



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.419, 2021

BPKP. Penyelenggaraan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi. Penilaian Maturitas. Pencabutan.

PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menyusun pedoman yang mengatur pelaksanaan penilaian atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
 5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat

pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
7. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP

terintegrasi:

- a. mekanisme penilaian;
- b. fokus penilaian;
- c. komponen penilaian; dan
- d. periode yang dinilai.

Pasal 3

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri pada huruf a dan penjaminan kualitas pada huruf b.

Pasal 4

- (1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.
- (2) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur-unsur:
 - a. SPIP;
 - b. MRI;
 - c. IEPK; dan
 - d. kapabilitas APIP.
- (3) Penilaian unsur SPIP, MRI, dan IEPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian unsur Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Badan tersendiri.

Pasal 5

Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
- b. Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan
- c. Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berdasarkan:
 - a. penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
 - b. struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - c. pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.
- (2) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

Pasal 7

Pedoman pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi

Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 489), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksana yang mengatur mengenai Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2021

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENILAIAN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KEMENTERIAN/
LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH

PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Definisi SPI menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, SPIP didefinisikan sebagai SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menyelenggarakan SPIP.

Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 59 ayat 2, BPKP memiliki mandat untuk melakukan pembinaan atas penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh mulai dari pengenalan konsep, penyusunan pedoman penyelenggaraan SPIP, sampai dengan pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

K/L/D bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi yang efektif hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan peran APIP yang kapabel. Integrasi antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan APIP yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan K/L/D.

Untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan SPIP pada K/L/D telah mendukung pencapaian tujuan K/L/D sesuai mandat yang telah ditetapkan, BPKP menyusun pedoman penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada K/L/D. Pedoman ini menjadi standar yang mengatur penilaian maturitas, yang meliputi Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) oleh K/L/D dan Evaluasi oleh BPKP atas hasil PM yang telah dilakukan PK.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada K/L/D disusun dengan maksud:

1. Menetapkan standar mekanisme dan proses PM, yang mencakup PM oleh manajemen dan PK yang dilakukan oleh APIP pada K/L/D;
2. Menetapkan standar mekanisme dan proses Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan PK; dan
3. Menjadi tolok ukur bagi pemeriksa dalam menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

C. Ruang Lingkup

1. Mekanisme Penilaian

Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

- a. PM oleh manajemen K/L/D;
- b. PK yang dilakukan oleh APIP pada K/L/D;
- c. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan PK.

2. Fokus Penilaian

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang mencakup PM dan PK pada K/L/D dan Evaluasi oleh BPKP mencakup penilaian secara terintegrasi atas:

- a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan
- c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

3. Komponen Penilaian

Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

- a. Penetapan Tujuan;
- b. Struktur dan Proses; dan
- c. Pencapaian Tujuan.

4. Periode yang Dinilai

Periode Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dinilai adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
- b. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
- c. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

D. Pengguna

Pengguna Peraturan ini meliputi:

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan Penilaian Mandiri;
2. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur selaku koordinator Penjaminan Kualitas;
3. Asesor Manajemen selaku pelaksana Penilaian Mandiri;
4. APIP selaku Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri; dan
5. BPKP selaku evaluator penilaian penyelenggaraan SPIP.

E. Metodologi Penyusunan

Peraturan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada K/L/D disusun dengan metodologi sebagai berikut:

1. Menganalisis prinsip-prinsip pengendalian intern dan atribut dari setiap komponen mulai dari penetapan tujuan, struktur dan proses, maupun pencapaian tujuan K/L/D.
2. Menetapkan faktor kunci penyelenggaraan SPIP yang efektif dengan mengkaji dan menganalisis:
 - a. Peraturan perundang-undangan terkait penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - b. Unsur dan subunsur SPIP serta daftar uji di dalam PP No 60 Tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan terkait yang mendukung pembangunan unsur dan subunsur;
 - c. Kajian Puslitbangwas BPKP Nomor LP-34/LB/2020 tentang pembobotan komponen penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.
3. Merumuskan tingkat, definisi, dan karakteristik maturitas SPIP;
4. Mengembangkan kriteria, indikator dan parameter efektivitas SPIP terkait SPIP, MRI, dan IEPK;
5. Mengidentifikasi teknik pengumpulan bukti;
6. Mengujicobakan pada K/L/D dengan menuangkan hasilnya pada lembar Kertas Kerja (KK);
7. Meminta masukan dari *stakeholders* dan akademisi melalui uji publik untuk menilai operasionalitas pedoman.

F. Kerangka Logis Pedoman

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi landasan penyelenggaraan SPIP. Peraturan Pemerintah tersebut diturunkan menjadi Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Sebelumnya, penilaian maturitas sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP dibagi menjadi 2 (dua) proses yaitu PM yang diatur dengan:

1. Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SPIP;
2. Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP;

3. Surat Edaran Deputy Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor SE-001/D3/02/2018 dan SE-002/D3/02/2018 tentang Penjelasan Teknis Parameter Pemenuhan Level Maturitas SPIP (Suplemen I Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016); dan
4. Surat Edaran Deputy Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor SE-01/D3/02/2019 tentang Penjelasan Teknis Pengujian Substansi Bukti Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Suplemen II Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016).

Proses selanjutnya adalah PK yang diatur dengan Peraturan Deputy Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Pedoman ini mengatur PM dan PK dalam satu peraturan yang sekaligus menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya. Kerangka logis yang menggambarkan hubungan pedoman ini dengan kebijakan lainnya dapat dilihat pada **Gambar I.1** berikut.

Gambar I.1 - Kerangka Logis Pedoman



Sumber: diolah dari berbagai kebijakan

G. Sistematika Pedoman

Sistematika penyajian Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengguna, metodologi penyusunan, kerangka logis pedoman, dan sistematika pedoman.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini memuat gambaran umum atas maturitas penyelenggaraan SPIP yang meliputi definisi dan konsep maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Selain itu dalam bab ini akan diuraikan mengenai kerangka kerja penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari komponen maturitas penyelenggaraan SPIP, pembobotan dan karakteristik hasil penilaian, serta prosedur penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang meliputi rangkaian proses PM dan PK di tingkat K/L/D dan proses evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan PK.

BAB III PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS

Bab ini menguraikan tentang proses penilaian mandiri dan penjaminan kualitas yang dilaksanakan oleh K/L/D, yang meliputi pelaksana, waktu pelaksanaan, tahapan penilaian mandiri oleh manajemen dan penjaminan kualitas oleh APIP.

BAB IV EVALUASI ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menguraikan proses evaluasi atas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh K/L/D yang dilaksanakan oleh BPKP, yang meliputi pelaksana, waktu pelaksanaan, alur evaluasi, serta tahapan dalam melaksanakan evaluasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini menutup pedoman dengan menegaskan penggunaan pedoman secara terpadu sebagai standar bagi K/L/D dalam melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Definisi dan Konsep

1. Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Andersen dan Jessen (2003) menyatakan bahwa konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Selain itu, menurut *the Institute of Internal Auditors* (2013) model maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarah pada pencapaian *output* dan *outcome* yang lebih baik. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP.

Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi. Penjabaran penilaian struktur dan proses dapat dilihat pada **Gambar II.1** pada halaman berikut.

Pencapaian tujuan organisasi dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang efektif dan efisien dinilai melalui capaian *output* dan *outcome* organisasi. Keandalan pelaporan keuangan dinilai melalui capaian opini atas laporan keuangan. Pengamanan aset negara dinilai melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dinilai melalui jumlah temuan ketidakpatuhan

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI, jumlah temuan ketidakpatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan APIP, dan keterjadian kasus korupsi.

Gambar II.1- Penilaian Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan SPIP



Sumber: PP 60 Tahun 2008

2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada K/L/D adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu:

a. Perencanaan

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.

b. Kapabilitas

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

1) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan K/L/D terkait penerapan manajemen risiko;

2) Kebijakan manajemen risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya;

3) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko;

4) Kemitraan

Kemitraan terkait dengan bagaimana K/L/D mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja;

5) Proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan K/L/D dalam pengelolaan risiko.

c. Hasil

Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:

1) Aktivitas Penanganan Risiko

Merupakan implementasi penanganan risiko oleh K/L/D;

2) *Outcome*

Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan K/L/D.

Ilustrasi Model Penilaian MRI pada K/L/D dapat dilihat pada **Gambar II.2**

Gambar II.2 - Model Penilaian MRI pada K/L/D



Sumber: diolah oleh penyusun

3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan (FCP)* yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi

kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.

- 1) Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP antikorupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personil, maupun sarana dan prasarana.
- 2) Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, *skill* (keterampilan), dan pengalaman yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.

b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:

- 1) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi.
- 2) Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

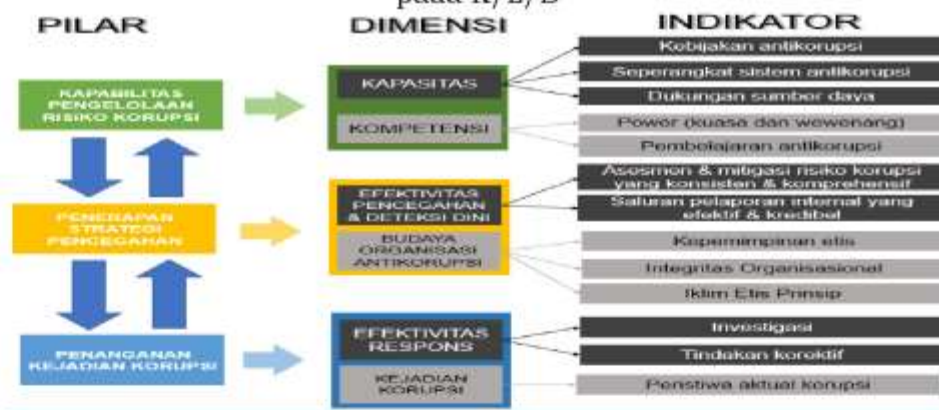
c. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.

- 1) Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh peneraan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya;
- 2) Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

Ilustrasi Model Penilaian IEPK pada K/L/D dapat dilihat pada **Gambar II.3.**

Gambar II.3 – Model Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi pada K/L/D



Sumber: diolah oleh penyusun

B. Kerangka Kerja Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

1. Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari 3 (tiga) komponen yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan K/L/D. Komponen tersebut meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses yang mencerminkan subunsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan K/L/D. Adapun kerangka penilaian penyelenggaraan SPIP sebagaimana disajikan pada **Gambar II.4**

Gambar II.4-Kerangka Kerja Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP



Sumber: diolah oleh penyusun

Rincian indikator penilaian tiap komponen untuk tiap tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP diuraikan lebih lanjut pada Butir 1.4 Buku I Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

Adapun penjelasan dari setiap komponen adalah sebagai berikut:

a. Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja, yaitu apakah sasaran strategis

yang ditetapkan oleh K/L/D telah mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada satker sesuai dengan mandatnya. Keselarasan ini dapat dilihat dari kesesuaian sasaran strategis dengan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran strategis tersebut. Selain itu, dalam komponen ini dilakukan pengukuran juga terkait kualitas strategi perencanaannya. Proses rinci dan langkah kerja untuk melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III.

b. Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter subunsur SPIP. Pemenuhan parameter subunsur SPIP sekaligus merupakan pemenuhan parameter MRI dan IEPK. Proses rinci dan langkah kerja untuk melakukan penilaian atas komponen struktur dan proses akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III.

c. Pencapaian Tujuan SPIP

Penilaian atas pencapaian tujuan SPIP dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada K/L/D yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Proses rinci dan langkah kerja untuk melakukan penilaian komponen pencapaian tujuan K/L/D akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP akan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pengendalian yang menjadi area perbaikan (*Area of Improvement/AoI*). Sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan atas kelemahan pengendalian tersebut dapat menggunakan pendekatan Manajemen Kualitas Sektor Publik. Manajemen kualitas sektor publik merupakan konsep pengembangan manajemen kualitas yang difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik yang mengacu pada unsur pembentuk kualitas manajemen yang terdiri dari Kepemimpinan (*Leadership*), Perencanaan dan Strategi (*Planning and Strategy*), Pegawai dan Sumber Daya (*People*

and Resources), Proses (*Process*), Penghantaran (*Delivery*), dan Hasil (*Results*).

2. Pembobotan dan Karakteristik Hasil Penilaian

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi pembobotan penilaian atas SPIP, MRI, dan IEPK. Rincian pembobotan untuk masing-masing nilai disajikan pada **Tabel II.1** untuk nilai maturitas penyelenggaraan SPIP. Subunsur 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif pada SPIP menggunakan hasil penilaian Peningkatan Kapabilitas APIP yang dinilai dengan pedoman tersendiri. **Tabel II.2** untuk MRI dan **Tabel II.3** untuk IEPK.

Tabel II.1 - Bobot Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
PENETAPAN TUJUAN		40.00%
Kualitas Sasaran Strategis	50.00%	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50.00%	
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%	
STRUKTUR DAN PROSES		30.00%
Lingkungan Pengendalian		
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.75%	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.75%	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.75%	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.75%	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.75%	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.75%	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.75%	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.75%	
Penilaian Risiko		
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	
Analisis Risiko (2.2)	10%	
Kegiatan Pengendalian		
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2.27%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.27%	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.27%	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.27%	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.27%	
Pemisahan Fungsi (3.6)	2.27%	
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.27%	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.27%	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2.27%	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2.27%	

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.27%	
Informasi dan Komunikasi		
Informasi yang Relevan (4.1)	5%	
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%	
Pemantauan		
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7.50%	
Evaluasi Terpisah (5.2)	7.50%	
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%	
PENCAPAIAN TUJUAN		30.00%
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi		
Capaian Outcome	15%	
Capaian Output	15%	
Keandalan Pelaporan Keuangan		
Opini LK	25%	
Pengamanan atas Aset		
Keamanan Administrasi	10%	
Keamanan Fisik	5%	
Keamanan Hukum	10%	
Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan		
Temuan Ketaatan	20%	
SUB JUMLAH HASIL	100.00%	
TOTAL BOBOT		100.00%

Tabel II.2 - Pembobotan Komponen dan Area Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Komponen/Area	Bobot Area	Bobot Komponen
PERENCANAAN		40.00%
Kualitas Perencanaan	40.00%	
KAPABILITAS		30.00%
Kepemimpinan	5.00%	
Kebijakan Manajemen Risiko	5.00%	
Sumber Daya Manusia	5.00%	
Kemitraan	2.50%	
Proses Manajemen Risiko	12.50%	
HASIL		30.00%
Aktivitas Penanganan Risiko	18.75%	
Outcomes	11.25%	
TOTAL BOBOT		100.00%

Tabel II.3 - Pembobotan Pilar dan Indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Pilar/Indikator	Bobot Indikator	Bobot Pilar
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI		48%
Kebijakan Antikorupsi	9.60%	
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7.20%	
Dukungan Sumber Daya	7.20%	
Power (Kuasa & Wewenang)	14.40%	
Pembelajaran Antikorupsi	9.60%	
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN		36%
Asesmen Dan Mitigasi Risiko Korupsi	9.00%	
Saluran Pelaporan Internal Yang Efektif dan Kredibel	3.60%	
Kepemimpinan Etis	9.00%	

Integritas Organisasional	7.20%	
Iklm Etis Prinsip	7.20%	
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI		16%
Investigasi	8.00%	
Tindakan Korektif	8.00%	
TOTAL BOBOT		100%

Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagaimana tercantum pada

Tabel II.4.

Tabel II.4 - Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$
5	Optimum	$\geq 4,50$

Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai karakteristik yang membedakan antara satu tingkat dari lainnya. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada **Gambar II.5** berikut.

Gambar II.5 - Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP



Penjelasan atas karakteristik dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Rintisan

Tingkat maturitas “Rintisan” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi tersebut belum mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsinya, serta belum dapat merumuskan indikator kinerja, target kinerja dan strategi pencapaian kinerjanya dengan baik.

Kondisi tersebut memengaruhi struktur dan proses pengendalian yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang tidak efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang tidak

andal, tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tinggi, serta kerentanan terjadinya korupsi pada organisasi.

b. Tingkat Berkembang

Tingkat maturitas “Berkembang” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian, organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait.

Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang belum andal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan risiko keterjadian korupsi yang tinggi.

c. Tingkat Terdefinisi

Tingkat maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut.

Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

d. Tingkat Terkelola dan Terukur

Tingkat maturitas “Terkelola dan Terukur” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi.

Organisasi dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP “terkelola dan terukur” telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, organisasi belum memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

e. Tingkat Optimum

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang “Optimum” menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Sistem pengendalian yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi. Hal tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi organisasi, tidak adanya permasalahan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, serta ketaatan seluruh bagian organisasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Uraian karakteristik tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di atas secara ringkas dirangkum dalam matriks pada **Gambar II.6** berikut:

Gambar II.6 – Matriks Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

KARAKTERISTIK LEVEL	Menyusun Perencanaan Kinerja	Mampu Mendefinisikan Kinerja	Strategi Pencapaian Sasaran dan Terintegrasi	Desain dan Kebijakan Pengendalian	Struktur dan Proses Pengendalian Telah Dibekankan	Struktur dan Proses Pengendalian Efektif	Adaptif Terhadap Perubahan
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Sumber: diolah oleh penyusun

3. Prosedur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Prosedur penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi proses PM, PK dan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Prosedur tersebut dilakukan secara berurutan sesuai dengan jadwal penilaian dan pelaksana kegiatan masing-masing. Prosedur ini dapat dilihat pada **Gambar II.7** berikut.

Gambar II.7 - Prosedur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP



Sumber: diolah oleh penyusun.

Proses PM dan PK oleh K/L/D serta proses evaluasi oleh BPKP secara rinci akan dijelaskan lebih lanjut pada **Bab III** dan **Bab IV**.

BAB III

PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS

Penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen sampai dengan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP. Detail mekanisme tersebut diatur dalam Buku I Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

A. Pelaksana Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas

Proses PM dilaksanakan oleh K/L/D, dengan rincian peran sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan PM;
2. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur selaku koordinator PK;
3. Asesor Manajemen selaku pelaksana PM; dan
4. APIP selaku penjamin kualitas atas PM.

B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas

PM dan PK dapat dilakukan antara rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan. Pembagian periode penyelenggaraan yang dilakukan penilaian adalah sebagai berikut:

1. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
2. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
3. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

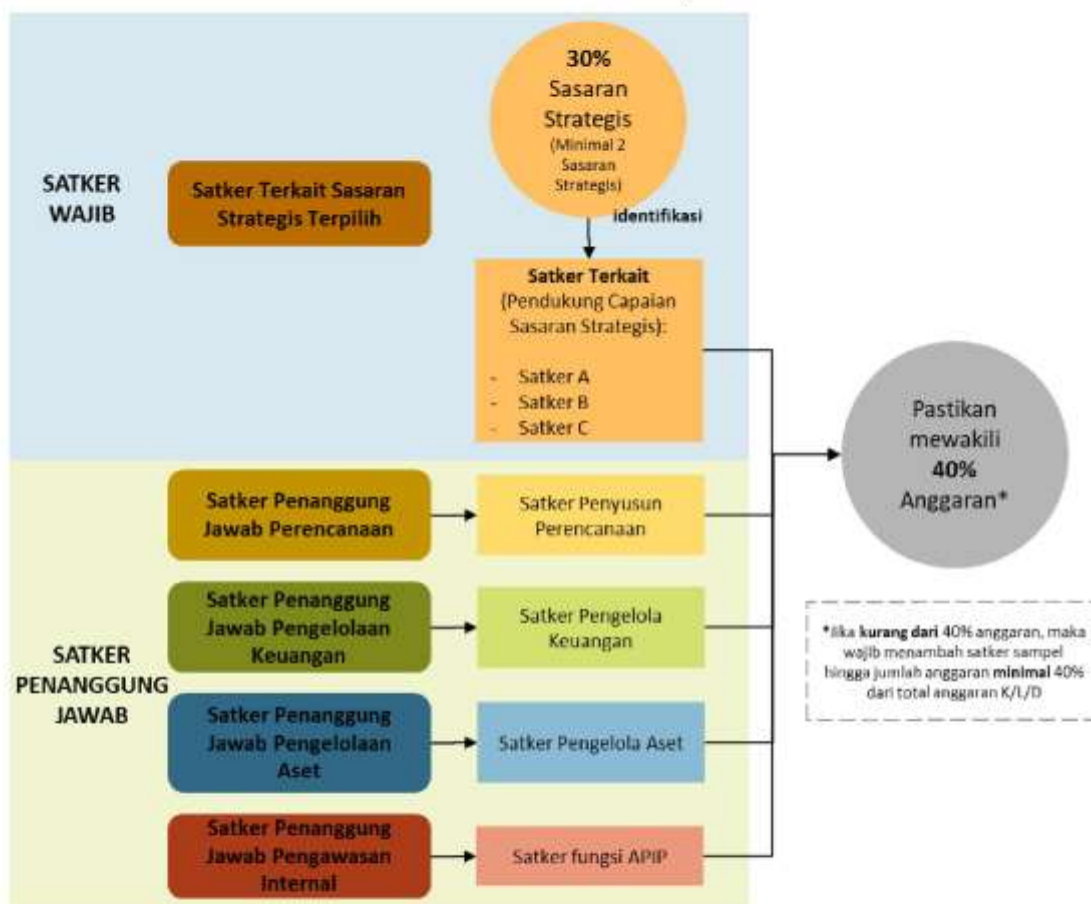
C. Tahapan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas**1. Tahap Persiapan****a. Pembentukan Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas**

K/L/D menetapkan kebijakan terkait pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas. Penetapan anggota tim asesor dan tim penjamin kualitas dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas satuan kerja (satker), serta penguasaan atas proses bisnis satker mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Minimal sepertiga tim asesor telah mengikuti bimbingan teknis SPIP, sedangkan seluruh tim penjamin kualitas telah mengikuti diklat SPIP atau pernah melaksanakan penugasan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP atau penugasan lain terkait SPIP.

b. Penentuan Objek

PM dilakukan terhadap **seluruh** satker pada K/L/D, sedangkan PK dilakukan terhadap **satker wajib** berdasarkan pertimbangan sasaran strategis terpilih dan **satker penanggung jawab** perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, serta pengawasan internal. Mekanisme penetapan satker PK ini digambarkan pada **Gambar III.1**.

Gambar III.1 - Mekanisme Penetapan Satker PK



Sumber: diolah oleh penyusun

1) Pemilihan Satker Wajib

Pemilihan satker wajib mempertimbangkan sasaran strategis yang paling mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan K/L/D. Jumlah sasaran strategis yang dijadikan sampel 30% dari total sasaran strategis dengan jumlah minimal 2 (dua) sasaran strategis.

2) Pemilihan Satker Penanggung Jawab

Pemilihan satker penanggung jawab mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya terkait penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan fungsi pengawasan internal. Dalam proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP,

satker penanggungjawab pada keempat fungsi tersebut berperan sebagai koordinator penilaian untuk masing-masing aspek tujuan SPIP dalam penilaian struktur dan proses.

Pemilihan satker wajib dan satker penanggung jawab mewakili 40% dari total anggaran K/L/D.

c. Penyusunan dan Pemaparan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari rencana PM dan PK. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan PM dan Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur selaku koordinator PK menyusun Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang setidaknya memuat:

- 1) Latar belakang;
- 2) Tujuan dan manfaat;
- 3) Ruang lingkup;
- 4) Metodologi yang digunakan;
- 5) Tahapan dan jadwal waktu;
- 6) Sistematika pelaporan;
- 7) Rencana kebutuhan sumber daya; dan
- 8) Susunan tim asesor dan tim penjamin kualitas.

Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dipaparkan kepada pimpinan K/L/D dan kepala satker K/L/D tersebut untuk mendapatkan kesepakatan dan persetujuan. Pemaparan kepada pimpinan K/L/D dan kepala satker K/L/D tersebut didokumentasikan dengan baik. Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dapat diubah sesuai dengan kondisi yang berkembang di lapangan.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pengumpulan dan Pengujian Bukti

Tahap pelaksanaan terkait dengan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari teknik pengumpulan bukti sesuai dengan pertimbangan profesional asesor dan penjamin kualitas. Teknik pengumpulan bukti meliputi tapi tidak terbatas pada wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

b. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan difokuskan pada 2 (dua) unsur, yaitu kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis. Langkah PM untuk komponen penetapan tujuan adalah sebagai berikut:

Menilai Kualitas Sasaran Strategis

- 1) Identifikasi seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan, telusuri penjabarannya ke dalam satker yang mengampu, dan lakukan penilaian atas kualitas sasaran strategis pada **KK 1.1** untuk Kementerian/Lembaga dan **KK 1.2** untuk Pemerintah Daerah;
- 2) Rumuskan *Area of Improvement (Aoi)* serta rekomendasi atas kelemahan pada kualitas sasaran strategis.

Menilai Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

- 1) Jabarkan sasaran strategis dari **KK 1.1/KK 1.2** kedalam program dan kegiatan pada **KK 2**.
- 2) Identifikasi dan lakukan penilaian atas kualitas sasaran, indikator kinerja, dan target program yang mendukung pencapaian sasaran strategis pada **KK 2**;
- 3) Identifikasi seluruh kegiatan beserta sasaran, indikator kinerja, anggaran, dan target yang mendukung pencapaian program satuan kerja, dan lakukan penilaian atas kualitas kegiatan pada **KK 2**;
- 4) Untuk Kementerian/Lembaga, identifikasi seluruh rincian/*output*/komponen kegiatan satuan kerja beserta sasaran, indikator kinerja, dan target, serta lakukan penilaian atas kualitas rincian/*output*/komponen pada **KK 2**;
- 5) Rumuskan Aoi serta rekomendasi atas kelemahan pada kualitas program dan satuan kerja;
- 6) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM).

Langkah PK untuk komponen penetapan tujuan adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM), kertas kerja penilaian penetapan tujuan (**KK 1.1/KK 1.2 dan KK 2**), serta data dukung kertas kerja tersebut;

2) Lakukan validasi dengan menguji pelaksanaan langkah kerja pada proses PM, termasuk substansi pengujian yang dilakukan, dan tuangkan pada **KK Lead I**;

3) Perbaiki draf LHPM sesuai hasil penjaminan kualitas;

Langkah kerja untuk melaksanakan pengujian dalam rangka melakukan penilaian maturitas komponen penetapan tujuan disajikan pada Butir I.3 Buku I Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini, sedangkan contoh format kertas kerja disajikan pada Butir I.4 Buku I Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

c. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas komponen struktur dan proses difokuskan pada 5 (lima) unsur SPIP yang mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP. Langkah PM untuk komponen struktur dan proses adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan gambaran kondisi di organisasi untuk setiap parameter, dengan menggunakan teknik pengujian yang paling tepat (wawancara/analisis dokumen/observasi);
- 2) Tuangkan hasil pengujian yang menggambarkan kondisi masing-masing satker pada **KK 3.1** (efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi), **KK 3.2** (keandalan pelaporan keuangan), **KK 3.3** (pengamanan aset negara/daerah), dan **KK 3.4** (ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan), dan simpulkan hasilnya;
- 3) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM).

Langkah PK untuk komponen struktur dan proses adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan draf LHPM, kertas kerja penilaian struktur dan proses (**KK 3.1, KK 3.2, KK 3.3, dan KK 3.4**), serta data dukung kertas kerja tersebut;
- 2) Lakukan validasi dengan menguji pelaksanaan langkah kerja pada proses penilaian mandiri, termasuk substansi pengujian yang dilakukan, dan tuangkan pada **KK Lead I**;
- 3) Perbaiki draf LHPM sesuai hasil penjaminan kualitas;

Langkah kerja untuk melaksanakan pengujian dalam rangka penilaian maturitas komponen struktur dan proses disajikan pada Butir I.3 Buku I Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini, sedangkan contoh format kertas kerja disajikan pada Butir I.4 Buku I Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

d. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas komponen Pencapaian Tujuan difokuskan pada capaian 4 (empat) indikator hasil yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Langkah PM untuk setiap tujuan penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:

Tujuan I: Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

- 1) Identifikasi seluruh sasaran strategis K/L/D pada tahun sebelumnya, dan berikan penilaian atas capaian sasaran strategis K/L/D pada **KK 5.1**.
- 2) Identifikasi seluruh program dan kegiatan satker pada tahun sebelumnya yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis K/L/D, dan berikan penilaian atas capaian sasaran program dan kegiatan satker pada **KK 5.2**.
- 3) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM).

Tujuan II: Keandalan Pelaporan Keuangan

- 1) Identifikasi opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan K/L/D dalam 5 tahun terakhir, termasuk temuan dan rekomendasi pada **KK 6**.
- 2) Lakukan analisis dan buat simpulan terkait temuan berulang dan penyebabnya.
- 3) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf LHPM.

Tujuan III: Pengamanan Aset Negara

- 1) Identifikasi opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan K/L/D dalam 5 tahun terakhir, terutama catatan terkait BMN/D pada **KK 7**.
- 2) Lakukan analisis dan buat simpulan atas catatan BMN/D, termasuk penyebab temuan, dan kondisi BMN/D.

- 3) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM).

Tujuan IV: Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Identifikasi temuan terkait kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam 4 tahun terakhir, termasuk penyebab temuan yang dapat memengaruhi opini BPK-RI, dan tuangkan pada **KK 8**.
- 2) Lakukan analisis dan identifikasi subunsur SPIP yang terkait dengan hal-hal tersebut.
- 3) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf LHPM.

Langkah PK untuk setiap tujuan penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan draf LHPM, kertas kerja penilaian pencapaian tujuan (**KK 5.1, KK 5.2, KK 6, KK 7, dan KK 8**), serta data dukung kertas kerja tersebut;
- 2) Lakukan validasi dengan menguji pelaksanaan langkah kerja pada proses penilaian mandiri, termasuk substansi pengujian yang dilakukan, dan tuangkan pada **KK Lead I**;
- 3) Perbaiki draf LHPM sesuai hasil penjaminan kualitas;

Langkah kerja untuk melaksanakan pengujian dalam rangka penilaian maturitas komponen penetapan tujuan disajikan pada Butir I.3 Buku I Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini, sedangkan contoh format kertas kerja disajikan pada Butir I.4 Buku I Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

e. Penalti Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Penalti nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah pengurangan nilai maturitas hasil PM oleh penjamin kualitas yang dilakukan karena pengendalian yang dilaksanakan oleh K/L/D belum efektif, sehingga masih terdapat keterjadian kasus korupsi. Tim penjamin kualitas melakukan analisis keterkaitan antara kasus korupsi dengan subunsur pengendalian di komponen struktur dan proses agar dapat segera dilakukan perbaikan. Langkah penalti adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Sumber Informasi

Tim penjamin kualitas dapat memanfaatkan informasi:

- a) Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai kasus korupsi yang tengah dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan.
- b) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
- c) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP.
- d) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP K/L/D.
- e) Informasi tambahan dari media massa.

2) Klasifikasi dan Analisis Kasus Korupsi

Kasus korupsi yang dapat dijadikan dasar penalti atas nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah kasus korupsi yang telah memasuki tahapan penuntutan sampai dengan putusan pengadilan, terkecuali kasus hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang langsung dapat dijadikan dasar penalti. Dalam menentukan kasus korupsi yang menjadi pertimbangan penalti atas nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, tim penjamin kualitas harus dapat mengidentifikasi secara jelas unsur kasus korupsi yang mencakup:

a) Jenis korupsi

Yaitu mengidentifikasi substansi penyimpangan dan mempertimbangkan signifikansi kasusnya dari aspek bentuk perbuatan yang dilakukan dan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

b) Pihak yang terlibat

Yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan/tindak pidana korupsi untuk menentukan apakah penyimpangan/tindak pidana korupsi terjadi secara individual atau institusional. Suatu kasus korupsi dianggap institusional jika penyimpangan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pejabat dan staf K/L/D secara lintas hierarki dan/atau lintas fungsi, sedangkan suatu kasus korupsi bersifat individual jika dilakukan oleh satu individu ASN tanpa melibatkan pihak lain.

c) Waktu keterjadian

Yaitu mengidentifikasi waktu terjadinya penyimpangan/ tindak pidana korupsi untuk menentukan apakah tindakan korektif telah dilakukan sehingga mencegah terulangnya kasus yang

sama, dan apakah efektivitas pengendalian pada saat periode penilaian masih dipengaruhi oleh kasus korupsi tersebut.

d) Lokasi keterjadian

Yaitu mengidentifikasi tempat terjadinya penyimpangan/tindak pidana korupsi (instansi/satker) untuk mengetahui karakteristik proses bisnis dan kelemahan pengendalian di instansi/satker tersebut.

e) Sebab keterjadian

Yaitu mengidentifikasi latar belakang dan motif pelaku penyimpangan/tindak pidana korupsi untuk mengetahui apakah penyimpangan/tindak pidana korupsi terjadi secara individual atau institusional.

f) Proses keterjadian

Yaitu mengidentifikasi modus operandi dari penyimpangan/tindak pidana korupsi untuk mengetahui kelemahan pengendalian intern di instansi/satker.

Hasil analisis digunakan untuk mengklasifikasikan hubungan antara subunsur pengendalian intern dan keterjadian korupsi.

Referensi hubungan tersebut dapat dilihat pada **Tabel III.1**

Tabel III.1 - Contoh Identifikasi Hubungan antara Subunsur Pengendalian Intern dan Kejadian Kasus Korupsi

STRUKTUR DAN PROSES		KASUS KORUPSI	
		INSTITUSIONAL	INDIVIDUAL
I	Lingkungan Pengendalian		
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Ya	Ya
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	Tidak	Tidak
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	Ya	Ya
1.4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Tidak	Tidak
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Ya	Tidak
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Ya	Ya
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Ya	Tidak
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Ya	Ya
II	Penilaian Risiko		
2.1	Identifikasi Risiko	Ya	Ya
2.2	Analisis Risiko	Ya	Ya
III	Kegiatan Pengendalian		
3.1	Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah	Tidak	Tidak
3.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia	Ya	Ya
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan	Tidak	Tidak

STRUKTUR DAN PROSES		KASUS KORUPSI	
		INSTITUSIONAL	INDIVIDUAL
	Sistem Informasi		
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	Ya	Ya
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	Tidak	Tidak
3.6	Pemisahan Fungsi	Tidak	Ya
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	Ya	Ya
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	Ya	Ya
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	Ya	Ya
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	Ya	Tidak
3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	Ya	Ya
IV	Informasi dan Komunikasi		
4.1	Informasi yang Relevan	Ya	Ya
4.2	Komunikasi yang Efektif	Tidak	Tidak
V	Pemantauan		
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	Ya	Ya
5.2	Evaluasi Terpisah	Ya	Ya

Tabel di atas hanya memberikan referensi dan tidak membatasi tim penjamin kualitas dalam menganalisis hubungan kasus korupsi dengan kelemahan unsur pengendalian intern sebagai dasar penalti atas nilai maturitas penyelenggaraan SPIP.

3) Pengurangan Nilai

Pengurangan nilai dilakukan melalui penurunan gradasi atas masing-masing subunsur yang telah dinyatakan memperoleh nilai ≥ 3 (sama dengan atau lebih dari tiga) pada Komponen Struktur dan Proses Pengendalian Intern yang terkait dengan kasus korupsi. Penurunan dapat dilakukan sebanyak satu atau lebih gradasi bergantung pada kelemahan pengendalian yang ditemukan saat dilakukan analisis. Apabila dapat disimpulkan bahwa kelemahan terletak pada proses implementasi namun dapat diyakini bahwa seluruh pejabat dan pegawai telah memahami kebijakan pengendalian intern yang ada, maka nilai subunsur tersebut turun ke satu gradasi yang ada di bawahnya (level 2). Namun apabila kelemahan pengendalian diketahui juga terletak pada proses pengomunikasian yang belum mampu mendorong pejabat dan pegawai memahami kebijakan pengendalian intern yang ada, maka nilai subunsur tersebut turun ke satu gradasi yang ada di bawahnya (level 1).

Terdapat 2 (dua) kemungkinan penurunan nilai pada parameter MRI dan indikator IEPK, yaitu:

- a) Apabila nilai parameter MRI dan pilar IEPK sebelum dikurangkan adalah lebih besar dari nilai subunsur terkait setelah diturunkan nilainya, maka nilai dari parameter MRI dan pilar IEPK tersebut menjadi sama dengan nilai subunsur.
- b) Apabila nilai parameter MRI dan pilar IEPK sebelum dikurangkan adalah lebih kecil atau sama dengan nilai subunsur terkait setelah diturunkan nilainya, maka nilai dari parameter MRI dan pilar IEPK tersebut tidak berubah.

f. Perhitungan Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai. Selain itu, skor yang dihasilkan juga menunjukkan skor MRI dan skor IEPK.

3. Tahap Pelaporan

a. Penyusunan Laporan

- 1) Tim asesor dan tim penjamin kualitas membahas draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM) pada lingkup K/L/D, termasuk merumuskan Aol, rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya. *Area of Improvement* adalah kelemahan pengendalian yang diidentifikasi berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang diklasifikasikan menurut komponen penilaian;
- 2) Tim asesor dan tim penjamin kualitas menyusun berita acara hasil pembahasan konsep LHPM dan rencana aksi;
- 3) Tim asesor melakukan finalisasi LHPM sesuai dengan format pada Butir I.7 Buku I Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini dengan dilampiri Pernyataan Penjaminan Kualitas yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur selaku koordinator penjaminan kualitas sesuai dengan format Butir I.6 Buku I Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini;

- 4) Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan PM.

b. Penyampaian Laporan

- 1) Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tingkat Kementerian/Lembaga disampaikan kepada:
 - a) Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dan rencana aksi perbaikan pengendalian;
 - b) Deputi Kepala BPKP terkait sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi oleh BPKP.
- 2) Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tingkat Pemerintah Daerah disampaikan kepada:
 - a) Kepala Daerah terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dan rencana aksi perbaikan pengendalian;
 - b) Perwakilan BPKP Provinsi terkait sebagai dasar evaluasi oleh BPKP.

4. Tahap Pemantauan Tindak Lanjut

Tahap pemantauan tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi:

- a. Pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, rekomendasi perbaikan AoI, dan rencana aksinya oleh tim asesor;
- b. Pemantauan tindak lanjut perbaikan AoI sesuai rencana aksi secara berkala oleh APIP K/L/D. Contoh *form* pemantauan terdapat dalam Butir I.8 Buku I Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
EVALUASI ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dijamin kualitasnya dilaksanakan untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri K/L/D dan penjaminan kualitas telah sesuai dengan pedoman, sehingga dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi atas *Area of Improvement* (Aoi). Hasil evaluasi akan digunakan untuk penetapan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP. Detail evaluasi atas diatur dalam Buku II Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

A. Pelaksana Evaluasi

Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan PK adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi untuk Kementerian/Lembaga dilakukan oleh tim evaluasi dan Tim Panel Direktorat mitra, serta tim panel Kedeputian terkait secara berjenjang;
2. Evaluasi untuk Pemerintah Daerah, dilakukan oleh tim evaluasi dan Tim Panel Perwakilan BPKP, serta tim panel Kedeputian PPKD secara berjenjang.
3. Berdasarkan pertimbangan strategis, Kepala BPKP dapat memimpin Tim Panel BPKP untuk menetapkan hasil evaluasi pada K/L/D.

B. Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi atas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP adalah pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun berjalan.

C. Tahapan Evaluasi

1. Kementerian/Lembaga

a. Tahap Persiapan

- 1) Pembentukan Tim Evaluasi

Tim evaluasi pada Direktorat mitra Kementerian/Lembaga dipersyaratkan telah mengikuti pelatihan terkait penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

- 2) Penentuan satker sampel

Proses penentuan satker sampel evaluasi atas PM dilakukan dengan mempertimbangkan pemilihan satker sampel pada saat

PK. Tim evaluasi mengambil 50% dari sampel PK untuk dilakukan analisis melalui wawancara, observasi dan reuiu dokumen.

3) Pengumpulan Dokumen

Tim evaluasi mengumpulkan dokumen hasil penilaian mandiri sesuai dengan Butir II.1 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini dan menyiapkan dokumen pelaksanaan evaluasi sesuai dengan daftar pada Butir II.3 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Evaluasi atas Proses

Pelaksanaan evaluasi atas proses berfokus pada ketaatan terhadap langkah-langkah penilaian mandiri yang tercantum dalam Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Mekanisme evaluasi dituangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) pada Butir II.2 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

Simpulan terkompilasi pada **KKE-PROSES-LEAD** dengan pembobotan sebagai berikut:

No.	Tahapan	Bobot
1	Evaluasi atas Persiapan PM yang telah dilakukan PK	20%
2	Evaluasi atas Pelaksanaan PM yang telah dilakukan PK	60%
3	Evaluasi atas Pelaporan PM yang telah dilakukan PK	20%

Proses evaluasi akan menghasilkan nilai "**Sesuai**", "**Kurang Sesuai**", dan "**Tidak sesuai**". Karakteristik masing-masing nilai dapat dilihat pada **Tabel IV.1**.

Tabel IV.1-Gradasi dan Karakteristik Nilai Kesesuaian Evaluasi

No.	Skor	Gradasi
1	$\geq 80\% \leq 100$	Sesuai
2	$\geq 56\% \leq 79$	Kurang Sesuai
3	$\leq 55\%$	Tidak Sesuai

Tahap evaluasi atas proses PM yang telah dilakukan PK diuraikan sebagai berikut:

a) Tim evaluasi memastikan bahwa tim penjamin kualitas telah menetapkan satker sampel sesuai dengan kriteria penetapan satker sampel yang diatur dalam pedoman ini. Kesesuaian

penetapan satker dituangkan dalam **KKE-P1A**;

- b) Tim evaluasi memastikan bahwa tim asesor dan tim penjamin kualitas telah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedoman ini. Kesesuaian atas penyiapan tim asesor dan tim penjamin kualitas dituangkan dalam **KKE-P1B1**;
- c) Tim evaluasi memverifikasi profil dan informasi umum Kementerian/Lembaga. Hasil verifikasi dituangkan dalam **KKE-Profil K/L/D**;
- d) Tim evaluasi memastikan bahwa Rencana Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan pemaparannya telah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedoman ini dan hasilnya dituangkan dalam **KKE-P1B2**;
- e) Tim evaluasi menuangkan simpulan langkah a) sampai dengan d) dalam **KKE-P1**;
- f) Tim evaluasi memastikan bahwa kertas kerja penilaian atas penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan telah diisi. Evaluasi dituangkan dalam **KKE-P2**;
- g) Tim evaluasi memastikan bahwa LHPM telah sesuai dengan format pelaporan yang diatur dalam pedoman ini. Evaluasi dituangkan dalam **KKE-P3**.

2) Evaluasi atas Substansi

Tahap evaluasi atas substansi PM diuraikan sebagai berikut:

- a) Tim evaluasi melakukan analisis dan pengujian substansi sesuai dengan parameter dan kriteria komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam pedoman ini. Hasil validasi dan analisis dituangkan dalam kertas kerja **KKE-H1** untuk penetapan tujuan, **KKE-H2** untuk struktur dan proses, dan **KKE-H3** untuk pencapaian tujuan;
- b) Tim evaluasi menyimpulkan analisis pada kertas kerja **KKE-HASIL-LEAD**.

Tim evaluasi dan tim penjamin kualitas menyepakati hasil evaluasi dalam Berita Acara Hasil Evaluasi sesuai dengan Butir II.4 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

Tim evaluasi menyiapkan konsep Laporan Hasil Evaluasi sesuai dengan Butir II.5 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

c. Tahap Ekspos Panel

Atas hasil evaluasi Kementerian/Lembaga yang menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) akan dilakukan ekspos panel. Ekspos panel dilakukan pada tim panel Direktorat, tim panel Kedeputian, dan dengan pertimbangan strategis dapat dilakukan ekspos pada tim panel BPKP dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Direktur menetapkan tim panel Direktorat dengan struktur sesuai Butir II.8 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini;
- 2) Tim evaluasi memaparkan hasil evaluasi kepada tim panel Direktorat. Pemaparan dapat dihadiri oleh tim asesor atau manajemen Kementerian/Lembaga;
- 3) Tim panel Direktorat melakukan pengujian atas proses dan substansi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dan hasilnya dituangkan dalam notulen sesuai dengan Butir II.6, Berita Acara Hasil Ekspos Panel Direktorat sesuai dengan Butir II.7 dan konsep Laporan Hasil Evaluasi sesuai dengan Butir II.5 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini;
- 4) Atas hasil panel Direktorat yang menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) tim evaluasi akan dilakukan ekspos panel Kedeputian;
- 5) Tim panel Direktorat memaparkan hasil ekspos kepada tim panel Kedeputian dengan struktur sesuai Butir II.9 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini. Tim panel Kedeputian dihadiri oleh perwakilan dari Kedeputian Bidang Investigasi. Hasil ekspos panel Kedeputian dituangkan dalam notulen sesuai dengan Butir II.6, Berita Acara Hasil Ekspos Panel Direktorat sesuai dengan Butir II.7 dan konsep Laporan Hasil Evaluasi sesuai dengan Butir II.5 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini;

- 6) Tim panel Kedeputan memberikan arahan yang bersifat strategis terkait pembinaan penyelenggaraan SPIP dan berdasarkan pertimbangan strategis dapat merekomendasikan hasil ekspos Kedeputan untuk dibahas oleh tim panel BPKP. Jika hasil ekspos Kedeputan tidak dibahas oleh tim panel BPKP, maka tim panel Kedeputan menetapkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga;
- 7) Tim panel Kedeputan memaparkan hasil ekspos kepada tim panel BPKP dengan struktur sesuai Butir II.12 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini. Tim panel BPKP menetapkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP dan memberikan arahan yang bersifat strategis terkait pembinaan penyelenggaraan SPIP. Hasil ekspos panel BPKP dituangkan dalam notulen sesuai dengan Butir II.6, Berita Acara Hasil Ekspos Panel Direktorat sesuai dengan Butir II.7 dan konsep Laporan Hasil Evaluasi sesuai dengan Butir II.5 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

d. Tahap Pelaporan

Tim evaluasi melakukan finalisasi laporan sesuai dengan Butir II.5 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

2. Pemerintah Daerah

a. Tahap Persiapan

- 1) Pembentukan Tim Evaluasi
Tim evaluasi pada Perwakilan BPKP dipersyaratkan telah mengikuti pelatihan terkait penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.
- 2) Penentuan satker sampel
Proses penentuan satker sampel evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan pemilihan satker sampel pada saat PK. Tim evaluasi mengambil 50% dari sampel PK untuk dilakukan analisis melalui wawancara, observasi dan reviu dokumen.
- 3) Pengumpulan Dokumen
Tim evaluasi mengumpulkan dokumen hasil penilaian mandiri sesuai dengan Butir II.1 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri

Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini dan menyiapkan dokumen pelaksanaan evaluasi sesuai dengan daftar pada Butir II.3 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Evaluasi atas Proses

Pelaksanaan evaluasi atas proses berfokus pada ketaatan terhadap langkah-langkah penilaian mandiri yang tercantum dalam Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Mekanisme evaluasi dituangkan dalam KKE pada Butir II.2 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini. Simpulan terkompilasi pada **KKE-PROSES-LEAD** dengan pembobotan sebagai berikut:

No.	Tahapan	Bobot
1	Evaluasi atas Persiapan PM	20%
2	Evaluasi atas Pelaksanaan PM	60%
3	Evaluasi atas Pelaporan PM	20%

Proses evaluasi akan menghasilkan nilai "**Sesuai**", "**Kurang Sesuai**", dan "**Tidak sesuai**". Karakteristik masing-masing nilai dapat dilihat pada **Tabel IV.1**.

Tahap evaluasi atas proses PM diuraikan sebagai berikut:

- a) Tim evaluasi memastikan bahwa tim penjamin kualitas telah menetapkan satker sampel sesuai dengan kriteria penetapan satker sampel yang diatur dalam pedoman ini. Kesesuaian penetapan satker dituangkan dalam **KKE-P1A**;
- b) Tim evaluasi memastikan bahwa tim asesor dan tim penjamin kualitas telah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedoman ini. Kesesuaian atas penyiapan tim asesor dan tim penjamin kualitas dituangkan dalam **KKE-P1B**;
- c) Tim evaluasi memverifikasi profil dan informasi umum Pemerintah Daerah. Hasil verifikasi dituangkan dalam **KKE-Profil K/L/D**;
- d) Tim evaluasi memastikan bahwa Rencana Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan pemaparannya telah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedoman ini dan hasilnya dituangkan dalam **KKE-P1B2**;

- e) Tim evaluasi menuangkan simpulan langkah a) sampai dengan d) dalam **KKE-P1**;
 - f) Tim evaluasi memastikan bahwa kertas kerja penilaian atas penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan telah diisi. Evaluasi dituangkan dalam **KKE-P2**;
 - g) Tim evaluasi memastikan bahwa LHPM telah sesuai dengan format pelaporan yang diatur dalam pedoman ini. Evaluasi dituangkan dalam **KKE-P3**.
- 2) Evaluasi atas Substansi
- Tahap evaluasi atas substansi PM diuraikan sebagai berikut:
- a) Tim evaluasi melakukan analisis dan pengujian substansi sesuai dengan parameter dan kriteria komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam pedoman ini. Hasil validasi dan analisis dituangkan dalam kertas kerja **KKE-H1** untuk penetapan tujuan, **KKE-H2** untuk struktur dan proses, dan **KKE-H3** untuk pencapaian tujuan.
 - b) Tim evaluasi menyimpulkan analisis pada kertas kerja **KKE-HASIL-LEAD**.
 - c) Tim evaluasi dan tim penjamin kualitas menyepakati hasil evaluasi dalam Berita Acara Hasil Evaluasi sesuai dengan Butir II.4 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.
 - d) Tim evaluasi menyiapkan konsep Laporan Hasil Evaluasi sesuai dengan Butir II.5 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

c. Tahap Ekspos Panel

Atas hasil evaluasi Pemerintah Daerah yang menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) akan dilakukan ekspos panel. Ekspos panel dilakukan pada tim panel Perwakilan BPKP, tim panel Kedeputian PPKD dan dengan pertimbangan strategis dapat dilakukan ekspos pada tim panel BPKP dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Kepala Perwakilan BPKP menetapkan tim panel Perwakilan BPKP dengan struktur sesuai Butir II.10 Buku II Evaluasi atas Penilaian

Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini;

- 2) Tim evaluasi memaparkan hasil evaluasi kepada tim panel Perwakilan BPKP. Pemaparan dapat dihadiri oleh tim asesor atau manajemen Pemerintah Daerah;
- 3) Tim panel Perwakilan BPKP melakukan pengujian atas proses dan substansi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dan hasilnya dituangkan dalam notulen sesuai dengan Butir II.6, Berita Acara Hasil Ekspos Panel Perwakilan BPKP sesuai dengan Butir II.7 dan konsep Laporan Hasil Evaluasi sesuai dengan Butir II.5 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini;
- 4) Atas hasil panel Perwakilan BPKP yang menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) akan dilakukan ekspos panel Kedeputian PPKD;
- 5) Tim panel Perwakilan BPKP memaparkan hasil ekspos kepada tim panel Kedeputian PPKD dengan struktur sesuai Butir II.11 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini. Tim panel Kedeputian PPKD dihadiri oleh perwakilan dari Kedeputian Bidang Investigasi. Hasil ekspos panel Kedeputian PPKD dituangkan dalam notulen sesuai dengan Butir II.6, Berita Acara Hasil Ekspos Panel Perwakilan BPKP sesuai dengan Butir II.7 dan konsep Laporan Hasil Evaluasi sesuai dengan Butir II.5 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini;
- 6) Tim panel Kedeputian PPKD memberikan arahan yang bersifat strategis terkait pembinaan penyelenggaraan SPIP dan berdasarkan pertimbangan strategis dapat merekomendasikan hasil ekspos Kedeputian PPKD untuk dibahas oleh tim panel BPKP. Jika hasil ekspos Kedeputian PPKD tidak dibahas oleh tim panel BPKP, maka tim panel Kedeputian PPKD menetapkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah;
- 7) Tim panel Kedeputian PPKD memaparkan hasil ekspos kepada tim panel BPKP dengan struktur sesuai Butir II.11 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini. Tim panel BPKP menetapkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP dan memberikan arahan yang

bersifat strategis terkait pembinaan penyelenggaraan SPIP. Hasil ekspos panel BPKP dituangkan dalam notulen sesuai dengan Butir II.6, Berita Acara Hasil Ekspos Panel Perwakilan BPKP sesuai dengan Butir II.7 dan konsep Laporan Hasil Evaluasi sesuai dengan Butir II.5 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

d. Tahap Pelaporan

Tim evaluasi melakukan finalisasi laporan sesuai dengan Butir II.5 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

BAB V

PENUTUP

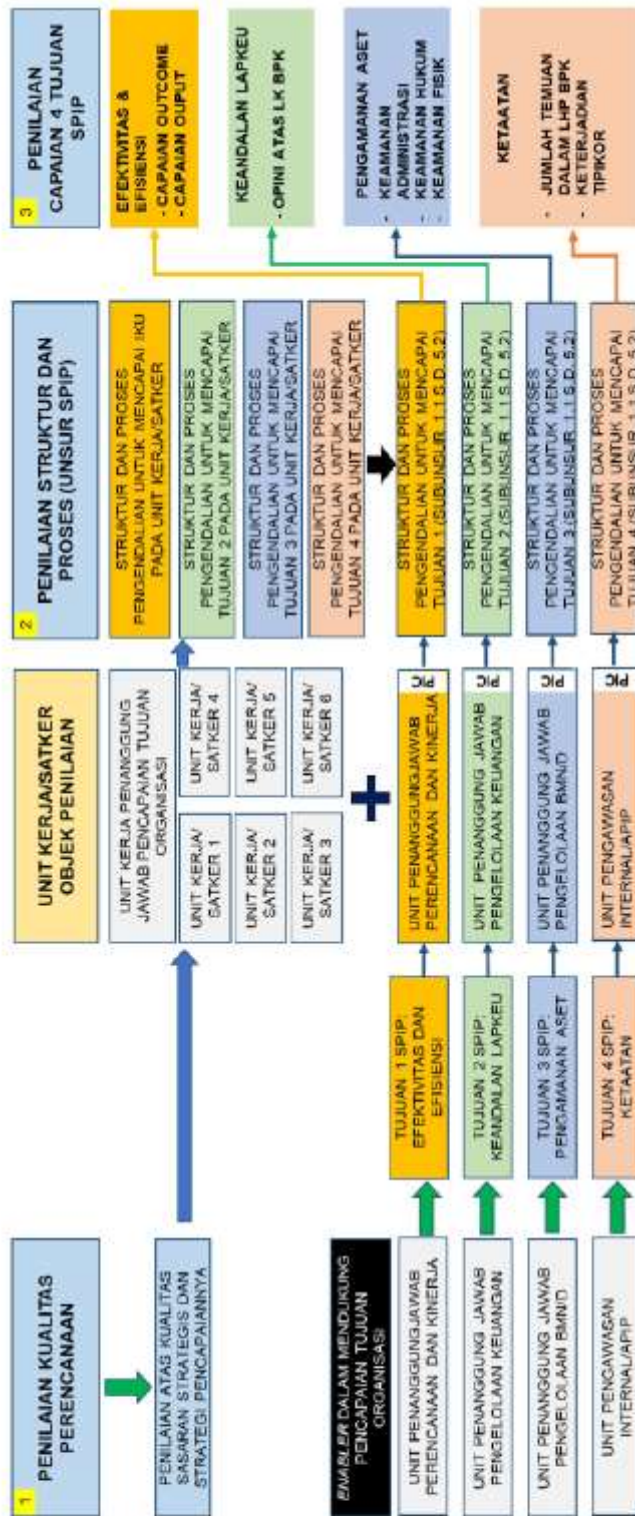
Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada K/L/D menjadi acuan bagi K/L/D dalam melaksanakan proses penilaian untuk mengukur kematangan penyelenggaraan SPIP. Pedoman ini menjadi pembaruan terhadap fokus dan komponen pembinaan penyelenggaraan SPIP yang mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, MRI, dan IEPK dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan. Lebih lanjut pedoman ini memberi panduan terkait mekanisme penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP mulai dari proses PM dan PK oleh K/L/D, serta Evaluasi oleh BPKP.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis, kondisi masing-masing instansi pemerintah pun memiliki karakteristik dan perkembangan sesuai kebutuhan akan pencapaian tujuan strategisnya. Untuk itu, diperlukan pemahaman atas karakteristik dan proses bisnis instansi pemerintah agar dapat melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang mampu menjadi bahan evaluasi, sehingga menghasilkan strategi serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP.

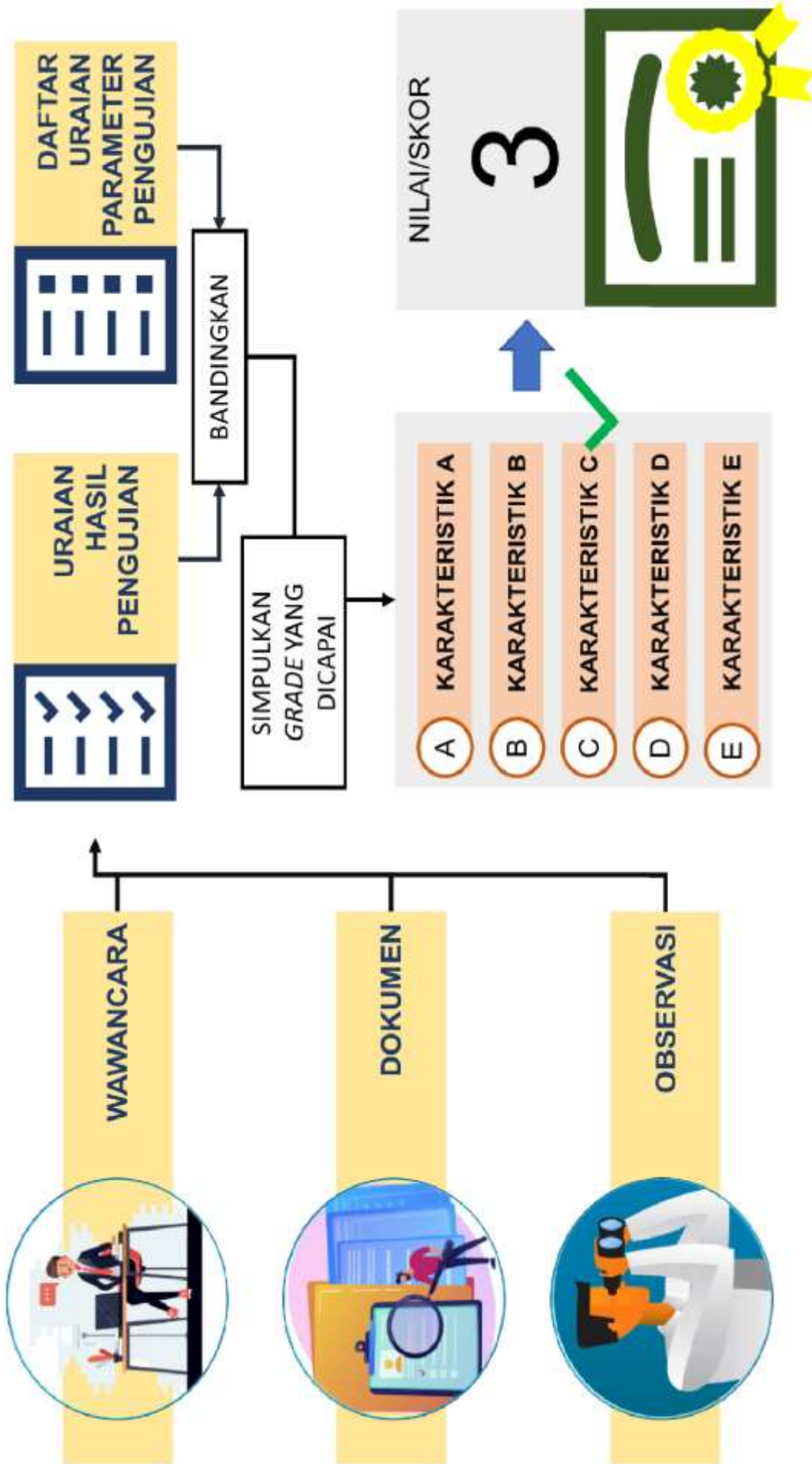
Penggunaan pedoman ini tidak terlepas dari perubahan kondisi lingkungan entitas yang akan terus berkembang seiring perubahan waktu. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan pedoman sesuai perkembangan kebijakan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

BUKU I PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

I.1. ALUR PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP



I.2. ILUSTRASI PENGUJIAN BUKTI PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP



I.3. LANGKAH KERJA PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PADA K/L/D

I.3.1 KUALITAS PERENCANAAN KINERJA

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
I	1. UNTUK KEMENTERIAN/LEMBAGA					
	Tujuan:					
	1 Menilai Kualitas Sasaran Strategis					
	2 Menilai Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)					
	A. PENILAIAN MANDIRI					
	Langkah Kerja:					
	A.1 Menilai Kualitas Sasaran Strategis					
	1 Identifikasi seluruh Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri/Kepala Lembaga	- Asesor (Satker perencanaan)	Perjanjian Kinerja Menteri/Kepala Lembaga	Analisis Dokumen		
	2 Masukkan seluruh Sasaran Strategis Menteri/Kepala Lembaga ke dalam KK 1.1 beserta Indikator Kinerja Sasaran dan Targetnya. Berikan kode untuk masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran	- Asesor (Satker perencanaan)	Perjanjian Kinerja Menteri/Kepala Lembaga	Analisis Dokumen	KK 1.1	
	3 Berikan penilaian atas kualitas Sasaran Strategis Menteri/Kepala Lembaga dengan fokus penilaian pada ketepatan Sasaran Strategis, ketepatan Indikator Kinerja Sasaran, dan ketepatan Target Kinerja Sasaran. Isikan dengan "Y" (Ya) jika memenuhi kriteria atau "T" (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria	- Asesor (Satker perencanaan)	Perjanjian Kinerja Menteri/Kepala Lembaga	Analisis Dokumen	KK 1.1	<p>- Sasaran Strategis Tepat: sasaran strategis K/L berorientasi pada hasil, dapat menjawab mandat organisasi, mendukung pencapaian prioritas nasional, dan mempertimbangkan isu strategis</p> <p>- Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja sasaran strategis K/L yang ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur</p>

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
4	Telusuri penjabaran (<i>cascading</i>) seluruh Sasaran Strategis Menteri/Kepala Lembaga ke dalam Perjanjian Kinerja satuan-satuan kerja yang menjadi pengampu setiap Sasaran Strategis	- Asesor (Satker perencanaan)	- Perjanjian Kinerja Menteri/Kepala Lembaga - Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja	Analisis Dokumen		<p>secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi sasaran, cukup mengukur kondisi sasaran, terkait langsung dan mendukung sasaran, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala</p> <p>- Target Kinerja Baik: target kinerja sasaran strategis K/L telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja organisasi di atasnya, proyektif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada</p>
5	Masukkan seluruh Sasaran Strategis satuan kerja sesuai dengan Sasaran Strategis Menteri/Kepala Lembaga yang terkait ke dalam KK 1.1 beserta Nama Satuan Kerja, Indikator Kinerja Sasaran	- Asesor (Satker perencanaan)	Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja	Analisis Dokumen	KK 1.1	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
6	<p>dan Targetnya. Berikan kode untuk masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran</p> <p>Berikan penilaian atas kualitas Sasaran Strategis Satuan Kerja dengan fokus penilaian pada keterkaitan dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, ketepatan Sasaran Strategis, ketepatan Indikator Kinerja Sasaran, dan ketepatan Target Sasaran dengan kriteria sebagaimana dijelaskan di atas. Isikan dengan "Y" (Ya) jika memenuhi kriteria atau "T" (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria</p>	<p>- Asesor (Satker perencanaan)</p>	<p>- Renstra K/L - Renstra Satker - Perjanjian Kinerja Menteri/ Kepala Lembaga - Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja</p>	<p>Analisis Dokumen</p>	<p>KK 1.1</p>	<p>- Keterkaitan dengan Sasaran Strategis K/L: sasaran strategis satuan kerja selaras dan sinergi dengan sasaran strategis K/L di atasnya</p> <p>- Sasaran Strategis Tepat: sasaran strategis satuan kerja berorientasi pada hasil, dapat menjawab mandat organisasi, mendukung pencapaian prioritas nasional, tidak tumpang tindih satu dengan lainnya, dan mempertimbangkan isu strategis</p> <p>- Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja sasaran strategis satuan kerja yang ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi sasaran, cukup mengukur kondisi sasaran, terkait langsung dan mendukung sasaran, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala</p> <p>- Target Kinerja Baik: target kinerja sasaran strategis satuan kerja telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu</p>

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
7	Rumuskan <i>Area of Improvement</i> beserta rekomendasinya terkait kelemahan pada kualitas Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja	- Asesor (Satker perencanaan)	KK 1.1	Analisis Dokumen		periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja K/L, proyektif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada
A.2	Menilai Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)					
8	Identifikasi dan isikan pada KK 2 nama program pada satuan-satuan kerja tersebut beserta Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Program sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Satuan Kerja	- Asesor (seluruh satker)	- Renstra Satker - Renja Satker - Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja	Analisis Dokumen	KK 2	
9	Berikan penilaian atas kualitas program pendukung Sasaran Program Satuan Kerja pada KK 2 dengan fokus penilaian pada keterkaitan dengan Sasaran Program Satuan Kerja, ketepatan Indikator Kinerja Program, dan ketepatan Target Program. Isikan dengan "Y" (Ya) jika memenuhi kriteria atau "T" (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria	- Asesor (seluruh satker)	- Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja - Perjanjian Kinerja Pengampu Program	Analisis Dokumen	KK 2	<p>- Keterkaitan dengan Sasaran Strategis K/L: program selaras dan sinergi dengan sasaran strategis K/L</p> <p>- Sasaran Program Tepat: sasaran program satuan kerja berorientasi pada hasil, dapat menjawab mandat organisasi, mendukung pencapaian sasaran strategis K/L, tidak tumpang tindih satu dengan lainnya, dan mempertimbangkan isu</p>

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
10	Identifikasi seluruh kegiatan Satuan Kerja dalam Renja dan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja pada tahun penilaian yang mendukung pencapaian setiap program satuan kerja yang diidentifikasi pada langkah kerja 8 dan 9	- Asesor (seluruh satker)	- Renja Satker - Perjanjian Kinerja Pengampu Kegiatan	Analisis Dokumen		strategis - Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja program ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi program, cukup mengukur kondisi program, terkait langsung dan mendukung sasaran strategis K/L, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala - Target Kinerja Baik: target program telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja sasaran strategis K/L, proyekatif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada.
11	Masukkan seluruh kegiatan pendukung program Satuan Kerja ke dalam KK 2 beserta Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kegiatan	- Asesor (seluruh satker)	- Renja Satker - Perjanjian Kinerja Pengampu Kegiatan	Analisis Dokumen	KK 2	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
12	Berikan penilaian atas kualitas kegiatan pendukung program Satuan Kerja dengan fokus penilaian pada keterkaitan dengan Sasaran Program Satuan Kerja, kualitas Sasaran Kegiatan, ketepatan Indikator Kinerja Kegiatan, dan ketepatan Target Kegiatan. Isikan dengan "Y" (Ya) jika memenuhi kriteria atau "T" (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria	- Asesor (seluruh satker)	- Renja Satker - Perjanjian Kinerja Pengampu Kegiatan	Analisis Dokumen	KK 2	<p>- Keterkaitan dengan Sasaran Program Satuan Kerja: kegiatan selaras dan sinergi dengan sasaran program satuan kerja</p> <p>- Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Tepat: sasaran kegiatan satuan kerja berorientasi pada hasil, dapat menjawab mandat organisasi, mendukung pencapaian sasaran program, tidak tumpang tindih satu dengan lainnya, dan mempertimbangkan isu strategis</p> <p>- Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi kegiatan, cukup mengukur kondisi kegiatan, terkait langsung dan mendukung sasaran program satuan kerja, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala</p> <p>- Target Kinerja Baik: target kegiatan telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja sasaran program satuan kerja, proyekatif, dan</p>

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
13	Identifikasi seluruh rincian/ <i>output</i> /komponen kegiatan Satuan Kerja dalam Renja dan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja pada tahun penilaian yang mendukung pencapaian setiap kegiatan satuan kerja yang diidentifikasi pada langkah kerja 11 dan 12	- Asesor (seluruh satker)	- Renja Satker - Perjanjian Kinerja Pengampu <i>Output</i> / Rincian/ komponen kegiatan	Analisis Dokumen		memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada. Rincian/ <i>output</i> /komponen kegiatan Satuan Kerja adalah aktivitas di bawah kegiatan
14	Masukkan seluruh rincian/ <i>output</i> /komponen kegiatan satuan kerja ke dalam KK 2 beserta Sasaran Rincian/ <i>Output</i> /Komponen Kegiatan, Indikator Kinerja Rincian/ <i>Output</i> /Komponen Kegiatan dan Target Rincian/ <i>Output</i> /Komponen Kegiatan	- Asesor (seluruh satker)	- Renja Satker - Perjanjian Kinerja Pengampu <i>Output</i> / Rincian/ komponen kegiatan	Analisis Dokumen	KK 2	
15	Berikan penilaian atas kualitas Sasaran Rincian/ <i>Output</i> /Komponen Kegiatan Satuan Kerja dengan fokus penilaian pada keterkaitan dengan Sasaran Kegiatan Satuan Kerja, kualitas Sasaran Rincian/ <i>Output</i> /Komponen Kegiatan, ketepatan Indikator Kinerja Rincian/ <i>Output</i> /Komponen Kegiatan, dan ketepatan target Rincian/ <i>Output</i> /Komponen Kegiatan. Isikan dengan "Y" (Ya) jika memenuhi kriteria atau "T" (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria	- Asesor (seluruh satker)	- Rencana Kerja Tahunan Satker - perjanjian kinerja pengampu kegiatan	Analisis Dokumen	KK 2	<p>- Keterkaitan dengan Sasaran Kegiatan Satuan Kerja: kegiatan selaras dan sinergi dengan sasaran kegiatan satuan kerja</p> <p>- Sasaran Rincian/ <i>Output</i>/Komponen Kegiatan Satuan Kerja: sasaran rincian/ <i>output</i>/komponen kegiatan satuan kerja berorientasi pada hasil, dapat menjawab mandat organisasi, mendukung pencapaian sasaran kegiatan, tidak</p>

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
						<p>tumpang tindih satu dengan lainnya, dan mempertimbangkan isu strategis</p> <p>- Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja rincian/output/komponen kegiatan yang ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi</p> <p>rincian/output/komponen kegiatan, cukup mengukur kondisi</p> <p>rincian/output/komponen kegiatan, terkait langsung dan mendukung sasaran kegiatan satuan kerja, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala</p> <p>- Target Kinerja Baik: target rincian/output/komponen kegiatan telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja sasaran kegiatan satuan kerja, proyektif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada.</p>

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
16	Tambahkan informasi pada KK 2 terkait ketersediaan anggaran dan jumlah kegiatan-pada tahun penilaian untuk kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi pada langkah kerja 11 dan 12	- Asesor (seluruh satker)	- Perjanjian Kinerja Pengampu Kegiatan - DIPA	Analisis Dokumen	KK 2	
17	Rumuskan <i>Area of Improvement</i> beserta rekomendasinya terkait kelemahan pada kualitas Program dan Kegiatan Satuan Kerja	- Asesor (seluruh satker)	KK 2	Analisis Dokumen		
18	Pelaksanaan langkah-langkah kerja di atas selanjutnya akan dikonversi secara otomatis menjadi skor pada KK <i>Lead I</i>	- Asesor (seluruh satker)	- KK 1.1 - KK 2	Analisis Dokumen	KK <i>Lead I</i>	
19	Tuangkan hasil pengujian ke dalam <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	- Asesor (seluruh satker) - Koordinator Penilaian Mandiri	- KK 1.1 - KK 2		<i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri	
B. PENJAMINAN KUALITAS						
Langkah Kerja:						
1	Dapatkan <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	APIP	<i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri	Analisis Dokumen		
2	Dapatkan kertas kerja penilaian kualitas penetapan tujuan (KK 1.1, KK 2, dan KK <i>Lead I</i>) beserta data dukung kertas kerja tersebut	APIP	- KK 1.1 - KK 2 - KK <i>Lead I</i>	Analisis Dokumen	- KK 1.1 - KK 2 - KK <i>Lead I</i>	
3	Lakukan validasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP komponen penilaian kualitas perencanaan kinerja dengan menguji pelaksanaan langkah kerja nomor 2 sampai dengan 19 pada	APIP	- KK 1.1 - KK 2 - KK <i>Lead I</i>	Analisis Dokumen dan Wawancara	- KK 1.1 - KK 2 - KK <i>Lead I</i>	Penjaminan Kualitas dilakukan minimal terhadap 50% satker sampel dan proporsional sesuai kebutuhan pengujian

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
4	langkah kerja Penilaian Mandiri Berdasarkan langkah kerja di atas, lakukan validasi atas simpulan pada KK <i>Lead I</i>	APIP	- KK 1.1 - KK 2 - KK <i>Lead I</i>	Analisis Dokumen	KK <i>Lead I</i>	
5	Perbaiki <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP sesuai hasil Penjaminan Kualitas	- APIP - Asesor (seluruh satker) - Koordinator Penilaian Mandiri	- KK 1.1 - KK 2 - KK <i>Lead I</i> - <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri	Analisis Dokumen	Laporan Hasil Penilaian Mandiri	
6	Susun pernyataan bahwa proses dan hasil penilaian mandiri telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP	- APIP	- KK 1.1 - KK 2 - KK <i>Lead I</i> - <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri	Analisis Dokumen	Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas	
	2. UNTUK PEMERINTAH DAERAH					
	Tujuan:					
1	Menilai Kualitas Sasaran Strategis					
2	Menilai Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)					
	A. PENILAIAN MANDIRI					
	Langkah Kerja:					
1	Menilai Kualitas Sasaran Strategis Identifikasi seluruh Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah	- Asesor (Satker perencanaan)	Perjanjian Kinerja Kepala Daerah	Analisis Dokumen		
2	Masukkan seluruh Sasaran Strategis	- Asesor	Perjanjian	Analisis	KK 1.2	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
	Pemerintah Daerah ke dalam KK 1.2 beserta Indikator Kinerja Sasaran dan Targetnya. Berikan kode untuk masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran	(Satker perencanaan)	Kinerja Kepala Daerah	Dokumen		
3	Berikan penilaian atas kualitas Sasaran Strategis Pemerintah Daerah dengan fokus penilaian pada ketepatan Sasaran Strategis, ketepatan Indikator Kinerja Sasaran, dan ketepatan Target Kinerja Sasaran. Isikan dengan "Y" (Ya) jika memenuhi kriteria atau "T" (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria	- Asesor (Satker perencanaan)	Perjanjian Kinerja Kepala Daerah	Analisis Dokumen	KK 1.2	<p>- Sasaran Strategis Tepat: sasaran strategis pemerintah daerah berorientasi pada hasil, dapat menjawab mandat keberadaan Pemerintah daerah mendukung pencapaian Visi Misi Daerah dan pembangunan nasional, dan mempertimbangkan isu strategis</p> <p>- Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja sasaran strategis pemerintah daerah yang ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi sasaran, cukup mengukur kondisi sasaran, terkait langsung dan mendukung sasaran, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala</p> <p>- Target Kinerja Baik: target kinerja sasaran strategis Pemerintah daerah telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target</p>

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
4	Telusuri penjabaran (<i>cascading</i>) seluruh Sasaran Strategis Pemerintah Daerah ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pengampu setiap Sasaran Strategis	- Asesor (Satker perencanaan)	- Perjanjian Kinerja Kepala Daerah - Perjanjian Kinerja Kepala OPD	Analisis Dokumen	KK 1.2	kinerja pembangunan nasional, proyekatif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada
5	Masukkan seluruh Sasaran Strategis OPD sesuai dengan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang terkait ke dalam KK 1.2 beserta Nama OPD, Indikator Kinerja Sasaran dan Targetnya. Berikan kode untuk masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran	- Asesor (Satker perencanaan)	Perjanjian Kinerja Kepala OPD	Analisis Dokumen	KK 1.2	
6	Berikan penilaian atas kualitas Sasaran Strategis OPD dengan fokus penilaian pada keterkaitan dengan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah, ketepatan Sasaran Strategis OPD, ketepatan Indikator Kinerja Sasaran OPD, dan ketepatan Target Sasaran OPD dengan kriteria sebagaimana dijelaskan di atas. Isikan dengan "Y" (Ya) jika memenuhi kriteria atau "T" (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria	- Asesor (Satker perencanaan)	Perjanjian Kinerja Kepala OPD	Analisis Dokumen	KK 2	<p>- Keterkaitan dengan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah: sasaran strategis OPD selaras dan sinergi dengan sasaran strategis pemerintah daerah di atasnya</p> <p>- Sasaran Strategis Tepat: sasaran strategis OPD berorientasi pada hasil, dapat menjawab mandat organisasi, mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah, tidak tumpang tindih satu dengan lainnya, dan mempertimbangkan isu strategis</p>

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
						<p>- Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja sasaran strategis OPD yang ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi sasaran, cukup mengukur kondisi sasaran, terkait langsung dan mendukung sasaran, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala</p> <p>- Target Kinerja Baik: target kinerja sasaran strategis satuan kerja telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja pemerintah daerah, proyekatif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada</p>
7	Rumuskan <i>Area of Improvement</i> beserta rekomendasinya terkait kelemahan pada kualitas Sasaran Strategis Pemerintah Daerah dan satuan kerja	- Asesor (Satker perencanaan)	KK 1.2	Analisis Dokumen		
8	<p>A.2 Menilai Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)</p> <p>Identifikasi dan isikan pada KK 2 nama program pada satuan-satuan kerja tersebut beserta Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target</p>	- Asesor (seluruh satker)	- Renstra OPD - Renja OPD	Analisis Dokumen	KK 2	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
9	<p>Program sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD dan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang/Bagian OPD yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis OPD</p> <p>Berikan penilaian atas kualitas program pendukung Sasaran Strategis OPD tema evaluasi pada KK 2 dengan fokus penilaian pada keterkaitan dengan Sasaran Strategis OPD, kualitas Sasaran Program, ketepatan Indikator Kinerja Program, dan ketepatan Target Program. Isikan dengan "Y" (Ya) jika memenuhi kriteria atau "T" (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria</p>	<p>- Asesor (seluruh satker)</p>	<p>- Perjanjian Kinerja Kepala Bidang/Bagian OPD - Renstra OPD - Renja OPD - Perjanjian Kinerja Kepala Bidang/Bagian OPD - Pengampu Program</p>	<p>Analisis Dokumen</p>	<p>KK 2</p>	<p>- Keterkaitan dengan Sasaran Strategis K/L: program selaras dan sinergi dengan sasaran strategis Pemerintah daerah</p> <p>- Kualitas Sasaran Program Baik:</p> <p>sasaran strategis sasaran program berorientasi pada hasil, dapat menjawab mandat, mendukung pencapaian Sasaran strategis OPD, tidak tumpang tindih satu dengan lainnya, dan mempertimbangkan isu strategis</p> <p>- Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja program ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistik, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi program, cukup mengukur kondisi program, terkait langsung dan mendukung sasaran strategis OPD, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala</p> <p>- Target Kinerja Baik: target program telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu</p>

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
						periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja sasaran strategis OPD, proyektif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada.
10	Identifikasi seluruh kegiatan OPD dalam Renja OPD dan Perjanjian Kinerja Kepala Seksi/Subbagian pada tahun penilaian yang mendukung pencapaian setiap program OPD yang diidentifikasi pada langkah kerja 8 dan 9	- Asesor (seluruh satker)	- Renja OPD - Perjanjian Kinerja Pengampu Kegiatan (Kepala Seksi/ Kepala Subbagian)	Analisis Dokumen		
11	Masukkan seluruh kegiatan pendukung program ke dalam KK 2 beserta, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kegiatan	- Asesor (seluruh satker)	- Renja OPD - Perjanjian Kinerja Pengampu Kegiatan (Kepala Seksi/ Kepala Subbagian)	Analisis Dokumen	KK 2	
12	Berikan penilaian atas kualitas kegiatan pendukung Program Satuan Kerja dengan fokus penilaian pada keterkaitan dengan Sasaran Program OPD, ketepatan Indikator Kinerja Kegiatan, dan ketepatan Target Kegiatan. Isikan dengan "Y" (Ya) jika memenuhi kriteria atau "T" (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria	- Asesor (seluruh satker)	- Renja OPD - Perjanjian Kinerja Pengampu Kegiatan (Kepala Seksi/ Kepala Subbagian)	Analisis Dokumen	KK 2	<p>- Keterkaitan dengan Sasaran Program Satuan Kerja: kegiatan selaras dan sinergi dengan sasaran program OPD</p> <p>- Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi</p>

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
13	<p>Tambahkan informasi pada KK 2 terkait ketersediaan anggaran dan jumlah anggaran pada tahun penilaian untuk kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi pada langkah kerja 10 dan 11</p>	<p>- Asesor (seluruh satker)</p>	<p>- Perjanjian Kinerja Pengampu Kegiatan (Kepala Seksi/ Kepala Subbagian) - DPA - KK 2</p>	<p>Analisis Dokumen</p>	<p>KK 2</p>	<p>dalam mengukur kondisi kegiatan, cukup mengukur kondisi kegiatan, terkait langsung dan mendukung sasaran program satuan kerja, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala</p> <p>- Target Kinerja Baik: target kegiatan telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja sasaran program satuan kerja, proyekatif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada.</p> <p>- Perjanjian Kinerja: kegiatan telah dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja pimpinan dan pegawai satuan kerja untuk tahun penilaian sebagai pendukung pencapaian Sasaran Program OPD</p>
14	<p>Rumuskan <i>Area of Improvement</i> beserta</p>	<p>- Asesor</p>	<p>- KK 2</p>	<p>Analisis</p>		

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
	rekomendasinya terkait kelemahan pada kualitas program dan kegiatan OPD	(seluruh satker)		Dokumen		
15	Pelaksanaan langkah-langkah kerja di atas selanjutnya akan dikonversi secara otomatis menjadi skor pada KK <i>Lead I</i>	- Asesor (seluruh satker)	- KK 1.2 - KK 2	Analisis Dokumen	KK <i>Lead I</i>	
16	Tuangkan hasil pengujian ke dalam <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	- Asesor (seluruh satker) - Koordinator Penilaian Mandiri	- KK 1.2 - KK 2		<i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri	
	B. PENJAMINAN KUALITAS					
	Langkah Kerja:					
1	Dapatkan <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	APIP	<i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri	Analisis Dokumen		
2	Dapatkan kertas kerja penilaian kualitas perencanaan kinerja (KK 1.2, KK 2, dan KK <i>Lead I</i>) beserta data dukung kertas kerja tersebut	APIP	- KK 1.2 - KK 2 - KK <i>Lead I</i>	Analisis Dokumen	- KK 1.2 - KK 2 - KK <i>Lead I</i>	
3	Lakukan validasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP komponen penilaian kualitas perencanaan kinerja dengan menguji pelaksanaan langkah kerja nomor 2 sampai dengan 16 pada langkah kerja Penilaian Mandiri	APIP	- KK 1.2 - KK 2 - KK <i>Lead I</i>	Analisis Dokumen dan Wawancara	- KK 1.2 - KK 2 - KK <i>Lead I</i>	Penjaminan Kualitas dilakukan minimal terhadap 50% satker sampel dan proporsional sesuai kebutuhan pengujian
4	Berdasarkan langkah kerja di atas, lakukan validasi atas simpulan pada KK <i>Lead I</i>	APIP	- KK 1.2 - KK 2 - KK <i>Lead I</i>	Analisis Dokumen	KK <i>Lead I</i>	
5	Perbaiki <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP sesuai hasil Penjaminan Kualitas	- APIP - Asesor (seluruh satker)	- KK 1.2 - KK 2 - <i>Draft</i> Laporan	Analisis Dokumen	Laporan Hasil Penilaian Mandiri	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
6	Susun pernyataan bahwa proses dan hasil penilaian mandiri telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Penilaian Mandiri - APIP 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Penilaian Mandiri - KK 1.2 - KK 2 - KK <i>Lead</i> I - <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Dokumen 	Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas	

I.3.2 STRUKTUR DAN PROSES

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
II	Struktur dan Proses					
	Tujuan: Menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai 4 tujuan penyelenggaraan SPIP					
	A. PENILAIAN MANDIRI					
	Langkah Kerja:					
1	Penilaian struktur dan proses pengendalian intern dilakukan melalui 4 kertas kerja (KK 3.1, KK 3.2, KK 3.3, dan KK 3.4) yang dibagi berdasarkan kaitannya dengan 4 tujuan SPIP. Pahami parameter, kriteria, dan penjelasan dalam setiap pernyataan pada KK 3.1, KK 3.2, KK 3.3, dan KK 3.4 tersebut	- Asesor (seluruh satker)	- KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3 - KK 3.4	- Analisis Dokumen	- KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3 - KK 3.4	- Perhatikan setiap parameter pada KK 3.1, KK 3.2, KK 3.3, dan KK 3.4. Secara umum parameternya hampir sama, tetapi dengan substansi yang berbeda untuk setiap KK, yang dibagi sesuai dengan 4 Tujuan Penyelenggaraan SPIP - Pada setiap KK selain mengandung parameter terkait struktur SPIP, juga dilekatkan parameter terkait MRI, dan khusus KK 3.4 dilekatkan juga parameter terkait IEPK
2	Tentukan teknik pengujian yang tepat untuk membuktikan setiap parameter pada KK 3.1, KK 3.2, KK 3.3, dan KK 3.4 tersebut	- Asesor (seluruh satker)	- KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3 - KK 3.4	- Analisis Dokumen	- KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3 - KK 3.4	Pengujian dapat dilakukan dengan wawancara, analisis dokumen, observasi dan teknik lain yang diperlukan. Teknik yang digunakan asesor dalam melakukan pengujian dituangkan pada kolom Cara Pengujian.
3	Dengan teknik pengujian yang dipilih, dapatkan gambaran kondisi untuk setiap parameter dengan sudut pandang 4 tujuan penyelenggaraan SPIP yaitu	- Asesor (seluruh satker)	- Pegawai yang memahami proses	- Wawancara - Analisis Dokumen	- KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3 - KK 3.4	- Pengujian bukti untuk menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan,

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
	efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi (KK 3.1), keandalan pelaporan keuangan (KK 3.2), pengamanan aset negara/daerah (KK 3.3), dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (KK 3.4)		bisnis organisasi - Dokumen terkait penyelenggaraan-raan pengendalian intern - Kondisi yang terlihat dalam proses penyelenggaraan-raan pengendalian intern	- Observasi		pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan pada seluruh satker - Apabila memilih teknik wawancara, lakukan terhadap pegawai yang benar-benar memahami proses bisnis organisasi. Catat dan simpulkan hasil wawancara - Apabila memilih teknik analisis dokumen, kumpulkan dan analisis dokumen yang benar-benar relevan dengan substansi parameter penilaian. Catat dan simpulkan hasil analisis dokumen - Apabila memilih teknik observasi, lakukan observasi pada obyek-obyek yang benar-benar relevan dengan substansi parameter penilaian. Catat dan simpulkan hasil observasi
4	Tuangkan hasil pengujian pada setiap satker dalam bentuk narasi pada kolom Hasil Pengujian yaitu pada KK 3.1 untuk tujuan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, KK 3.2 untuk tujuan keandalan pelaporan keuangan, KK 3.3 untuk tujuan pengamanan aset negara/daerah, dan KK 3.4 untuk tujuan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	- Asesor (seluruh satker)	- Pegawai yang memahami proses bisnis organisasi - Dokumen terkait penyelenggaraan-raan pengendalian intern	- Wawancara - Analisis Dokumen - Observasi	- KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3 - KK 3.4	Terhadap kolom Hasil Pengujian pada KK 3.1, KK 3.2, KK 3.3, dan KK 3.4, Asesor perlu memperhatikan: - Dapatkan informasi mengenai kondisi pada satker sampel lalu bandingkan kondisi tersebut dengan substansi parameter penilaian pada kolom Penjelasan - Untuk pengujian dengan teknik wawancara, selain

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi yang terlihat dalam proses penyelenggaraan pengendalian intern 			<p>substansi jawaban, cantumkan juga nama narasumber dan jabatannya serta informasi lain yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pengujian dengan teknik analisis dokumen, cantumkan nama dokumen sumber serta substansi yang relevan dengan parameter penilaian - Untuk pengujian dengan teknik observasi, cantumkan objek observasi serta hasil observasi yang relevan dengan parameter penilaian - Narasi hasil wawancara, analisis dokumen, dan observasi harus ditulis secara lengkap, runut, rapi, dan secara substansi mampu menjawab parameter, kriteria, dan penjelasannya.
5	<p>Atas hasil pengujian yang telah dituangkan dalam kolom Hasil Pengujian, simpulkan hasil pengujian dengan memilih "A/B/C/D/E" setelah membandingkan kondisi hasil pengujian dengan penjelasan setiap kriteria</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asesor (seluruh satker) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai yang memahami proses bisnis organisasi - Dokumen terkait penyelenggaraan pengendalian intern - Kondisi 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Analisis Dokumen - Observasi 	<ul style="list-style-type: none"> - KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3 - KK 3.4 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam parameter dengan kode "SPJP" saja, pilihan "A/B/C/D/E" menunjukkan gradasi struktur pengendalian internal mulai dari keberadaan dan kualitas kebijakan (E), pengkomunikasian kebijakan (D), implementasi kebijakan (C), evaluasi atas kebijakan dan implementasinya (B), dan perbaikan berkelanjutan/pengendalian optimum (A), yang dibuktikan

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
			yang terlihat dalam proses penyelenggara - raan pengendalian intern			<p>secara berurutan dari E s.d grade yang dicapai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam parameter dengan kode "SPIP dan MRI" serta "SPIP dan IEPK" dengan pilihan "A/B/C/D/E", asesor memilih grade yang menggambarkan kondisi yang diperoleh dari hasil pengujian. Pilihan "A" merupakan pilihan yang menggambarkan kondisi optimal hingga pilihan "E" yang menunjukkan kondisi pengendalian yang paling lemah - Asesor perlu secara cermat memperhatikan kondisi yang ada dan membandingkannya dengan Kriteria dan Penjelasan yang ditetapkan sebelum menentukan pilihan jawaban. Dalam kondisi tidak seluruh poin dalam setiap kolom Penjelasan dipenuhi (hanya sebagian dapat dipenuhi), Asesor dapat memutuskan memilih "A/B/C/D/E" dengan menjadikan hal-hal yang belum dipenuhi dalam kolom tersebut sebagai <i>Area of Improvement</i>
6	Hasil pengujian seluruh satker selanjutnya disimpulkan menjadi nilai subunsur sesuai modus yang diperoleh.	- Asesor (seluruh satker)	- KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3 - KK 3.4	Analisis Dokumen	- KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3 - KK 3.4	<ul style="list-style-type: none"> - Kesimpulan akhir per parameter diambil dari modus hasil pengujian semua satker - Pada setiap subunsur terdapat baris yang merupakan kesimpulan parameter yang

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
7	<p>Untuk menyimpulkan skor akhir penilaian struktur dan proses, maka nilai per subunsur dari KK 3.1, KK 3.2, KK 3.3, dan KK 3.4 tersebut akan dirata-rata dan menghasilkan skor per subunsur untuk tingkat K/L/D. Selanjutnya hasil akhirnya akan dibobot menjadi hasil penilaian komponen 2 yaitu struktur dan proses pengendalian intern pada K/L/D.</p>	<p>- Asesor (seluruh satker)</p>	<p>- KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3 - KK 3.4</p>	<p>Analisis Dokumen</p>	<p>KK <i>Lead</i> II</p>	<p>dicapai, misal 3 berarti modus Y pada pengujian di bawahnya s.d. pilihan jawaban C - Jika pada setiap subunsur terdapat lebih dari satu parameter, maka kesimpulan per subunsur dihitung dari jumlah capaian skor per parameter dibagi jumlah parameter</p> <p>KK <i>Lead</i> II akan otomatis terisi sesuai pengisian pada KK 3.1, KK 3.2, KK 3.3, dan KK 3.4</p>
8	<p>Tuangkan hasil pengujian ke dalam <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP</p>	<p>- Asesor (seluruh satker) - Koordinator Penilaian Mandiri</p>	<p>- KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3 - KK 3.4 - KK <i>Lead</i> II</p>		<p><i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri</p>	
<p>B. PENJAMINAN KUALITAS</p>						
<p>Langkah Kerja:</p>						
1	<p>Dapatkan <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP</p>	<p>APIP</p>	<p><i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri</p>	<p>Analisis Dokumen</p>		
2	<p>Dapatkan KK 3.1, KK 3.2, KK 3.3, KK 3.4, dan KK <i>Lead</i> II beserta data dukung kertas kerja tersebut</p>	<p>APIP</p>	<p>- KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3</p>	<p>Analisis Dokumen</p>	<p>- KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3</p>	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
3	Lakukan validasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP komponen penilaian struktur dan proses dengan menguji pelaksanaan langkah kerja nomor 2 sampai dengan 8 pada langkah kerja Penilaian Mandiri	APIP	- KK 3.4 - KK Lead II - KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3 - KK 3.4 - KK Lead II	Analisis Dokumen dan Wawancara	- KK 3.4 - KK Lead II - KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3 - KK 3.4 - KK Lead II	Penjaminan Kualitas dilakukan minimal terhadap 50% satker sampel dan proporsional sesuai kebutuhan pengujian
4	Berdasarkan langkah kerja di atas, lakukan validasi atas simpulan pada KK Lead II	APIP	- KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3 - KK 3.4 - KK Lead II	Analisis Dokumen	KK Lead II	
5	Perbaiki <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP sesuai hasil Penjaminan Kualitas	- APIP - Asesor (seluruh satker) - Koordinator Penilaian Mandiri	- KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3 - KK 3.4 - KK Lead II - <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri	Analisis Dokumen	Laporan Hasil Penilaian Mandiri	
6	Susun pernyataan bahwa proses dan hasil penilaian mandiri telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP	- APIP	- KK 3.1 - KK 3.2 - KK 3.3 - KK 3.4 - KK Lead II - <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri	Analisis Dokumen	Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas	

I.3.3 CAPAIAN 4 TUJUAN SPIP

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
III	1. EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI Tujuan: Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi sesuai indikator penilaian					
	A. PENILAIAN MANDIRI					
1	Identifikasi seluruh Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah tahun sebelumnya (20xx-1)	- Asesor (Satker perencanaan)	Perjanjian Kinerja Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah tahun penilaian (20xx-1)	Analisis Dokumen		
2	Masukkan seluruh Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ke dalam KK 5.1 beserta Indikator Kinerja Sasarannya	- Asesor (Satker perencanaan)	Perjanjian Kinerja Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah tahun penilaian (20xx-1)	Analisis Dokumen	KK 5.1	
3	Berikan penilaian atas kualitas Sasaran Strategis Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan fokus penilaian pada ketepatan sasaran strategis, ketepatan indikator kinerja sasaran, dan keandalan datanya. Isikan dengan "Y" (Ya) jika memenuhi kriteria	- Asesor (Satker perencanaan)	- Perjanjian Kinerja Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah	Analisis Dokumen	KK 5.1	- Sasaran Strategis Tepat: sasaran strategis K/L/D berorientasi pada hasil, dapat menjawab mandat organisasi, mendukung pencapaian prioritas nasional/daerah, tidak tumpang tindih satu dengan

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
	atau "T" (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria		tahun penilaian (20xx-1) - Metode pengukuran dan pengumpulan data - Laporan Kinerja K/L/D			lainnya, dan mempertimbangkan isu strategis - Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja sasaran strategis K/L/D yang ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi sasaran, cukup mengukur kondisi sasaran, terkait langsung dan mendukung sasaran, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala - Data Andal: setiap indikator kinerja memiliki metode pengukuran dan pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditrasir sampai dokumen sumber.
4	Dapatkan informasi target dan realisasi capaian seluruh Sasaran Strategis Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dari Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran sebelumnya. Isikan pada KK 5.1	- Asesor (Satker perencanaan)	Laporan Kinerja K/L/D	Analisis Dokumen	KK 5.1	Jika jawaban pada langkah kerja 3 adalah "T" (Tidak), langkah 4 tidak perlu dilaksanakan.
5	Masukkan seluruh Sasaran Strategis Satuan Kerja (untuk Pemerintah Daerah) dalam Perjanjian Kinerja Satuan Kerja yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Daerah	- Asesor (seluruh satker)	- Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja - Perjanjian	Analisis Dokumen	KK 5.2	Khusus untuk Pemerintah Daerah

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
6	Berikan penilaian atas kualitas Sasaran Strategis Satuan Kerja (untuk Pemerintah Daerah) dengan fokus penilaian pada keterkaitan dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah, ketepatan sasaran strategis dan ketepatan indikator kinerja sasaran. Isikan dengan "Y" (Ya) jika memenuhi kriteria atau "T" (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria	- Asesor (seluruh satker)	Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja	Analisis Dokumen	KK 5.2	<p>Khusus untuk Pemerintah Daerah</p> <p>- Keterkaitan dengan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah: sasaran strategis satuan kerja selaras dan sinergi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah di atasnya</p> <p>- Sasaran Strategis Tepat: sasaran strategis satuan kerja berorientasi pada hasil, dapat menjawab mandat organisasi, mendukung pencapaian prioritas nasional/daerah, tidak tumpang tindih satu dengan lainnya, dan mempertimbangkan isu strategis</p> <p>- Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja sasaran strategis satuan kerja yang ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi sasaran, cukup mengukur kondisi sasaran, terkait langsung dan mendukung sasaran, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta</p>

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
7	Identifikasi dan isikan seluruh Program pada seluruh satuan kerja yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (untuk Kementerian/Lembaga) atau Sasaran Strategis OPD (untuk Pemerintah Daerah) beserta Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	- Asesor (seluruh satker)	- Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja - Perjanjian Kinerja Pengampu Program	Analisis Dokumen	KK 5.2	dievaluasi dan diperbaiki secara berkala Jika jawaban pada langkah kerja 3 dan 6 adalah "T" (Tidak), langkah 7 dan seterusnya tidak perlu dilaksanakan
8	Berikan penilaian atas kualitas Program dengan fokus penilaian pada keterkaitan/relevansi dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (untuk Kementerian/Lembaga) atau Sasaran Strategis OPD (untuk Pemerintah Daerah) dan ketepatan Indikator Kinerja Program. Isikan dengan "Y" (Ya) jika memenuhi kriteria atau "T" (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria	- Asesor (seluruh satker)	- Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja - Perjanjian Kinerja Pengampu Program	Analisis Dokumen	KK 5.2	<p>- Keterkaitan dengan Sasaran Strategis K/L/D: program selaras dan sinergi dengan sasaran strategis K/L/D</p> <p>- Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja program ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi program, cukup mengukur kondisi program, terkait langsung dan mendukung sasaran strategis K/L/D, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala</p> <p>Jika jawaban pada langkah kerja 8 adalah "T" (Tidak), langkah 9 dan seterusnya tidak perlu dilaksanakan</p>
9	Identifikasi seluruh Kegiatan satuan kerja yang mendukung pencapaian setiap Program satuan kerja yang diidentifikasi pada langkah kerja 7 dan 8	- Asesor (seluruh satker)	- Renja Satker - Perjanjian Kinerja Pengampu Kegiatan	Analisis Dokumen	KK 5.2	Jika jawaban pada langkah kerja 8 adalah "T" (Tidak), langkah 9 dan seterusnya tidak perlu dilaksanakan
10	Masukkan seluruh Kegiatan pendukung Program satuan kerja beserta Indikator	- Asesor (seluruh satker)	- Renja Satker	Analisis Dokumen	KK 5.2	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
	Kinerja Kegiatan dan Target Kegiatan	satker)	- Perjanjian Kinerja Pengampu Kegiatan			
11	Berikan penilaian atas kualitas Kegiatan pendukung Program satuan kerja dengan fokus penilaian pada keterkaitan/relevansi dengan Sasaran Program satuan kerja, ketepatan Indikator Kinerja Kegiatan, dan keandalan data. Isikan dengan "Y" (Ya) jika memenuhi kriteria atau "T" (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria	- Asesor (seluruh satker)	- Renja Satker - Perjanjian Kinerja Pengampu Kegiatan	Analisis Dokumen	KK 5.2	<p>- Keterkaitan dengan Sasaran Program Satuan Kerja: kegiatan selaras dan sinergi dengan sasaran program satuan kerja</p> <p>- Indikator Kinerja Tepat dan Baik: indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi kegiatan, cukup mengukur kondisi kegiatan, terkait langsung dan mendukung sasaran program satuan kerja, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala</p> <p>- Data Andai: setiap indikator kinerja memiliki metode pengukuran dan pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditrasir sampai dokumen sumber.</p>
12	Dapatkan informasi target dan realisasi capaian Kegiatan pendukung Program satuan kerja dari Laporan Kinerja kegiatan dan laporan pelaksanaan sebelumnya. Isikan pada KK 5.2	- Asesor (seluruh satker)	- Renja Satker - Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja	Analisis Dokumen	KK 5.2	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
13	Isikan simpulan di atas pada KK <i>Lead</i> III	- Asesor (Satker perencanaan) - Asesor (seluruh satker)	- Laporan Kinerja Satker - Laporan Kegiatan - KK 5.1 - KK 5.2	Analisis Dokumen	KK <i>Lead</i> III	
14	Tuangkan hasil pengujian ke dalam <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	- Asesor (seluruh satker) - Koordinator Penilaian Mandiri	- KK 5.1 - KK 5.2 - KK <i>Lead</i> III		<i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	
B. PENJAMINAN KUALITAS						
Langkah Kerja:						
1	Dapatkan <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	APIP	<i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri	Analisis Dokumen		
2	Dapatkan kertas kerja komponen pencapaian tujuan Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (KK 5.1, KK 5.2, dan KK <i>Lead</i> III), beserta data dukung kertas kerja tersebut	APIP	- KK 5.1 - KK 5.2 - KK <i>Lead</i> III	Analisis Dokumen	- KK 5.1 - KK 5.2 - KK <i>Lead</i> III	
3	Lakukan validasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP komponen pencapaian tujuan Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi dengan melakukan langkah kerja nomor	APIP	- KK 5.1 - KK 5.2 - KK <i>Lead</i> III	Analisis Dokumen dan Wawancara	- KK 5.1 - KK 5.2 - KK <i>Lead</i> III	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
	2 sampai dengan 15 pada langkah kerja Penilaian Mandiri					
4	Berdasarkan langkah kerja di atas, lakukan validasi atas simpulan pada Kertas Kerja <i>Lead</i> III	APIP	KK <i>Lead</i> III	Analisis Dokumen	KK <i>Lead</i> III	
5	Perbaiki <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP sesuai hasil Penjaminan Kualitas	- APIP - Asesor (seluruh satker) - Koordinator Penilaian Mandiri	- KK 5.1 - KK 5.2 - KK <i>Lead</i> III - <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri	Analisis Dokumen	Laporan Hasil Penilaian Mandiri	
6	Susun pernyataan bahwa proses dan hasil penilaian mandiri telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP	- APIP	- KK 5.1 - KK 5.2 - KK <i>Lead</i> III - <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri	Analisis Dokumen	Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas	
	2. KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN					
	Tujuan:					
	Menilai keandalan pelaporan keuangan K/L/D.					
	A. PENILAIAN MANDIRI					
	Langkah Kerja:					
1	Dapatkan Buku I Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan (LK) K/L/D, untuk 5 tahun terakhir	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku I LHP BPK-RI atas LK K/L/D yang dinilai, untuk 5 tahun terakhir	Analisis Dokumen		

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
2	Rekapitulasikan perolehan Opini BPK-RI atas LK K/L/D, dalam 5 tahun terakhir	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku I LHP BPK-RI atas LK K/L/D yang dinilai, untuk 5 tahun terakhir	Analisis Dokumen	- KK 6	
3	Dalam hal Opini BPK-RI atas LK K/L/D bukan WTP, uraikan penyebab/penjelasan/pengecualian/ketidak-wajaran tersebut	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku I LHP BPK-RI atas LK K/L/D yang dinilai, untuk 5 tahun terakhir	Analisis Dokumen	- KK 6	
4	Dapatkan Buku II LHP BPK-RI atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) K/L/D, untuk 5 tahun terakhir	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku II LHP BPK-RI atas SPI K/L/D	Analisis Dokumen	- KK 6	
5	Uraikan secara ringkas substansi tiap butir temuan dalam Buku II LHP BPK-RI	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku II LHP BPK-RI atas SPI K/L/D	Analisis Dokumen	- KK 6	
6	Uraikan secara ringkas penyebab tiap butir temuan dalam Buku II LHP BPK-RI	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku II LHP BPK-RI atas SPI K/L/D	Analisis Dokumen	- KK 6	
7	Lakukan analisis apakah terdapat penyebab temuan yang berulang dalam 5 tahun terakhir	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku II LHP BPK-RI atas SPI K/L/D	Analisis Dokumen	- KK 6	
8	Berdasarkan hasil analisis pada butir 7 di atas, identifikasi subunsur SPIP yang terkait dengan penyebab temuan berulang tersebut	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku II LHP BPK-RI atas SPI K/L/D	Analisis Dokumen	- KK 6	
9	Susun simpulan atas langkah kerja 1 sampai dengan 8 sesuai kriteria skor pada Kertas Kerja <i>Lead</i> III	- Asesor (Satker pengawasan)		Analisis Dokumen	- KK 6	
10	Isikan simpulan di atas pada KK <i>Lead</i> III	- Asesor (Satker)	- KK 6	Analisis Dokumen	KK <i>Lead</i> III	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
11	Tuangkan hasil pengujian ke dalam <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	pengawasan) - Asesor (Satker pengawasan) - Koordinator Penilaian Mandiri	- KK 6 - KK Lead III		<i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	
B. PENJAMINAN KUALITAS						
Langkah Kerja:						
1	Dapatkan <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	APIP	<i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri	Analisis Dokumen		Personil APIP yang melakukan Penilaian Mandiri sebagaimana langkah kerja 1 s.d 11 Penilaian Mandiri di atas tidak boleh sama dengan personil APIP yang melakukan Penjaminan Kualitas
2	Dapatkan kertas kerja komponen pencapaian tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan (KK 6 dan KK Lead III), beserta data dukung kertas kerja tersebut	APIP	- KK 6 - KK Lead III	Analisis Dokumen	- KK 6 - KK Lead III	
3	Lakukan validasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP komponen pencapaian tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan dengan melakukan langkah kerja nomor 2 sampai dengan 11 pada langkah kerja Penilaian Mandiri	APIP	- KK 6 - KK Lead III	Analisis Dokumen dan Wawancara	- KK 6 - KK Lead III	
4	Berdasarkan langkah kerja di atas, lakukan validasi atas simpulan pada Kertas Kerja <i>Lead</i> III	APIP	- KK 6 - KK Lead III	Analisis Dokumen	KK <i>Lead</i> III	
5	Perbaiki <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP sesuai hasil Penjaminan Kualitas	- APIP - Asesor (Satker)	- KK 6 - KK Lead III	Analisis Dokumen	Laporan Hasil Penilaian	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
		pengawasan) - Koordinator Penilaian Mandiri	- Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri		Mandiri	
6	Susun pernyataan bahwa proses dan hasil penilaian mandiri telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP	- APIP	- KK 6 - KK Lead III - Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri	Analisis Dokumen	Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
4	Identifikasi catatan terkait BMN/D dalam Opini BPK-RI atas LK K/L/D	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku I LHP BPK-RI atas LK K/L/D yang dinilai, untuk 5 tahun terakhir	Analisis Dokumen	- KK 7	
5	Berdasarkan hasil analisis pada butir 4 di atas, identifikasi sub unsur SPIP yang terkait dengan catatan tersebut	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku I LHP BPK-RI atas LK K/L/D yang dinilai, untuk 5 tahun terakhir	Analisis Dokumen	- KK 7	
6	Dapatkan Buku II LHP BPK-RI atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) K/L/D, untuk 5 tahun terakhir	- Asesor (Satker pengawasan)			-	
7	Uraikan secara ringkas substansi tiap butir temuan terkait BMN/D dalam Buku II LHP BPK-RI (jika ada)	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku II LHP BPK-RI atas SPI K/L/D, untuk 5 tahun terakhir	Analisis Dokumen	- KK 7	
8	Uraikan secara ringkas penyebab tiap butir temuan terkait BMN/D dalam Buku II LHP BPK-RI (jika ada)	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku II LHP BPK-RI atas SPI K/L/D, untuk 5 tahun terakhir	Analisis Dokumen	- KK 7	
9	Lakukan analisis apakah terdapat temuan terkait kepemilikan BMN/D dalam 5 tahun terakhir	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku II LHP BPK-RI atas SPI K/L/D, untuk 5 tahun terakhir	Analisis Dokumen	- KK 7	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
10	Berdasarkan hasil analisis pada butir 9 di atas, identifikasi subunsur SPIP yang terkait dengan penyebab temuan tersebut	- Asesor (Satker pengawasan)	tahun terakhir Buku II LHP BPK-RI atas SPI K/L/D, untuk 5 tahun terakhir	Analisis Dokumen	- KK 7	
11	Dapatkan laporan terkait kondisi BMN/D	- Asesor (Satker pengawasan)				
12	Hitung persentase BMN/D dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN/D	- Asesor (Satker pengawasan)	Lampiran terkait BMN/D pada LK K/L/D atau Laporan Kondisi BMN/D K/L/D	Analisis Dokumen	- KK 7	
13	Berdasarkan hasil perhitungan pada butir 12 di atas, dalam hal kondisi BMN/D belum 100% baik, dapatkan informasi mengenai penyebab kondisi tersebut, serta upaya tindak lanjut yang dilakukan entitas atau upaya entitas untuk meminimalisasi dampaknya	- Asesor (Satker pengawasan)	Kuasa Pengguna Barang atau Pengelola BMN/D	Wawancara dan Analisis Dokumen	- KK 7	
14	Berdasarkan informasi yang diperoleh dari langkah pada butir 13, identifikasi sub unsur SPIP yang terkait kondisi BMN/D tersebut	- Asesor (Satker pengawasan)	Hasil Wawancara dan Analisis Dokumen	Analisis Dokumen	- KK 7	
15	Susun simpulan atas langkah kerja 1 sampai dengan 14 sesuai kriteria skor pada Kertas Kerja <i>Lead</i> III	- Asesor (Satker pengawasan)		Analisis Dokumen	- KK 7	
16	Isikan simpulan di atas pada KK <i>Lead</i> III	- Asesor (Satker pengawasan)	- KK 7	Analisis Dokumen	KK <i>Lead</i> III	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
17	Tuangkan hasil pengujian ke dalam <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	- Asesor (Satker pengawasan) - Koordinator Penilaian Mandiri	- KK 7 - KK Lead III		<i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	
B. PENJAMINAN KUALITAS						
Langkah Kerja:						
1	Dapatkan <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	APIP	<i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri	Analisis Dokumen		Personil APIP yang melakukan Penilaian Mandiri sebagaimana langkah kerja 1 s.d 11 Penilaian Mandiri di atas tidak boleh sama dengan personil APIP yang melakukan Penjaminan Kualitas
2	Dapatkan kertas kerja komponen pencapaian tujuan Pengamanan Aset Negara/Daerah (KK 7 dan KK Lead III), beserta data dukung kertas kerja tersebut	APIP	- KK 7 - KK Lead III	Analisis Dokumen	- KK 7 - KK Lead III	
3	Lakukan validasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP komponen pencapaian tujuan Pengamanan Aset Negara/Daerah dengan melakukan langkah kerja nomor 2 sampai dengan 17 pada langkah kerja Penilaian Mandiri	APIP	- KK 7 - KK Lead III	Analisis Dokumen dan Wawancara	- KK 7 - KK Lead III	
4	Berdasarkan langkah kerja di atas, lakukan validasi atas simpulan pada Kertas Kerja <i>Lead</i> III	APIP	- KK 7 - KK Lead III	Analisis Dokumen	- KK 7 - KK Lead III	
5	Perbaiki <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP sesuai hasil Penjaminan Kualitas	- APIP - Asesor (Satker pengawasan)	- KK 7 - KK Lead III - <i>Draft</i> Laporan	Analisis Dokumen	Laporan Hasil Penilaian Mandiri	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
6	Susun pernyataan bahwa proses dan hasil penilaian mandiri telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP	- APIP	Hasil Penilaian Mandiri - KK 7 - KK Lead III - Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri	Analisis Dokumen	Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas	
	4. KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
	Tujuan: Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian.					
	A. PENILAIAN MANDIRI					
1	Dapatkan Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, untuk 4 tahun terakhir	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku III LHP BPK-RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dinilai, untuk 4 tahun terakhir	Analisis Dokumen		
2	Rekapitulasikan temuan BPK-RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dalam 4 tahun terakhir	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku III LHP BPK-RI atas Kepatuhan terhadap	Analisis Dokumen	- KK 8	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
3	Uraikan secara ringkas substansi tiap butir temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Buku III LHP BPK-RI	- Asesor (Satker pengawasan)	Peraturan Perundang-undangan yang dinilai, untuk 4 tahun terakhir Buku III LHP BPK-RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Analisis Dokumen	- KK 8	
4	Uraikan secara ringkas penyebab tiap butir temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Buku III LHP BPK-RI	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku III LHP BPK-RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Analisis Dokumen	- KK 8	
5	Lakukan analisis apakah terdapat temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dengan penyebab yang signifikan yang dapat memengaruhi opini BPK dalam 4 tahun terakhir	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku III LHP BPK-RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Analisis Dokumen	- KK 8	
6	Berdasarkan hasil analisis pada butir 5 di atas, identifikasi subunsur SPIP yang terkait dengan penyebab temuan signifikan yang dapat memengaruhi opini BPK tersebut	- Asesor (Satker pengawasan)	Buku III LHP BPK-RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Analisis Dokumen	- KK 8	
7	Susun simpulan atas langkah kerja 1	- Asesor	Buku III LHP BPK-RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Analisis	- KK 8	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
8	sampai dengan 6 sesuai kriteria skor pada KK <i>Lead</i> III Isikan simpulan di atas pada KK <i>Lead</i> III	(Satker pengawasan) - Asesor (Satker pengawasan)	- KK 8	Analisis Dokumen	KK <i>Lead</i> III	
9	Tuangkan hasil pengujian ke dalam <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	- Asesor (Satker pengawasan) - Koordinator Penilaian Mandiri	- KK 8 - KK <i>Lead</i> III		<i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	
B. PENJAMINAN KUALITAS Langkah Kerja:						
1	Dapatkan <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	APIP	<i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian Mandiri	Analisis Dokumen		
2	Dapatkan kertas kerja komponen pencapaian tujuan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan (KK 8 dan KK <i>Lead</i> III), beserta data dukung kertas kerja tersebut	APIP	- KK 8 - KK <i>Lead</i> III	Analisis Dokumen	- KK 8 - KK <i>Lead</i> III	
3	Lakukan validasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP komponen pencapaian tujuan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dengan melakukan langkah kerja nomor 2 sampai dengan 8 pada langkah kerja Penilaian Mandiri	APIP	- KK 8 - KK <i>Lead</i> III	Analisis Dokumen dan Wawancara	- KK 8 - KK <i>Lead</i> III	
4	Berdasarkan langkah kerja di atas, lakukan validasi atas simpulan pada Kertas Kerja <i>Lead</i> III	APIP	- KK 8 - KK <i>Lead</i> III	Analisis Dokumen	KK <i>Lead</i> III	
5	Perbaiki <i>Draft</i> Laporan Hasil Penilaian	- APIP	- KK 8	Analisis	Laporan	

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
	Mandiri Maturitas SPIP sesuai hasil Penjaminan Kualitas	- Asesor	- KK Lead III - Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri	Dokumen	Hasil Penilaian Mandiri	
6	Susun pernyataan bahwa proses dan hasil penilaian mandiri telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP	- APIP	- KK 8 - KK Lead III - Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri	Analisis Dokumen	Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas	
	<p>*KETERJADIAN TINDAK PIDANA KORUPSI</p> <p>Tujuan: Mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor komponen Struktur dan Proses pada subunsur yang terkait</p> <p>Langkah Kerja:</p>					
1	Dapatkan informasi mengenai keterjadian korupsi yang berkaitan dengan K/L/D	APIP	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi dari Aparat Penegak Hukum; - LHP BPK; - LHP APIP K/L/D; - Informasi tambahan dari media 	Analisis Dokumen dan Wawancara		

No.	Komponen	Pelaksana	Sumber Informasi	Teknik Pengujian	Referensi	Keterangan
2	Lakukan analisis untuk mengidentifikasi apakah kejadian korupsi tersebut terkait dengan kelemahan pengendalian yang diselenggarakan oleh K/L/D	APIP	massa. - Informasi dari Aparat Penegak Hukum; - LHP BPK; - LHP APIP K/L/D; - Informasi tambahan dari media massa.	Analisis Dokumen dan Wawancara	- KK 8 - KK 4	
3	Berdasarkan analisis di atas, identifikasi subunsur SPIP yang terkait sebagai dasar pengurangan nilai untuk subunsur tersebut	APIP	- KK 8 - KK 4	Analisis Dokumen	KK Lead III	

I.4. Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Daftar Kertas Kerja:

1.	KKLEAD SPIP	PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP, MRI, DAN IEPK
2.	KKLEAD I_KL	PENETAPAN TUJUAN K/L
3.	KKLEAD I_PEMDA	PENETAPAN TUJUAN PEMDA
4.	KK 1.1	PENILAIAN KUALITAS SASARAN STRATEGIS K/L
5.	KK 1.2	PENILAIAN KUALITAS SASARAN STRATEGIS PEMDA
6.	KK 2	PENILAIAN KUALITAS STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS K/L/D
7.	KKLEAD II	STRUKTUR DAN PROSES
8.	KK 3.1	PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN (T1)
9.	KK 3.2	PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN (T2)
10.	KK 3.3	PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES PENGAMANAN ATAS ASET NEGARA/DAERAH (T3)
11.	KK 3.4	PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (T4)
12.	KK 4	PENALTI/PENGURANGAN NILAI
13.	KKLEAD III	PENCAPAIAN TUJUAN
14.	KK 5.1	PENILAIAN CAPAIAN <i>OUTCOME</i>
15.	KK 5.2	PENILAIAN CAPAIAN <i>OUTPUT</i>
16.	KK 6	PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN
17.	KK 7	PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN PENGAMANAN ATAS ASET NEGARA/DAERAH
18.	KK 8	PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. KK LEAD SPIP - PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP, MRI, DAN IEPK

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ... Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	...	50,00%		0,00		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	...	50,00%		0,00		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		0,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		0,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	...	3,75%		0,06		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	...	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	...	3,75%		0,06		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	...	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	...	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	...	3,75%		0,08		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	...	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	...	3,75%		0,07		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	...	10%		0,20		
Analisis Risiko (2.2)	...	10%		0,18		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	...	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	...	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	...	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	...	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	...	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	...	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	...	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	...	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	...	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	...	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	...	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	...	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	...	5%		0,14		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	...	7,50%		0,15		
Evaluasi Terpisah (5.2)	...	7,50%		0,13		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,119		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,636	
PENCAPAIAN TUJUAN						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	...	15%		0,45		
Capaian Output	...	15%		0,45		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	...	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	...	10%		0,30		
Keamanan Fisik	...	5%		0,15		
Keamanan Hukum	...	10%		0,20		

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ... Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	---	20%		0.40		
SUB JUMLAH HASIL		100.00%		2.70		
BOBOT HASIL			30.00%		0.81	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						1.446
NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)						1.24
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
PERENCANAAN	40.00%		0.00			
KUALITAS PERENCANAAN	40.00%	0.00	0.00			
KAPABILITAS	30.00%		0.57			
KEPEMIMPINAN	5.00%	1.65	0.08			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5.00%	2.00	0.10			
SUMBER DAYA MANUSIA	5.00%	2.00	0.10			
KEMITRAAN	2.50%	1.88	0.05			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12.50%	1.90	0.24			
HASIL	30.00%		0.67			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18.75%	1.77	0.33			
OUTCOMES	11.25%	3	0.34			
TOTAL	100.00 %		1.24			
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)						1.56
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI			
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		0.73			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9.60%	1.50	0.14			
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7.20%	1.50	0.11			
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7.20%	1.55	0.11			
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14.40%	1.55	0.22			
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9.60%	1.50	0.14			
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		0.59			
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9.00%	1.77	0.16			
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3.60%	1.95	0.07			
KEPEMIMPINAN ETIS	9.00%	1.55	0.14			
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7.20%	1.50	0.11			
IKLIM ETIS PRINSIP	7.20%	1.50	0.11			
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0.24			
INVESTIGASI	8.00%	1.50	0.12			
TINDAKAN KOREKTIF	8.00%	1.50	0.12			
TOTAL	100%		1.56			
KAPABILITAS APIP						3

2. KK LEAD I – PENETAPAN TUJUAN K/L

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN/LEMBAGA ...						
Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX						
Indeks KK No. : Disusun oleh/Tanggal : Direvisi oleh/Tanggal : Disetujui oleh/Tanggal :						
A. Kualitas Sasaran Strategis (KK 1)						
No	Uraian	Uraian pengukuran	KK	Kolom	Bobot	Skor Akhir
1	Sasaran Strategis K/L					
a	Sasaran Strategis Tepat	Sasaran Strategis berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis	1	G	40	... %
b	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	Indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil	1	H	30	... %
c	Target Kinerja Baik	Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target diatasnya	1	I	30	... %
	Skor Akhir Level					... %
						... *
B. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (KK 1 dan 2)						
1	Kualitas Program (Outcome) Unit Kerja Eselon I				100	0.00%
a	Keterkaitan dengan Sasaran Strategis K/L	Mengukur <i>cascading</i> kinerja dari sasaran strategis K/L ke sasaran program Unit kerja	1	S	30	... %
b	Sasaran Program Tepat	Sasaran Program berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis	2	E	30	... %
c	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	Indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil	2	F	20	... %
d	Target Kinerja Baik	Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target diatasnya	2	G	20	... %

No	Uraian	Uraian pengukuran	KK	Kolom	Bobot	Skor	Skor Akhir
2	Kualitas Kegiatan (Output) Eselon II				100		... %
	a	Keterkaitan dengan Sasaran Strategis Satker	2	M	30	... %	... %
	b	Kualitas sasaran Program Satker	2	N	30	... %	... %
	c	Kualitas indikator kinerja program Satker	2	O	20	... %	... %
	d	Kualitas target kinerja program Satker	2	P	20	... %	... %
		Skor Akhir Level					... %
							... *

***Gradasi Level**

1	51% s.d. 60%
2	61% s.d. 70%
3	71% s.d. 80%
4	81% s.d. 90%
5	91% s.d. 100%

Kriteria

1 Kualitas Sasaran

- a Sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsi organisasi
- b Berorientasi pada hasil
- c mempertimbangkan isu strategis
 - Terkait dengan isu strategis Nasional yang dianalisis dalam RPJMN
 - Menjadi bagian dari janji Presiden
 - Mendukung pencapaian prioritas nasional
 - Selaras dan sinergi dengan sasaran/program organisasi di atasnya
 - *Overlapping avoided* antar sasaran/program/kegiatan

2 Kualitas Indikator Kinerja

- a Spesifik (tidak bermakna ganda)
- b Dapat diukur secara obyektif
- c Relevan (dapat menggambarkan kondisi sasaran/program/kegiatan yang akan dicapai)

- d. *Overlapping avoided* antar sasaran/program/kegiatan
 - e. Berorientasi pada hasil
 - f. *Time-bound* (dapat dicapai dalam jangka tertentu)
 - g. *Continuous Improvement* (dievaluasi secara berkala untuk menilai kualitas dan kuantitas indikator)
- 3 Kualitas Target Kinerja**
- a. Spesifik (nilai dan satuan yang akan diukur tergambarkan secara akurat)
 - b. *Measurable* (nilai dan satuan dapat terukur dan dapat dibuktikan)
 - c. *Achievable* (penetapan target realistis dapat dicapai)
 - d. *Relevant* (mendukung pencapaian target indikator perencanaan di atasnya)
 - e. *Time-bound* (dapat dicapai dalam jangka tertentu)
 - f. *Continuous Improvement* (dievaluasi secara berkala untuk menilai kualitas dan kuantitas target)
 - g. Memperhatikan capaian tahun lalu
 - h. Proyektif (mampu menggambarkan rencana pencapaian target per periodenya secara terukur dan relevan)

3. KK LEAD I – PENETAPAN TUJUAN PEMDA

A. PENILAIAN PERENCANAAN KINERJA

Untuk memastikan Program/Kegiatan/Instansi Pemerintah dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka diperlukan perencanaan yang berorientasi hasil, terukur, fokus, dan strategis.

A. Kualitas Sasaran Strategis (Kertas Kerja 1 dan 2)

No	Uraian	Uraian pengukuran	KK	Kolom	Bobot	Skor	Skor Akhir
1	Sasaran Strategis Pemda				100		82.04%
	a	Sasaran Strategis Tepat	1	G	40	86.67%	34.67%
	b	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	1	H	30	78.95%	23.68%
	c	Target Kinerja Baik	1	I	30	78.95%	23.68%
2	Sasaran Strategis Satker				100		90.00%
	a	Keterkaitan dengan Sasaran Strategis Pemda	1	S	30	100%	30.00%
	b	Sasaran Strategis Tepat	2	E	30	100%	30.00%
	c	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	2	F	20	75%	15.00%
	d	Target Kinerja Baik	2	G	20	75%	15.00%
		Skor Akhir Level					86.02%
							4

B. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Kertas Kerja 2)

No	Uraian	Uraian pengukuran	KK	Kolo m	Bobot	Skor	Skor Akhir
1	Kualitas Program				100		90.00%
	a	Keterkaitan dengan Sasaran Strategis OPD	2	M	30	100.00 %	30.00%
	b	Kualitas sasaran Program OPD	2	N	30	100.00 %	30.00%
	c	Kualitas indikator kinerja program OPD	2	O	20	75.00%	15.00%
	d	Kualitas target kinerja program OPD	2	P	20	75.00%	15.00%
2	Kualitas Kegiatan				100		56.00%
	a	Keterkaitan dengan Sasaran Program	2	V	40	80.00%	32.00%
	b	Kualitas indikator kinerja Kegiatan	2	W	30	40.00%	12.00%
	c	Kualitas target kinerja kegiatan OPD	2	X	30	40.00%	12.00%
		Skor Akhir					73.00%
		Level					3

**Kriteria
1****Kualitas Sasaran**

- a Sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsi organisasi
- b Berorientasi pada hasil
- c mempertimbangkan isu strategis
 - Mendukung terwujudnya visi dan misi Pemda atau
 - Terkait dengan isu strategis Nasional/Daerah yang dianalisis dalam RPJMD
- Menjadi bagian dari janji Kepala Daerah
- Mendukung pencapaian prioritas nasional/provinsi
- Selaras dan sinergi dengan sasaran/program organisasi di atasnya

2 **Kualitas Indikator Kinerja**

- a Spesifik dan relevan (dapat menggambarkan secara akurat bagaimana sasaran/program/kegiatan dapat dicapai)
- b Realistis (mempertimbangkan kemampuan organisasi)
- c *Overlapping avoided* antar sasaran/program/kegiatan
- d Berorientasi pada hasil
- e *Time bound* (Dapat dicapai dalam jangka tertentu)
- f *Continuous Improvement* (dievaluasi secara berkala untuk menilai kualitas dan kuantitas indikator)

3 **Kualitas Target Kinerja**

- a Spesifik (nilai dan satuan yang akan diukur tergambar secara akurat)
- b *Measurable* (nilai dan satuan dapat terukur dan dapat dibuktikan)
- c *Achievable* (penetapan target realistis dapat dicapai)
- d *Relevant* (mendukung pencapaian target indikator perencanaan di atasnya)
- e *Time-bound* (dapat dicapai dalam jangka tertentu)
- f *Continuous Improvement* (dievaluasi secara berkala untuk menilai kualitas dan kuantitas target)
- g Memperhatikan capaian tahun lalu
- h Proyektif (mampu menggambarkan rencana pencapaian target per periodenya secara terukur dan relevan)

4. KK 1.1 – KUALITAS SASARAN STRATEGIS K/L

KERTAS KERJA PENILAIAN PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	SASARAN STRATEGIS K/L				KUALITAS SASARAN STRATEGIS			SASARAN PROGRAM UNIT KERJA SAMPEL				KUALITAS SASARAN PROGRAM UNIT KERJA SAMPEL					
	KODE SASARAN	URAIAN SASARAN STRATEGIS	KODE INDIKATOR KINERJA	URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK	TARGET KINERJA BAIK	KODE SASARAN	URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	NAMA SATKER	SASARAN PROGRAM TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK	TARGET KINERJA BAIK	KETERIKATAN DENGAN SASARAN STRATEGIS K/L
1				Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilihan dan pemilu	77,5%		Y	Y		Meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya	Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri akibat radikal, isu separatisme, ekonomi sergokta Jahan dan sumber daya alam	kurang dari atau sama dengan 20 peristiwa					Y
		Terpeliharanya persatuan dan keamanan bangsa, serta politik dalam negeri		Indeks Kinerja Cemas	Skor 60	Y	Y	Y		Terpeliharanya kerukunan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah konflik berskala menengah atau SARA	kurang dari atau sama dengan 5 peristiwa					T
				Penurunan peristiwa konflik sosial setiap tahunnya	≤ 83 Peristiwa		Y	Y		Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila	Presentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu	75,50%					Y
2		Peningkatan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat		Peningkatan indeks demokrasi Indonesia	Skor 75		Y	Y									
				Jumlah Pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	270 daerah		Y	Y									
				Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	34 Provinsi	Y	T	T									
				Perataan Kelengkapan dan Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai PP 18 Tahun 2016	34 Provinsi		T	T									
3		Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan perencanaan		Peningkatan kualitas pelayanan dan pendudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan	548 Daerah	Y	Y	Y		Memperbaiki Kualitas Database Kependudukan Nasional Sebagai Dasar Perhitungan Dokumen	Penyelesaian database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua	34 Provinsi dan 514 Kab/Kota					Y

NO	SASARAN STRATEGIS K/L				SASARAN PROGRAM UNIT KERJA SAMPEL				KUALITAS SASARAN PROGRAM UNIT KERJA SAMPEL				KETERIKATAN DENGAN SASARAN STRATEGIS K/L			
	KODE SASARAN	URAIAN SASARAN STRATEGIS	KODE INDIKATOR KINERJA	URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK	TARGET KINERJA BAIK	KODE SASARAN	URAIAN SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA		NAMA SATKER	SASARAN PROGRAM TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK
		spit, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya		nasional yang akurat						Keperluan, Pelayan Publik dan Pembangunan Nasional serta Mendukung Penyelenggaraan Pemili/Pemilukada.	kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal					
				Peningkatan pemantauan MIK, Database Keperluan dan KTP-el oleh lembaga peraguna Pusat	42 K/L		Y	Y			Meningkatkan pemantauan MIK, Database Keperluan dan KTP-el oleh Lembaga Peraguna Pusat	21 K/L (Komisariat)				
				Penyediaan DPM untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemili/Pemilukada Serentak	270 daerah		Y	Y			Meningkatkan kualitas pelayanan keperluan dan perencanaan sipi di semua Kabupaten/kota	514 Kab/Kota				
4		Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		Jumlah daerah yang menerapkan SPM	34 Provinsi					Meningkatnya kualitas pembangunan daerah yang merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional	Persentase konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	50%				Y
				Jumlah daerah yang telah menyusun dokumen perencanaan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	5 Provinsi	Y	Y	T			Persentase / Jumlah daerah yang menyelenggarakan SIPD	20% (5 Provinsi)				
				Jumlah daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai	34 Provinsi		Y	T			Persentase penyelesaian persesuaian antar susunan tingkat pemerintahan terkait dengan	100%				

5. KK 1.2 – KUALITAS SASARAN STRATEGIS PEMDA

KERTAS KERJA PENILAIAN PERENCANAAN KINERJA PEMDA

NO	SASARAN STRATEGIS K/L/D				KUALITAS SASARAN STRATEGIS				SASARAN STRATEGIS SATKER SAMPEL				KUALITAS SASARAN STRATEGIS SATKER SAMPEL				KETERKAITAN DENGAN SASARAN STRATEGIS K/L/D
	KODE SASARAN	URAIAN SASARAN STRATEGIS	KODE INDIKATOR KINERJA	URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK	TARGET KINERJA BAIK	KODE SASARAN	URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	NAMA SATKER	SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK	TARGET KINERJA BAIK	
1		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas		Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesian Governance Index/IGI)	7,5	Y	Y	Y									
2		Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi		Umur Harapan Hidup	73,6	Y	Y	Y									
3		Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas		Angka Harapan Lama sekolah	15,29	Y	Y	Y									
4		Turunan Jumlah Masyarakat Kurang Mampu		Angka Kemiskinan	10,86	Y	Y	Y									
5		Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas		Pertumbuhan Ekonomi	5,45	Y	Y	Y									
				Pemerataan pendapatan (gbr/ratio)	0,39	Y	Y	Y									
6		Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul		Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	22%	Y	Y	Y		Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah kunjungan wisatawan Lama tinggal wisatawan	4.445.781 orang	Dinas Pariwisata			Y	
						Y	Y	Y		Meningkatnya pemberdayaan dan pertumbuhan Budaya Daerah	Jumlah Desa Budaya	14 Desa	Dinas Pariwisata			Y	
						Y	Y	Y		Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya Volume sampah yang tertangani	24%	Dinas Kebudayaan			Y	
						Y	Y	Y		Meningkatnya Kualitas Sarana dan prasarana publik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	74,58%	Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman			Y	
7		Terciptanya industri kreatif yang berkualitas		Cakupan industri kreatif	45	Y	T	T									

NO	SASARAN STRATEGIS K/L/D				KUALITAS SASARAN STRATEGIS				SASARAN STRATEGIS SATKER SAMPEL				KUALITAS SASARAN STRATEGIS SATKER SAMPEL				
	KODE SASARAN STRATEGIS	URAIAN SASARAN STRATEGIS	KODE INDIKATOR KINERJA	URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK	TARGET KINERJA BAIK	KODE SASARAN	URAIAN SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	NAMA SATKER	SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK	TARGET KINERJA BAIK	KETERLAIHAN DENGAN SASARAN STRATEGIS N/L/D
8		Terperuhnya kebutuhan pangan masyarakat		Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0.102		Y	Y									
				Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	1.08		Y	Y									
				Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0.25	Y	Y	Y									
				Pertumbuhan produksi daging Isarti, kambing, domba, kuda, unggas	0.8		Y	Y									
9		Terperuhnya kebutuhan perbaikan masyarakat sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat		Pertumbuhan produksi perikanan	1.4	Y	Y	Y									
10		Terperuhnya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	76	Y	Y	Y									
11		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56	Y	Y	Y									
12		Terciptanya kesadaran masyarakat dalam Bessiposagastu bencana		Desa Tangguh Bencana	38.66	Y	Y	Y									
13		Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang		Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	72.66	Y	T	T									
14		Terwujudnya ketertarikan dan ketertiban masyarakat		Angka Kriminalitas	0.03	T	T	T									
15		Terwujudnya pedatarian dan pengembangan budaya daerah		Indeks Pembangunan Kebudayaan	6.5	T	T	T									
					13	13	15	15									6
					15	15	19	19									6
					86.67%	78.95%	78.95%	78.95%									100.00%

6. KK 2 - SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN K/L/D

KERTAS KERJA PENILAIAN PERENCANAAN KINERJA
OPD PADA PEMERINTAH DAERAH

Dinas Pariwisata

NO	SARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KUALITAS SASARAN STRATEGIS		NO PROGRAM	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET PROGRAM	KUALITAS PROGRAM			NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR TARIK	KUALITAS KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI (OPSIONAL)
				SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT						SASARAN PROGRAM TEPAT	IK TEPAT	TARGET KINERJA BAIK					HETEROGENITAS PROGRAM	IK TEPAT		
1	Meningkatkan daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	4.445.763 orang	Y	Y	1	Program pengembangan pariwisata lokal	Sasaran Program pengembangan pariwisata lokal	Jumlah pengunjung wisatawan	3 juta	Y	Y	1	Pengembangan destinasi wisata	Jumlah objek wisata	4 objek	Y	Y			
		Lama tinggal wisatawan	2 hari	Y	Y								2	Peningkatan daya tarik wisata	Jumlah area wisata	10 buah	Y	Y			
						2	Program peningkatan kualitas destinasi wisata	Sasaran Program peningkatan kualitas destinasi wisata	Jumlah area wisata	3 juta	Y	Y	1	Pengembangan destinasi wisata	Jumlah area wisata	10 objek	Y	Y			
						3	Program pengembangan pariwisata perbatasan	Sasaran Program pengembangan pariwisata perbatasan	Cherry (1) perbatasan perbatasan	70%	Y	Y	2	Pengembangan pariwisata perbatasan	Jumlah pengunjung perbatasan	4) perbatasan	Y	Y			
				100,00%	50,00%	50,00%					100,00%	100,00%	100,00%					40,00%	40,00%		

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman

NO	SARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KUALITAS SASARAN STRATEGIS		NO PROGRAM	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET PROGRAM	KUALITAS PROGRAM			NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR TARIK	KUALITAS KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI (OPSIONAL)
				SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT						SASARAN PROGRAM TEPAT	IK TEPAT	TARGET KINERJA BAIK					HETEROGENITAS PROGRAM	IK TEPAT		
1	Meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat	Pemantauan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat	0,7538	Y	Y		Program C1	Sasaran Program C1	IK Program C1	20%	Y	Y	1	Pengawasan lingkungan	IK	40	Y	Y			
													2	Pengawasan lingkungan	IK	50	Y	Y			
				100,00%	100,00%	100,00%					100,00%	100,00%	100,00%					50,00%	50,00%		

Nilai Total

NO	SARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KUALITAS SASARAN STRATEGIS		NO PROGRAM	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET PROGRAM	KUALITAS PROGRAM			NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR TARIK	KUALITAS KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI (OPSIONAL)
				SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT						SASARAN PROGRAM TEPAT	IK TEPAT	TARGET KINERJA BAIK					HETEROGENITAS PROGRAM	IK TEPAT		
				100,00%	100,00%	100,00%					100,00%	100,00%	100,00%					40,00%	40,00%		

7. KK LEAD II – STRUKTUR DAN PROSES

KERTAS KERJA HASIL PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			2E NILAI	KEUANGAN NILAI	ASET NILAI	KETAATAN NILAI	KESIMPULAN NILAI	VETO (YA/TIDAK)	NILAI AKHIR
				SPIP	MRI	IEPK							
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika					2	2	3	3	2.5	YA	1.50	
1.1		1	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan aset Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku	SPIP	-	-	2	2	3	3	2.5		1.50
1.1		2	Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup penyusunan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi	SPIP	-	IEPK				3	3		1.50
1.1		3	Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons.	SPIP	-	IEPK				3	3		1.50
1.1		4	Unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi yang memicu perilaku korupsi	SPIP	-	IEPK				3	3		1.50
1.1		5	Integritas organisasional yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja	SPIP	-	IEPK				3	3		1.50
1.1		6	Terdapat persepsi bersama bahwa yang	SPIP	-	IEPK				3	3		1.50

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			2E NILAI	KEUANGAN NILAI	ASET NILAI	KETAATAN NILAI	KESIMPULAN NILAI	VETO (YA/TIDAK)	NILAI AKHIR
				SPIP	MRI	IEPK							
			dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional										
1.1		7	Kejadian korupsi/perilaku koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang kompeten dan independen	SPIP	-	IEPK			3	3		1.50	
1.1		8	Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalam organisasi berupa pemastian peneraan sanksi dan perbaikan melalui pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian.	SPIP	-	IEPK			3	3		1.50	
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi						3	3	3	3	3	3.00	
1.2		1	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	SPIP	-	-	3	3	3	3	3	3.00	
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif						2.5	2.5	2.714285714	2.553571429	YA	1.55	
1.3		1	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	3	3	3	3	3	1.55	
1.3		2	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	SPIP	MRI	-	2	2	2	2	2	1.55	
1.3		3	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	SPIP	MRI	-	3	3	3	3	3	1.55	
1.3		4	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	SPIP	MRI	-	2	2	2	2	2	1.55	
		5	Program antikorupsi didukung dengan penyediaan alokasi sumberdaya secara eksplisit secara memadai, baik anggaran, personal, dan sarana prasarana	SPIP	-	IEPK			3	3	3	1.55	
		6	Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak	SPIP	-	IEPK			3	3	3	1.55	

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			2E NILAI	KEUANGAN NILAI	ASET NILAI	KETAATAN NILAI	KESIMPULAN NILAI	VETO (YA/TIDAK)	NILAI AKHIR
				SPIP	MRI	IEPK							
		7	membarkan/ mengabaikan) Pimpinan mendorong bawahan untuk mengikutinya melalui atensi yang diberikan di berbagai kesempatan, keterbukaan dan transparansi, reinforcement, perlakuan adil, dan pengambilan keputusan yang menyertakan pertimbangan etis.	SPIP	-	IEPK				3	3		1.55
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan						3	3	3	3	3	TIDAK	3.00
1.4		1	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keandalan laporan keuangan Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keamanan aset Dalam Struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal.	SPIP	-	-	3	3	3	3	3		3.00
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat						3	3	3	3	3	YA	2.00
1.5		1	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian pencapaian tujuan organisasi. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab memperhatikan benturan kepentingan	SPIP	-	-	3	3	3	3	3		2.00
1.6	Penyusunan dan Penerapan						3	3	3	3	3	YA	2.00

Kode	Uraian Subnsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			2E NILAI	KEUANGAN NILAI	ASET NILAI	KETAATAN NILAI	KESIMPULAN NILAI	VETO (YA/TIDAK)	NILAI AKHIR
				SPIP	MRI	IIEPK							
	Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM												
1.6		1	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	SPIP	-	-	3	3	3	3	3		2.00
1.6		2	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	SPIP	MRI	-	3	3	3	3	3		2.00
1.6		3	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	SPIP	MRI	-	3	3	3	3	3		2.00
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif						3	3	3	3	3	YA	2.00
1.7		1	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi	SPIP	-	-	3	3	3	3	3		2.00
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait						2.5	3	3	3	2.875	YA	1.88
1.8		1	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	2	3	3	3	2.75		1.88
1.8		2	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	SPIP	MRI	-	3	3	3	3	3		1.88
2.1	Identifikasi Risiko						2	2	2	2	2	YA	1.00
2.1		1	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	SPIP	MRI	-	2	2	2	2	2		1.00
2.1		2	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	SPIP	MRI	-	2	2	2	2	2		1.00
2.1		3	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	SPIP	MRI	-	2	2	2	2	2		1.00
2.2	Analisis Risiko						2.8	2.8	2.8	2.67	2.77	YA	1.77
2.2		1	Seluruh risiko telah dianalisis dampak	SPIP	MRI	-	3	3	3	3	3		1.77

Kode	Uraian Subnsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			2E NILAI	KEUANGAN NILAI	ASET NILAI	KETAATAN NILAI	KESIMPULAN NILAI	VETO (YA/TIDAK)	NILAI AKHIR
				SPIP	MRI	IEPK							
			dan tingkat keterjadiannya										
2.2		2	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	SPIP	MRI	-	3	3	3	3	3		1.77
2.2		3	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	SPIP	MRI	-	3	3	3	3	3		1.77
2.2		4	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	SPIP	MRI	-	3	3	3	3	3		1.77
2.2		5	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	SPIP	MRI	-	2	2	2	2	2		1.77
		6	Analisis dan asesmen risiko telah dilakukan dan menghasilkan rancangan tindak pengendalian untuk memitigasi risiko korupsi yang sudah terpetakan	SPIP	-	IEPK				2	2		1.77
3.1	Reviu atas Kinerja						3	3	3	3	3	TIDAK	3.00
3.1		1	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-							
3.2	Pembinaan SDM						3	3	3	3	3	YA	2.00
3.2		1	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	3	3	3	3	3		2.00
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi						3	3	3	3	3	TIDAK	3.00
3.3		1	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	SPIP	-	-	3	3	3	3	3		3.00
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset						3	3	3	3	3	YA	2.00
3.4		1	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna	SPIP	-	-	3	3	3	3	3		2.00

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			2E NILAI	KEUANGAN NILAI	ASET NILAI	KETAATAN NILAI	KESIMPULAN NILAI	VETO (YA/TIDAK)	NILAI AKHIR
				SPIP	MIRI	IEPK							
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja		dalam rangka mendukung kinerja organisasi.										
3.5		1	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	SPIP	-	-	3	3	3	3	3	TIDAK	3.00
3.6	Pemisahan Fungsi												
3.6		1	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	SPIP	-	-	3	3	3	3	3		3.00
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting												
3.7		1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	SPIP	-	-	3	3	3	3	3	YA	2.00
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian												
3.8		1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	SPIP	-	-	3	3	3	3	3	YA	2.00
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan												
3.9							3	3	3	3	3	YA	2.00

Kode	Uraian Subnsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			2E NILAI	KEUANGAN NILAI	ASET NILAI	KETAATAN NILAI	KESIMPULAN NILAI	VETO (YA/TIDAK)	NILAI AKHIR
				SPIP	MRI	IEPK							
3.9	Pencatatannya	1	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya	SPIP	-	-	3	3	3	3	3	2.00	
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya						3	3	3	3	YA	2.00	
3.10		1	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	3	3	3	3	3	2.00	
3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting						3	3	3	3	YA	2.00	
3.11		1	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	SPIP	-	-	3	3	3	3	3	2.00	
4.1	Informasi yang Relevan						3	3	2.8	2.95	YA	1.95	
4.1		1	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	SPIP	-	-	3	3	3	3	3	1.95	
4.1		2	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	SPIP	MRI	-	3	3	3	3	3	1.95	
4.1		3	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	SPIP	MRI	-	3	3	3	3	3	1.95	
4.1		4	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	SPIP	MRI	-	3	3	3	3	3	1.95	
		5	Saluran pelaporan internal dikelola secara kredibel dalam menerima pelaporan dan memberikan perlindungan kepada pelapor sehingga kepercayaan meningkat dan memberikan	SPIP	-	IEPK				2	2		1.95

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter		2E NILAI	KEUANGAN NILAI	ASET NILAI	KETAATAN NILAI	KESIMPULAN NILAI	VETO (YA/TIDAK)	NILAI AKHIR
				SPIP	MR							
			efek pengantar yang efektif.									
4.2	Komunikasi yang Efektif					3	3	2	3	2.75	TIDAK	2.75
4.2		1	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	SPIP	-	3	3	2	3	2.75		2.75
5.1	Pemantauan Berkelanjutan					3	3	3	3	3	YA	2.00
5.1		1	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	SPIP	-	3	3	3	3	3		2.00
5.1		2	Proses manajemen risiko telah direvisi	SPIP	MR	3	3	3	3	3		2.00
5.1		3	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	SPIP	MR	3	3	3	3	3		2.00
5.2	Evaluasi Terpisah					3	3	2.5	2.5	2.75	YA	1.75
5.2		1	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	SPIP	-	3	2	1	2	2		1.75
5.2		2	Terdapat review independen terhadap proses manajemen risiko	SPIP	MR	3	3	3	3	3		1.75

8. KK 3.1 – STRUKTUR DAN PROSES T1

KERTAS KERJA HASIL PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES
TUJUAN 1: EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI

Kode	Uraian Submisi	No	Uraian Parameter	Kode Parameter				Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 IKIP				Keatingan dan Akhir Y/T		
				SP1P	MR1	IEPK	da d				Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4		Unit/OPD.... (n)	
1.1	Pemegakan Integritas dan Nilai Etika									Uraian Hasil Pengujian	Uraian Hasil Pengujian	Uraian Hasil Pengujian	Uraian Hasil Pengujian	Uraian Hasil Pengujian	Uraian Hasil Pengujian	Uraian Hasil Pengujian	
		J	K/L/D mengabdikan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	SP1P	-	-	A	<p>Kejelasan integritas dan nilai etika telah diperbaiki secara berkelanjutan sehingga tercipta suasana kerja organisasi yang kondusif yang dapat mendorong kinerja para pegawai secara optimal</p> <p>Kebijakan dan implementasi organisasi telah dievaluasi untuk meningkatkan integritas dan nilai etika para pegawai</p>	<p>- Setiap individu dalam organisasi dapat menyadari penerapan nilai nilai organisasi</p> <p>- Setiap individu menaati hukum pencapaian kinerja organisasi</p> <p>- Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dihubungkan dengan integritas dan perilaku individu serta mempengaruhi resiliensi individu</p>	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
				SP1P	-	-	B	<p>Kebijakan dan implementasi organisasi telah dievaluasi untuk meningkatkan integritas dan nilai etika para pegawai</p>	<p>Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkala - Terbukurasi - Dilakukan untuk menangani residual risk - Hasil evaluasi telah dimchek impact - Perbaikan telah menghasilan kinerja yang lebih baik 	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
				SP1P	-	-	C	<p>Pemegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam organisasi</p>	<p>- Terdapat wujud keteladanan dan pimpinan atas nilai organisasi</p> <p>- Terdapat praktik pembangunan integritas dan nilai etika</p> <p>- Terdapat praktik pemegakan nilai etika</p> <p>- Terdapat bukti pemegakan disiplin pegawai yang aclairggar dan reward bagi pegawai yang mengakkan integritas dan nilai etika</p> <p>- Proses tersebut di atas dilaksanakan melalui struktur dan mekanisme yang ditetapkan</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Belum ...	Bahwa ... Belum ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Y
				SP1P	-	-	D	<p>Kebijakan pemegakan integritas dan nilai etika organisasi telah dipantau oleh seluruh pegawai</p>	<p>Kebijakan telah dikomunikasikan dan dipahami oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan (terukur) - Pemangkuwawab pemegakan integritas dan nilai etika - Pegawai 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Y
				SP1P	-	-	E	<p>Terdapat kebijakan pemegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi</p>	<p>Kebijakan telah mengacu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kriteria/jaminan - Upaya pembangunan integritas - Nilai etika - Pemegakan disiplin - Pemberian reward and punishment - Penerapan struktur dan mekanisme pemegakan integritas dan nilai etika 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Y
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi						A	Pengalaman		W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
			Tugas dan	SP1P	-	-	A	Pengalaman		W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	

Kode	Uraian Subunit	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gru d	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... [n]	Kesteg uan Akhir Y/T	
				SPTP	MRE	IEPK					Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T			
							istara dan berupaya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian yang kondusif	3. Tidak lanjut atas hasil evaluasi telah dilaksanakan; b. Pimpinan organisasi terbukti atas masalah dan pegawai dan adapal terdapat perubahan; c. Keahlian dan penguat atau keterbatasan/masalah sumberdaya dukungan pelaksanaan pekerjaan dapat diatasi;	W/D/O	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaBelum ...	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	Y	Y	Y
						C	Pimpinan organisasi melaksanakan kebijakan dan dukungan dengan SDM yang bekerja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan	a. Pimpinan organisasi menerapkan manajemen berbasis kinerja dan terus pertumbuhkan risiko dalam pengembalaan perusahaan; b. Pimpinan organisasi berusaha keadaannya dalam beretika, bertanggung jawab terhadap perundang-undangan, dan berkinerja secara efektif dan efisien; c. Pegawai menaungi pengaitan organisasi dengan hadir dan bekerja sesuai dengan ketentuan.	W/D/O	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	Y	Y	
						D	Pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan dan pencapaian kebijakan yang mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, serta memahami, menguasai kebijakan pengendalian intern dan menerapkan kebijakan dalam berbagai interaksi kepada jajaran di bawahnya	a. Pimpinan organisasi telah membuat substansi dari kebijakan yang telah ditetapkan; b. Pimpinan organisasi mengarahkan pegawai agar dapat bekerja selaras dengan kebijakan, antara: 1. tepat sasaran; 2. amanah/tepat; 3. tepat dan baik/jam; penguasaan; 4. interaktif efektif.	W/D/O	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	Y	Y	Y
						E	Pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan dan pencapaian kebijakan yang mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi	Pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan kebijakan yang mendukung organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi, antara lain kebijakan terkait manajemen kinerja, manajemen keuangan dan aset, manajemen SDM, serta manajemen risiko.	W/D/O	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	Y	Y	Y
3	Pimpinan K/L/D mengidentifikasi sumber daya untuk pencapaian manajemen risiko					A	Sudah mengidentifikasi sumber daya secara memadai untuk pemertan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja, strategi unit kerja, dan strategi K/L/D	a. Instansi Pemerintah telah mengorganisasi dan implementasi manajemen risiko seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RFP, kegiatan monitoring dan review dalam rencana kerja/DPA/DIPA dan dalam implementasi manajemen risiko tidak terkendala pelaksanaan dan implementasi; ditingkat operasional unit kerja, strategi unit kerja, dan strategi K/L/D b. Minimal 70% SDM yang menjadi anggota UPK pada tingkat operasional dan	W/D/O	T		T		T		T		T		T	

Kode	Usaian Bubungan	No	Urutan Parameter	Kode Parameter			Garis	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SRP				Kesteguhan Akhir Y/T
				SRP	MRE	IEPK					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4	
								strategis unit kerja serta strategi K/L/D diisi oleh orang yang berkompoten dalam bidang manajemen risiko.							
				MRE	-	B	Sudah mengidentifikasi sumber daya secara memadai untuk persiapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja namun pada tingkat strategis K/L/D belum memadai	<p>a. Instansi Persemaian telah mengorganisasi dan implementasi manajemen risiko seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan review dalam rencana kerja/DPA/DIPA dan dalam implementasi manajemen risiko tidak terdapat kekurangan dan strategi unit kerja namun masih terdapat kekurangan dan pada tingkat strategis K/L/D dan anggota UPR pada tingkat operasional dan strategis unit kerja diisi oleh orang yang berkompoten dalam bidang manajemen risiko.</p>	W/D/O						
				MRE	-	C	Sudah mengidentifikasi sumber daya secara memadai untuk persiapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja	<p>a. Instansi Persemaian telah mengorganisasi dan implementasi manajemen risiko seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan review dalam rencana kerja/DPA/DIPA dan dalam implementasi manajemen risiko tidak terdapat kekurangan dan strategi unit kerja namun masih terdapat kekurangan dan pada tingkat strategis K/L/D dan anggota UPR pada tingkat operasional dan strategis unit kerja diisi oleh orang yang berkompoten dalam bidang manajemen risiko.</p>	W/D/O	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Belum ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	
				MRE	-	D	Sudah mengidentifikasi sumber daya secara memadai untuk persiapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja namun pada tingkat strategis unit kerja belum memadai	<p>a. Instansi Persemaian telah mengorganisasi dan implementasi manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan review dalam rencana kerja/DPA/DIPA secara memadai, namun belum memadai pada tingkat strategis unit kerja dan/atau</p> <p>b. Kurang dari 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional unit kerja diisi oleh orang yang berkompoten dalam bidang manajemen risiko.</p>	W/D/O	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	
				MRE	-	E	Sudah mengidentifikasi sumber daya untuk persiapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja namun belum memadai	<p>a. Instansi Persemaian telah mengorganisasi dan implementasi manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan review dalam rencana kerja/DPA/DIPA namun belum memadai, dan/atau</p> <p>b. Kurang dari 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional unit kerja diisi oleh orang yang berkompoten dalam bidang manajemen risiko.</p>	W/D/O	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	
		3	Pengukuran			A	Seluruh	Sesuai ketentuan pencapaian prestasi.	W/D/O						

Kode	Uraian Substruktur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Orisinal	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SRP				Kesteguhan Akhir Y/T				
				SRP	MRE	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
			K/L/D menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan					penambilan keputusan strategis K/L/D, strategi unit kerja, dan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko dan memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi											
				SRP	MRE	-	B	Seluruh penambilan keputusan strategis K/L/D, strategi unit kerja, dan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko	Seluruh keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara umum menggunakan informasi terkait risiko di tingkat operasional dan strategi unit kerja	W/D/O						Y			
				SRP	MRE	-	C	Seluruh penambilan keputusan strategis unit kerja dan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko	Seluruh keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara risiko di tingkat operasional dan strategi unit kerja	W/D/O							Y		
				SRP	MRE	-	D	Seluruh penambilan keputusan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko	Seluruh keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara risiko di tingkat operasional	W/D/O								Y	
				SRP	MRE	-	E	Seluruh penambilan keputusan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko	Seluruh keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara risiko di tingkat operasional	W/D/O								Y	
			4	4	SRP	MRE	-	A	Kinerja pencapaian manajemen risiko diuraikan sebagai dasar penilaian kinerja UFR terhadap tingkatkan operasional unit kerja, seluruh UFR tingkatkan strategis unit kerja, dan UFR tingkatkan strategi K/L/D secara memadai dan telah diwujudkan	Kinerja pencapaian manajemen risiko sudah digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan UFR tingkatkan strategis K/L/D, seluruh UFR tingkatkan operasional unit kerja secara tepat, telah diukur pencapaiannya, serta diwujudkan pencapaiannya	W/D/O							Y	
				SRP	MRE	-	B	Kinerja pencapaian manajemen risiko diuraikan sebagai dasar penilaian kinerja UFR terhadap tingkatkan operasional unit kerja, seluruh UFR	Kinerja pencapaian manajemen risiko sudah digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan UFR tingkatkan strategis K/L/D, seluruh UFR tingkatkan operasional unit kerja secara tepat dan telah diukur pencapaiannya	W/D/O								Y	

Kode	Usaian Bubar	No	Uraian Parameter	Kode Parameter				Car a Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SRP												Kestrop ulan Akhir Y/T
				SRP	MRE	LEPK	Gru d		Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... [n]				
									Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T			
							C	Kriteria Struktur organisasi diadopsi sesuai proses bisnis organisasi dengan SUM yang mencakup	Penjelasan - Struktur organisasi telah dimodifikasi dengan implementasi/pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai proses bisnis; - Proses bisnis telah dijabarkan dengan SOP - Organisasi telah menetapkan kebijakan/SOP yang mengatur manajemen hubungan dan jejaring pelaporan internal/atas dan informasi. - Organisasi telah memetakan kebutuhan pegawai untuk mendukung proses bisnis yang diantaranya mengatur anggaran yang sesuai dengan rencana anggaran dan sumber daya.	W/D/O	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
							D	Kriteria Pemisahan tugas dan tanggung jawab	Penjelasan a. Struktur organisasi dan tata laksana sesuai dengan proses bisnis yang ditetapkan dengan pemertimbangan: - Uraian dan sifat kegiatan. - Faktor faktor yang meliputi pertimbangan strategis/operasional organisasi. - Struktur organisasi harus mampu memfasilitasi arus informasi di dalam organisasi. b. Struktur organisasi dan tata laksana telah diformulasikan dan dipaparkan.	W/D/O	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
							E	Kriteria Terdapat struktur tugas dan fungsi organisasi	Penjelasan Adanya struktur organisasi dan tata laksana yang disusun yang mengacu kepada peraturan terkait.	W/D/O	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y		
1.5	Pendelegasi an Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat																				
		1	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tugasnya untuk melakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi				A	Kriteria Mintan organisasi memiliki akses untuk melihat proses pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab yang diberikan dan memonitor pelaksanaan tugas fungsi yang dijalankan untuk pencapaian tujuan organisasi yang mencakup dan meniadakan perburuan secara bertahap.	Penjelasan a. Terdapat tools untuk memonitor pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab yang diberikan secara berjangka dan memonitor pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab kepada jejaring di atasnya. b. Keseluruhan akses memonitor pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab telah dilaksanakan sebelum menjadi prosedur yang ditetapkan; c. peretinan mendefinisikan/ stakeholder memberikan feedback yang baik atas kesempatan erapan implementasi terhadap kebutuhan mereka.	W/D/O	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
							B	Kriteria Efektivitas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab organisasi yang dapat dilihat melalui evaluasi berkala atas	Penjelasan Organisasi melakukan evaluasi atas kebijakan/prosedur terkait pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab beserta implementasinya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Telah dilaksanakan evaluasi berkala; b. Evaluasi dilaksanakan untuk memantau residual risk; c. Tindak lanjut atas hasil evaluasi telah dilaksanakan.	W/D/O	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y

Kode	Uraian Subunit	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Orisinal	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SRP				Kestegulan Akhir Y/T				
				SPT	MRE	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
							pelaksanaan perencanaan dan tanggungjawab serta analisis terhadap kinerja hasil pelaksanaan tugas/fungsi yang dilaksanakan (respon stakeholder)	d. Merindukanjitu telah/terkandung kualitas pelaksanaan tugas fungsi yang disampaikan oleh stakeholder.											
						C	Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/prosedur yang ditetapkan	a. Tugas fungsi dan program/kegiatan telah dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan perencanaan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam kebijakan/prosedur yang ditetapkan; b. Pihak pihak yang menerima penelenggaraan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur dan menyempatkan pelaporan kepada pihak yg memberikan wewenang secara berkala sesuai kebutuhan.											
						D	Regulasi/prosedur yang dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan kepada seluruh dibawahnya telah diketahui dan diketahui oleh pihak terkait	a. Kebijakan/prosedur yang mengatur pelaksanaan penelenggaraan wewenang dan tanggung jawab telah dipahami oleh pegawai yang berkepentingan. b. Kebijakan/prosedur yang mengatur pelaksanaan penelenggaraan wewenang dan tanggung jawab telah diketahui oleh kepala seluruh program dan stakeholder.											
						E	Peraturan organisasi dan kebijakan teknis yang wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan berada struktur di bawahnya secara berjenjang	Organisasi memiliki kebijakan/prosedur yang mengatur pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas fungsi dan program/kegiatan dalam organisasi yang meliputi pencapaian tujuan organisasi yang meliputi antara lain: - Prosedur pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab yang diklasifikasi; - Alur hubungan vertikal serta horizontal dan pelaksanaan masing masing penelenggaraan wewenang dan tanggung jawab; - Kewajiban dan pertanggungjawaban pihak yang diberikan wewenang kepada pihak yang memberikan wewenang.											
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM														3				
							Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	Pertemuan berkegiatan telah dilaksanakan: - Penghasilan SDM telah berhasil meningkatkan kinerja yang memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi - Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dibandingkan dengan penghasilan SDM nya - Penghasilan SDM mampu meningkatkan kepuasan kerja pegawai.											
						A	Penghasilan SDM telah diperoleh secara berkelanjutan dan secara optimal namun perlu mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi												
						B	Kebijakan dan	Kebijakan dan implementasi telah.											

Kode	Uraian Subunit	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gru d	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesteg ulan A/B/C Y/T				
				SPP	MRE	LEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujia n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujia n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
							<p>impkmentasi terkait pengelolaan SDM organisasi lebih devolusi sehingga dapat diartikan efektivitasnya</p> <p>Pengelolaan SDM telah dilaksanakan sejak rekrutmen sampai dengan pemberibntan pegawai sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan</p>	<p>dewolusi dengan ketetapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkala Terdokumentasi Dibebaskan untuk menomngi residual risk Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti Perubahan telah menggunakan kinerjanya yang lebih baik <p>- Pengelolaan SDM dibebaskan sesuai dengan kebijakan/prosedur yang ditetapkan</p> <p>- Pengelolaan SDM dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun</p> <p>- Terlihat dibebaskan kewenangan yang apatir dan handal yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan</p> <p>- Pengelolaan SDM dibebaskan sebagai upaya untuk menomngi risiko yang dibebaskan kearahkan SIM/Mem</p>	W/D/O	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaBelum ...	Y	BahwaTelah ...	Y	Y		
						D	<p>Kebijakan terkait pengelolaan SDM telah dilaksanakan dan dipantau oleh pihak yang bertanggung jawab organisasi</p>	<p>- Kebijakan terkait pengelolaan SDM penanganannya</p> <p>- Kebijakan terkait dibebaskan kearahkan pmpusan formal, pegawai</p>	W/D/O	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y			
						E	<p>Terlihat kegiatan yang mengarah pengelolaan SDM sejak rekrutmen sampai dengan penaherfitalan pegawai</p>	<p>Kebijakan telah mengarah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prosedur penomngan pegawai Prosedur penilaian kinerja individu pegawai Prosedur kenaikan pangkat, jabatan, golongan Prosedur kenaikan gaji Prosedur pengembangan kompetensi (diklat, tugas belajar, jin belajar) Prosedur mutasi Prosedur seleksi Prosedur pemberibntian pegawai Prosedur Penomngan Prosedur supervisi oleh manajemen 	W/D/O	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y			
3	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko				A	<p>Terlihat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan seluruh pegawai dan telah diarahkan pencapaianya</p>	<p>A. Kriteria upaya peningkatan kompetensi yang memadai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko baik tahunan maupun lima tahunan baik dibangkit K/L/Pemerintah daerah maupun Kerja/OPD; Unit Kerja Eselon I/OPD memiliki program in house training tahunan; Insians Pemerintah telah melaksanakan program pelatihan/sertifikasi tersebut dan dibuktikan dengan adanya laporan pelatihan dan bukti perolehan sertifikat pelatihan setiap Unit Kerja Eselon I/OPD tersebut pegawai yang memiliki sertifikat keahliannya; In House Training telah dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu semester oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I/OPD serta instruktur harus orang yang telah memiliki sertifikat keahliannya; <p>B. Kriteria Output: Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan</p>	W/D/O	T		T		T		T	T			

Kode	Urutan Subunit	No	Urutan Parameter	Kode Parameter			Gru d	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Kestrop ulan Akhir Y/T						
				SPT	MRE	LEPK					Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian					
								<p>untuk setiap tingkatan risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi K/L/D untuk Eselon I adalah lebih dari 90% pejabat; 2. Strategi Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II adalah lebih dari 90% pejabat; 3. Operasional Kerja/OPD untuk Eselon III ke atas sampai dengan staf adalah lebih dari 90% pejabat dan staff di level ini. <p>C. Terlepas evaluasi atas dampak peningkatan kompetensi dan ketrampilan terhadap kualitas proses dan hasil manajemen risiko</p> <p>A. Kriteria upaya peningkatan kompetensi yang memadai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki program pelatihan/sertifikasi teraspek manajemen risiko baik tahunan maupun lima tahunan baik di tingkat K/L/Pemerintah daerah maupun KOPM/OPD; 2. Unit Kerja Eselon I/OPD memiliki program in house training tahunan; di tingkat Pemerintahan adalah pelatihan/program seragam dan alihbidang dengan adanya lesson learned dan hasil perbaikan sertifikasi keahliannya; Unit Kerja Eselon I/OPD terdapat pegawai yang memiliki sertifikasi keahliannya; 3. In House Training telah dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu semester oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I/OPD serta instruktur harus orang yang telah memiliki sertifikasi keahliannya; <p>B. Kriteria Output:</p> <p>Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan untuk setiap tingkatan risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi K/L/D untuk Eselon I adalah lebih dari 90% pejabat; 2. Strategi Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II adalah lebih dari 90% pejabat; 3. Operasional Kerja/OPD untuk Eselon III ke atas sampai dengan staf adalah lebih dari 90% pejabat dan staff di level ini. 																	
							B	<p>Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan serta ketrampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan seluruh pegawai</p>	<p>W/D/O</p>																
							C	<p>Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan sebagian besar pegawai</p>	<p>W/D/O</p>																

Kode	Urutan Subunit	No	Urutan Parameter	Kode Parameter			Gru	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SRP						Kestegulan Akhir Y/T		
				SRP	MRE	LEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T
								<p>B. Kriteria Output: Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan untuk setiap tingkatan risiko: 1. Strategi Penda untuk Eselon I adalah 71%-50% pejabat; 2. Strategi Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II adalah 71%-50%pejabat; 3. Operasional Unit Eselon I/OPD untuk Eselon III ke atas sampai dengan saat adalah 71% 90% pejabat dan staff di level III.</p>	W/D/O	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	Y
						D	<p>Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan, serta terampil untuk manajemen risiko yang normedis dengan capaian sebagai pegawai</p>	<p>A. Kriteria Memadai: 1. Memiliki program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko baik tahunan maupun lima tahunan baik di tingkat K/L/Pencapaian daerah maupun Unit Kerja/OPD; 2. Unit Kerja/OPD memiliki program in house training tahunan; 3. Sasaran Penerimaan telah dilaksanakan program pelatihan/sertifikasi secara bertahap dan berkelanjutan serta terdapat pelatihan dan hasil perbaikan sertifikasi pegawai yang memiliki sertifikat keahlian; 4. In House Training telah dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu semester oleh masing2 Unit Kerja/OPD serta instruktur harus orang yang telah memiliki sertifikat keahlian.</p>	W/D/O	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	Y
						E	<p>Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko namun belum memadai</p>	<p>B. Kriteria Output: Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan untuk setiap tingkatan risiko: 1. Strategi K/L/D untuk Eselon I adalah 50% - 70%pejabat; 2. Strategi Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II adalah 50% - 70%pejabat; 3. Operasional Unit Eselon I/OPD untuk Eselon III ke atas sampai dengan saat adalah 50% - 70% pejabat dan staff di level III.</p>	W/D/O	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	BahwaTelah ...	Y	Y

Kode	Uraian Subunit	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Garis	Kategori	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SRP						Keterangan Akhir Y/T				
				SRP	MRE	LEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4			
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T		
		3	pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko		MRE	-	A	<p>Secara umum kriteria:</p> <p>B. Kriteria Output: Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan untuk setiap tingkatan risiko: 1. Strategi K/L/D untuk Eselon I adalah < 50% pejabat; 2. Strategi Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II adalah < 50% pejabat; 3. Operasional Unit Eselon I/OPD untuk Eselon III ke atas sampai dengan staf adalah < 50% pejabat dan staff di level III.</p> <p>100% pegawai sampel menunjukkan kesadaran/keselamatan dalam perencanaan MR</p>	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
					MRE	-	B	Sebagian besar pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
					MRE	-	C	Sebagian pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko	W/D/O	Y	Bahwa Belum	Y	Bahwa Belum	Y	Bahwa Belum	Y	Bahwa Belum	Y	Y		
					MRE	-	D	Sebagian kecil pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y		
					MRE	-	E	Sebagian pegawai telah memiliki kesadaran manajemen risiko	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y		
1.7	Penyusunan Peran ATP yang Efektif	1	Perencanaan ATP telah dapat memberikan nilai tambah pada pelaksanaan perencanaan organisasi				A	ATP telah menjadi unit yang terakutir dalam organisasi dan mampu memberikan kontribusi	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3		
							B	ATP telah mengorganisir seluruh organisasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
							C	ATP telah mengorganisir dan mengkoordinasi seluruh organisasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif	W/D/O	Y	Bahwa Belum	Y	Bahwa Belum	Y	Bahwa Belum	Y	Bahwa Belum	Y	Y	Y	
							D	ATP telah mengorganisir dan mengkoordinasi sebagian organisasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y
							E	ATP telah mengorganisir dan mengkoordinasi sebagian kecil organisasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y

Kode	Uraian Subunit	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Ordn	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPTP				Kestegulan Akhir Y/T				
				SPTP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
2.1	Identifikasi Risiko														2				
		1	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko	SPTP	MRI	-	A	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang normatif, terintegrasi serta telah direvisi secara berkala	W/D/O							T			
				SPTP	MRI	-	B	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang normatif dan terintegrasi	W/D/O							T			
				SPTP	MRI	-	C	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang normatif	W/D/O							T			
				SPTP	MRI	-	D	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko namun belum normatif	W/D/O							Y			
				SPTP	MRI	-	E	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko namun sama sekali belum memuat persyaratan dalam kriteria memadai	W/D/O							Y			

Kode	Uraian Subunit	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SRP						Kesteguhan Adhik Y/T		
				SRP	MRE	IEPK		Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4	
								Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T
				MRE	-	D	W/D/O	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
				MRE	-	D	W/D/O	Kualitas identifikasi risiko dan register risiko belum memadai	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
				MRE	-	E	W/D/O	Register risiko telah dibuat	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
3	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis K/L/D			MRE	-	A	W/D/O	Proses manajemen risiko telah melekat dengan proses bisnis dari unit kerja terkecil pada seluruh K/L/D dan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan strategis K/L/D dan operasional unit kerja	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
				MRE	-	D	W/D/O	Proses manajemen risiko telah melekat dengan proses bisnis utama dari unit kerja terkecil dan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan strategis K/L/D, strategi unit kerja, dan operasional unit kerja	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
				MRE	-	C	W/D/O	Proses manajemen risiko telah terintegrasi dengan proses bisnis utama dari unit kerja terkecil dan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan strategis K/L/D dan strategi unit kerja atas pada operasional unit kerja	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
				MRE	-	D	W/D/O	Proses manajemen risiko telah melekat dengan proses bisnis utama dari unit kerja terkecil dan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan strategis K/L/D, strategi unit kerja, dan operasional unit kerja	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y

Kode	Uraian Subunit	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Orang	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... [n]	Kestop ulan Abitr Y/T							
				SPTP	MRE	IEPK					Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian			Y/T						
																						Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
2	K/L/D telah menentukan prosedur proses risiko	3	K/L/D telah menentukan prosedur proses risiko	SPTP	MRE	-	E	<p>diadakan terhadap seluruh risiko operasional yang teridentifikasi namun belum memadai</p> <p>Analisis risiko telah dilakukan terhadap sebagian risiko operasional yang teridentifikasi</p>	<p>proses analisis risiko terhadap seluruh risiko operasional unit kerja yang telah dilakukan. Namun demikian proses analisis risiko belum diperoleh secara memadai sesuai dengan 3 kriteria assessment sebagaimana disebutkan pada kriteria C)</p> <p>Analisis hanya dilakukan pada sebagian dan keseluruhan risiko yang teridentifikasi</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	Y					
				SPTP	MRE	-	A	<p>Insansi Pemerintah telah menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja, strategi unit kerja, strategi K/L/D</p>	<p>1. Insansi Pemerintah telah melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas risiko operasional unit kerja, strategi unit kerja, dan strategi K/L/D terhadap seluruh hasil analisis risiko yang dilakukan;</p> <p>2. Proses evaluasi risiko telah didokumentasikan.</p> <p>3. Evaluasi risiko dilakukan sesuai dengan kebijakan kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	Y					
				SPTP	MRE	-	B	<p>Insansi Pemerintah telah menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja dan strategi unit kerja</p>	<p>1. Insansi Pemerintah telah melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas risiko operasional unit kerja dan strategi unit kerja yang telah dilakukan;</p> <p>2. Proses evaluasi risiko telah didokumentasikan.</p> <p>3. Evaluasi risiko dilakukan sesuai dengan kebijakan kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	Y			
				SPTP	MRE	-	C	<p>Insansi Pemerintah telah menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategi unit kerja</p>	<p>1. Insansi Pemerintah telah melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko yang telah dilakukan;</p> <p>2. Proses evaluasi risiko telah didokumentasikan.</p> <p>3. Evaluasi risiko dilakukan sesuai dengan kebijakan kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y		
				SPTP	MRE	-	D	<p>Insansi Pemerintah telah menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja</p>	<p>1. Insansi Pemerintah telah melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas risiko operasional unit kerja serta telah mendokumentasikan proses evaluasi risiko terhadap seluruh hasil analisis risiko yang telah dilakukan.</p> <p>2. Evaluasi risiko yang dilakukan belum sesuai dengan kebijakan kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y
				SPTP	MRE	-	E	<p>Insansi Pemerintah telah menentukan prioritas risiko pada sebagian risiko operasional unit kerja</p>	<p>1. Insansi Pemerintah telah melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas risiko operasional unit kerja serta telah mendokumentasikan proses evaluasi risiko terhadap seluruh hasil analisis risiko yang telah dilakukan.</p> <p>2. Evaluasi risiko yang dilakukan belum sesuai dengan kebijakan kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y
3	K/L/D telah menentukan rencana tindak	3	K/L/D telah menentukan rencana tindak	SPTP	MRE	-	A	<p>Insansi Pemerintah telah menentukan</p>	<p>500% RPP terhadap risiko operasional unit kerja, strategi unit kerja, dan strategi K/L/D yang disusut (sampling)</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	Y			
				SPTP	MRE	-																					

Kode	Usulan Subunit	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SRP						Kestopulan Akhir Y/T		
				SRP	MRE	DEPK		Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4	
								Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T
	SDM	1	Penyusunan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	SRP	-	-	A	Penyusunan SDM organisasi telah diperbaiki secara berkelayakan dan secara optimal mampu meningkatkan pencapaian tujuan organisasi	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
				SRP	-	-	B	Kelengkapan dan implementasi terkait penyusunan SDM organisasi telah devolusi sehingga dapat diberikan efektivitasnya	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
				SRP	-	-	C	Penyusunan SDM telah dilaksanakan sesuai kebijakan/posisi yang dibutuhkan organisasi	W/D/O	Y	Bahwa ... Belum ...	Y	Bahwa ... Belum ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y
				SRP	-	-	D	Kelengkapan terkait penyusunan SDM dan diimbangi oleh pihak yang bertanggung jawab	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y
				SRP	-	-	E	Terlengkap kebijakan yang mengatur penyusunan SDM untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informatika	1	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan	SRP	-	-	A	Perbaikan terkait pengelolaan sistem informasi dilakukan secara berkelayakan	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3

Kode	Usaian Subunit	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Ordn	Kategori	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SRP						Kestegulan Akhir Y/T		
				SRP	MRE	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pemanfaatannya	1	Terdapat pertanggungjawaban atas aset/organisasi untuk organisasi dalam mengelola sumber daya yang digunakan/dibebankan/ditanggungjawabkan/ditanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	SRP	-	-	D	<p>periodik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan akses dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang disebabkan oleh sistem informasi - Kebijakan telah dipaparkan oleh pertanggungjawab pertanggungjawaban dan BMM/BMD - Kebijakan telah dibenarkan/kepada pimpinan struktural dan pegawai 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	
				SRP	-	-	E	<p>Kebijakan telah mengurut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme/desain pembatasan akses yang tidak ditinjau terhadap sumber daya - Mekanisme/desain pembatasan akses yang tidak ditinjau terhadap pemanfaatan sumber daya 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	
				SRP	-	-	A	<p>Pertanggungjawaban terhadap sumber daya dan pertanggungjawaban dengan sumber daya organisasi</p>	W/D/O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
				SRP	-	-	B	<p>Kebijakan dan implementasi terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertindak - Terdokumentasi - Dibakukan untuk menangani masalah risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjut - Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	
				SRP	-	-	C	<p>Sumber daya dan pemanfaatannya telah dipertanggungjawabkan oleh pihak/pegawai yang ditugaskan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	

Kode	Usaian Subunit	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gru	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... [n]	Kestrukturan Akhir Y/T		
				SPT	MRE	LEPK					Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T				
								<p>b. Jelas prosedur pengujian informasi;</p> <p>c. Disajikan tepat waktu, akurat, dan relevan.</p> <p>- Informasi produk, standar, prosedur layanan/pelaksanaan tugas fungsi dan pengujian tersedia secara lengkap dan sudah diadopsi.</p> <p>- Informasi layanan internet (pelayanan, pengawasan, umun, db) tersedia secara lengkap dan mudah diakses;</p> <p>- Informasi manajemen kinerja (rencana kinerja, capaian kinerja, db) tersedia secara lengkap dan mudah diakses.</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y
						C	Informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia secara lengkap dan mudah untuk diperoleh	<p>- Informasi produk, standar, prosedur layanan/pelaksanaan tugas fungsi dan pengujian tersedia secara lengkap, namun tidak mudah diakses;</p> <p>- Informasi layanan internet (pelayanan, pengawasan, umun, db) tersedia secara lengkap, namun tidak mudah diakses.</p> <p>- Informasi manajemen kinerja (rencana kinerja, capaian kinerja, db) tersedia secara lengkap, namun tidak mudah diakses.</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	
						D	Informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia namun tidak diperoleh/akses terbatas.	<p>- Informasi produk, standar, prosedur layanan/pelaksanaan tugas fungsi dan pengujian belum tersedia secara lengkap;</p> <p>- Informasi layanan internet (pelayanan, pengawasan, umun, db) belum tersedia secara lengkap;</p> <p>- Informasi manajemen kinerja (rencana kinerja, capaian kinerja, db) belum tersedia secara lengkap.</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	
						E	Ketersediaan informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tidak lengkap	<p>- Informasi produk, standar, prosedur layanan/pelaksanaan tugas fungsi dan pengujian belum tersedia secara lengkap;</p> <p>- Informasi layanan internet (pelayanan, pengawasan, umun, db) belum tersedia secara lengkap;</p> <p>- Informasi manajemen kinerja (rencana kinerja, capaian kinerja, db) belum tersedia secara lengkap.</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	
2	Rancangan K/L/D aronibangun sistem pengujian					A	Sistem pengujian dirancang pada pondasi perencanaan yang baik	<p>- Terdapat dokumen untuk menangani residual risk</p> <p>- Hasil evaluasi telah dimindak lanjut</p> <p>- Perbaikan sudah menghasilkan kinerja yang lebih baik</p> <p>Sudah jelas</p>	W/D/O	T		T		T		T		T		T	T	
						B	Sistem pengujian telah divalidasi	<p>- Terdapat dokumen untuk menangani residual risk</p> <p>- Hasil evaluasi telah dimindak lanjut</p> <p>- Perbaikan sudah menghasilkan kinerja yang lebih baik</p> <p>Sudah jelas</p>	W/D/O	T		T		T		T		T		T	T	
						C	Sistem pengujian telah diterapkan dan dilaksanakan sesuai	<p>- Terdapat dokumen untuk menangani residual risk</p> <p>- Hasil evaluasi telah dimindak lanjut</p> <p>- Perbaikan sudah menghasilkan kinerja yang lebih baik</p> <p>Sudah jelas</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y
						D	Kebijakan sistem pengujian telah dilaksanakan kepada masyarakat/ stakeholder	<p>- Terdapat dokumen untuk menangani residual risk</p> <p>- Hasil evaluasi telah dimindak lanjut</p> <p>- Perbaikan sudah menghasilkan kinerja yang lebih baik</p> <p>Sudah jelas</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y
						E	Tidak terdapat kebijakan perencanaan sistem pengujian	<p>- Terdapat dokumen untuk menangani residual risk</p> <p>- Hasil evaluasi telah dimindak lanjut</p> <p>- Perbaikan sudah menghasilkan kinerja yang lebih baik</p> <p>Sudah jelas</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y
3	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan					A	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan	<p>- Terdapat dokumen untuk menangani residual risk</p> <p>- Hasil evaluasi telah dimindak lanjut</p> <p>- Perbaikan sudah menghasilkan kinerja yang lebih baik</p> <p>Sudah jelas</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y

Kode	Uraian Subunit	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Orisinal	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SRP				Kestegulan Akhir Y/T				
				SPP	MRE	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
							pada seluruh pegawai pada tingkat operasional unit kerja, tingkat strategis unit kerja, dan tingkat strategis K/L/D												
						B	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah diimplementasikan pada seluruh pegawai pada tingkat operasional unit kerja dan tingkat strategis unit kerja	>50% pegawai sample pada tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja melaksanakan pengabdian akan strategi yang telah ditetapkan	W/D/O	Y						Y			
						C	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah diimplementasikan pada seluruh pegawai pada tingkat operasional unit kerja dan tingkat strategis unit kerja	>60% pegawai sample pada tingkat operasional unit kerja melaksanakan pengabdian akan strategi yang telah ditetapkan	W/D/O	Y	Bahwa ... Belum ...	Y	Bahwa ... Belum ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y			
						D	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah diimplementasikan pada seluruh pegawai pada tingkat operasional unit kerja	>60% pegawai sample pada tingkat operasional unit kerja melaksanakan pengabdian akan strategi yang telah ditetapkan	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y			
						E	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah diimplementasikan pada sebagian pegawai pada tingkat operasional unit kerja	>50% pegawai sample pada tingkat operasional unit kerja melaksanakan pengabdian akan strategi yang telah ditetapkan	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y			
						A	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	Komunikasi Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional Unit Kerja/OPD, dan strategis Unit Kerja/OPD telah dilakukan kepada semua pihak yang telah diidentifikasi dalam rencana komunikasi sebagaimana terdapat dalam dokumen RTR yang telah diadopsi sebelumnya dan diadakan bahan pembuatannya serta menjadi bahan pembelajaran dan inovasi bagi K/L/D	W/D/O	Y							Y		
						D	Register risiko dan rencana tindak	Komunikasi Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional	W/D/O	Y								Y	

Kode	Uraian Subunit	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Orasid	Efektiva	Penjelasan	Cara Pengujian	Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... [n]	Kestrukturan Akhir Y/T		
				SPTP	MRI	IEPK					Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian			Y/T	
																						Uraian Hasil Pengujian
							<p>perencanaan operasional Unit Kerja/OPD, strategi Unit Kerja/OPD dan Strategi K/L/D telah dilaksanakan kepada seluruh pihak terkait dan diadukan dalam pengembalian keputusan</p>	<p>Unit Kerja/OPD, dan strategi Unit Kerja/OPD telah dilakukan kepada semua rencana komunikasi sebagaimana terutang dalam dokumen RTP yang telah dibuat sebelumnya dan diadukan dalam pembuatan keputusan oleh pihak-pihak tersebut.</p>	W/D/O	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Y	Y		
							<p>Register risiko dan rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional Unit Kerja/OPD, strategi Unit Kerja/OPD, dan strategi Unit Kerja/OPD telah dilaksanakan dalam rencana komunikasi sebagaimana terutang dalam dokumen RTP yang telah dibuat sebelumnya.</p>	<p>Register risiko dan rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional Unit Kerja/OPD, strategi Unit Kerja/OPD, dan strategi Unit Kerja/OPD telah dilaksanakan dalam rencana komunikasi sebagaimana terutang dalam dokumen RTP yang telah dibuat sebelumnya.</p>	W/D/O	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Y	
							<p>Register risiko dan rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional Unit Kerja/OPD, strategi Unit Kerja/OPD, dan strategi Unit Kerja/OPD telah dilaksanakan dalam rencana komunikasi sebagaimana terutang dalam dokumen RTP yang telah dibuat sebelumnya.</p>	<p>Register risiko dan rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional Unit Kerja/OPD, strategi Unit Kerja/OPD, dan strategi Unit Kerja/OPD telah dilaksanakan dalam rencana komunikasi sebagaimana terutang dalam dokumen RTP yang telah dibuat sebelumnya.</p>	W/D/O	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Y	
4.2	Komunikasi yang Efektif	1	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal					<p>Perbaikan berkelanjutan atau komunikasi yang efektif menggunakan produk/layanan/ pelaksanaan tugas fungsi yang telah berhasil meningkatkan kepercayaan publik/stakeholder; Upaya komunikasi dengan publik/stakeholder yang telah berhasil mempromosikan citra instansi.</p>	<p>Perbaikan berkelanjutan atau komunikasi yang efektif menggunakan produk/layanan/ pelaksanaan tugas fungsi yang telah berhasil meningkatkan kepercayaan publik/stakeholder; Upaya komunikasi dengan publik/stakeholder yang telah berhasil mempromosikan citra instansi.</p>	W/D/O	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Y
							<p>Komunikasi yang efektif telah dilakukan kepada internal dan eksternal secara terstruktur dan berkala dan telah dievaluasi</p>	<p>Komunikasi yang efektif telah dilakukan kepada internal dan eksternal secara terstruktur dan berkala dan telah dievaluasi</p>	W/D/O	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y	Bahwa telah	Y

Kode	Usaian Bubungan	No	Urutan Parameter	Kode Parameter			Gru d	Kriteria	Penjelasan	Cara Penelitian	Hasil Penelitian terkait Tujuan 1 SRP				Kesteg uan Akhir Y/T				
				SFP	MRE	LEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Urasi n Hasil Penegua n	Y/T	Urasi n Hasil Penegua n	Y/T		Urasi n Hasil Penegua n	Y/T	Urasi n Hasil Penegua n	Y/T
							diadakan kepada internal dan eksternal secara sistematis dan berkesinambungan	fungsi dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik/stakeholder telah dilakukan secara terstruktur dan berfala; - Upaya komunikasi dengan publik/stakeholder untuk mengatasi isu yang telah dilakukan secara terstruktur dan berfala; - Seluruh pegawai telah memahami visi, misi, tujuan, sasaran strategis, fokus dan prioritas secara terstruktur dan berfala; - Seluruh pegawai telah memahami risiko dan kegiatan pengendalian, namun belum dilakukan secara terstruktur dan berfala;	W/D/O	Y	Belum ... Telah ...	Y	Belum ... Telah ...	Y	Belum ... Telah ...	Y	Y		
					D	Komunikasi yang efektif telah dilakukan kepada internal dan eksternal namun belum terstruktur dan berkesinambungan	- Upaya promosi/sosialisasi terintegrasi produk/layanan/ pelaksanaan tugas fungsi dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik/stakeholder telah dilakukan; - Upaya komunikasi dengan publik/stakeholder untuk mengatasi isu yang telah dilakukan; - Telah dilakukan pengkomunikasian program terintegrasi, misi, tujuan, sasaran strategis, fokus dan prioritas namun belum dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan; - Telah dilakukan komunikasi terkait risiko dan kegiatan pengendalian, namun belum dilakukan secara terstruktur dan berfala;	W/D/O	Y	Belum ... Telah ...	Y	Belum ... Telah ...	Y	Belum ... Telah ...	Y	Y			
					E	Komunikasi yang efektif belum dilakukan	- Upaya promosi/sosialisasi terintegrasi produk/layanan/ pelaksanaan tugas fungsi dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik/stakeholder belum dilakukan; - Upaya komunikasi dengan publik/stakeholder untuk mengatasi isu yang telah dilakukan; - Telah dilakukan pengkomunikasian program terintegrasi, misi, tujuan, sasaran strategis, fokus dan prioritas, namun belum terstruktur dan berkesinambungan; - Telah dilakukan komunikasi terkait risiko dan kegiatan pengendalian, namun belum terstruktur dan berfala;	W/D/O	Y	Belum ... Telah ...	Y	Belum ... Telah ...	Y	Belum ... Telah ...	Y	Y			
5.1	Pemanfaatan Berkelanjutan															3			
							Perubahan berkelanjutan atau peningkatan atau pengendalian internal dilakukan pada kondisi pengendalian internal.	a. Pemanfaatan atau pelaksanaan pengendalian telah efektif mengurung dampak dan frekuensi terjadinya risiko; b. Terdapat sistem informasi strategis untuk memantau pengendalian untuk seluruh proses bisnis secara real-time; c. Pemanfaatan kinerja digunakan sebagai dasar dalam reward and punishment; d. Dilakukan oleh sistem informasi pemanfaatan kinerja yang terintegrasi.	W/D/O	Y	Belum ... Telah ...	Y	Belum ... Telah ...	Y	Belum ... Telah ...	Y	Y		
					B	Seluruh hasil pemanfaatan berkelanjutan dibelk dan	Seluruh hasil pemanfaatan dibelk dan ditindaklanjuti. Pemanfaatan dibelk dan: a. Secara berkala;	W/D/O	Y	Belum ... Telah ...	Y	Belum ... Telah ...	Y	Belum ... Telah ...	Y	Y			

Kode	Uraian Subunit	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Car a Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SRP						Kesteg uan dan Akhir Y/T						
				SRP	MRE	LEPK		Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4					
								Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T				
							<p>Penjelasan</p> <p>direvisi oleh pihak internal dari instansi Pemertnah (oleh AFP maupun Komite Manajemen Risiko) untuk semua risiko operasional unit kerja, strategi unit kerja, strategi K/L/D</p> <p>Kebijakan, framework, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dipadukan terkait dengan proses manajemen risiko telah direvisi oleh pihak internal dari instansi Pemertnah (oleh AFP maupun Komite Manajemen Risiko) tetapi hanya atas risiko operasional unit kerja dan strategi unit kerja</p> <p>Kebijakan, framework, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dipadukan terkait dengan proses manajemen risiko telah direvisi oleh pihak internal dari instansi Pemertnah (oleh AFP maupun Komite Manajemen Risiko) tetapi hanya atas risiko operasional unit kerja</p> <p>Kebijakan, framework, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dipadukan terkait dengan proses manajemen risiko telah direvisi oleh pihak internal dari instansi Pemertnah (oleh AFP maupun Komite Manajemen Risiko) dan hanya atas sebagian risiko operasional unit kerja</p>													
							<p>Penjelasan</p> <p>unit kerja, strategi unit kerja, dan strategi K/L/D</p> <p>Sudah dilakukan revisi atas seluruh risiko operasional unit kerja dan strategi unit kerja</p>	C												
							<p>Penjelasan</p> <p>Sudah dilakukan revisi atas seluruh risiko operasional unit kerja</p>	D												
							<p>Penjelasan</p> <p>Sudah dilakukan revisi atas sebagian risiko operasional unit kerja</p>	E												
3	Penantuan/ monitoring terhadap risiko terdapat dituliskan						<p>Penjelasan</p> <p>Monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja, strategi unit kerja, K/L/D dan strategi bagian pembalasan bagi unit kerja</p>	A												
							<p>Penjelasan</p> <p>Monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD, strategi unit kerja/OPD dan strategi K/L/D secara memadai</p>	E												

Kode	Uraian Subunit	No	Urutan Parameter	Kode Parameter			Gru d	Eskleria	Penjelasan	Cara Pengujian	Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Kestrop ulan Akhir Y/T			
				SPT	MRE	IEPK					Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T		
								<p>pengalihan risiko.</p> <p>6. Hasil monitoring menunjukkan kondisi yang baik;</p> <p>7. Hasil Monitoring sebagian telah ditindaklanjuti.</p> <p>Memada berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ada langkah Monitoring sesuai kebijakan; 2. Monitoring dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sesuai kebijakan; 3. Monitoring dilakukan oleh unit kopru/OPD; 4. Proses dan hasil Monitoring telah didokumentasikan; 5. Monitoring sepenuhnya dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. implementasi pengendalian; b. kejadian risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan segera); c. Monitoring pelaksanaan tiap tahapan pengendalian risiko; d. hasil monitoring menunjukkan kondisi yang baik; e. Hasil Monitoring sebagian telah ditindaklanjuti. 	W/D/O	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y
								<p>6. Hasil monitoring menunjukkan kondisi yang baik;</p> <p>7. Hasil Monitoring sebagian telah ditindaklanjuti.</p> <p>Memada berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ada langkah Monitoring sesuai kebijakan; 2. Monitoring dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sesuai kebijakan; 3. Monitoring dilakukan oleh unit kopru/OPD; 4. Proses dan hasil Monitoring telah didokumentasikan; 5. Monitoring sepenuhnya dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. implementasi pengendalian; b. kejadian risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan segera); c. Monitoring pelaksanaan tiap tahapan pengendalian risiko; d. hasil monitoring menunjukkan kondisi yang baik; e. Hasil Monitoring sebagian telah ditindaklanjuti. 	W/D/O	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y
								<p>pengalihan risiko.</p> <p>6. Hasil monitoring menunjukkan kondisi yang baik;</p> <p>7. Hasil Monitoring sebagian telah ditindaklanjuti.</p> <p>Memada berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ada langkah Monitoring sesuai kebijakan; 2. Monitoring dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sesuai kebijakan; 3. Monitoring dilakukan oleh unit kopru/OPD; 4. Proses dan hasil Monitoring telah didokumentasikan; 5. Monitoring sepenuhnya dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. implementasi pengendalian; b. kejadian risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan segera); c. Monitoring pelaksanaan tiap tahapan pengendalian risiko; d. hasil monitoring menunjukkan kondisi yang baik; e. Hasil Monitoring sebagian telah ditindaklanjuti. 	W/D/O	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y
5.2	Sv/basel							<p>6. Hasil monitoring menunjukkan kondisi yang baik;</p> <p>7. Hasil Monitoring tidak ditindaklanjuti.</p> <p>Belum memadai berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dilakukan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan; 2. Monitoring dilakukan oleh satuan fungsional yang tidak ditunjuk secara resmi; 3. Proses dan hasil Monitoring tidak didokumentasikan; 4. Monitoring belum sepenuhnya dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. implementasi pengendalian; b. kejadian risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan segera); c. Monitoring pelaksanaan tiap tahapan pengendalian risiko; d. hasil monitoring menunjukkan kondisi yang belum baik; e. Hasil Monitoring tidak ditindaklanjuti. 	W/D/O	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y	Bahwa Telah ...	Y

Kode	Usaian Subunit	No	Urutan Parameter	Kode Parameter			Gru d	Efektiva	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPTP						Kestrop ulan Akhir Y/T		
				SPTP	MRE	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T
							<p>baik yang kompeten dengan metodologi yang tepat</p>	<p>- Melakukan rekrutmen yang relevan. - Evaluasi dilakukan pada sebagian program/kegiatan. a. Dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan independen; b. Evaluasi menilai keseluruhan program dan program dengan susunan; c. Memberikan rekomendasi yang relevan;</p>											
						E	<p>Evaluasi terhadap atau pengendalian internal dan pelaksanaan program/kegiatan telah dilaksanakan</p>	<p>- Evaluasi atas pelaksanaan pengendalian intern telah dilaksanakan; - Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan telah dilaksanakan.</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y		
2			<p>Terdapat revisi independen terhadap proses manajemen risiko</p>			A	<p>Revisi terhadap proses tidak pengendalian risiko tingkat operasional unit kerja/OPD, strategi unit kerja/OPD, dan strategi K/L/D sangat memadai</p>	<p>Sangat memadai berarti: 1. Telah ada pedoman revisi yang terstandar yang menyajikan pada best practice; 2. Revisi dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan pedoman; 3. Revisi dilakukan oleh APSP minimal satu kali per tahun; 4. Proses dan hasil revisi telah dikomunikasikan serta dapat diimplementasikan; 5. Revisi dilakukan untuk merevisi rencana dan strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan serta berdasar risiko serta rencana yang dilakukan; 6. Hasil revisi menunjukkan kondisi yang sebenarnya telah sesuai dengan standar dan kebijakan serta dapat ditindaklanjuti; 7. Hasil revisi seluruhnya telah ditindaklanjuti; 8. Terdapat implementasi perubahan atas hasil revisi.</p>	W/D/O	Y		Y		Y		Y		Y	
						B	<p>Revisi terhadap proses tidak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD, strategi unit kerja/OPD, dan strategi K/L/D memadai</p>	<p>Memadai berarti: 1. Telah ada pedoman revisi yang terstandar yang menyajikan pada best practice; 2. Revisi dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan pedoman; 3. Revisi dilakukan oleh APSP minimal satu kali per tahun; 4. Proses dan hasil revisi telah dikomunikasikan; 5. Revisi dilakukan untuk merevisi rencana dan implementasi pengendalian serta kebijakan risiko serta respon yang dilakukan; 6. Hasil revisi menunjukkan sebagian besar kondisi yang ada telah sesuai dengan standar dan kebijakan serta dapat ditindaklanjuti; 7. Hasil revisi sebagian besar telah ditindaklanjuti.</p>	W/D/O	Y		Y		Y		Y		Y	
						C	<p>Revisi terhadap proses tidak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD dan strategi unit kerja/OPD</p>	<p>Memadai berarti: 1. Telah ada pedoman revisi yang terstandar; 2. Revisi dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan pedoman yang terstandar; 3. Revisi dilakukan oleh APSP dan strategi unit kerja/OPD</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	

Kode	Usaian Bubungan	No	Urutan Parameter	Kode Parameter			Gru d	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SRP						Kestrop ulan Akhir Y/T			
				SRP	MRE	LEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... [n]
											Urutan Hasil Pengujian	Y/T	Urutan Hasil Pengujian	Y/T	Urutan Hasil Pengujian	Y/T		Urutan Hasil Pengujian	Y/T	
							memada	<p>4. Proses dan hasil revu telah didokumentasikan;</p> <p>5. Revu dilakukan untuk merevisi rencana dan implementasi pengembangan serta kebijakan risiko serta region yang dilakukan</p> <p>6. Hasil revu menunjukkan sebagian besar kondisi yang ada telah sesuai dengan standar dan kebijakan serta dapat disimpulkan baik.</p> <p>7. Hasil revu sebagian besar telah ditindaklanjuti.</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	
						D	Revu terhadap proses tidak penguasaan untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD cukup memadai	<p>1. Revu dilakukan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan;</p> <p>2. Belum ada pedoman revu yang terstandar</p> <p>3. Revu dilakukan oleh APSP dan dilaksanakan minimal satu kali per tahun;</p> <p>4. Proses dan hasil revu telah didokumentasikan</p> <p>5. Revu dilakukan untuk merevisi rencana dan implementasi pengembangan serta kebijakan risiko serta region yang dilakukan</p> <p>6. Hasil revu menunjukkan sebagian kondisi yang ada sesuai dengan standar dan kebijakan;</p> <p>7. Hasil revu sebagian kecil ditindaklanjuti;</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	
						E	Revu terhadap proses tidak penguasaan untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD belum memadai	<p>1. Revu dilakukan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan;</p> <p>2. Belum ada pedoman revu yang terstandar</p> <p>3. Revu dilakukan oleh APSP dan dilaksanakan minimal satu kali per tahun;</p> <p>4. Proses dan hasil revu telah didokumentasikan;</p> <p>5. Revu dilakukan untuk merevisi rencana dan implementasi pengembangan serta kebijakan risiko serta region yang dilakukan</p> <p>6. Hasil revu menunjukkan sebagian kecil kondisi yang ada sesuai dengan standar dan kebijakan;</p> <p>7. Hasil revu belum ditindaklanjuti;</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	

9. KK 3.2 – STRUKTUR DAN PROSES T2

KERTAS KERJA HASIL PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES
TUJUAN 2: KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN

Kode	Uraian Subunit	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPiP				Kasimpulan Akhir Y/T		
				SPI P	MIR I	IEP R					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4		Unit/OPD.... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian	Uraian Hasil Pengujian	Uraian Hasil Pengujian	Uraian Hasil Pengujian	Uraian Hasil Pengujian		
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika														2		
		I	K/L/D menegaskan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan				A	Penegakan integritas dan nilai etika telah diperbaiki secara bertahap/terencana sehingga tercipta suasana kerja organisasi yang kondusif yang dapat mendorong kinerja para pegawai secara optimal	- Setiap individu dalam organisasi dapat mendorong penerapan nilai-nilai organisasi - Setiap individu mendukung pencapaian kinerja organisasi - Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dibutuhkan dengan integritas dan perilaku individu serta mempengaruhi remunerasi individu	W/D/O	T	T	T	T	T		
							B	Kebijakan dan implementasi organisasi telah dievaluasi untuk meningkatkan integritas dan nilai etika para pegawai	- Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan: - Berkala - Terdokumentasi - Dilakukan untuk mengurangi residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti - Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik	W/D/O	T	T	T	T	T	T	
							C	Penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam organisasi	- Terdapat wujud kesediaan dari pimpinan atas nilai organisasi - Terdapat praktik pembangunan integritas dan nilai etika - Terdapat praktik penegakan nilai etika - Terdapat bukti penegakan disiplin - Terdapat pemberian punishment bagi pegawai yang melanggar dan reward bagi pegawai yang menegakan integritas dan	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T

Kode	Uraian Subnomen	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPD						Kesimpulan Akhir Y/T		
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)				
				Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian					Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T	
			SP/P	-	-	C	Standar kompetensi telah diimplementasikan/di manfaatkan dalam pengelolaan/pembinaan SDM organisasi	<ul style="list-style-type: none"> yang lebih baik Standar kompetensi dimanfaatkan untuk menyusun analisis kompetensi SDM Analisis kompetensi yang disusun berdasarkan standar kompetensi dimanfaatkan untuk perencanaan rekrutmen SDM Analisis kompetensi yang disusun berdasarkan standar kompetensi dimanfaatkan untuk perencanaan pengembangan SDM Standar kompetensi dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengisian jabatan (mutasi/ promosi/ sekecil) 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Belum ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
			SP/P	-	-	D	Standar kompetensi telah dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh pegawai organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Standar kompetensi telah dikomunikasikan dan dipahami oleh: Pimpinan (struktural) Pemangungjawab pengelolaan SDM Pegawai sesuai tugasnya 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
			SP/P	-	-	E	Terdapat standar kompetensi yang jelas untuk seluruh jabatan dan posisi dalam organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat standar kompetensi yang mengatur: Standar kompetensi SDM struktural Standar kompetensi SDM fungsional Standar kompetensi manajerial Standar kompetensi sosio kultural Standar kompetensi teknis 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif																	2.5	
		1	Pimpinan K/L/D menepitaskan lingkungan Kerja yang kondusif dalam pengelolaan	SP/P	-	-	A	Penerapan manajemen kinerja, pengelolaan keuangan, manajemen SDM, serta manajemen risiko dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja seluruh level pimpinan dan pegawai	Sudah Jelas	W/D/O	T		T		T		T	T	

Kode	Uraian Subnomen	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPD						Kesimpulan Akhir Y/T		
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)				
				Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian					Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T	
	keuangan		S/P/	-	-	B	<p>Pimpinan organisasi melaksanakan evaluasi berkala atas kebijakan pengendalian intern dan berupaya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian yang kondusif</p>	<p>a. K/L/D melakukan evaluasi untuk meninjau kembali relevansi kebijakan beserta implementasinya dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Telah dilaksanakan evaluasi berkala; 2. Evaluasi dilaksanakan untuk mengurangi resiko; 3. Tidak lanjut atas hasil evaluasi telah dilaksanakan; b. Pimpinan organisasi terbuka atas masukan dari pegawai dan adaptif terhadap perubahan; c. Keluhan dari pegawai atas keterbatasan/masalah sumberdaya dukungan pelaksanaan pekerjaan dapat diatasi.</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	T
			S/P/	-	-	C	<p>Pimpinan organisasi melaksanakan kebijakan dan didukung dengan SDM yang bekerja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan</p>	<p>a. Pimpinan organisasi menetapkan/menjabarkan berbasis kinerja dan mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan. b. Pimpinan organisasi memberikan keteladanan dalam beretika, berintegritas, ketepatan terhadap perundang-undangan, dan berkinerja secara efektif dan efisien. c. Pegawai mendukung pimpinan organisasi dengan hadir dan bekerja sesuai dengan ketertuan.</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
			S/P/	-	-	D	<p>Pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan dan penetapan kebijakan yang mendukung pencapaian lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi serta memahami substansi kebijakan pengendalian intern dan mendorong penerapan kebijakan</p>	<p>a. Pimpinan organisasi telah memahami substansi dari kebijakan yang telah ditetapkan. b. Pimpinan organisasi mengarahkan pegawai agar dapat bekerja selaras dengan kebijakan, melalui: 1. Rapat internal. 2. Ujucara/apel pagi. 3. Forum diskusi/jam pimpinan. 4. Interaksi informal.</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y

Kode	Uraian Subnomer	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T		Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T
							dalam berbagai interaksi kepada pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan dan penetapan kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi, antara lain kebijakan terkait manajemen kinerja, manajemen keuangan dan aset, manajemen SDM, serta manajemen risiko.												
			SPIP			E		Pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan kebijakan yang mendukung pencapaian lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi, antara lain kebijakan terkait manajemen kinerja, manajemen keuangan dan aset, manajemen SDM, serta manajemen risiko.	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y			
		2	Pimpinan K/L/D mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko			A	Sudah mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D	a. Instansi Pemerintah telah menganggarkan dana implementasi manajemen risiko seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RFP, kegiatan monitoring dan review dalam rencana kerja/DPA/DIPA dan dalam implementasi manajemen risiko tidak terkontrola kekomangan dana implementasi ditingkat operasional unit kerja, strategis K/L/D b. Minimal 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional dan strategis unit kerja serta strategis K/L/D diisi oleh orang yang berkompeten dalam bidang manajemen risiko.	W/D/O	T		T		T		T			
						B	Sudah mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja namun pada tingkat strategis K/L/D belum memadai	a. Instansi Pemerintah telah menganggarkan dana implementasi manajemen risiko seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RFP, kegiatan monitoring dan review dalam rencana	W/D/O	T		T		T		T			

Kode	Uraian Subnour	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T		
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)				
				Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian					Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T	
							<p>bisnis organisasi dan ketepatannya dengan perencanaan strategis</p> <p>lain dengan ketentuan sebagai berikut: a. Evaluasi dilaksanakan untuk menangani <i>residual risk</i>; b. Terdapat duplikasi fungsi karena struktur yang tidak efektif/efisien; c. Arus data dan informasi yang tidak handal dalam pelaksanaan proses bisnis; d. Perubahan lingkungan strategis.</p>												
						C	<p>Struktur organisasi dijalankan sesuai proses bisnis organisasi dengan SDM yang mencukupi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi telah ditindaklanjuti dengan implementasi/pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai proses bisnis; - Proses bisnis telah diibarkan dengan SOP - Organisasi telah menerapkan kebijakan/SOP yang mengatur mengenai hubungan dan jenjang pelaporan intern/arus data dan informasi. - Organisasi telah menetapkan kebutuhan pegawai untuk mendukung proses bisnis yang diantaranya mengatur mengenai analisis beban kerja untuk pimpinan dan pegawai. 	W/D/O										
						D	<p>Proses bisnis organisasi dapat didukung dengan struktur organisasi yang ditetapkan dan personel pada setiap lini mengetahui arus data dan informasi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Struktur organisasi dan tata laksana sesuai dengan proses bisnis yang ditetapkan dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran dan sifat kegiatan. • Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan sentralisasi/desentralisasi organisasi. - Struktur organisasi harus mampu memfasilitasi arus informasi di dalam instansinya. b. Struktur organisasi 	W/D/O										

Kode	Uraian Subnursur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPD						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T		Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T
							kebijakan/prosedur yang ditetapkan	<p>dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat database kepegawain yang update dan barudal yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan penyelesaian SDM - Penyelesaian SDM dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang disebabkan ketidakhadiran SDM/Mnt. 													
						D	Kebijakan terkait penyelesaian SDM telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan dalam organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan telah dipahami oleh penanggungjawab penyelesaian SDM - Kebijakan telah dikomunikasikan kepada pimpinan (struktural), pegawai 	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y		
						E	Terdapat kebijakan yang mengatur penyelesaian SDM sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai	<p>kebijakan telah mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur penerimaan pegawai - Prosedur penilaian kinerja individu pegawai - Prosedur kenaikan pangkat, jabatan, - Prosedur kenaikan gaji - Prosedur - pengembangan kompetensi (didlat, tugas belajar, jin belajar) - Prosedur mutasi - Prosedur seleksi - Prosedur pemberhentian pegawai - Prosedur pensiun - Prosedur supervisi oleh pimpinan 	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y		
2	Pegawai telah mendapatkan Basitias untuk meningkatkan kompetensi dan Keterampilan terkait manajemen risiko					A	Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan seluruh pegawai dan telah diawasi perencanaannya	<p>A. Kriteria upaya peningkatan kompetensi yang memadai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko baik tahunan maupun lima tahunan baik dittingkat K/L/Pemerintah daerah maupun kerja/OPD; 2. Unit Kerja Eselon I/OPD memiliki program 	W/D/O	T		T		T		T		T	T		

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Penguji n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPD						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD.... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T		Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T
							kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan sebagian besar pegawai	<p>yang memadai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko baik tahunan maupun lima tahunan bank ditingkat K/L/Pemerintah daerah maupun Unit Kerja/OPD; Unit Kerja/OPD memiliki program in house training tahunan; Instruksi Pemerintah telah melaksanakan program pelatihan/sertifikasi tersebut dan dibuktikan dengan adanya laporan pelatihan dan bukti penyelesaian sertifikat keahlian (setiap Unit Kerja/OPD terdapat pegawai yang memiliki sertifikat keahlian); In House Training telah dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu semester oleh masing-masing unit Kerja/OPD serta instruktur harus orang yang telah memiliki sertifikat keahlian; <p>B. Kerja Output: Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan untuk setiap tingkatan risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> Strategis Pemda untuk Eselon I adalah 71%-90% pejabat; Strategis Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II adalah 71%-90% pejabat; Operasional Unit Eselon I/OPD untuk Eselon III ke atas sampai dengan staf adalah 71%-90% pejabat dan staf di level III. 	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y
						D	Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan	A. Kriteria Memadai: 1. Memiliki program pelatihan/sertifikasi													

Kode	Uraian Subnomen	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Penguji n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPDP						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Penguji n	Y/T	Uraian Hasil Penguji n	Y/T	Uraian Hasil Penguji n	Y/T		Uraian Hasil Penguji n	Y/T	Uraian Hasil Penguji n	Y/T
							<p>keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan sebagian pegawai</p>	<p>terkait manajemen risiko baik tahunan maupun lima tahunan baik ditingkat K/L/Pemerintah daerah maupun Unit Kerja/OPD;</p> <p>2. Unit Kerja/OPD memiliki program in house training tahunan;</p> <p>3. Instansi Pemerintah telah melaksanakan program pelatihan/sertifikasi tersebut dan dibuktikan dengan adanya laporan pelatihan dan bukti perolehan sertifikat keahlian (setiap Unit Kerja/OPD terdapat pegawai yang memiliki sertifikat keahlian);</p> <p>4. In House Training telah dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu semester oleh masing2 Unit Kerja/OPD serta instruktur harus orang yang telah memiliki sertifikat keahlian;</p> <p>B. Kriteria Output: Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan untuk setiap tingkatan risiko:</p> <p>1. Strategis K/L/D untuk Eselon I adalah 50% - 70% pejabat;</p> <p>2. Strategis Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II adalah 50% -70% pejabat;</p> <p>3. Operasional Unit Eselon I/OPD untuk Eselon III ke atas smpul dengan staf adalah 50% - 70% pejabat dan staff di level ini.</p>													
						E	<p>Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko</p>		W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y

Kode	Uraian Subunur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujia n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPD						Kesimpulan Akhir Y/T	
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)			
				Uraian Hasil Pengujia n	Y/T	Uraian Hasil Pengujia n					Y/T	Uraian Hasil Pengujia n	Y/T	Uraian Hasil Pengujia n	Y/T	Uraian Hasil Pengujia n		Y/T
		1	Pimpinan K/L/D menjalin hubungan kerja yang baik (kemiripan) dengan instansi lain terkait dengan pengelolaan keuangan	SP/P	-	-	A	Pelaksanaan hubungan kerja yang baik dengan mitra kerjasama organisasi menghasilkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan efisiensi penggunaan sumberdaya masing-masing instansi	Pimpinan organisasi telah menjalin hubungan kerja yang baik dengan instansi lain melalui pembagian peran dan ukuran kinerja yang diharapkan dapat saling mendukung kepada tujuan masing-masing. Pembagian peran mendukung pimpinan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai lingkungannya.	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	
				SP/P	-	-	B	Pelaksanaan kebijakan kerjasama organisasi dievaluasi secara berkala	Organisasi melakukan evaluasi atas kebijakan/prosedur pelaksanaan kerjasama dan mekanisme kerja antar unit/organisasi/mitra kerja beserta implementasinya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Telah dilaksanakan evaluasi berkala; b. Evaluasi dilaksanakan untuk menangani hambatan koordinasi/kerjasama; c. Tindak lanjut atas hasil evaluasi telah dilaksanakan dengan pembaharuan kebijakan/perubahan pola kerjasama yang diperlukan.	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T
				SP/P	-	-	C	Masing-masing pihak melaksanakan kegiatan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing sesuai kebijakan dan ukuran kinerja yang ditetapkan	Organisasi melaksanakan komunikasi, koordinasi, pertukaran data dan informasi dengan unit/organisasi/mitra kerja sesuai dengan kebijakan/prosedur dan kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Belum ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Belum ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Y
				SP/P	-	-	D	Publikasi kebijakan kerjasama organisasi kepada para pihak yang berkepentingan (antara lain subjek, objek, dan penerima	Kebijakan/prosedur yang mengatur pelaksanaan kerjasama dan mekanisme kerja antar unit/organisasi/mitra kerja telah	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Y

Kode	Uraian Subnomen	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujian n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T					
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)		
											Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T		Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	
								apabila penerapan manajemen risiko telah dilakukan terhadap semua komitmen yang memiliki peran yang penting dalam organisasi.														
				SPIP MR I			B	Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen dan penerapannya telah terintegrasi dengan proses bisnis Instansi Pemerintah	A. Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen. B. Kriteria implementasi adalah sebagai berikut: 1. Terintegrasi apabila penerapan manajemen risiko: a. Telah menyatu dalam proses perencanaan kegiatan komitmen; b. Manajemen risiko diterapkan diseluruh kegiatan komitmen; c. Dirancang untuk mengelola seluruh risiko yang muncul d. Menginkorporasikan hasil dari manajemen risiko kedalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan. 2. Kriteria memadai apabila penerapan manajemen risiko telah dilakukan terhadap semua komitmen yang memiliki peran yang penting dalam organisasi.	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	T	T
				SPIP MR I			C	Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen dan telah diterapkan dengan memadai	A. Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen. B. Kriteria implementasi secara memadai apabila penerapan manajemen risiko telah dilakukan terhadap semua komitmen yang memiliki peran yang penting dalam organisasi.	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	T	Y		
				SPIP MR I			D	Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen namun belum diterapkan dengan memadai	A. Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen. B. Kriteria implementasi secara tidak memadai apabila sebagian dari komitmen utama yang	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y		

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T		Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T
								memiliki peran penting terhadap organisasi yang telah menerapkan manajemen risiko.													
			SPJP	MR I	-	E	Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen namun belum diterapkan sama sekali	Studi Jelas	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y		
2.1	Identifikasi Risiko																		2		
		1	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko	SPJP	MR I	-	A	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai, terintegrasi serta telah direvisi secara berkala.	W/D/O	T		T		T		T		T	T		
				SPJP	MR I	-	B	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai dan terintegrasi	W/D/O	T		T		T		T		T	T		

Kode	Uraian Subnomer	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ								Kesimpulan Akhir Y/T					
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD.... (n)				
											Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T		Uraian Hasil Pengujian n	Y/T			
								strategi pencapaian tujuan instansi Pemerintah). 2. Manajemen risiko diterapkan di seluruh level organisasi. 3. Manajemen risiko dirancang untuk mengelola seluruh risiko yang muncul. 4. Menginkorporasikan hasil dari manajemen risiko kedalam dokumen kerja dan pengambilan keputusan.																
			SPIP	MR I	-	C	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai	Memadai apabila Kebijakan Manajemen Risiko yang dibuat telah memuat: 1. Penetapan konteks manajemen risiko (Bentuk risiko strategis dan Operasional) 2. Identifikasi risiko setidaknya memuat penyebab risiko, dampak risiko, sebab yang terkena dampak 3. Analisis risiko setidaknya memuat metode prioritas risiko 4. Penetapan kriteria penilaian risiko (kriteria dampak, kriteria kemungkinan, dan skala nilai risiko); 5. Penetapan struktur manajemen risiko dan alur pertanggungjawaban; 6. Penetapan risk appetite/selera risiko 7. Gambaran proses manajemen risiko. 8. Pembangunan budaya risiko.	W/D/O	Y	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah			
			SPIP	MR I	-	D	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko namun belum memadai	Belum memadai apabila K/L/D telah memiliki kebijakan terkait manajemen risiko namun belum memenuhi seluruh kriteria kebijakan yang memadai (hanya memenuhi beberapa parameter yang ada dalam kriteria memadai)	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	

Kode	Uraian Subnomen	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPIP						Kesimpulan Akhir Y/T						
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)								
				Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian					Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T					
				SPIP	MR	I	-	E	K/L/D telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko namun sama sekali belum memuat persyaratan dalam kriteria memadai.	Sudah Jelas	W/D/O	Y	Ya Telah	Y	Ya Telah	Y	Ya Telah	Y	Ya Telah	Y	Y		
		2	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	SPIP	MR	I	-	A	Kualitas identifikasi risiko dan register risiko memadai, serta telah mengidentifikasi peluang.	Kualitas identifikasi Risiko dan Risk Register yang memadai bila: 1. Proses identifikasi risiko menghasilkkan risiko utama dan peluang yang bisa diambil; 2. Seluruh sasaran strategis K/L/D, sasaran strategis unit kerja, serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan konteks telah diidentifikasi risikonya; 3. Pihak yang terlibat sedianya seluruh pegawai unit kerja yang besar-besaran memahami proses bisnis organisasi; 4. Proses identifikasi telah sesuai dengan kebijakan yang dibuat; 5. Risk register sedianya memuat hal berikut: a. uraian tujuan/sasaran strategis/kegiatan, b. Indikator tujuan/sasaran strategis/kegiatan, c. Uraian Risiko, d. Pemilik risiko, e. Uraian dan sumber penyebab, f. Uraian dan pihak yang terdampak; 6. Pernyataan risiko, RTP, penyebab secara umum jelas/dapat dipahami (>90% sampling)	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
				SPIP	MR	I	-	B	Kualitas identifikasi risiko dan register risiko memadai	Kualitas Identifikasi Risiko dan Risk Register yang memadai bila: 1. Proses identifikasi risiko menghasilkkan risiko utama; 2. Seluruh program dan kegiatan serta sasaran strategis unit kerja yang telah ditetapkan dalam	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		

Kode	Uraian Subnomer	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T				
				S/P		MR					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD.... (n)	
				P	I						Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian
								<p>penetapan kriteria telah diidentifikasi risikonya;</p> <p>3. Pihak yang terlibat setidaknya seluruh pegawai unit kerja yang benar-benar memahami proses bisnis organisasi;</p> <p>4. Proses identifikasi telah sesuai dengan kebijakan yang dibuat;</p> <p>5. Risk register setidaknya memuat hal berikut: a. uraian tujuan/sasaran strategis/kegiatan, b. Indikator tujuan/sasaran strategis/kegiatan, c. Uraian Risiko, d. Pemilik Risiko, e. Uraian dan sumber penyebab, f. Uraian dan pihak yang terdampak;</p> <p>6. Pernyataan risiko, RTP penyebab, secara umum jelas/dapat dipahami (70%-90% sampling).</p>													
				S/P/P	MR	I	C	<p>Kualitas identifikasi risiko dan register risiko cukup memadai</p>	<p>Kualitas identifikasi Risiko dan Risk Register cukup memadai bila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses identifikasi risiko menghasilkan risiko utama; 2. Seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kriteria telah diidentifikasi risikonya; 3. Pihak yang terlibat setidaknya 2/3 pegawai unit kerja yang besar-besarnya memahami proses bisnis organisasi; 4. Proses identifikasi telah sesuai dengan kebijakan yang dibuat; 5. Risk register setidaknya memuat hal berikut: a. uraian tujuan/sasaran strategis/kegiatan, b. Indikator tujuan/sasaran strategis/kegiatan, c. Uraian Risiko, d. Pemilik Risiko, e. Uraian dan 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	T	T	

Kode	Uraian Subnomer	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Penguji n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD.... (n)	
											Uraian Hasil Penguji n	Y/T	Uraian Hasil Penguji n	Y/T	Uraian Hasil Penguji n	Y/T		Uraian Hasil Penguji n	Y/T	Uraian Hasil Penguji n	Y/T
			risiko telah melekat pada proses bisnis K/L/D				inovasi, diidentifikasi untuk memaksimalkan peluang dan dijadikan bahan pembelajaran	proses bisnis utama dari unit kerja terkait dan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan strategis K/L/D dan Unit kerja Eselon I/II/OPD maupun dalam proses perencanaan operasional unit kerja Eselon I/II/OPD. Proses manajemen risiko juga dilakukan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada serta mendorong adanya inovasi-inovasi. Disamping itu, hasil dari proses manajemen risiko menjadi bahan pembelajaran dalam pengambilan keputusan													
				SPJP	MR I	-	B	Proses manajemen risiko telah diterapkan secara konsisten, terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D	Proses manajemen risiko telah melekat (terintegrasi) dengan proses bisnis utama dari unit kerja terkait dan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan strategis K/L/D, strategis unit kerja, dan operasional unit kerja	W/D/O										T	
				SPJP	MR I	-	C	Proses manajemen risiko telah diterapkan secara konsisten, terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja	Proses manajemen risiko telah terintegrasi dengan proses bisnis utama dari unit kerja terkait dan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan pasca strategis K/L/D dan strategis unit kerja atau pasca operasional unit kerja	W/D/O			Bahwa Telah Belum		Bahwa Telah Belum		Bahwa Telah Belum		Bahwa Telah Belum		T
				SPJP	MR I	-	D	Proses manajemen risiko telah terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja serta telah diterapkan secara konsisten	Proses manajemen risiko mulai dihubungkan dengan proses bisnis utama dari unit kerja terkait dan mulai diterapkan dalam proses perencanaan unit kerja. Namun demikian implementasi dari proses manajemen risiko ini belum dilakukan secara konsisten oleh unit kerja	W/D/O			Bahwa Telah Belum		Bahwa Telah Belum		Bahwa Telah Belum		Bahwa Telah Belum		Y
				SPJP	MR I	-	E	Proses manajemen risiko telah terintegrasi	Studi Jelas	W/D/O			Bahwa Telah Belum		Bahwa Telah Belum		Bahwa Telah Belum		Bahwa Telah Belum		Y

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Penguji n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T		
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)				
				Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n					Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n		Y/T	
2.2	Analisis Risiko	1	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	SPI	MR	IEP	A	Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja, risiko strategis unit kerja, dan risiko strategis K/L/D	A. Instansi Pemerintah telah melakukan analisis risiko untuk hasil identifikasi risiko di tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D secara memadai yaitu: 1. Telah sesuai dengan kebijakan [termasuk selera risiko dan langkah analisis]; 2. Kriteria yang digunakan baik dampak maupun probabilitasnya konsisten antara satu unit kerja dengan unit kerja lain; 3. Proses analisis risiko dilaksanakan setidaknya oleh orang2 yang memiliki kompetensi.	W/D/O	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	2.8
				P	I	K					T	T	T	T	T	T			
				MR	-		B	Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja	A. Instansi Pemerintah telah melakukan analisis risiko untuk hasil identifikasi risiko di tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja secara memadai yaitu: 1. Telah sesuai dengan kebijakan [termasuk selera risiko dan langkah analisis]; 2. Kriteria yang digunakan baik dampak maupun probabilitasnya konsisten antara satu unit kerja dengan unit kerja lain; 3. Proses analisis risiko dilaksanakan setidaknya oleh orang2 yang memiliki kompetensi.	W/D/O	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T			

Kode	Uraian Subunur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujis n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T		
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD.... (n)				
				Uraian Hasil Pengujis n	Y/T	Uraian Hasil Pengujis n					Y/T	Uraian Hasil Pengujis n	Y/T	Uraian Hasil Pengujis n	Y/T	Uraian Hasil Pengujis n		Y/T	
				SPJ MR I	MR I	-	C	Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja	B. Hasil dari proses ini telah mengidentifikasi tren risiko. A. Instansi Pemerintah telah melakukan analisis risiko untuk hasil identifikasi risiko di tingkat operasional unit kerja secara memadai yaitu: 1. Telah sesuai dengan kebijakan (termasuk selera risiko dan isogkah analisis). 2. Kriteria yang digunakan baik dampak maupun probabilitasnya konsisten antara satu unit kerja dengan unit kerja lain. 3. Proses analisis risiko dilaksanakan setidaknya oleh orang2 yang memiliki kompetensi. E. Hasil dari proses ini telah mengidentifikasi tren risiko.	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y
				SPJ MR I	MR I	-	D	Analisis risiko telah dilakukan terhadap seluruh risiko operasional yang teridentifikasi namun belum memadai	Instansi Pemerintah telah melakukan proses analisis risiko terhadap seluruh risiko operasional unit kerja yang telah diidentifikasi. Namun demikian proses analisis risiko belum dikerjakan secara memadai sesuai dengan 3 kriteria sistematis (sebagaimana disebutkan pada kriteria C)	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	
				SPJ MR I	MR I	-	E	Analisis risiko telah dilakukan terhadap sebagian risiko operasional yang teridentifikasi.	Analisis risiko belum dilakukan pada sebagian dari keseluruhan risiko yang teridentifikasi	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	
		2	K/L/D telah menentukan prioritas risiko	SPJ MR I	MR I	-	A	Instansi Pemerintah telah menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D	1. Instansi Pemerintah telah melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D terhadap seluruh hasil analisis risiko yang telah dilakukan. 2. Proses evaluasi risiko	W/D/O	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T	

Kode	Uraian Subnomen	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPD						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SP1		MR					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD.... (n)	
				MR	IEP						Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
				MR	-	E	Instansi Pemerintah telah menentukan prioritas risiko pada sebagian risiko operasional unit kerja	1. Instansi Pemerintah telah melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas risiko operasional unit kerja serta telah mendokumentasikan proses evaluasi risiko tersebut namun demikian evaluasi risiko belum dilakukan terhadap seluruh hasil analisis risiko yang telah dilakukan. 2. Evaluasi risiko yang dilakukan belum sesuai dengan kebijakan kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y		
		3	K/L/D telah menentukan rencana tindak pengendalian	MR	-	A	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D secara memadai	>60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D yang disusun (sampling) telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas penanggung jawab, ukuran pelaksanaan, secara substansi dinilai dapat mengurangi dampak/menghilangkan penyebab,realistis.	W/D/O	T		T		T		T		T			
				MR	-	B	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja secara memadai	>60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja yang disusun (sampling) telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas target waktu, penanggung jawab, ukuran pelaksanaan, secara substansi dinilai dapat mengurangi dampak/menghilangkan penyebab,realistis.	W/D/O	T		T		T		T		T			
				MR	-	C	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja yang telah diprioritaskan	>60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja dan <60% RTP terhadap risiko strategis unit kerja yang disusun (sampling) telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas target waktu, penanggung jawab, ukuran	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	Y	

Kode	Uraian Subnomer	Nomor	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T		
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)				
				Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian					Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T	
				MR I	-	D	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja yang telah diprioritaskan	pelaksanaan, secara substansi dinilai dapat mengurangi dampak/menghilangkan penyebab,realistis.	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y		
				MR I	-	E	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap sebagian risiko operasional unit kerja yang telah diprioritaskan	<50% RTP terhadap risiko operasional unit kerja telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas target waktu, penanggung jawab, ukuran pelaksanaan, secara substansi dinilai dapat mengurangi dampak/menghilangkan penyebab,realistis.	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y		
4	Tindak pengendalian telah diimplementasikan			MR I	-	A	Tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja, dan risiko strategis K/L/D telah diimplementasikan	>60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja, strategi unit kerja, dan strategi K/L/D (sampling) yang direncanakan telah diimplementasikan dan didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan	W/D/O	T		T		T		T	T		
				MR I	-	B	Tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja telah diimplementasikan	>50% RTP terhadap risiko operasional unit kerja dan strategi unit kerja (sampling) yang direncanakan telah diimplementasikan dan didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan	W/D/O	T		T		T		T	T	T	
				MR I	-	C	Tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja telah diimplementasikan	<60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja dan <60% RTP terhadap risiko strategis unit kerja (sampling) yang direncanakan telah diimplementasikan dan didukung oleh sumber	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	Y	Y

Kode	Uraian Subnour	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPD						Kesimpulan Akhir Y/T	
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)			
				Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian					Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T
			SPJP MR I	-	D	Tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja telah diimplementasikan	daya yang dibutuhkan >60% KTP terhadap risiko operasional unit kerja (sampling) yang direncanakan telah diimplementasikan dan didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
			SPJP MR I	-	E	Tindak pengendalian terhadap sebagian risiko operasional unit kerja telah diimplementasikan	>60% KTP terhadap risiko operasional unit kerja (sampling) yang direncanakan telah diimplementasikan dan didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
5	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko		SPJP MR I	-	A	Tindak pengendalian telah efektif menurunkan risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D	KTP untuk risiko tingkat operasional unit kerja, tingkat strategis unit kerja, dan tingkat strategis K/L/D mampu menurunkan level risiko sebesar >60%. Misalnya terdapat 20 risiko yang perlu ditangani (di luar batas risk tolerance), dari 20 risiko tersebut ternyata terdapat 5 kejadian risiko yang mana 2 kejadian masih dalam batas risk tolerance sedangkan 3 kejadian di luar batas risk tolerance. Maka efektivitas penangan risiko dihitung dengan cara $(20 - 3) / 20 \times 100\% = 85\%$.	W/D/O	T		T		T		T		T	
			SPJP MR I	-	B	Tindak pengendalian telah efektif menurunkan risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja	KTP untuk risiko tingkat operasional unit kerja dan tingkat strategis unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar >60%. Misalnya terdapat 20 risiko yang perlu ditangani (di luar batas risk tolerance), dari 20 risiko tersebut ternyata terdapat 5 kejadian risiko yang mana 2 kejadian masih dalam batas risk tolerance sedangkan 3 kejadian di luar batas risk tolerance. Maka efektivitas penangan risiko dihitung dengan	W/D/O	T		T		T		T		T	T

Kode	Uraian Subnomen	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian ⁿ	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian ⁿ	Y/T	Uraian Hasil Pengujian ⁿ	Y/T	Uraian Hasil Pengujian ⁿ	Y/T		Uraian Hasil Pengujian ⁿ	Y/T	Uraian Hasil Pengujian ⁿ	Y/T
				MR I	-	C	Tindak pengendalian efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja	<p>cara (20-3)/20X100%ⁿ=85% RTP untuk risiko tingkat operasional unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar >60% dan risiko tingkat operasional unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar >60%. Misalnya terdapat 20 risiko yang yang perlu ditangani (di luar batas risiko tolerance), dan 20 risiko tersebut ternyata terdapat 5 kejadian risiko yang mana 2 kejadian masih dalam batas risiko tolerance sedangkan 3 kejadian diluar batas risiko tolerance. Maka efektivitas penanganan risiko dihitung dengan cara (20-3)/20X100%ⁿ=85%.</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	T	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Telah ...	T	T		
				MR I	-	D	Tindak pengendalian efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja	<p>RTP untuk risiko operasional unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar >60% RTP untuk risiko operasional unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar <50%.</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y		
				MR I	-	E	Tindak pengendalian efektif menurunkan sebagian risiko operasional unit kerja	<p>RTP untuk risiko operasional unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar <50%.</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y		
3.1	Revisi atas Kinerja Instansi Pemerintah																	3			
		1	Pimpinan K/L/D membina/guan tolak ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai																		
				MR I	-	A	Pelaksanaan revisi kinerja mendukung pencapaian kinerja organisasi	<p>a. Terdapat perbaikan yang berkelanjutan atas kinerja organisasi, unit kerja, kegiatan, dan pegawai sebagai akibat pelaksanaan revisi kinerja, b. Revisi kinerja memungkinkan penilaian terhadap tolak ukur kinerja seluruh level pimpinan dan pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. c. Hasil revisi kinerja digunakan pimpinan organisasi dalam penetapan kebijakan</p>	W/D/O	T		T		T		T		T			

Kode	Uraian Subnomen	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujian n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T		Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T
	SDM	1	Pembinaan SDM terkait pengelolaan keuangan dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	SPJP	-	-	A	<p>Pembinaan SDM organisasi telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan SDM telah mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis Pembinaan SDM telah berhasil meningkatkan kinerja yang memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi Kebertahanan pencapaian kinerja organisasi dapat dihubungkan dengan pembinaan SDM-nya 	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T			
				SPJP	-	-	B	<p>Kebijakan dan implementasi terkait pembinaan SDM organisasi telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektifitasnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan: Berkala Terdokumentasi Dilakukan untuk menangani residual risk Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik 	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
				SPJP	-	-	C	<p>Pembinaan SDM telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan organisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan SDM dilakukan sebagai upaya perencanaan yang disusun Perencanaan pembinaan SDM disusun dengan mempertimbangkan gap kompetensi pegawai dan penguasaan yang akan dilaksanakannya Pembinaan SDM dilakukan sebagai upaya untuk menangani risiko yang disebabkan kelemahan SDM/Mora 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Belum ...	Bahwa ... Belum ...	Bahwa ... Belum ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Y	
				SPJP	-	-	D	<p>Kebijakan terkait pembinaan SDM telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan telah dipahami oleh penanggungjawab pelaksanaan SDM Kebijakan telah dikomunikasikan kepada pimpinan (struktural) dan 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Y	

Kode	Uraian Subunur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T		
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)				
				Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian					Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T	
								mengembalikan perbaikan kualitas atas informasi yang dihasilkan.											
			SPJP	-	-	-	C	Kebijakan pengelolaan sistem informasi organisasi digunakan dalam analisis kebutuhan dukungan sistem informasi, kemampuan sistem informasi existing, serta struktur pengelola dan pengguna sistem informasi beserta wewenang dan tanggungjawabnya.	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	T	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
			SPJP	-	-	-	D	Unit pengelola sistem informasi organisasi dan pengguna mengetahui kebijakan pengelolaan sistem informasi.	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
			SPJP	-	-	-	E	Punptan organisasi menetapkan kebijakan/brand design pengelolaan sistem informasi.	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y

Kode	Uraian Subunuran	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T		Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	1	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka melakukan pengelolaan Keuangan	SPIP	-	-	A	Perbaikan berkelanjutan atas pengelolaan aset organisasi	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T				
				SPIP	-	-	B	Kebijakan/prosedur pengelolaan atas aset organisasi termasuk pengendalian fisik atas aset dievaluasi secara berkala	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T				
								Perbaikan berkelanjutan atas pengelolaan aset didukung dengan sistem yang terintegrasi dan menghasilkan aset yang tersedia secara optimal dalam mendukung kinerja organisasi; antara lain ditunjukkan dengan kondisi: a. tidak terdapat aset dengan kondisi rusak baik ringan maupun berat; b. tidak terdapat keluhan atas penggunaan aset oleh pengguna; c. tidak terdapat aset pribadi yang digunakan untuk keperluan organisasi akibat keterbatasan aset.													
								Evaluasi atas K/SCOP terkait pengendalian fisik atas aset beserta implementasinya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Telah dilaksanakan evaluasi berkala; b. Evaluasi dilaksanakan untuk menangani residual risk; c. Tindak lanjut atas hasil evaluasi telah dilaksanakan; d. Evaluasi meningkatkan kepatuhan penggunaan aset oleh pengguna aset dalam													

Kode	Uraian Subnomer	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPI						Kesimpulan Akhir Y/T		
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)				
				Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian					Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T	
			SPIP	-	-	C	<p>Kebijakan/prosedur pengelolaan atas aset organisasi termasuk pengamanan fisik atas aset diimplementasikan secara memadai</p>	<p>mendukung pencapaian kinerja.</p> <p>a. Kebijakan pengelolaan aset diimplementasikan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aset yang bertekno hilang, dicuri, rusak, digunakan tanpa hak secara fisik diamankan dan akses ke aset tersebut dikendalikan; - Aset secara periodik dihitung dan dibandingkan dengan catatan pengendalian; setiap perbedaan diperiksa secara teliti; - Identitas aset dieksekusi pada masing-masing fisik aset; - Persediaan dan perlengkapan disimpan di tempat yang diamankan secara fisik dan diawasi dari kerusakan; - Observasi dilakukan secara rutin oleh pengelola aset untuk melihat secara langsung kegiatan pengamanan dan pengurusan aset sudah sesuai dengan kebijakan/SOP yang ditetapkan; - Kejadian dalam penggunaan aset yang menimbulkan risiko rusak segera ditangani dengan pengamanan dan perbaikan yang diperlukan agar aset dapat segera digunakan kembali; - Sebagian besar pengguna aset dapat memperoleh manfaat atas keberadaan aset dalam mendukung kinerja organisasi; 	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y
			SPIP	-	-	D	<p>Kebijakan pengelolaan aset organisasi dipahami oleh pengelola aset dan pengguna aset</p>	<p>Kebijakan/SOP tentang pengelolaan aset disampaikan kepada seluruh pejabat dan sebagian besar pegawai serta pihak lain yang</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y		

Kode	Uraian Subnomer	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T		Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T
								<ul style="list-style-type: none"> - Berbaikan telah mengbasiskan kriteria yang lebih baik - Pemisahan fungsi dilaksanakan sesuai ketentuan (struktur organisasi, peraturan/keputusan, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain) - Pemisahan fungsi dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan (penerimaan/pengeluaran) maupun kegiatan teknis operasional organisasi - Pemisahan fungsi dilakukan sebagai upaya untuk menanggapi risiko yang disebabkan ketidmampuan alur/prosedur 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ... Belum ...	T	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Telah ...	Y	Y		
						C	<ul style="list-style-type: none"> - Pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan 														
							<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan terkait pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan 		W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y				
						D	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kebijakan yang mengatur pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian 		W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y				
						E		<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan telah mengantar - Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian telah dipisahkan di antara pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran dan penertisan data, revaluasi dan audit, penyimpanan dan penanganan aset - Pelaksanaan tugas dan kewenangan secara sistematis ke sejumlah orang untuk memastikan terdapat proses check and balance 													
3.7	Otorisasi atas																3				

Kode	Uraian Subunturnya	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujian n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T					
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)		
											Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T		Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n
							telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan	ketentuan peraturan/keputusan, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain) - Pencatatan dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan (akuntansi, keuangan dan EMN/EMD) maupun kegiatan teknis operasional organisasi - Fungsi pencatatan dilakukan sebagai upaya untuk menangani risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur		Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum							
						D	kebijakan terkait pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> kebijakan telah dipahami oleh penanggungjawab pengelolan keuangan/kegiatan kebijakan telah dikomunikasikan kepada pimpinan (struktural) dan pegawai. 	W/D/O	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	Y		
						E	Terdapat kebijakan yang mengatur prosedur pencatatan atas transaksi dan kejadian	<ul style="list-style-type: none"> kebijakan telah mengatur Mekanisme pencatatan untuk seluruh siklus transaksi dan kejadian yang mencakup otomasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir Klasifikasi yang jelas untuk seluruh transaksi dan kejadian Tergat waktu pencatatan seluruh transaksi dan kejadian 	W/D/O	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	Y		
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatan nya																				3	
		I	Terdapat pembatasan akses atas Resepdata dan hak untuk menggunakan	SHP		A	Pembatasan akses terhadap sumber daya dan pencatatan telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung	<ul style="list-style-type: none"> Proses pembatasan akses telah mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis Proses pembatasan akses secara efektif 	W/D/O													

Kode	Uraian Subnomen	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPDP						Kesimpulan Akhir Y/T	
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)			
				Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian					Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T
			an, atau memperoleh sumber daya dan mencatatkan keuangannya				percapaian tujuan organisasi	mampu memitigasi risiko penggunaan secara tidak sah dan penyalahgunaan wewenang - Menghasilkan zero significant frauds/denegious intrusion										
				SPDP	-	-	B	Kebijakan dan implementasi terkait pembatasan akses terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya	W/D/O	T								T
				SPDP	-	-	C	Terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dilakukan pembatasan akses sesuai dengan ketentuan	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Belum ...	Bahwa ... Belum ...	Bahwa ... Belum ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...		Y
				SPDP	-	-	D	Kebijakan terkait pembatasan akses terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...		Y

Kode	Uraian Subnurnya	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
											P	I	K	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian
							berkepentingan	<p>penjajagan (struktural) dan pegawai</p> <p>kebijakan telah mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme/desain pembatasan akses yang tidak dihindarkan terhadap sumber daya - Mekanisme/desain pembatasan akses yang tidak dihindarkan terhadap pencatatan sumber daya 	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y			
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatan nya					E	<p>Terdapat kebijakan yang mengatur prosedur pembatasan akses terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi beserta pencatatannya</p>											3			
			Terdapat pertanggung jawaban glawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya keuangan yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi					<p>- Proses pertanggungjawaban telah mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan</p> <p>- Proses pertanggungjawaban secara efektif mampu meminimisasi risiko</p> <p>- Penganggaran secara tidak sah dan penyimpangan wewenang</p> <p>- Pertanggungjawaban terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dibagi habis kepada pihak/pegawai sesuai dengan kewenangannya</p>	W/D/O	T		T		T		T		T			
						B	<p>Kebijakan dan implementasi terkait akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya</p>	<p>kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkala - Terdokumentasi - Diskusikan untuk menangani residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti - Perbaikan telah dilaksanakan kinerja yang lebih baik 	W/D/O	T		T		T		T		T			
						C	<p>Sumber daya dan pencatatannya telah dipertanggungjawabkan oleh pihak/pegawai yang ditetapi sesuai kebijakan/prosedur</p>	<p>- Pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan/keputusan, SOP, petunjuk teknis/petunjuk</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	Y	Y		

Kode	Uraian Subnomen	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
											P	I	K	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian
	pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi keuangan dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait						atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi	pendokumentasian telah mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis - Proses pendokumentasian mampu menghasilkan dokumen yang relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen dan pihak lain secara <i>real time</i>													
			SPIP	-	-	B	Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya	Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan: - Berkala - Pendokumentasian menargetkan residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti - Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik	W/D/O									T			
			SPIP	-	-	C	Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan	- Pendokumentasian dilaksanakan sesuai ketentuan (peraturan/keputusan, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain) - Dokumentasi dan catatan dikelola, dipelihara, dan diupdate secara berkala - Pendokumentasian dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik sesuai karakteristik dokumen dan kebutuhan organisasi - Pendokumentasian dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan (akuntansi, keuangan dan EMN/EMD) maupun kegiatan teknis operasional organisasi - Fungsi pendokumentasian dilakukan sebagai upaya	W/D/O												

Kode	Uraian Subnomer	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujian n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T		Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T
							disajikan dengan tepat waktu, andal, dan relevan	<p>pengaduan telah dievaluasi dan ditindaklanjuti sehingga:</p> <p>a. Jelas klasifikasi informasi;</p> <p>b. Jelas prosedur penyelesaian informasi;</p> <p>c. Disajikan tepat waktu, andal, dan relevan.</p> <p>- Informasi layanan internal (keuangan, kepegawaian, umum, dsb) telah dievaluasi dan ditindaklanjuti sehingga:</p> <p>a. Jelas klasifikasi informasi;</p> <p>b. Jelas prosedur penyelesaian informasi;</p> <p>c. Disajikan tepat waktu, andal, dan relevan.</p> <p>- Informasi manajemen kinerja (rencana kinerja, capaian kinerja, db) telah dievaluasi dan ditindaklanjuti sehingga:</p> <p>a. Jelas klasifikasi informasi;</p> <p>b. Jelas prosedur penyelesaian informasi;</p> <p>c. Disajikan tepat waktu, andal, dan relevan.</p>													
						C	Informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia secara lengkap dan mudah untuk diperoleh	<p>- Informasi produk, standar, prosedur layanan/peleaksanaan tugas fungsi dan pengaduan tersedia secara lengkap dan mudah diakses;</p> <p>- Informasi layanan internal (keuangan, kepegawaian, umum, dsb) tersedia secara lengkap dan mudah diakses;</p> <p>- Informasi manajemen kinerja (rencana kinerja, capaian kinerja, db) tersedia secara lengkap dan mudah diakses;</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	T	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Telah ...	Y			
						D	Informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia secara lengkap namun tidak mudah	<p>- Informasi produk, standar, prosedur layanan/peleaksanaan tugas fungsi dan pengaduan tersedia</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y			

Kode	Uraian Subnomen	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujian n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPD						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T		Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T
							diperoleh/akses terbatas	secara lengkap, namun tidak mudah diakses; - Informasi layanan internal (keuangan, kepegawain, umum, dsb) tersedia secara lengkap, namun tidak mudah diakses. - Informasi manajemen kinerja (rencana kinerja, capaian kinerja, dsb) tersedia secara lengkap, namun tidak mudah diakses													
						E	Ketersediaan informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tidak lengkap	- Informasi produk, standar, prosedur layanan/pelaksanaan tugas fungsi dan pengadaan belum tersedia secara lengkap; - Informasi layanan internal (keuangan, kepegawain, umum, dsb) belum tersedia secara lengkap; - Informasi manajemen kinerja (rencana kinerja, capaian kinerja, dsb) belum tersedia secara lengkap;	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	
2	Pimpinan K/L/D membangun sistem pengendalian					A	Sistem pengendalian berdampak pada perbaikan berkelanjutan	Perbaikan berkelanjutan antara lain berdampak pada peningkatan kinerja, perbaikan pelayanan publik, dan kepuasan stakeholder.	W/D/O	Y		T		T		T		T		T	
						B	Sistem pengendalian telah dievaluasi	Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan: - Berkala - Terdokumentasi - Dilakukan untuk menangani residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti - Perbaikan telah dilaksanakan kinerja yang lebih baik	W/D/O	T		T		T		T		T		T	
						C	Sistem pengendalian telah diterapkan dan ditindaklanjuti sesuai kebijakan/SOP	Sudah Jelas	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	T	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y
						D	Keberadaan sistem pengendalian telah dioptimalkan kepada	Sudah Jelas	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y

Kode	Uraian Subnomer	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujian n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPD						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T		Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T
		3	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai pada tingkat operasional unit kerja, tingkat strategis unit kerja, K/L/D	SPIP	MR I	-	E	Telah terdapat kebijakan penerapan sistem pengaduan	Sudah Jelas	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
				SPIP	MR I	-	A	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan pada seluruh pegawai pada tingkat operasional unit kerja, tingkat strategis unit kerja, K/L/D	>60% pegawai sample pada tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D menunjukkan pengetahuan akan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
				SPIP	MR I	-	B	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan pada seluruh pegawai pada tingkat operasional unit kerja dan tingkat strategis unit kerja	>60% pegawai sample pada tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja menunjukkan pengetahuan akan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		4	Register risiko dan rencana tindak operasional Unit Kerja/OPD, strategis Unit Kerja/OPD telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	SPIP	MR I	-	D	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan pada seluruh pegawai pada tingkat operasional unit kerja	>60% pegawai sample pada tingkat operasional unit kerja menunjukkan pengetahuan akan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
				SPIP	MR I	-	E	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan pada sebagian pegawai pada tingkat operasional unit kerja	<60% pegawai sample pada tingkat operasional unit kerja menunjukkan pengetahuan akan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
				SPIP	MR I	-	A	Register risiko dan rencana tindak operasional Unit Kerja/OPD, strategis Unit Kerja/OPD telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Komunikasi Register risiko dan rencana tindak operasional tingkat Kerja/OPD, dan strategis Unit Kerja/OPD telah dilakukan kepada semua pihak yang telah ditentukkan dalam rencana komunikasi sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP yang telah disusun sebelumnya dan dijabarkan dalam	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	

Kode	Uraian Subnomer	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujian n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SP1						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T		Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T
4.2	Komunikasi yang Efektif	1	Tertahapnya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal terkait pengelolaan keuangan	SPIP	-	-	A	Perbaikan berkelanjutan atas metodologi komunikasi yang efektif	Perbaikan berkelanjutan atas komunikasi yang efektif menghasilkan: - Upaya promosi/sosialisasi tentang produk/layanan/ pelaksanaan tugas fungsi yang telah berhasil meningkatkan kepercayaan publik/stakeholder; - Upaya komunikasi dengan publik/stakeholder yang telah berhasil memperbaiki citra instansi.	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T				
				SPIP	-	-	B	Komunikasi yang efektif telah dilakukan kepada internal dan eksternal secara terstruktur dan berkala dan telah dievaluasi	- Telah dilakukan evaluasi terhadap upaya promosi/sosialisasi tentang produk/layanan/ pelaksanaan tugas fungsi yang menghasilkan perbaikan. - Contoh: melalui evaluasi kepuasan layanan, survei citra instansi di mata stakeholder - Telah dilakukan evaluasi terhadap upaya komunikasi dengan publik/stakeholder untuk mengatasi isu negatif, yang menghasilkan perbaikan - Upaya promosi/sosialisasi tentang produk/layanan/ pelaksanaan tugas fungsi dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik/stakeholder telah dilakukan secara	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T			
				SPIP	-	-	C	Komunikasi yang efektif telah dilakukan kepada internal dan eksternal secara terstruktur dan berkala	- Upaya promosi/sosialisasi tentang produk/layanan/ pelaksanaan tugas fungsi dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik/stakeholder telah dilakukan secara	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
3																					

Kode	Uraian Subnomen	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPDP						Kesimpulan Akhir Y/T	
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD.... (n)			
				Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian					Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T
								terstruktur dan berkala; - Upaya komunikasi dengan publik/stakeholder untuk mengatasi isu negatif telah dilakukan secara terstruktur dan berkala; - Seluruh pegawai telah memahami visi, misi, tujuan, sasaran strategis, fokus dan prioritas secara terstruktur dan berkala; - Seluruh pegawai telah memahami risiko dan kegiatan pengendalian.										
				SPDP	-	-	D	Komunikasi yang efektif telah dilakukan kepada internal dan eksternal namun belum terstruktur dan berkala	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y
				SPDP	*	*	E	Komunikasi yang efektif dengan eksternal belum dilakukan. - Upaya komunikasi dengan publik/stakeholder untuk	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y

Kode	Uraian Subnomer	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPD						Kesimpulan Akhir Y/T		
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD.... (n)				
				Uraian Haad Pengujian	Y/T	Uraian Haad Pengujian					Y/T	Uraian Haad Pengujian	Y/T	Uraian Haad Pengujian	Y/T	Uraian Haad Pengujian		Y/T	
								organisasi. Pemanntauan atas kinerja K/L/D, unit level I, unit level II, unit level III dan pemanntauan kinerja individu membahas: a. Capaian pelaksanaan rencana aksi; b. Hambatan; c. Rencana ke depan.											
				SPDP	-	-	C	Pemanntauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian dan terkait pemanntauan kinerja telah dilaksanakan pada level program, kegiatan, unit kerja level dibawahnya sampai dengan pemanntauan kinerja individu, namun hasil pemanntauan belum dilevela (tidak lanjut tidak termonitort)	W/D/O	Y	Esahwa ... Telah	Y	Esahwa ... Belum	T	Esahwa ... Belum	T	Esahwa ... Telah	Y	Y
				SPDP	-	-	D	Pemanntauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan pada sebagian aktivitas pengendalian dan terkait pemanntauan kinerja telah dilaksanakan pada level program dan kegiatan	W/D/O	Y	Esahwa ... Telah	Y	Esahwa ... Telah	Y	Esahwa ... Telah	Y	Esahwa ... Telah	Y	Y

Kode	Uraian Subnomer	Nomor	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ												Kesimpulan Akhir Y/T	
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD...		Y/T							
				Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian					Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T				
				SPI	MR	IEP			proses manajemen risiko telah direvisi oleh pihak internal dan instansi Pemerintah (oleh APJP maupun Komite manajemen risiko) tetapi hanya atas risiko operasional unit kerja dan strategi unit kerja. Kebijakan, framework, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dijalankan terkait dengan proses manajemen risiko telah direvisi oleh pihak internal dari instansi Pemerintah (oleh APJP maupun Komite manajemen risiko) tetapi hanya atas risiko operasional unit kerja	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	Y	
				SPIP	MR	-	D	Sudah dilakukan revisi atas seluruh risiko operasional unit kerja			Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	Y	
				SPIP	MR	-	E	Sudah dilakukan revisi atas sebagian risiko operasional unit kerja			W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	Y
		3	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	SPIP	MR	-	A	Monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D secara memadai dan menjadi bahan pembelajaran bagi unit kerja			W/D/O	T											T	T

Kode	Uraian Subunit	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad	Kriteria	Penjelasan	Cura Penguji n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJP						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD.... (n)	
											Uraian Hasil Penguji n	Y/ T	Uraian Hasil Penguji n	Y/ T	Uraian Hasil Penguji n	Y/ T		Uraian Hasil Penguji n	Y/ T	Uraian Hasil Penguji n	Y/ T
								b. kejadian risiko termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan segera); c. Menantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko. 6. Hasil monitoring menunjukkan kondisi yang baik; 7. Hasil Monitoring seluruhnya telah ditindaklanjuti. 8. Terdapat implementasi perbaikan atas hasil monitoring.													
						B	Monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD, strategis unit kerja/OPD dan strategis K/L/D secara memadai	Memadai berarti: 1. Telah ada langkah Monitoring sesuai kebijakan; 2. Monitoring dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sesuai kebijakan; 3. Monitoring dilakukan oleh unit kepatuhan dan dilaksanakan minimal satu kali per semester atau sesuai dengan kebutuhan; 4. Proses dan hasil Monitoring telah didokumentasikan; 5. Monitoring sepenuhnya dilakukan terhadap: a. implementasi pengendalian; b. kejadian risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan segera); c. Menantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko. 5. Hasil monitoring menunjukkan kondisi yang baik; 7. Hasil Monitoring sebagian telah ditindaklanjuti.	W/D/O												
						C	Monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit.	Memadai berarti: 1. Telah ada langkah Monitoring sesuai kebijakan; 2. Monitoring dilakukan	W/D/O												

Kode	Uraian Subnunar	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujia n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPD						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD.... (n)	
											Uraian Hasil Pengujia n	Y/T	Uraian Hasil Pengujia n	Y/T	Uraian Hasil Pengujia n	Y/T		Uraian Hasil Pengujia n	Y/T	Uraian Hasil Pengujia n	Y/T
	menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, atau, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian terkait pengelolaan Keuangan, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.						Evaluasi terpisah telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian dan seluruh program dan kegiatan serta pihak yang kompeten dan dengan metodologi yang tepat, namun hasil evaluasi terpisah belum ditindaklanjuti seluruhnya	<p>lanjut hasil evaluasi terpisah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dilakukan pada seluruh aktivitas pengendalian. Evaluasi dianggap dilaksanakan jika: <ol style="list-style-type: none"> Dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan independen; Evaluasi menilai kecukupan pelaksanaan pengendalian (maturlitas dan efektifitas pengendalian); Memberikan rekomendasi yang relevan; Rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjuti sebagian. - Evaluasi dilakukan pada seluruh program kegiatan. Evaluasi dianggap dilaksanakan jika: <ol style="list-style-type: none"> Dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan independen; Evaluasi menilai keseluruhan program dan program dengan sasaran; Memberikan rekomendasi yang relevan; Rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjuti sebagian. - Evaluasi dilakukan pada sebagian aktivitas pengendalian. Evaluasi dianggap dilaksanakan jika: <ol style="list-style-type: none"> Dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan independen; Evaluasi menilai kecukupan pelaksanaan pengendalian (maturlitas dan efektifitas pengendalian). Memberikan rekomendasi yang relevan. 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	T	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Telah ...	Y	
						D	Evaluasi terpisah telah dilaksanakan pada sebagian aktivitas pengendalian dan seluruh program dan kegiatan serta pihak yang kompeten dan dengan metodologi yang tepat	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dilakukan pada sebagian aktivitas pengendalian. Evaluasi dianggap dilaksanakan jika: <ol style="list-style-type: none"> Dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan independen; Evaluasi menilai kecukupan pelaksanaan pengendalian (maturlitas dan efektifitas pengendalian). Memberikan rekomendasi yang relevan. 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y			

Kode	Uraian Subunit	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujia n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPJ						Kesimpulan Akhir Y/T			
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)					
				Uraian Hasil Pengujia n	Y/T	Uraian Hasil Pengujia n					Y/T	Uraian Hasil Pengujia n	Y/T	Uraian Hasil Pengujia n	Y/T	Uraian Hasil Pengujia n		Y/T		
								<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dilakukan pada sebagian program kegiatan. Dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan independen; Evaluasi menilai keselarasan program dan program dengan sasaran; Membentkan rekomendasi yang relevan. 												
						E	Evaluasi terpisah atas pengendalian intern dan pelaksanaan program/kegiatan telah dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi atas pelaksanaan pengendalian intern telah dilaksanakan; Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan telah dilaksanakan. 	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	Y	
		2	Terdapat revidi independen terhadap proses manajemen risiko			A	Revidi terhadap proses tindak pengendalian risiko tingkat operasional unit kerja/OPD, strategis unit kerja/OPD, dan strategis K/L/D sangat memadai	<p>Sangat memadai berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah ada pedoman revidi yang terstandar yang merujuk pada best practice; Revidi dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan pedoman; Revidi dilakukan oleh APJ minimal satu kali per tahun; Proses dan hasil revidi telah didokumentasikan serta dapat disimpulkan baik; Revidi dilakukan untuk merewi rancangan dan implementasi pengendalian serta kegunaan risiko serta respon yang dilakukan Hasil revidi menunjukkan kondisi yang seluruhnya telah sesuai dengan standar dan kebijakan serta dapat disimpulkan baik; Hasil revidi seluruhnya telah ditindaklanjuti; Terdapat implementasi perbaikan atas hasil revidi. 	W/D/O											
						B	Revidi terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat	<p>Memadai berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah ada pedoman revidi yang terstandar 	W/D/O											

Kode	Uraian Subnomen	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad *	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujis n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPDP						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T		Uraian Hasil Pengujian n	Y/T	Uraian Hasil Pengujian n	Y/T
							operasional unit kerja/OPD, strategis unit kerja/OPD, dan strategis K/L/D memadai	<p>yang merujuk pada best practice;</p> <p>2. Revisi dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan pedoman;</p> <p>3. Revisi dilakukan oleh ATP minimal satu kali per tahun;</p> <p>4. Proses dan hasil revisi telah didokumentasikan;</p> <p>5. Revisi dilakukan untuk merevisi rencana dan implementasi pengendalian serta kejadian risiko serta respon yang dilakukan</p> <p>6. Hasil revisi menunjukkan sebagian besar kondisi yang ada telah sesuai dengan standar dan kebijakan serta dapat disimpulkan baik;</p> <p>7. Hasil revisi sebagian besar telah ditindaklanjuti.</p>													
						C	revisi terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD dan strategis unit kerja/OPD memadai	<p>Memadai berarti:</p> <p>1. Telah ada pedoman revisi yang terstandar;</p> <p>2. Revisi dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan pedoman yang terstandar;</p> <p>3. Revisi dilakukan oleh ATP dan dilaksanakan minimal satu kali per tahun;</p> <p>4. Proses dan hasil revisi telah didokumentasikan;</p> <p>5. Revisi dilakukan untuk merevisi rencana dan implementasi pengendalian serta kejadian risiko serta respon yang dilakukan</p> <p>6. Hasil revisi menunjukkan sebagian besar kondisi yang ada telah sesuai dengan standar dan kebijakan serta dapat disimpulkan baik;</p> <p>7. Hasil revisi sebagian besar telah ditindaklanjuti.</p>	W/D/O												

Kode	Uraian Subnomer	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad	Kriteria	Penjelasan	Cura Penguji n	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPI						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Penguji n	Y/ T	Uraian Hasil Penguji n	Y/ T	Uraian Hasil Penguji n	Y/ T		Uraian Hasil Penguji n	Y/ T	Uraian Hasil Penguji n	Y/ T
				MR I	-	D	Revisi terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD cukup memadai	<p>Cukup memadai berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi dilakukan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan; 2. Belum ada pedoman revisi yang terstandar 3. Revisi dilakukan oleh ATP dan dilaksanakan minimal satu kali per tahun; 4. Proses dan hasil revisi telah didokumentasikan; 5. Revisi dilakukan untuk merevisi rencana dan implementasi pengendalian serta kejadian risiko serta respon yang dilakukan 6. Hasil revisi menunjukkan sebagian kondisi yang ada sesuai dengan standar dan kebijakan; 7. Hasil revisi sebagian kecil ditindaklanjuti; 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ... n	Y	Bahwa ... Telah ... n	Y	Bahwa ... Telah ... n	Y	Bahwa ... Telah ... n	Y	Y		
				MR I	-	E	Revisi terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD belum memadai	<p>Belum memadai berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi dilakukan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan; 2. Belum ada pedoman revisi yang terstandar 3. Revisi dilakukan oleh ATP dan dilaksanakan minimal satu kali per tahun; 4. Proses dan hasil revisi telah didokumentasikan; 5. Revisi dilakukan untuk merevisi rencana dan implementasi pengendalian serta kejadian risiko serta respon yang dilakukan 6. Hasil revisi menunjukkan sebagian kecil kondisi yang ada sesuai dengan standar dan kebijakan; 7. Hasil revisi belum ditindaklanjuti; 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ... n	Y	Bahwa ... Telah ... n	Y	Bahwa ... Telah ... n	Y	Bahwa ... Telah ... n	Y	Y		

10. KK 3.3 – STRUKTUR DAN PROSES T3

KERTAS KERJA HASIL PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES
TUJUAN 3: PENGAMANAN ASET NEGARA

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad	Kriteria	Penjelasan	Cura Pengujian	Hasil Pengujian terhadap Tujuan 1 SPP						Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MR I	IEP R					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4	Unit/OPD 5	Unit/OPD 6		Unit/OPD 7			
1.1	Pencapaian Integritas dan Nilai Etika																	3			
		1	K/L/D integritas dan nilai etika dalam pengelolaan aset	SPIP	-	-	A	<p>Penerapan integritas dan nilai etika telah diperbaiki secara berkesinambungan sehingga tercipta suasana kerja organisasi yang kondusif yang dapat mendorong kinerja para pegawai secara optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap individu dalam organisasi dapat mendorong penerapan nilai-nilai organisasi - Setiap individu mendukung pencapaian kinerja organisasi - Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dihubungkan dengan integritas dan perilaku individu serta mempengaruhi reputasi individu 	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T			
				SPIP	-	-	B	<p>Kebijakan dan implementasi organisasi telah dievaluasi untuk meningkatkan integritas dan nilai etika para pegawai</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan: - Berkala - Terdokumentasi - Dilakukan untuk mengurangi residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjut - Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik 	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
				SPIP	-	-	C	<p>Penerapan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam organisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat wujud keteladanan dari pimpinan atas nilai organisasi - Terdapat praktik pembangunan integritas dan nilai etika - Terdapat praktik penegakan nilai etika - Terdapat bukti penegakan disiplin - Terdapat pemberian penghargaan bagi pegawai yang melanggar dan reward bagi pegawai yang menegakan integritas dan nilai etika 	W/D/O	Y	Bahwa ... , Telah ...	Bahwa ... , Telah ...	Bahwa ... , Telah ...	Bahwa ... , Telah ...	Bahwa ... , Telah ...	Bahwa ... , Telah ...	Bahwa ... , Telah ...	Bahwa ... , Telah ...	Bahwa ... , Telah ...	Y

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
								- Proses tersebut di atas dilaksanakan melalui struktur dan mekanisme yang ditetapkan											
				SPIP	-	-	D	Kebijakan pengakuan integritas dan nilai etika organisasi telah dipahami oleh seluruh pegawai	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y				
				SPIP	-	-	E	Terdapat kebijakan pengakuan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y				
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi														3				
		I	Tugas dan jabatan dalam struktur pengelolaan aset dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	SPIP	-	-	A	Pengelolaan kompetensi SDM telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi	W/D/O		T		T		T	T			
				SPIP	-	-	B	Standar kompetensi organisasi dan implementasi/penyertaannya telah dievaluasi dengan ketentuan:	W/D/O		T		T		T	T			
				SPIP	-	-	C	Standar kompetensi organisasi dan implementasi/penyertaannya telah dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya	W/D/O		Y		Y		Y	Y			

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T
							kompetensi telah diimplementasikan/dimanfaatkan dalam pengelolaan/pembinaan SDM organisasi	dimanfaatkan untuk menyusun analisis kompetensi SDM - Analisis kompetensi yang disusun berdasarkan standar kompetensi dimanfaatkan untuk perencanaan rekrutmen SDM - Analisis kompetensi yang disusun berdasarkan standar kompetensi dimanfaatkan untuk perencanaan pengembangan SDM - Standar kompetensi dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengisian jabatan (mutasi/ promosi/ seleksi)		Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum				
						D	Standar kompetensi telah dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh pegawai organisasi	Standar kompetensi telah dikomunikasikan dan dipahami oleh: - Pimpinan (struktural) - Penanggungjawab pengelolaan SDM - Pegawai sesuai tugasnya	W/D/O	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Y	Y	
						E	Terdapat standar kompetensi yang jelas untuk seluruh jabatan dan posisi dalam organisasi	Terdapat standar kompetensi yang mengatur: - Standar kompetensi SDM struktural - Standar kompetensi SDM fungsional - Standar kompetensi manajerial - Standar kompetensi sosio kultural - Standar kompetensi teknis	W/D/O	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Y	Y	
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif									2.5								2.5			
						A	Penerapan manajemen kinerja, pengelolaan keuangan, manajemen SDM, serta manajemen risiko dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja seluruh level	Sudah Jelas	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T						
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)					
				SPIP			B	<p>pimpinan dan pegawai</p> <p>Pimpinan organisasi melaksanakan evaluasi untuk meninjau kembali relevansi kebijakan beserta implementasinya dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan evaluasi berkala; 2. Evaluasi dilaksanakan untuk menangani residual risk; 3. Tidak lanjut atas hasil evaluasi telah dilaksanakan; <p>b. Pimpinan organisasi terbuka atas masukan dari pegawai dan adaptif terhadap perubahan.</p> <p>c. Keluhan dari pegawai atas keterbatasan/masalah sumberdaya dukungan pelaksanaan pekerjaan dapat ditasai.</p>	W/D/O												
				SPIP			C	<p>Pimpinan organisasi melaksanakan kebijakan dan didukung dengan SDM yang bekerja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan</p>	W/D/O												
				SPIP			D	<p>Pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan dan penetapan kebijakan yang mendukung pencapaian lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi serta memahami</p>	W/D/O												

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
							substansi kebijakan pengendalian intern dan mendorong penerapan kebijakan dalam berbagai interaksi kepada jajaran di bawahnya	4. Interaksi informal.											
							Pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan dan penetapan kebijakan yang mendukung penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi, antara lain kebijakan terkait manajemen kinerja, manajemen keuangan dan aset, manajemen SDM, serta manajemen risiko.	Pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan kebijakan yang mendukung penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi, antara lain kebijakan terkait manajemen kinerja, manajemen keuangan dan aset, manajemen SDM, serta manajemen risiko.	W/D/O						Y				
		2	Pimpinan K/L/D mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko				Sudah mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D	a. Instansi Pemerintah telah menganggarkan dana implementasi manajemen risiko seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RPP, kegiatan monitoring dan review dalam rencana kerja/DPA/DIPA dan dalam implementasi manajemen risiko tidak terkendala kekurangan dana implementasi ditingkat operasional unit kerja, strategis K/L/D b. Minimal 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional dan strategis unit kerja serta strategis K/L/D diisi oleh orang yang berkompeten dalam bidang manajemen risiko	W/D/O						T				
							Sudah mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan	a. Instansi Pemerintah telah menganggarkan dana implementasi manajemen risiko seperti rapat terkait manajemen	W/D/O							T			

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP					Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
							untuk penetapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja namun pada tingkat strategis unit kerja belum memadai	<p>tingkat operasional unit kerja seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan review dalam rencana kerjs/DPA/DIPA secara memadai, namun belum memadai pada tingkat strategis unit kerja, dan/atau</p> <p>b. Kurang dari 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional Unit Kerja diisi oleh orang yang berkemampuan dalam bidang manajemen risiko</p>											
						E	Sudah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja namun belum memadai	<p>a. Instansi Pemerintah telah menganggarkan dana implementasi manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan review dalam rencana kerjs/DPA/DIPA, namun belum memadai, dan/atau</p> <p>b. Kurang dari 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional Unit Kerja diisi oleh orang yang berkemampuan dalam bidang manajemen risiko</p>	<p>Bahwa ... Telah ...</p>	Y	<p>Bahwa ... Telah ...</p>	Y	<p>Bahwa ... Telah ...</p>	Y	<p>Bahwa ... Telah ...</p>	Y		Y	
		3	Pimpinan K/L/D menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan				Seluruh pengambilan keputusan strategis K/L/D, strategis unit kerja, dan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko dan memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi	<p>Seluruh keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara umum menggunakan informasi terkait risiko di tingkat operasional unit kerja, dan strategis unit kerja, dan strategis K/L/D dan memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi</p>	W/D/O										
						B	Seluruh		W/D/O										

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP												Kesimpulan Akhir Y/T			
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)											
				Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T					Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian							
				MR	IEP		pengambilan keputusan strategis K/L/D, strategi unit kerja, dan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko	pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara umum menggunakan informasi terkait risiko di tingkat operasional unit kerja, dan strategis K/L/D		Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Y	
				MR	-	C	Seluruh pengambilan keputusan strategis unit kerja dan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko	Seluruh keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara umum menggunakan informasi terkait risiko di tingkat operasional dan strategis unit kerja	W/D/O	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Y	
				MR	-	D	Seluruh pengambilan keputusan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko	Seluruh keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara umum menggunakan informasi terkait risiko di tingkat operasional	W/D/O	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Y	
				MR	-	E	Sebagian pengambilan keputusan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko	Sebagian keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara umum menggunakan informasi terkait risiko di tingkat operasional	W/D/O	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Y	
4	Pimpinan K/L/D mendorong penerapan manajemen risiko, melalui penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja			MR	-	A	Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja, seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja, dan UPR tingkat strategis K/L/D secara memadai dan telah dievaluasi pencapaiannya	Kinerja penerapan manajemen risiko sudah digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan UPR tingkat strategis K/L/D, seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja, dan seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja secara tepat, telah diukur pencapaian, serta dievaluasi pencapaiannya	W/D/O	T		T		T		T		T		T		T		T	T	
				MR	-	B	Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja, seluruh UPR	Kinerja penerapan manajemen risiko sudah digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan UPR tingkat strategis K/L/D, seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja, dan seluruh UPR	W/D/O	T		T		T		T		T		T		T		T		T

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SIP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
							tingkatan strategis unit kerja, dan UPR tingkat strategis K/L/D secara memadai	tingkatan operasional unit kerja secara tepat dan telah diukur pencapaiannya											
						C	Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penulisan kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja, seluruh UPR tingkat strategis unit kerja, dan UPR tingkat strategis K/L/D secara memadai	Kinerja penerapan manajemen risiko sudah digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan UPR tingkat strategis K/L/D, seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja, dan seluruh UPR tingkat operasional unit kerja, dan telah diukur pencapaiannya	W/D/O						T				
						D	Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penulisan kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja dan seluruh UPR tingkat strategis unit kerja secara memadai	Kinerja penerapan manajemen risiko sudah digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja dan seluruh UPR tingkat operasional unit kerja secara tepat dan telah diukur pencapaiannya	W/D/O							Y			
						E	Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja secara memadai	Kinerja penerapan manajemen risiko sudah digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan seluruh UPR tingkat operasional unit kerja secara tepat dan telah diukur pencapaiannya	W/D/O							Y			
1.4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan															3			
		1	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian pengamanan aset				K/L/D memiliki fleksibilitas untuk menyelesaikan struktur organisasi dalam rangka mendukung perubahan proses bisnis dan perubahan	Perbaikan struktur organisasi dan tata laksana dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mengelola arus data dan informasi dalam menjalankan fungsi-fungsi	W/D/O							T			

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MRI	IEPK				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
										Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
						organisasi yang didelegasikan dapat dilibati melalui evaluasi berkala atas pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab serta analisis terhadap kualitas hasil pelaksanaan tugas/fungsi yang dilaksanakan (tespot stakeholder)	<p>jawab beserta implementasinya dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Telah dilaksanakan evaluasi berkala;</p> <p>b. Evaluasi dilaksanakan untuk mengatasi residu risk;</p> <p>c. Tindak lanjut atas hasil evaluasi telah dilaksanakan;</p> <p>d. Menindaklanjuti keluhan/kekurangan kualitas pelaksanaan tugas fungsi yang disampaikan oleh stakeholder</p>											
						pelaksanaan tugas dan fungsi yang didelegasikan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/prosedur yang ditetapkan	<p>a. Tugas fungsi dan program/kegiatan telah dilaksanakan dengan menerapkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam kebijakan/prosedur yang ditetapkan;</p> <p>b. Pihak/pihak yang menerima pendelegasian telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur dan menyampaikan laporan kepada pihak yg memberikan wewenang secara berkala sesuai kebijakan.</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	
						Kegiatan/prosedur yang dalam pelaksanaannya telah didelegasikan kepada struktur dibawahnya telah dipahami dan diketahui oleh pihak terkait	<p>a. Kebijakan/prosedur yang mengatur pelaksanaan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dipahami oleh pegawai yang berkepentingan;</p> <p>b. Kebijakan/prosedur yang mengatur pelaksanaan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan stakeholder.</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	
						Pimpinan organisasi menetapkan kebijakan terkait		<p>Organisasi memiliki kebijakan/prosedur yang mengatur pendelegasian wewenang dan tanggung</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y

Kode	Uraian Subunit	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	1	Penyusunan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mengelola aset	SPIP	-	-	A	<p>Pengelolaan SDM telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi</p> <p>Kebijakan dan implementasi terkait pengelolaan SDM organisasi telah diwujudkan sehingga dapat diketahui efektivitasnya</p>	<p>jawab dalam pelaksanaan tugas fungsi dan program/kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi yang memuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab yang didelegasikan; - Alur hubungan vertikal serta horisontal dan kejelasan ruang lingkup pen delegasian wewenang dan tanggung jawab; - Kewajiban dan pertanggungjawaban pihak yang diberikan wewenang kepada pihak yang memberikan wewenang. 	W/D/O	T	T	T	T	T	T			
				SPIP	-	-	B	<p>Kebijakan dan implementasi terkait pengelolaan SDM organisasi telah diwujudkan sehingga dapat diketahui efektivitasnya</p> <p>Perbaikan berkelanjutan telah menghasilkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan SDM telah berhasil meningkatkan kinerja yang memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi - Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dihubungkan dengan pengelolaan SDM-nya - Pengelolaan SDM mampu meningkatkan kepuasan kerja pegawai <p>Kebijakan dan implementasi telah devolusi dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkala - Terdokumentasi - Dilakukan untuk mengurangi residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti - Perbaikan telah menghasilkan kinerja 	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T		

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
				SPIP	-	-	C	<p>Pengelolaan SDM telah dilaksanakan sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan</p>	<p>yang lebih baik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan SDM dilakukan sesuai dengan kebijakan/prosedur yang ditetapkan - Pengelolaan SOM dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun - Terdapat database pegawai yang update dan handal yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pengisian SDM - Pengelolaan SOM dilakukan sebagai upaya untuk menangani risiko yang disebabkan ketidmampuan SDM/Men 	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	Y	Y	
				SPIP	-	-	D	<p>Kebijakan terkait pengelolaan SDM telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan dalam organisasi</p>	<p>Kebijakan telah dipahami oleh pangsungjawab pengelolaan SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan telah dikomunikasikan kepada pimpinan (struktural), pegawai 	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
				SPIP	-	-	E	<p>Terdapat kebijakan yang mengatur pengelolaan SDM sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai</p>	<p>Kebijakan telah mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur penerimaan pegawai - Prosedur penilaian kinerja individu pegawai - Prosedur kenaikan pangkat, jabatan, golongan - Prosedur kenaikan gaji - Prosedur pengembangan kompetensi (diklat, tugas belajar, jin belajar) - Prosedur mutasi - Prosedur seleksi - Prosedur pemberhentian pegawai - Prosedur pensiun - Prosedur supervisi oleh pimpinan 	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
		2	<p>Pegawai telah menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen</p>	SPIP	MRI	-	A	<p>Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan seluruh</p>	<p>A. Kriteria upaya peningkatan kompetensi yang memadai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki program pelatihan/ sertifikasi terkait manajemen risiko baik tahunan maupun lima tahunan baik 	W/D/O	Y		Y		Y		T		

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1 Uraian Hasil Pengujian n	Unit/OPD 2 Uraian Hasil Pengujian n	Unit/OPD 3 Uraian Hasil Pengujian n	Unit/OPD 4 Uraian Hasil Pengujian n	
			risiko				pegawai dan telah dievaluasi pencapaiannya	<p>ditingkat</p> <p>K/L/ Pementah daerah maupun Kerja/OPD;</p> <p>2. Unit Kerja Eselon I/OPD memiliki program in house training tahunan;</p> <p>3. Instansi Pementah telah melaksanakan program pelatihan/sertifikasi tersebut dan dibuktikan dengan adanya laporan pelatihan dari bukti perolehan sertifikat keahlian (sebagai Unit Kerja Eselon I/OPD terdapat pegawai yang memiliki sertifikat keahlian);</p> <p>4. In House Training telah dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu semester oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I/OPD serta instruktur baru orang yang telah memiliki sertifikat keahlian;</p> <p>B. Kriteria Output: Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan untuk setiap tingkatan risiko:</p> <p>1. Strategi K/L/D untuk Eselon I adalah lebih dari 90% pejabat;</p> <p>2. Strategi Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II adalah lebih dari 90% pejabat;</p> <p>3. Operasional Kerja/OPD untuk Eselon III ke atas smpai dengan staf adalah lebih dari 90% pejabat dan staf di level Iai.</p> <p>C. Terdapat evaluasi atau dampak peningkatan kompetensi dan ketraampilan terhadap kualitas proses dan hasil manajemen risiko.</p>							

Kode	Uraian Subunsur	Nomor	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP												Kesimpulan Akhir Y/T
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1 Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Unit/OPD 2 Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Unit/OPD 3 Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Unit/OPD 4 Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Unit/OPD 5 Uraian Hasil Pengujian	Y/T			
				SPIP	MRI	-	B	<p>Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan seluruh pegawai</p>	<p>A. Kriteria upaya peningkatan kompetensi yang memsosi: 1. Memiliki program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko baik tahunan maupun lima tahunan baik ditingkat K/L/Pemerintah daerah maupun Kerja/OPD; 2. Unit Kerja E secon I/OPD memiliki program in house training tahunan; 3. Instansi Pemerintah telah melaksanakan program pelatihan/sertifikasi tersebut dan dibuktikan dengan adanya laporan pelatihan dan bukti perolehan sertifikat keahlian (setiap Unit Kerja E secon I/OPD terdapat pegawai yang memiliki sertifikat keahlian); 4. In House Training setidaknya satu kali dalam satu semester oleh masing-masing Unit Kerja E secon I/OPD serta instruktur harus orang yang telah memiliki sertifikat keahlian;</p> <p>B. Kriteria Output: Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan untuk setiap tingkatan risiko: 1. Strategis K/L/D untuk E secon I adalah lebih dari 90% pejabat; 2. Strategis Unit E secon I/OPD untuk E secon II adalah lebih dari 90% pejabat; 3. Operasional Kerja/OPD untuk E secon III ke atas sesuai dengan staf sedalah lebih dari 90% pejabat dan staff di</p>	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		

Kode	Uraian Subunsur	Nomor	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SP1 P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
				SP1 P	MR I	-	C	<p>Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan sebagian besar pegawai</p>	<p>level InI.</p> <p>A. Kriteria upaya peningkatan kompetensi yang memadai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko baik tahunan maupun lima tahunan baik ditingkat K/L/Pemerintah daerah maupun Unit Kerja/OPD 2. Unit Kerja/OPD memiliki program in house training tahunan; 3. Instansi Pemerintah telah melaksanakan program pelatihan/sertifikasi tersebut dan diumumkan dengan adanya laporan pelatihan dan bukti penolehan sertifikat keahlian setiap Unit Kerja/OPD terdapat pegawai yang memiliki sertifikat keahlian; 4. In House Training telah dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu semester oleh masing-masing unit Kerja/OPD serta instruktur harus orang yang telah memiliki sertifikat keahlian. <p>B. Kriteria Output: Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan untuk setiap tingkatan risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Pemda untuk Eselon I adalah 71%-90% pejabat; 2. Strategi Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II adalah 71%-90% pejabat; 3. Operasional Unit Eselon I/OPD untuk Eselon III ke atas sampai dengan staf adalah 71%-90% pejabat dan staf di level InI. 	W/D/O	<p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Belum</p> <p>Bahwa Telah</p>	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
				SP1 P	MR I	-	D	<p>Terdapat upaya</p>	<p>A. Kriteria Memadai:</p>	W/D/O	<p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p>	Y	Y	Y	Y	Y			

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
							peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memsdsi dengan cakupan sebagian pegawai	<p>1. Memiliki program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko baik tahunan maupun lima tahunan baik ditingkat K/L/Pemerintah daerah maupun Unit Kerja/OPD;</p> <p>2. Unit Kerja/OPD memiliki program in house training tahunan;</p> <p>3. Insidensi Pemerintah telah melaksanakan program pelatihan/sertifikasi tersebut dan dibuktikan dengan adanya laporan pelatihan dan bukti perubahan sertifikat keahlian (setiap Unit Kerja/OPD terdapat pegawai yang memiliki sertifikat keahlian);</p> <p>4. In House Training telah dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu semester oleh masing2 Unit Kerja/OPD serta instruktur harus orang yang telah memiliki sertifikat Keahlian;</p> <p>B. Kriteria Output: Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan untuk setiap tingkatan risiko:</p> <p>1. Strategi K/L/D untuk Eselon I adalah 50% - 70% pejabat;</p> <p>2. Strategi Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II adalah 50% -70% pejabat;</p> <p>3. Operasional Unit Eselon I/OPD untuk Eselon III ke atas smpai dengan ataf adalah 50% - 70% pejabat dan staff di level ini</p>	W/D/O	BahwaTelah	Y	BahwaTelah	Y	BahwaTelah	Y	BahwaTelah	Y	Y	

Kod c	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpul an Akhir Y/T			
				SPI P	MR I	IEP K				Grad e	Unit/OPD 1 Y/ T n	Unit/OPD 2 Y/ T n	Unit/OPD 3 Y/ T n		Unit/OPD 4 Y/ T n	Unit/OPD... (n) Y/ T	
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	1	Timbunan K/L/D berjalan hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan pengelolaan aset	SPIP	-	-	A	Pelaksanaan hubungan kerja yang baik dengan mitra kerjasama organisasi menghasilkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan efisienat penggunaan sumberdaya masing-masing instansi	Penjalinan organisasi telah menjalin hubungan kerja yang baik dengan instansi lain melalui pembagian peran dan ukuran kinerja yang diharapkan dapat saling mendukung kepada tujuan masing-masing. Pembagian peran mendukung penjinan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai lingkupnya.	W/D/O	T	T	T	T	T	3	
				SPIP	-	-	B	Pelaksanaan kebijakan kerjasama organisasi dievaluasi secara berkala	Organisasi melakukan evaluasi atas kebijakan/prosedur pelaksanaan kerjasama dan mekanisme kerja antar unit/organisasi/mitra kerja beserta implementasinya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Telah dilaksanakan evaluasi berkala; b. Evaluasi dilaksanakan untuk menangani hambatan koordinasi/kerjasama; c. Tindak lanjut atas hasil evaluasi telah dilaksanakan dengan pembauruan kebijakan/perubahan pola kerjasama yang diperlukan.	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T
				SPIP	-	-	C	Masing-masing pihak melaksanakan kegiatan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing sesuai kebijakan	Organisasi melaksanakan komunikasi, koordinasi, pertukaran data dan informasi dengan unit/organisasi/mitra kerja sesuai dengan kebijakan/prosedur dan kebutuhan dalam rangka	W/D/O	Y ...Telah ...T	Bahwa ...Telah Belum ...T	Bahwa ...Telah ...T	Bahwa ...Telah ...T	Bahwa ...Telah ...T	Y	

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T	
				SPIP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)
							dan ukuran kinerja yang ditetapkan	penetapan tujuan organisasi.								
				SPIP	-	-	D	Publikasi kebijakan kerjasama organisasi kepada para pihak yang berkepentingan (antara lain subjek, objek, dan penerima manfaat kerjasama)	Kebijakan/prosedur yang mengatur pelaksanaan kerjasama dan mekanisme kerja antar unit/organisasi/mitra kerja telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan.	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Y	Y
				SPIP	-	-	E	Pimpinan organisasi menetapkan mekanisme hubungan kerja/taat cara kerjasama dengan instansi lain	Adanya kebijakan/prosedur yang mengatur pelaksanaan kerjasama dan mekanisme kerja antar unit/organisasi/mitra kerja dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Kebijakan/prosedur tersebut antara lain meliputi: - lingkup dan hasil kerjasama yang diharapkan; - alur komunikasi dan koordinasi; - wewenang, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban masing-masing pihak; - ukuran hasil kerjasama dalam rangka mencapai tujuan organisasi masing-masing.	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Y	Y
		2	Dalam rangka meningkatkan hubungan kerja yang baik, K/L/D telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait komitmen	SPIP	MRI	-	A	Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengendalian risiko terkait komitmen, telah diterapkannya telah terintegrasi dengan proses bisnis Instansi Pemerintah, telah direvisi secara berkala dan dijadikan bahan pembelajaran	A. Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengendalian risiko terkait komitmen, telah dilakukan revaluasi secara berkala dan hasil revaluasi diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. E. Kriteria implementasi adalah sebagai berikut: 1. Terintegrasi apabila penerapan manajemen risiko: a. Telah menyatu dalam proses perencanaan kegiatan komitmen; b. Manajemen risiko diterapkan di seluruh kegiatan komitmen;	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Y	Y

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP					Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
								<p>e. Dirancang untuk mengelola seluruh risiko yang muncul</p> <p>d. Menginkorporasikan hasil dari manajemen risiko kedalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan.</p> <p>2. Kriteria memadai apabila penerapan manajemen risiko telah dilakukan terhadap semua komitmen yang memiliki peran yang penting dalam organisasi.</p>											
				SPIP	MR	*	B	<p>Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko dan penerapannya telah terintegrasi dengan proses bisnis Instansi Pemerintah</p>	<p>A. Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen.</p> <p>B. Kriteria implementasi adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Terintegrasi apabila penerapan manajemen risiko:</p> <p>a. Telah menyatu dalam proses perencanaan kegiatan komitmen;</p> <p>b. Manajemen risiko diterapkan di seluruh kegiatan komitmen;</p> <p>c. Dirancang untuk mengelola seluruh risiko yang muncul</p> <p>d. Menginkorporasikan hasil dari manajemen risiko kedalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan.</p> <p>2. Kriteria memadai apabila penerapan manajemen risiko telah dilakukan terhadap semua komitmen yang memiliki peran yang penting dalam organisasi.</p>	W/D/O									
				SPIP	MR	*	C	<p>Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen dan telah diterapkan dengan memadai</p>	<p>A. Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen.</p> <p>B. Kriteria implementasi secara memadai apabila penerapan manajemen risiko telah dilakukan terhadap semua komitmen yang memiliki peran yang penting dalam organisasi.</p>	W/D/O									

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP												Kesimpulan Akhir Y/T				
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)												
				Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian					Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T								
				SPIP	MR I	IEP K	D	Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen namun belum diterapkan dengan memadai	A. Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen. B. Kriteria implementasi secara tidak memadai apabila sebagian dari komitmen utama yang memiliki peran penting terhadap organisasi yang telah menetapkan manajemen risiko. Sudah jelas	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
				SPIP	MR I		E	Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen namun belum diterapkan sama sekali		W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.1	Identifikasi Risiko																										2
		1	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko	SPIP	MR I		A	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai, terintegrasi serta telah direvisi secara berkala	Kebijakan Manajemen Risiko memiliki kriteria memadai dan dalam penyatu/menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan (perumusan target dan strategi pencapaian tujuan instansi Pemerintah). 2. Manajemen risiko diterapkan di seluruh level organisasi 3. Manajemen risiko dirancang untuk mengelola seluruh risiko yang muncul 4. Menginkorporasikan hasil dari manajemen risiko kedalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan 5. Kebijakan tersebut telah direvisi secara berkala	W/D/O	T		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
				SPIP	MR I		B	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai dan	Terintegrasi berarti bahwa Kebijakan Manajemen Risiko memiliki kriteria memadai dan dalam	W/D/O	T		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPIP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
							terintegrasi	kebijakan tersebut telah dijelaskan bahwa: 1. Penerapan manajemen risiko oleh Instansi Pemerintah telah menyatu/merjasi pertimbangan dalam proses perencanaan/perumusan target dan strategi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. 2. Manajemen risiko diterapkan di seluruh level organisasi 3. Manajemen risiko dirancang untuk mengelola seluruh risiko yang muncul 4. Menginkorporasikan hasil dan manajemen risiko kedalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	T		
						C	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai	Menjadi apabila Kebijakan Manajemen Risiko yang dibuat telah memuat: 1. Penetapan konteks manajemen risiko (konteks risiko strategis dan Operasional) 2. Identifikasi risiko setielaknya memuat penyebab risiko, dampak risiko, pihak yang terkena dampak 3. Analisis risiko setielaknya memuat metode prioritasasi risiko 4. Penetapan kriteria penilaian risiko (kriteria dampak, kriteria kemungkinan, dan skala nilai risiko) 5. Penetapan struktur manajemen risiko dan alur pertanggungjawaban; 6. Penetapan risk appetite/selera risiko 7. Gambaran proses manajemen risiko. 8. Penguatnguran budaya risiko	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y
						D	K/L/D telah memiliki	Belum memadai apabila K/L/D telah memiliki	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	Y		

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP					Kesimpulan Akhir Y/T				
				SP1	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian
							Kebijakan Manajemen Risiko belum sepenuhnya memadai	kebijakan terkait manajemen risiko namun belum memenuhi seluruh kriteria kebijakan yang memadai (hanya memenuhi beberapa parameter yang ada dalam kriteria memadai)												
				SP1	MR I	-	E	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko namun sama sekali belum memuat persyaratan dalam kriteria memadai	Sudah Jelas	W/D/O										
		2	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	SP1P	MR I	-	A	Kualitas identifikasi risiko dan register risiko memadai, serta telah mengidentifikasi peluang	Kualitas identifikasi Risiko dan Risk Register yang memadai bila: 1. Proses identifikasi risiko menghasilkan risiko utama dan peluang yang bisa diambil; 2. Seluruh sasaran strategis K/L/D, sasaran strategis unit kerja serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan koneksi telah diidentifikasi risikonya; 3. Pihak yang terlibat setidaknya seluruh pegawai unit kerja yang bersangkutan memahami proses bisnis organisasi; 4. Proses identifikasi telah sesuai dengan kebijakan yang dibuat; 5. Risk register setidaknya memuat hal berikut: a. uraian tujuan/sasaran strategis/kegiatan, b. indikator tujuan/sasaran strategis/kegiatan, c. Uraian Risiko, d. Pemilik risiko, e. Uraian dan sumber penyebab, f. Uraian dan pihak yang terdampak; 5. Penyataan risiko, RTP, penyebab secara umum jelas/dapat dipahami >90% sampling).	W/D/O										

Kod c	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpul an Akhir Y/T		
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/ T	Uraian Hasil Pengujian	Y/ T	Uraian Hasil Pengujian	Y/ T	Uraian Hasil Pengujian	Y/ T		Uraian Hasil Pengujian	Y/ T
				SPIP	MR I	-	E	Kualitas identifikasi risiko dan register risiko memadai	Kualitas identifikasi Risiko dan Risk Register yang memadai bila: 1. Proses identifikasi risiko menghasilkan risiko utama; 2. Seluruh program dan kegiatan serta persiapan strategis unit kerja yang telah ditetapkan dalam penetapan konteks telah diidentifikasi risikonya; 3. Pihak yang terlibat setidaknya seluruh pegawai unit kerja yang besar-besarnya memahami proses bisnis organisasi; 4. Proses identifikasi telah sesuai dengan kebijakan yang dibuat; 5. Risk register setidaknya memuat hal berikut: a. uraian tujuan/sasaran strategis/kegiatan, b. indikator tujuan/sasaran strategis/kegiatan, c. Uraian Risiko, d. Pemilik risiko, e. Uraian dan sumber penyebab, f. Uraian dan pihak yang terdampak; 6. Pernyataan risiko, RTP penyebab, wacana umum ideas/dapat dipaham 70%-90% sampling.	W/D/O	Y	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
				SPIP	MR I	-	C	Kualitas identifikasi risiko dan register risiko cukup memadai	Kualitas Identifikasi Risiko dan Risk Register cukup memadai bila: 1. Proses identifikasi risiko menghasilkan risiko utama; 2. Seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan konteks telah diidentifikasi risikonya; 3. Pihak yang terlibat setidaknya 2/3 pegawai unit kerja yang besar- besar memahami proses bisnis organisasi; 4. Proses identifikasi telah sesuai dengan kebijakan yang dibuat; 5. Risk register	W/D/O	Y	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Kode	Uraian Subunsur	Nomor	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPDP				Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPIP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
				SPIP	MRI	-	D	Kualitas identifikasi risiko dan register risiko belum memadai	<p>setidaknya memuat hal berikut: a. uraian tujuan/sasaran strategis/Kegiatan, b. Indikator tujuan/sasaran strategis/Kegiatan, c. Uraian Risiko, d. Pemilik risiko, e. Uraian dan sumber penyebab, f. Uraian dan pihak yang terdampak;</p> <p>6. Pernyataan risiko, KTP penyebab sebagai besar jelas/dapat dipahami (50%-70% sampling)</p> <p>Kualitas Identifikasi Risiko dan Risk Register belum memadai bila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses identifikasi risiko mengabaikan daftar risiko 2. Belum seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan rencana telah diidentifikasi risikonya; 3. Pihak yang terlibat kurang dari 2/3 pegawai unit kerja yang benar-benar memahami proses bisnis organisasi; 4. Proses identifikasi belum sesuai dengan kebijakan yang dibuat, baru sebatas 1-2 proses yang sesuai dengan kebijakannya; 5. Risk register yang dibuat belum sesuai dengan kriteria memadai yaitu masih ada hal-hal sebagai berikut ini yang tidak dicantumkan: a. uraian tujuan/sasaran strategis/Kegiatan, b. Indikator tujuan/sasaran strategis/Kegiatan, c. Uraian Risiko, d. Pemilik risiko, e. Uraian dan sumber penyebab, f. Uraian dan pihak yang terdampak 5. Pernyataan risiko, KTP penyebab secara umum 	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP												Kesimpulan Akhir Y/T	
				SPP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)					
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		
2.2	Analisis Risiko	1	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat ketegorsidannya	SPIP	MRI	-	E	<p>terintegrasi dengan proses bisnis dan perencanaan operasional unit kerja serta telah diterapkan secara konsisten</p> <p>Proses manajemen risiko telah terintegrasi dengan proses bisnis dan perencanaan operasional unit kerja namun belum diterapkan secara konsisten</p>	<p>dengan proses bisnis utama dari unit kerja diterapkan dalam proses perencanaan unit kerja. Namun demikian implementasi dari proses manajemen risiko ini belum dilakukan secara konsisten oleh unit kerja Sudah Jelas</p>	W/D/O	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	2.8	Y		
				SPIP	MRI	-	B	<p>Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja dan risiko strategis K/L/D</p>	<p>A. Instansi Pemerintah telah melakukan analisis risiko untuk hasil identifikasi risiko di tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategi K/L/D secara memadai yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah sesuai dengan kebijakan (termasuk selevel risiko dan langkah analisis); 2. Kriteria yang digunakan baik dampak maupun probabilitasnya konsisten antara satu unit kerja dengan unit kerja lain; 3. Proses analisis risiko dilaksanakan sertidanya oleh orang2 yang memiliki kompetensi; 4. Hasil dari proses ini telah menghasilkan tren risiko. 	<p>A. Instansi Pemerintah telah melakukan analisis risiko untuk hasil identifikasi risiko di tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja secara memadai yaitu:</p>	W/D/O	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Kode	Uraian Subunsur	Nomor	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPDP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPIP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
								<p>1. Telah sesuai dengan kebijakan termasuk selesai risiko dan langkah analisis;</p> <p>2. Kriteria yang digunakan baik dampak maupun probabilitasnya konsisten antara satu unit kerja dengan unit kerja lain;</p> <p>3. Proses analisis risiko dilaksanakan selanjutnya oleh orang2 yang memiliki kompetensi;</p> <p>E. Hasil dari proses ini telah menghasilkkan tren risiko.</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	Y	
						C	Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja	<p>A. Instansi Pemerintah telah melakukan analisis risiko untuk hasil identifikasi risiko di tingkat operasional unit kerja secara memadai yaitu:</p> <p>1. Telah sesuai dengan kebijakan termasuk selesai risiko dan langkah analisis;</p> <p>2. Kriteria yang digunakan baik dampak maupun probabilitasnya konsisten antara satu unit kerja dengan unit kerja lain;</p> <p>3. Proses analisis risiko dilaksanakan selanjutnya oleh orang2 yang memiliki kompetensi.</p> <p>E. Hasil dari proses ini telah menghasilkkan tren risiko.</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	
						D	Analisis risiko telah dilakukan terhadap seluruh risiko operasional yang teridentifikasi namun belum memadai	<p>Instansi Pemerintah telah melakukan proses analisis risiko terhadap seluruh risiko operasional unit kerja yang telah diidentifikasi. Namun demikian proses analisis risiko belum dikerjakan secara memadai sesuai dengan 3 kriteria sistematis (sebagaimana disebutkan pada kriteria C)</p> <p>Analisis hanya dilakukan pada sebagian dari keseluruhan risiko yang</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	
						E	Analisis risiko telah dilakukan terhadap sebagian		W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
		2	K/L/D telah menentukan prioritas risiko	SPIP	MRI	-	A	<p>risiko operasional yang teridentifikasi</p> <p>1. Instansi Pemerintah telah melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas risiko operasional unit kerja, dan strategis K/L/D terhadap seluruh hasil analisis risiko yang telah dilakukan;</p> <p>2. Proses evaluasi risiko telah didokumentasikan.</p> <p>3. Evaluasi risiko dilakukan sesuai dengan kebijakan kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya</p>	W/D/O		T		T					T	
				SPIP	MRI	-	B	<p>Instansi Pemerintah telah menentukan prioritas risiko operasional unit kerja dan strategis K/L/D terhadap seluruh hasil analisis risiko yang telah ditetapkan sebelumnya</p> <p>1. Instansi Pemerintah telah melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja terhadap seluruh hasil analisis risiko yang telah dilakukan;</p> <p>2. Proses evaluasi risiko telah didokumentasikan.</p> <p>3. Evaluasi risiko dilakukan sesuai dengan kebijakan kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya</p>	W/D/O		T		T					T	
				SPIP	MRI	-	C	<p>Instansi Pemerintah telah menentukan prioritas risiko operasional unit kerja dan strategis risiko sebagian risiko yang telah ditetapkan sebelumnya</p> <p>1. Instansi Pemerintah telah melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko terhadap seluruh hasil analisis risiko yang telah dilakukan;</p> <p>2. Proses evaluasi risiko telah didokumentasikan.</p> <p>3. Evaluasi risiko dilakukan sesuai dengan kebijakan kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya</p>	W/D/O		Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Belum	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	Y
				SPIP	MRI	-	D	<p>Instansi Pemerintah telah menentukan prioritas risiko</p> <p>1. Instansi Pemerintah telah melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas risiko</p>	W/D/O		Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP					Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
							pada seluruh risiko operasional unit kerja	operasional unit kerja serta telah mendokumentasikan proses evaluasi risiko tersebut evaluasi risiko telah dilakukan terhadap seluruh hasil analisis risiko yang telah dilakukan.											
							Instansi Pemerintah telah menentukan prioritas risiko pada sebagian risiko operasional unit kerja	1. Instansi Pemerintah telah melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas risiko operasional unit kerja serta telah mendokumentasikan proses evaluasi risiko tersebut namun demikian evaluasi risiko belum dilakukan terhadap seluruh hasil analisis risiko yang telah dilakukan.	W/D/O									Y	
		3	K/L/D telah menentukan rencana tindak pengendalian				Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D secara memadai	>50% RTP terhadap risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D yang disusun (sampling) telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas, penanggung jawab, ukuran pelaksanaan, secara substansi dinilai dapat mengurangi dampak/mengulangi penyebab,realistis.	W/D/O									T	
							Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja secara memadai	<60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja yang disusun (sampling) telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas target waktu, penanggung jawab, ukuran pelaksanaan, secara pelaksanaan, secara substansi dinilai dapat mengurangi	W/D/O										T

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian
						C	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja yang telah diprioritaskan	dampak/menghilangkan penyebab,realistis. >60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja dan <60% RTP terhadap risiko strategis unit kerja yang disusun (sampling) telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas target waktu, penanggung jawab, ukuran pelaksanaan, secara substansial dinilai dapat mengurangi dampak/menghilangkan penyebab,realistis.	W/D/O	Y	BahwaTelah	Y	BahwaTelah	T	BahwaTelah	Y	Y		
						D	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja yang telah diprioritaskan	>60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja yang disusun (sampling) telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas target waktu, penanggung jawab, ukuran pelaksanaan, secara substansial dinilai dapat mengurangi dampak/menghilangkan penyebab,realistis.	W/D/O	Y	BahwaTelah	Y	BahwaTelah	Y	BahwaTelah	Y	Y		
						E	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap sebagian risiko operasional unit kerja yang telah diprioritaskan	<60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja yang disusun (sampling) telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas target waktu, penanggung jawab, ukuran pelaksanaan, secara substansial dinilai dapat mengurangi dampak/menghilangkan penyebab,realistis.	W/D/O	Y	BahwaTelah	Y	BahwaTelah	Y	BahwaTelah	Y	Y		
4	Tidak pengendalian telah diimplementasikan					A	Tidak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja, risiko strategis unit kerja, dan risiko strategis K/L/D telah diimplementasikan	>60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja, dan strategis unit kerja, dan strategis K/L/D (sampling) yang direncanakan telah diimplementasikan dan didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan	W/D/O	T		T		T		T	T		
						B	Tidak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional	>60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja (sampling) yang	W/D/O	T		T		T		T	T		

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T					
				SPIP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)				
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	
								ditangani diluar batas risk tolerance), dari 20 risiko tersebut ternyata terdapat 5 kejadian risiko yang mana 2 kejadian masih dalam batas risk tolerance sedangkan 3 kejadian diluar batas risk tolerance. Maka efektivitas penanganan risiko dihitung dengan cara $\{(20-3)/20\} \times 100\% = 85\%$.																
							Tidak pengendalian efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja	RTP untuk Risiko tingkat operasional unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar >60% dan risiko tingkat operasional unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar >60%. Misalnya terdapat 20 risiko yang perlu ditangani diluar batas risk tolerance), dari 20 risiko tersebut ternyata terdapat 5 kejadian risiko yang mana 2 kejadian masih dalam batas risk tolerance sedangkan 3 kejadian diluar batas risk tolerance. Maka efektivitas penanganan risiko dihitung dengan cara $\{(20-3)/20\} \times 100\% = 85\%$.	W/D/O	Y	Bahwa Telah	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T				T
							Tidak pengendalian efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja	RTP untuk risiko operasional unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar >60%	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
							Tidak pengendalian efektif menurunkan sebagian risiko operasional unit kerja	RTP untuk risiko operasional unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar <60%	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
3.1	Revisi atas Kinerja Instansi Pemerintah																						3	
		1	Pimpinan K/L/D membandingkan	SPIP					a. Terdapat perbaikan yang berkelanjutan atas kinerja organisasi, unit	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
								dengan mempertimbangkan gap kompetensi pegawai dan penugasan yang akan dilaksanakannya - Pembinaan SDM dilakukan sebagai upaya untuk menanganai risiko yang disebabkan kelemahan SDM/Manajemen oleh penanggungjawab pengelolaan SDM - Kebijakan telah dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan	W/D/O	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Y					
						D	Kebijakan terkait pembinaan SDM telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan		W/D/O	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Y					
						E	Terdapat Kebijakan yang mengatur pembinaan SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	Kebijakan telah mengatur: - Prosedur pendidikan dan pelatihan pegawai - Rencana pengembangan karir pegawai - Sistem penilaian kinerja pegawai - Sistem kompensasi, program kesejahteraan, dan fasilitas pegawai untuk seluruh pegawai baik pimpinan maupun staf	W/D/O	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Y					
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi													3					
		1	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi aset dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	SPIP	-	-	A	Perbaikan terkait pengelolaan sistem informasi organisasi dilakukan secara berkesinambungan.	W/D/O	T	T	T	T	T					

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T					
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)				
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	
				SPIP	-	-	E	Kebijakan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi organisasi telah dievaluasi secara berkala.	K/L/D melakukan evaluasi atas K/SOP terkait pengelolaan sistem informasi beserta implementasinya dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Telah dilaksanakan evaluasi berkala; 2. Evaluasi dilaksanakan untuk mengontrol residual risk; 3. Tidak lanjut atas hasil evaluasi telah dilaksanakan; 4. Forbalkan menghasilkan perbaikan kualitas atas informasi yang dihasilkan.	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	T		
				SPIP	-	-	C	Kebijakan pengelolaan sistem informasi organisasi digunakan dalam analisis kebutuhan dukungan sistem informasi, pemanfaatan sistem informasi existing, serta struktur pengelola dan pengguna sistem informasi beserta wewenang dan tanggungjawabnya	Seluruh kebijakan/SOP tentang pengelolaan sistem informasi telah diimplementasikan, antara lain: a. Sistem informasi yang digunakan telah dianalisis kemampuannya bagi pencapaian tujuan organisasi; b. Aset-asat yang berhubungan dengan teknologi informasi telah dipelakan dan dicatat serta dianalisis kebutuhannya; c. Struktur organisasi pengelola sistem informasi telah menalakan proses bisnis yang diatur dengan SOP; d. Kewenangan dan tanggung jawab pengelola sistem informasi dan pengguna sistem informasi diilankan sesuai dengan perannya masing-masing.	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y
				SPIP	-	-	D	Unit pengelola sistem informasi organisasi dan pengguna mengetahui kebijakan pengelolaan sistem informasi.	Unit pengelola dan pengguna sistem informasi memahami prosedur pengelolaan sistem informasi dan tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing.	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y		

Kode	Uraian Subunsur	Nomor	Uraian Parameter	Kode Parameter			Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MRI	IEPK				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
										Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
				SPIP	-	-	E	Pimpinan organisasi menetapkan Kebijakan/ grand design pengelolaan sistem informasi.	Adanya kebijakan pengelolaan sistem informasi yang antara lain mempertimbangkan a. Risiko penggunaan sistem informasi; b. Prosedur otentikasi atas sistem informasi; c. Pendetapan aset teknologi informasi yang perlu dikelola dan rencana penyusunan kebijakan dan prosedur teknologi informasi; d. Penerapan struktur organisasi untuk mengelola sistem informasi (termasuk program pengamanan); e. Kebijakan dan prosedur pemisahan fungsi dalam pengelolaan sistem informasi; dan f. Pedoman rencana kontinjensi (contingency plan).	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset															3		
		1	Pengelolaan BRN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	A	Perbaikan berkelanjutan atas pengelolaan aset organisasi	Perbaikan berkelanjutan atas pengelolaan aset yang terintegrasi dan tersedia secara optimal dalam mendukung kinerja organisasi; antara lain ditunjukkan dengan kondisi: a. tidak terdapat aset dengan kondisi rusak baik ringan maupun berat; b. tidak terdapat keluhan atas penggunaan aset oleh pengguna; c. tidak terdapat aset perbad yang digunakan untuk keperluan organisasi akibat keterbatasan aset.	W/D/O	T	T	T	T	T	T		
				SPIP	-	-	B	Kebijakan/prosedur pengelolaan atas aset organisasi termasuk	K/L/D melakukan evaluasi atas K/SCP terkait pengendalian fisik atas aset beserta implementasinya dengan	W/D/O	T	T	T	T	T	T		

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T	
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)
							pengamanan fisik atas aset dievaluasi secara berkala	ketentuan sebagai berikut: a. Telah dilaksanakan evaluasi berkala; b. Evaluasi dilaksanakan untuk menangani residual risk; c. Tidak lanjut atas hasil evaluasi telah dilaksanakan; d. Evaluasi meningkatkan kemampuan penggunaan aset oleh pengguna aset dalam mendukung pencapaian kinerja.								
				SPIP	-	-	C	Kebijakan/prosedur pengelolaan aset aset organisasi termasuk pengamanan fisik atas aset diimplementasikan secara memadai	a. Kebijakan pengelolaan aset diimplementasikan, antara lain: - Aset yang berisiko hilang, dicuri, rusak, digunakan tanpa hak secara fisik diamankan dan akses ke aset tersebut dikendalikan. - Aset secara periodik dibaring dan dibandingkan dengan catatan pengendalian; setiap perbedaan diperiksa secara teliti. - Identitas aset dikaitkan pada masing-masing fisik aset. - Persediaan dan perlengkapan disimpan di tempat yang diamankan secara fisik dan dilindungi dari kerusakan. b. Observasi dilakukan secara rutin oleh pengelola aset untuk melihat secara langsung kegiatan pengamanan dan penggunaan aset sudah sesuai dengan kebijakan/SOP yang ditetapkan. c. Kejadian dalam penggunaan aset yang menimbulkan risiko rusak segera ditangani dengan pengamanan dan perbaikan yang diperlukan agar aset dapat segera digunakan	Y Bahwa ... Telah	Y Bahwa ... Telah	T Belum	T Belum	Y Bahwa ... Telah	Y	

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
				SP	IK					Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T			
				SPIP	-	-	D	Kebijakan terkait otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan	<ul style="list-style-type: none"> operasional organisasi Pungut otorisasi dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur Kebijakan telah dipantau oleh penanggungjawab pengelolaan keuangan/kegiatan Kebijakan telah dikomunikasikan kepada pemosisi (struktural) dan pegawai 	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y
				SPIP	-	-	E	Terdapat kebijakan yang mengatur prosedur otorisasi atas transaksi dan kejadian	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan telah mengatur Kondisi dan/atau syarat spesifik suatu transaksi atau kejadian dapat diotorisasi Pihak yang berwenang melakukan otorisasi sesuai lingkup otorisasinya 	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian														3		
			Terdapat proses untuk memastikan transaksi terkait aset telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	SPIP	-	-	A	Pencatatan atas transaksi telah kejadian telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Proses pencatatan telah mampu menyesuaikan lingkungan strategis Proses pencatatan secara efektif mampu menitigasi risiko mampu mengatasi transaksi dan penyalahgunaan wewenang Proses pencatatan mampu menghasilkan informasi yang relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen dalam mengendalikan operasi dan mengambil keputusan 	W/D/O	T	T	T	T	T	T	
				SPIP	-	-	B	Kebijakan dan implementasi terkait pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dievaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan: Berkala Terdokumentasi 	W/D/O	T	T	T	T	T	T	

Kode	Uraian Subunsur	Nomor	Uraian Parameter	Kode Parameter			Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MRI	IEPK				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
										Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
						sebagaimana dapat diketahui efektivitasnya	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan untuk mengurangi residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjut - Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik 											
						Pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Pencatatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan/keputusan, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/stau kebijakan lain) - Pencatatan dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan (akuntansi keuangan dan BMN/EMD) maupun kegiatan teknis operasional organisasi - Pungsi pencatatan dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur 	W/D/O								Y		
						Kebijakan terkait pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan telah dipahami oleh penanggungjawab pelaksanaan kegiatan - Kebijakan telah dikomunikasikan kepada pimpinan (struktural) dan pegawai 	W/D/O									Y	
						Terdapat kebijakan yang mengatur prosedur pencatatan atas transaksi dan kejadian	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pencatatan untuk seluruh siklus transaksi dan kejadian yang mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir - Klasifikasi yang jelas untuk seluruh transaksi dan kejadian - Tenggat waktu pencatatan seluruh transaksi dan kejadian 	W/D/O									Y	
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatan															3		

Kode	Uraian Subunsurnya	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4	
				SPIP	-	-	D	<p>Kebijakan terkait pembatasan akses terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan</p> <p>Terdapat kebijakan yang mengatur prosedur pembatasan akses terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi beserta pencatatannya</p>	<p>- Kebijakan telah dipahami oleh penguji/anggota dan BMD/BMD</p> <p>- Kebijakan telah dikomunikasikan kepada pimpinan (struktural) dan pegawai</p>	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y
				SPIP	-	-	E	<p>Terdapat kebijakan yang mengatur pembatasan akses terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi beserta pencatatannya</p>	<p>Kebijakan telah mengantar</p> <p>- Mekanisme/desain pembatasan akses yang tidak diinginkan terhadap sumber daya</p> <p>- Mekanisme/desain pembatasan akses yang tidak diinginkan terhadap pembatasan sumber daya</p>	W/D/O	Y	Y	Y	Y	
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatannya														3
		1	<p>Terdapat pertanggungjawaban atas orang atau unit organisasi dalam mengelola aset yang diberikan/dikuasai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi</p>	SPIP	-	-	A	<p>Pertanggungjawab an terhadap sumber daya dan pencatatannya telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi</p>	<p>- Proses pertanggungjawaban telah mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis</p> <p>- Proses pertanggungjawaban secara efektif mampu mitigasi risiko penggunaan secara tidak sah dan penyalahgunaan wewenang</p> <p>- Pertanggungjawaban terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dibagikan kepada pihak/pegawai sesuai dengan kewenangannya</p>	W/D/O	T	T	T	T	T
				SPIP	-	-	B	<p>Kebijakan dan implementasi terkait akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya</p>	<p>Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan:</p> <p>- Berkala</p> <p>- Terdokumentasi</p> <p>- Dilakukan untuk mengurangi risiko</p> <p>- Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti</p> <p>- Perbaikan telah menghasilkan kinerja</p>	W/D/O	T	T	T	T	T

Kode	Uraian Subunsur	Nomor	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)			
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T				
				SPIP	-	-	C	Sumber daya dan pencatatannya telah dipertanggungjawabkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> yang lebih baik - Pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan/keputusan, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan [satu] - Dilakukan perbandingan perilaku antara sumber daya dengan pencatatannya - Pertanggungjawaban dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan (akuntansi keuangan dan EMN/EMD) maupun kegiatan teknis operasional organisasi - Pertanggungjawaban terhadap sumber daya dan pencatatannya direvisi secara periodik - Fungsi pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk menanganai risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur 	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah Belum	T	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y
				SPIP	-	-	D	Kebijakan terkait pertanggungjawaban sumber daya dan pencatatannya telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan telah dipahami oleh penanggungjawab pengelolaan keuangan dan EMN/EMD - Kebijakan telah dikomunikasikan kepada pimpinan [struktural] dan pegawai 	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y
				SPIP	-	-	E	Terdapat Kebijakan yang mengatur prosedur pertanggungjawaban sumber daya dan pencatatannya	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan telah mengatur: - Mekanisme pertanggungjawaban penyimpanan, penggunaan, dan pencatatan sumber daya - Penetapan pihak/pegawai yang bertanggungjawab - Penetapan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan/dibuat 	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y
3.11	Dokumen															3			

Kode	Uraian Subunsur	Nomor	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T	
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)
				SPIP	-	-	B	<p>Klasifikasi informasi telah dievaluasi dan ditindaklanjuti sehingga dapat disajikan dengan tepat waktu, andal, dan relevan.</p>	<p>telah memenuhi ekspektasi stakeholder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi produk, standar, prosedur layanan/pelaksanaan tugas fungsi dan pengaduan telah dievaluasi dan ditindaklanjuti sehingga: <ol style="list-style-type: none"> Jelas klasifikasi informasi; Jelas prosedur pengolahan informasi; Disajikan tepat waktu, andal, dan relevan. - Informasi layanan internal (keuangan, kepegawaian, umum, dsb) telah dievaluasi dan ditindaklanjuti sehingga: <ol style="list-style-type: none"> Jelas klasifikasi informasi; Jelas prosedur pengolahan informasi; Disajikan tepat waktu, andal, dan relevan. - Informasi manajemen kinerja (rencana kinerja, capaian kinerja, dsb) telah dievaluasi dan ditindaklanjuti sehingga: <ol style="list-style-type: none"> Jelas klasifikasi informasi; Jelas prosedur pengolahan informasi; Disajikan tepat waktu, andal, dan relevan. 	W/D/O	Y	T	T	T	T	T
				SPIP	-	-	C	<p>Informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia secara lengkap dan mudah untuk diperoleh</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi produk, standar, prosedur layanan/pelaksanaan tugas fungsi dan pengaduan tersedia secara lengkap dan mudah diakses; - Informasi layanan internal (keuangan, kepegawaian, umum, dsb) tersedia secara lengkap dan mudah diakses; - Informasi manajemen kinerja (rencana kinerja, capaian kinerja, dsb) tersedia secara lengkap dan mudah diakses. 	W/D/O	Y	Y	T	T	T	Y

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T		Y/T	Y/T	Y/T	Y/T
			SPIP	-	-	D	Informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia secara lengkap namun tidak mudah diperoleh/akses terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi produk, standar, prosedur layanan/pelaksanaan tugas fungsi dan pengaduan tersedia secara lengkap, namun tidak mudah diakses; - Informasi layanan internal (keuangan, kepegawaian, umum, dsb) tersedia secara lengkap, namun tidak mudah diakses. - Informasi manajemen kinerja (rencana kinerja, capaian kinerja, dsb) tersedia secara lengkap, namun tidak mudah diakses. 	W/D/O	Y	Bahwa Telah Y	Y	Bahwa Telah Y	Y	Bahwa Telah Y	Y			
			SPIP	-	-	E	Ketersediaan informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tidak lengkap	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi produk, standar, prosedur layanan/pelaksanaan tugas fungsi dan pengaduan belum tersedia secara lengkap; - Informasi layanan internal (keuangan, kepegawaian, umum, dsb) belum tersedia secara lengkap; - Informasi manajemen kinerja (rencana kinerja, capaian kinerja, dsb) belum tersedia secara lengkap. 	W/D/O	Y	Bahwa Telah Y	Y	Bahwa Telah Y	Y	Bahwa Telah Y	Y			
2	Flintolan K/L/D membangun sistem pengaduan		SPIP	MRI	-	A	Sistem pengaduan berdampak pada perbaikan berkelanjutan	Perbaikan berkelanjutan antara lain berdampak pada peningkatan kinerja, perbaikan pelayanan publik, dan kepuasan stakeholder.	W/D/O	T		T		T		T			
			SPIP	MRI	-	B	Sistem pengaduan telah dievaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan: - Berkala - Terdokumentasi - Dilakukan untuk mengurangi residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti - Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik 	W/D/O	T		T		T		T		T	
			SPIP	MRI	-	C	Sistem pengaduan telah diterapkan dan	Sudah Jelas	W/D/O	Y	Bahwa Telah Y	Y	Bahwa Telah Belum	T	Bahwa Telah Belum	Y			

Kode	Uraian Subunsur	Nomor	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
							tingkat operasional unit kerja												
				SPIP	MRI	-	E	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan pada sebagian pegawai pada tingkat operasional unit kerja	<60% pegawai sample pada tingkat operasional unit kerja menunjukkan pengetahuan akan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y		
		4	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	SPIP	MRI	-	A	Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional Unit Kerja/OPD, strategi Unit Kerja/OPD dan Strategi K/L/D telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait dan dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan serta menjadi bahan pembelajaran dan inovasi	Komunikasi Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional Unit Kerja/OPD, dan strategis Unit Kerja/OPD telah dilakukan kepada semua pihak yang telah diidentifikasi dalam rencana komunikasi sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP yang telah disusun sebelumnya dan dijadikan bahan pembuatan keputusan oleh pihak-pihak tersebut serta menjadi bahan pembelajaran dan inovasi bagi K/L/D	W/D/O	T		T		T	T			
				SPIP	MRI	-	B	Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional Unit Kerja/OPD, strategi Unit Kerja/OPD dan Strategi K/L/D telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait dan dijadikan bahan pengambilan keputusan	Komunikasi Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional Unit Kerja/OPD, dan strategis Unit Kerja/OPD telah dilakukan kepada semua pihak yang telah diidentifikasi dalam rencana komunikasi sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP yang telah disusun sebelumnya dan dijadikan bahan pembuatan keputusan oleh pihak-pihak tersebut.	W/D/O	T		T		T		T		
				SPIP	MRI	-	C	Register risiko dan rencana tindak pengendalian operasional Unit Kerja/OPD, strategi Unit	Komunikasi Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional Unit Kerja/OPD, strategi Unit Kerja/OPD, dan strategis	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	Y	Y	

Kode	Uraian Subunsur	Nomor	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
								<p>pengkomunikasian perubahan tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, fokus dan prioritas namun belum dilakukan secara terstruktur dan berkala;</p> <p>- Telah dilakukan komunikasi terkait risiko dan kegiatan pengendalian namun belum dilakukan secara terstruktur dan berkala.</p> <p>- Upaya pemrose/ sosialisasi tentang produk/layanan/ pelaksanaan tugas tugas dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik/stakeholder belum dilakukan;</p> <p>- Upaya komunikasi dengan publik/stakeholder untuk mengatasi isu negatif belum dilakukan;</p> <p>- Telah dilakukan pengkomunikasian perubahan tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, fokus dan prioritas namun belum terstruktur dan berkala;</p> <p>- Telah dilakukan komunikasi terkait risiko dan kegiatan pengendalian namun belum terstruktur dan berkala.</p>											
5.1	Pantauan Berkelanjutan						E	<p>Komunikasi yang efektif dengan eksternal belum dilakukan</p>	W/D/O								3		
		1	Pimpinan organisasi/peran menggunakan program dan kegiatan/peran menggunakan operasional mengelola secara berkala pengendalian internal pengelolaan aset yang telah																

Kode	Uraian Subunsur	Nomor	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)		
			dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.															
				SPIP	-	-	B	Seluruh hasil pemantauan berkesinambungan dikelola dan ditindaklanjuti	Seluruh hasil pemantauan dikelola dan ditindaklanjuti. Pemantauan dilaksanakan: a. Secara berkala; b. Pemantauan menilai pelaksanaan pengendalian (membandingkan rencana tindak pengendalian dengan pelaksanaan dan memberikan rekomendasi perbaikan); c. Hasil pemantauan dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi.	W/D/O						T		
				SPIP	-	-	C	Pemantauan pelaksanaan telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian dan terkait pemantauan kinerja telah dilaksanakan pada level program, unit kerja level dibawahnya sesuai dengan pemantauan kinerja individu, namun hasil pemantauan belum dikelola (tidak lanjut tidak termonitor)	Pemantauan dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian. Pemantauan dilaksanakan: a. Secara berkala; b. Pemantauan menilai pelaksanaan pengendalian (membandingkan rencana tindak pengendalian dengan pelaksanaan dan memberikan rekomendasi perbaikan); c. Hasil pemantauan dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi. Pemantauan atas kinerja K/L/D, unit level I, unit level II, unit level III dan pemantauan kinerja individu membahas: a. Capaian pelaksanaan rencana aksi; b. Hambatan; c. Rencana kedepan.	W/D/O								Y

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
								level II, unit level III dan pemantauan kinerja individu membahas: a. Capaian pelaksanaan rencana aksi; b. Hambatan; c. Rencana ke depan.											
						D	Pemantauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan pada sebagian aktivitas pengendalian dan terkait pemantauan kinerja telah dilaksanakan pada level program dan kegiatan	<p>W/D/O</p> <p>Pemantauan dilakukan pada sebagian aktivitas pengendalian. Pemantauan dilaksanakan: a. Secara berkala; b. Pemantauan melalui pelaksanaan pengendalian (membandingkan rencana tindak pengendalian dengan pelaksanaan dan memberikan rekomendasi perbaikan); c. Hasil pemantauan dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi.</p> <p>Pemantauan atas kinerja K/L/D, unit level I, unit level II, unit level III dan pemantauan kinerja individu membahas: a. Capaian pelaksanaan rencana aksi; b. Hambatan; c. Rencana ke depan.</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	
						E	Pemantauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan	<p>W/D/O</p> <p>- Pemantauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan;</p> <p>- Pemantauan pelaksanaan kinerja telah dilaksanakan.</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	
		2	Proses manajemen risiko telah direvisi			A	Sudah dilakukan revisi atas seluruh risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D dan hasil revisi dijadikan bahan perbaikan organisasi	<p>W/D/O</p> <p>Kejadian, framework, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dilaksanakan terkait dengan proses manajemen risiko telah direvisi oleh pihak internal dari instansi Pemerintah (oleh APUP maupun Komite manajemen risiko) untuk semua risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, strategis K/L/D. Hasil revisi telah</p>	W/D/O	T		T		T		T			

Kode	Uraian Subunsur	Nomor	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPDP				Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPIP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)		
			Monitoring terhadap risiko telah dilakukan		I		terhadap risiko dan tidak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja, strategi unit kerja, dan strategis K/L/D secara memadai dan menjadi bahan pembelajaran bagi unit kerja	<ol style="list-style-type: none"> Telah ada langkah Monitoring sesuai kebijakan; Monitoring dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sesuai kebijakan; Monitoring dilakukan oleh unit kepatuhan dan dilaksanakan minimal satu kali per semester atau sesuai dengan kebutuhan; Proses dan hasil Monitoring telah didokumentasikan; Monitoring sepenuhnya dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> implementasi pengendalian; kejadian risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan segera); Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko; Hasil monitoring menunjukkan kondisi yang baik; Hasil Monitoring seluruhnya telah ditindaklanjuti; Terdapat implementasi perbaikan atas hasil monitoring 										
				SPIP	MRI	-	B	Monitoring terhadap risiko dan tidak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD, strategi unit kerja/OPD dan strategis K/L/D secara memadai	<p>Memadai Berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah ada langkah Monitoring sesuai kebijakan; Monitoring dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sesuai kebijakan; Monitoring dilakukan oleh unit kepatuhan dan dilaksanakan minimal satu kali per semester atau sesuai dengan kebutuhan; Proses dan hasil Monitoring telah didokumentasikan; Monitoring sepenuhnya dilakukan terhadap: 	W/D/O								

Kode	Uraian Subunsur	Nomor	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPDP				Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPIP	MR I	IEP K					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)	
								<p>a. implementasi pengendalian;</p> <p>b. Kejadian Risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan segera);</p> <p>c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko.</p> <p>5. Hasil monitoring menunjukkan kondisi yang baik;</p> <p>7. Hasil Monitoring sebagian telah ditindaklanjuti.</p>									
				SPIP	MR I	*	C	<p>Monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit Kersy/OPD dan strategi unit kersy/OPD secara memadai</p>	<p>Memadai berarti:</p> <p>1. Telah ada langkah Monitoring sesuai kebijakan;</p> <p>2. Monitoring dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sesuai kebijakan;</p> <p>3. Monitoring dilakukan oleh unit bepatuhin dan dilaksanakan minimal satu kali per semester atau sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>4. Proses dan hasil Monitoring telah didokumentasikan;</p> <p>5. Monitoring sepenuhnya dilakukan terhadap:</p> <p>a. implementasi pengendalian;</p> <p>b. Kejadian Risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan segera);</p> <p>c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko.</p> <p>5. Hasil monitoring menunjukkan kondisi yang baik;</p> <p>7. Hasil Monitoring sebagian telah ditindaklanjuti.</p>	W/D/O	Y	Y	T	T	Bahwa ... Telah ... Belum ...	Bahwa ... Telah ... Belum ...	Y
				SPIP	MR I	*	D	<p>Monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit</p>	<p>Memadai berarti:</p> <p>1. Telah ada langkah Monitoring sesuai kebijakan;</p> <p>2. Monitoring dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sesuai</p>	W/D/O	Y	Y	T	T	Bahwa ... Telah ... Belum ...	Bahwa ... Telah ... Belum ...	Y

Kode	Uraian Subunsur	Nomor	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP					Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
							kebersihan: 3. Monitoring dilakukan oleh unit kepatuhan dan dilaksanakan minimal satu kali per semester atau sesuai dengan kebutuhan; 4. Proses dan hasil Monitoring telah didokumentasikan; 5. Monitoring sepenuhnya dilakukan terhasp: a. implementasi pengendalian; b. kejadian risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan segera); c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelalaan risiko. 6. Hasil monitoring menunjukkan kondisi yang baik; 7. Hasil Monitoring sebagian telah ditindaklanjuti.												
							kears/OPD secara memadai												
							Monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD namun belum memadai												
								Belum memadai berarti: 1. Monitoring dilakukan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan; 2. Monitoring dilakukan oleh atasan langsung unit UPR dan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun; 3. Proses dan hasil Monitoring tidak didokumentasikan; 4. Monitoring belum sepenuhnya dilakukan terhasp: a. implementasi pengendalian; b. kejadian risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan segera); c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelalaan risiko. 5. Hasil monitoring menunjukkan kondisi yang belum baik; 6. Hasil Monitoring tidak ditindaklanjuti.	W/D/O										

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP					Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4	Unit/OPD... (n)				
5.2	Evaluasi Terpisah	1	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disarankan dan dapat melibatkan APP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian terkait pengelolaan aset, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi	SPIP	-	-	A	Pertemuan berkesinambungan atas pelaksanaan evaluasi terpisah berdampak pada peningkatan kualitas pengendalian intern dan pencapaian tujuan organisasi Seluruh hasil evaluasi terpisah dikesala dan ditindaklanjuti. Pengelolaan hasil antara lain dilakukan dengan dokumentasi yang baik dan monitoring atas penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi terpisah.	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T			
				SPIP	-	-	B	Seluruh hasil evaluasi terpisah dikesala dan ditindaklanjuti. Pengelolaan hasil antara lain dilakukan dengan dokumentasi yang baik dan monitoring atas penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi terpisah.	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T			
				SPIP	-	-	C	Evaluasi terpisah telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian dan kegiatan serta dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan dengan metodologi yang tepat, namun hasil evaluasi terpisah belum ditindaklanjuti seluruhnya - Evaluasi dilakukan pada seluruh program kegiatan. Evaluasi dianggap dilaksanakan jika: a. Dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan independen; b. Evaluasi menilai kecukupan pelaksanaan pengendalian (maturlas dan efektifitas pengendalian); c. Memberikan rekomendasi yang relevan; d. Rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjuti sebagian. - Evaluasi dilakukan pada seluruh program kegiatan. Evaluasi dianggap dilaksanakan jika: a. Dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan independen; b. Evaluasi menilai keseluruhan program dan program dengan sasaran; c. Memberikan rekomendasi yang relevan;	W/D/O	T	Bahwa, Telah	Bahwa, Telah	Bahwa, Telah	Bahwa, Telah	Bahwa, Telah	Bahwa, Telah	Bahwa, Telah	Bahwa, Telah	T

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP					Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPIP	MR I	IEPK					Unit/OPD 1 Y/ T	Unit/OPD 2 Y/ T	Unit/OPD 3 Y/ T	Unit/OPD 4 Y/ T	Unit/OPD... (n) Y/ T				
								<p>merewu rencana dan implementasi pengendalian serta kesediaan risiko serta respon yang dilakukan</p> <p>5. Hasil rewu menunjukkan kondisi yang seluruhnya telah sesuai dengan standar dan kebijakan serta dapat disimpulkan baik;</p> <p>7. Hasil rewu seluruhnya telah ditindaklanjuti;</p> <p>8. Terdapat implementasi perbaikan atas hasil rewu.</p>	W/D/O										
				SPIP	MR I	-	B	<p>Rewu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD, strategi unit kerja/OPD, dan strategi K/L/D memadai</p>	<p>Memadai berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah ada pedoman rewu yang terstandar yang merujuk pada best practice; Rewu dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan pedoman; Rewu dilakukan oleh APIP minimal satu kali per tahun; Proses dan hasil rewu telah didokumentasikan; Rewu dilakukan untuk merewu rencana dan pengendalian serta kejadian risiko serta respon yang dilakukan Hasil rewu menunjukkan sebagian besar kondisi yang ada telah sesuai dengan standar dan kebijakan serta dapat disimpulkan baik; Hasil rewu sebagian besar telah ditindaklanjuti. 										
				SPIP	MR I	-	C	<p>Rewu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD dan strategi unit kerja/OPD memadai</p>	<p>Memadai berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah ada pedoman rewu yang terstandar; Rewu dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan pedoman yang terstandar; Rewu dilakukan oleh APIP dan dilaksanakan minimal satu kali per tahun; 	W/D/O									

Kode	Uraian Subunsur	Nomor	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPIP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)		
								<p>4. Proses dan hasil rewiu telah didokumentasikan;</p> <p>5. Rewiu dilakukan untuk merewiu rencana dan implementasi pengendalian serta kejadian risiko serta respon yang dilakukan</p> <p>6. Hasil rewiu menunjukkan sebagian besar kondisi yang ada telah sesuai dengan standar dan kebijakan serta dapat disimpulkan baik;</p> <p>7. Hasil rewiu sebagian besar telah didinindaklanjuti.</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y
							<p>Rewiu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD cukup memadai</p>	<p>Cukup memadai berarti:</p> <p>1. Rewiu dilakukan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan;</p> <p>2. Belum ada pedoman rewiu yang terstandar</p> <p>3. Rewiu dilakukan oleh APJP dan dilaksanakan oleh minimal satu kali per tahun;</p> <p>4. Proses dan hasil rewiu telah didokumentasikan;</p> <p>5. Rewiu dilakukan untuk merewiu rencana dan pengendalian serta kejadian risiko serta respon yang dilakukan</p> <p>6. Hasil rewiu menunjukkan sebagian kondisi yang ada sesuai dengan standar dan kebijakan;</p> <p>7. Hasil rewiu sebagian kecil ditindaklanjuti;</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y
							<p>Rewiu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD belum memadai</p>	<p>Belum memadai berarti:</p> <p>1. Rewiu dilakukan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan;</p> <p>2. Belum ada pedoman rewiu yang terstandar</p> <p>3. Rewiu dilakukan oleh APJP dan dilaksanakan minimal satu kali per tahun;</p> <p>4. Proses dan hasil rewiu telah didokumentasikan;</p> <p>5. Rewiu dilakukan untuk merewiu rencana dan</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad e	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4	Unit/OPD 5	Unit/OPD 6	Unit/OPD 7	Unit/OPD 8		Unit/OPD 9	Unit/OPD 10	
									implementasi pengendalian serta kejadian risiko serta respon yang dilakukan 6. Hasil rewu menunjukkan sebagian kecil kondisi yang ada sesuai dengan standar dan kebijakan; 7. Hasil rewu belum ditindaklanjuti;		Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	

11. KK 3.4 – STRUKTUR DAN PROSES

KERTAS KERJA HASIL PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES
TUJUAN : KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terlekat Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1	Unit/OPD 2	Unit/OPD 3	Unit/OPD 4		Unit/OPD... [n]	
1.1	Pengakuan Integritas dan Nilai Etika	1	K/L/D menegaskan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku	SPIP	-	-	A	Pengakuan integritas dan nilai etika telah diperbaiki secara berkelanjutan sehingga tercipta suasana kerja organisasi yang kondusif yang dapat mendorong kinerja para pegawai secara optimal	- Setiap individu dalam organisasi dapat mendorong penerapan nilai-nilai organisasi	- Setiap individu mendukung pencapaian kinerja organisasi	- Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dihubungkan dengan integritas dan perilaku individu serta mempengaruhi remunerasi individu	W/D/O	T	T	T	T	T
1.1				SPIP	-	-	B	Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan: - Berkala - Terdokumentasi - Dilakukan untuk menangani <i>residual risk</i> - Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti - Perbaikan telah dilaksanakan kinerja yang lebih baik	Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan: - Berkala - Terdokumentasi - Dilakukan untuk menangani <i>residual risk</i> - Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti - Perbaikan telah dilaksanakan kinerja yang lebih baik	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T
1.1				SPIP	-	-	C	Pengakuan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam organisasi	- Terdapat wujud keteladanan dari pimpinan atas nilai organisasi - Terdapat praktik pembangunan integritas dan nilai etika - Terdapat praktik penegakan nilai etika - Terdapat bukti penegakan disiplin - Terdapat pemberian <i>reward</i> bagi pegawai yang menegakan integritas dan nilai etika - Proses tersebut di atas dilaksanakan melalui	W/D/O	Y	Bahwa... Telah	Bahwa... Telah	Bahwa... Belum	Bahwa... Telah	Y	Y
3																	

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
1.1				SPIP	*	*	D	Kebijakan pengesahan integritas dan nilai etika organisasi telah dipahami oleh seluruh pegawai	struktur dan mekanisme yang ditetapkan kebijakan telah dikomunikasikan dan dipahami oleh: - Pimpinan (struktural) - Penanggungjawab pelaksanaan integritas dan nilai etika - Pegawai	W/D/O	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	Y		
1.1				SPIP	*	*	E	Terhadap kebijakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi	Kebijakan telah mengatur: - Keteladanan pimpinan - Upaya pembangunan integritas - Nilai etika - Pengesahan disiplin - Pemberian reward and punishment - Penetapan struktur dan mekanisme penanganan pelanggaran integritas dan nilai etika	W/D/O	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	Y		
1.1		2	Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup penyusunan kebijakan, penetapan struktur pengeloda risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi	SPIP	*	IEPK	A	Kebijakan antikorupsi menjangkau semua kegiatan dan terevaluasi terus-menerus oleh struktur pengeloda risiko korupsi yang bekerja efektif dengan kewenangan dan tanggung jawab yang memadai sehingga pengembangan kebijakan antikorupsi yang berkelanjutan benar-benar dilakukan.	- Komite/satgas/unit/tim yang ditetapkan dengan kewenangan dan tanggung jawab yang memadai untuk membantu pimpinan menyakini kepatuhan internal dan pelaksanaan agenda rutin dan kontinyu untuk meriviu dan mengevaluasi kebijakan antikorupsi. - Pengembangan kebijakan antikorupsi berkelanjutan mencakup perbaikan struktur standar perilaku, dan pernyataan kebijakan benar-benar dilakukan pimpinan sebagai hasil dari reviu dan evaluasi berkala.	W/D/O	Bahwa ... Telah	T	Bahwa ... Telah	T	Bahwa ... Telah	T	T		
1.1				SPIP	*	IEPK	B	Kebijakan antikorupsi telah diimplementasikan pada semua kegiatan, namun belum ada reviu dan evaluasi terhadap efektivitasnya yang dilakukan secara formal dan terjadwal.	- Komite/satgas/unit/tim yang ditetapkan untuk membantu pimpinan menyakini kepatuhan internal dan pengelolaan risiko korupsi telah bekerja dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. - Standar perilaku telah dipromosikan dalam berbagai cara, termasuk melalui keteladanan pimpinan, konsisten sesuai	W/D/O	Bahwa ... Telah	T	Bahwa ... Telah	T	Bahwa ... Telah	T	T		

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T
1.1				SPIP	-	IEPK	C	<p>Kebijakan antikorupsi telah diimplementasikan, tetapi belum menjangkau semua kegiatan utama organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan risiko korupsi belum ditetapkan secara permanen di dalam struktur organisasi</p>	<p>dengan pernyataan kebijakan antikorupsi yang diselaraskan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan antikorupsi yang termanifestasi pada penetapan struktur pengelolaan risiko korupsi dan penegakan standar perilaku telah mulai diimplementasikan, tetapi belum untuk semua kegiatan utama dan kegiatan pendukung. - Komite/pokja/satgas/unit yang diberi tanggung jawab dalam Pengelolaan risiko korupsi telah berusaha bekerja sesuai kewenangan yang diberikan. - Standar perilaku antikorupsi telah dipromosi dalam berbagai cara, s.l. terdapat bukti adanya tindakan penegakan standar perilaku oleh pimpinan. 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	T	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Belum ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y
1.1				SPIP	-	IEPK	D	<p>Kebijakan antikorupsi yang terwujud dalam penfasan struktur pengelolaan risiko korupsi dan standar perilaku antikorupsi baru pada tataran terdiseminasi dan masih diterapkan secara parsial saja dan terbatas lingkungannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ada pernyataan kebijakan antikorupsi secara eksplisit yang ditetapkan. - Ada komite/pokja/satgas/unit yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan risiko korupsi dengan kewenangan yang memadai - Ada Standar perilaku antikorupsi yang spesifik dan jelas mengatur perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan, namun kebijakan dan standar perilaku baru sebatas terdiseminasi dan diterapkan secara parsial dan terbatas lingkungannya. Struktur yang dibentuk belum bekerja secara efektif sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan. 	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y
1.1				SPIP	-	IEPK	E	<p>Kebijakan yang eksplisit untuk antikorupsi tidak ditetapkan, atau kalaupun ada, tidak berjalan</p>	<p>kebijakan antikorupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelolaan risiko korupsi dan standar perilaku tidak dilakukan.</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y		

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T
1.1		3	Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengendalian risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons	SPIP	-	IEPK	A	<p>semua sekali atau sekadar formalitas.</p> <p>SOP yang mencakup prinsip cegah deteksi dan respons telah diterapkan secara konsisten pada seluruh kegiatan dan ada evaluasi terhadap dan dilakukan perbaikan berkelanjutan sehingga membawa perubahan nyata pada organisasi.</p>	<p>Kalaupun ada, tidak berjalan sehingga kebijakan antikorupsi sekadar formalitas.</p> <p>- SOP mencakup aspek edukasi, asesmen risiko, atau tematik seperti pengendalian gratifikasi, penyusutan, WES, dan investigasi</p> <p>- SOP efektif dilaksanakan secara komprehensif menjangkau semua kegiatan utama dan didukung.</p> <p>- SOP rewu dan dievaluasi secara berkala dan hasil rewu/evaluasi ditindaklanjuti dengan perbaikan berkelanjutan.</p> <p>- Hambatan atas pelaksanaan SOP tidak pernah diabaikan.</p>	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
1.1				SPIP	-	IEPK	B	<p>Penetapan SOP mencakup proses cegah deteksi dan respons telah dilaksanakan secara konsisten, meskipun rewu dan evaluasi atas pelaksanaan SOP masih dilakukan secara insidental.</p>	<p>- SOP mencakup aspek edukasi, asesmen risiko, atau tematik seperti pengendalian gratifikasi, penyusutan, WES, dan investigasi</p> <p>- SOP efektif dilaksanakan secara komprehensif menjangkau semua kegiatan utama dan didukung.</p> <p>- Rewu dan evaluasi atas SOP belum ada atau insidental saja artinya hanya jika terdapat hambatan atau rekomendasi hasil audit eksternal</p>	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.1				SPIP	-	IEPK	C	<p>Penetapan SOP mencakup proses cegah deteksi dan respons telah dilaksanakan sepenuhnya, meskipun masih kurang konsisten dan tidak ada rewu dan evaluasi atas efektivitas kegiatannya.</p>	<p>SOP mencakup aspek edukasi, asesmen risiko, atau tematik seperti pengendalian gratifikasi, penyusutan, WES, dan investigasi</p> <p>- SOP dilaksanakan tetapi belum secara konsisten untuk semua SOP atau dari segi jangkauan lingkup penerapannya</p> <p>- Rewu dan evaluasi atas SOP belum pernah ada.</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Bahwa Belum	Bahwa Belum	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Y
1.1				SPIP	-	IEPK	D	<p>Penetapan SOP antikorupsi belum mencakup</p>	<p>- SOP anti korupsi tidak mencakup cegah deteksi respons, misalnya SOP</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Y

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP						Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T
							Tiga proses prinsip, atau mencakup ketiga tetapi hanya berjalan sebagian saja, atau masih berfungsi secara terbatas lingkungannya, pelaksanaan SOP masih cenderung seremonial	yang ada hanya aspek cegah dan deteksi, tetapi minus aspek respons (investigasi) - SOP dilaksanakan untuk lingkup yang terbatas - Pelaksanaan SOP masih cenderung seremonial dan terhadap hambatan tidak terlaksananya SOP tidak distasi.											
1.1			SPIP	-	IEPK	E	Tidak ada pematapan SOP antikorupsi spesifik. Kalaupun ada, tidak berfungsi sama sekali sehingga formalitas belaka.	Tidak ada pematapan SOP antikorupsi spesifik. Kalaupun ada, tidak berfungsi sama sekali sehingga formalitas belaka.	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
1.1	4		SPIP	-	IEPK	A	Kegiatan pembelajaran anti korupsi telah diberikan kepada pihak internal dan eksternal. Penyelenggaraan dilakukan dengan terencana dan terstruktur. Kegiatan tersebut dipantau pelaksanaannya dan dievaluasi efektivitasnya.	- Ada kegiatan edukasi/pembelajaran yang dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal - Sasaran edukasi seluruh pegawai pada semua level plus stakeholder (penyedia dan pengguna layanan) - Kegiatan pembelajaran dievaluasi secara berkala - Perbaikan benar-benar dilakukan sebagai tindak lanjut hasil rewu dan evaluasi pembelajaran.	W/D/O	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T	T	
1.1			SPIP	-	IEPK	B	Kegiatan pembelajaran anti korupsi telah melibatkan pihak internal dan eksternal serta penyelenggaraan dilakukan secara terjadwal	- Ada kegiatan edukasi/pembelajaran yang dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal - Sasaran edukasi seluruh pegawai pada semua level plus stakeholder (penyedia dan pengguna layanan)	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
1.1			SPIP	-	IEPK	D	Unit kerja telah melaksanakan	- Kegiatan edukasi/pembelajaran antikorupsi belum dilaksanakan	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
1.1		6	Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional	SPIP	-	IEPK	A	Unit kerja menunjukkan iklim etis yang tinggi	Unit kerja mempunyai seperangkat peraturan kepatuhan, kode etik, SOP dan iklim etis prinsip di unit kerja ditunjukkan dengan 1. Pegawai menempatkan kepatuhan kepada aturan di atas pertimbangan lain 2. Pegawai mematuhi kode etik organisasi dan standar profesi yang berlaku atas pekerjaannya 3. Pegawai patuh kepada aturan & SOP dianggap sangat penting oleh pegawai	W/D/O	T	T	T	T	T				
1.1				SPIP	-	IEPK	B	Unit kerja menunjukkan iklim etis prinsip yang cukup tinggi	Unit kerja mempunyai seperangkat peraturan kepatuhan, kode etik, SOP dan iklim etis prinsip di unit kerja ditunjukkan dengan 1. Pegawai menempatkan kepatuhan kepada aturan di atas pertimbangan lain 2. Pegawai mematuhi kode etik organisasi dan standar profesi yang berlaku atas pekerjaannya 3. Pegawai patuh kepada aturan & SOP dianggap sangat penting oleh pegawai	W/D/O	T	T	T	T	T				

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)				
				Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian					Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	
1.1				SPIP	MI	IEP K	C	Unit kerja menunjukkan iklim etis prinsip yang sedang	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	T	Bahwa Belum	Y	Bahwa Telah	Y	
1.1				SPIP	-	IEP K	D	Unit kerja menunjukkan iklim etis prinsip yang cenderung rendah	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	
1.1				SPIP	-	IEP K	E	Unit kerja menunjukkan iklim etis prinsip yang rendah	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	
1.1		7	Kejadian korupsi/peril	SPIP	-	IEP K	A	Seluruh kejadian korupsi/perilaku	W/D/O	T		T		T		T		T	

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
1.1			satu koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang kompeten dan independen	SPP	MRI	IEPK	Tindakan lanjut dalam bentuk investigasi, audit, atau bentuk pengawasan lainnya telah dilakukan oleh orang/tim yang kompeten dan independen sehingga terdapat permasalahan konflik kepentingan dalam penyelesaian tindak lanjut	Unit kerja telah melaksanakan sebagian besar tindak lanjut audit dan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen sehingga pelaksanaan tindak lanjut telah secara efektif menyelesaikan kejadian korupsi/perilaku koruptif, dengan rekomendasi auditor, serta dokumentasi penyelesaian tindak lanjut memuat tindak lanjut yang telah dilakukan. Hal ini ditandai dengan: 1. kejadian korupsi/perilaku korupsi sesuai dengan hasil temuan audit tidak terlihat 2. Indikasi korupsi terdeteksi direspans segera	W/D/O	Y	T	T	T	T	T				
										Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah				
1.1			Kejadian korupsi/perilaku koruptif yang ditemuan terakahir ditindaklanjuti oleh orang/tim yang kompeten namun berpotensi memiliki konflik kepentingan	SPP		IEPK	Unit kerja telah melaksanakan tindakan lanjut atas temuan kejadian korupsi/perilaku koruptif yang ditemuan terakahir dalam satu tahun terakahir oleh orang yang mempunyai kompetensi, namun pelaksanaannya dilakukan oleh orang yang mempunyai konflik kepentingan yang ditandai dengan: 1. pelaksanaan tindak lanjut oleh pihak yang melaksanakan atau	W/D/O	Y	Y	T	T	T	Y					
									W/D/O	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah				

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T	
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T		
1.1			SPIP		IEP K	D	Kejadian korupsi/perilaku koruptif yang ditemukan satu tahun terakhir ditindaklanjuti oleh orang/tim yang tidak kompeten dan berpotensi memiliki konflik kepentingan	bertanggung jawab terhadap kejadian korupsi/perilaku koruptif (sebarannya tindak lanjut menjadi tanggung jawab pejabat di atas pihak yang menjadi pelaku korupsi) 2. pelaksanaan tindak lanjut tidak secara efektif menghilangkan kejadian korupsi/perilaku koruptif di unit kerja.	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
1.1			SPIP		IEP K	E	Kejadian korupsi/perilaku koruptif yang ditemukan satu tahun terakhir tidak ditindaklanjuti	Unit kerja tidak menindaklanjuti temuan atas perilaku koruptif yang terjadi di lingkungan kerjanya dan/atau tidak mempunyai dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut.	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
1.1		8	Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh praktik	SPIP		IEP K	A	Terhadap hasil investigasi, sanksi diberikan sepadan, ada pemulihan kerugian keuangan negara, dan perbaikan pengendalian. Tersdapat bukti kejadian korupsi/perilaku	W/D/O	T									T	

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T		Y/T	Y/T	Y/T	Y/T
1.1							sanksi namun tidak sepadan dan tidak ada pemulihan kerugian negara serta perbaikan pengendalian.	<p>pemulihan kerugian keuangan namun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sanksi yang dikenakan tidak sepadan dengan tindakan korupsi/ yang dilakukan 2. pengembalian kerugian keuangan negara tidak sepadan dengan kerugian yang diterima unit organisasi atau negara/daerah 3. perbaikan pengendalian dan tindak lanjut tidak dilaksanakan 											
1.1				SPIP	-	IEP K	E	<p>Terhadap hasil investigasi, tidak ada sanksi kepada pelaku, tidak ada perbaikan pengendalian, dan tidak ada pemulihan kerugian keuangan negara atas tindakan korupsi</p>	<p>W/D/O</p> <p>Bahwa Telah</p>	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y			
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi																	3	
1.2		I	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diteliti oleh SDM yang kompeten	SPIP	-	-	A	<p>Pengelolaan kompetensi SDM telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi</p>	<p>- Setiap posisi dalam organisasi telah diisi oleh SDM sesuai dengan standar kompetensinya</p> <p>- Penerapan standar kompetensi telah berhasil meningkatkan kinerja yang memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi</p> <p>- Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dihubungkan dengan kompetensi SDM-nya</p>	W/D/O	T		T		T		T		
1.2				SPIP	-	-	B	<p>Standar kompetensi</p>	<p>Standar kompetensi dan implementasi/pemanfaatan</p>	W/D/O	T		T		T		T		

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP						Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPI P	MRI	IEPK				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)
										Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	
1.2						organisasi dan implementasi/pelembuatannya telah dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya	nya telah dievaluasi dengan ketentuan: - Berkala - Terdokumentasi - Dilakukan untuk mengurangi <i>residual risk</i> - Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti - Pertakuan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y		
1.2						Standar kompetensi telah diimplementasikan/dimanfaatkan dalam pengelolaan/prim binaan SDM organisasi	- Standar kompetensi dimanfaatkan untuk menyusun analisis kompetensi SDM - Analisis kompeten yang disusun berdasarkan standar kompetensi dimanfaatkan untuk perencanaan - Analisis kompeten yang disusun berdasarkan standar kompetensi dimanfaatkan untuk pengembangan SDM - Standar kompetensi dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengisian jabatan (mutasi/promosi/ seleksi)	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y		
1.2						Standar kompetensi telah dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh pegawai organisasi	Terdapat standar kompetensi yang mengatur: - Standar kompetensi struktural - Standar kompetensi SDM fungsional - Standar kompetensi manajerial - Standar kompetensi sosio kultural - Standar kompetensi teknis	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y		
1.3	Kepimpinan yang Kondusif														2.714286				

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
1.3							<p>penyusunan dan penetapan kebijakan yang mendukung pencapaian lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi serta menjabarkan kebijakan pengendalian intern dan mendorong penerapan kebijakan dalam berbagai interaksi kepada jajaran di bawahnya</p>	<p>b. Pimpinan organisasi mengarahkan pegawai agar dapat bekerja selaras dengan kebijakan, melalui: 1. Rapat internal. 2. Upacara/apel pagi. 3. Forum diskusi/jam peminatan. 4. Interaksi informal.</p>											
1.3	Pimpinan mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko	2		SPIP		E	<p>Pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan kebijakan yang mendukung pencapaian lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi</p>	<p>Pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan kebijakan yang mendukung pencapaian lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi, antara lain kebijakan terkait manajemen kinerja, manajemen keuangan dan aset, manajemen SDM, serta manajemen risiko.</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y			
1.3				SPIP		A	<p>Sudah mengidentifikasi secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D</p>	<p>a. Instansi Pemerintah telah mengorganisir dan implementasi manajemen risiko seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi KRP, kegiatan monitoring dan review dalam rencana kerja/DPA/DIPA dan dalam implementasi manajemen risiko tidak terkendala kekurangan dan implementasi ditingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D</p> <p>b. Minimal 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional dan strategis unit kerja serta strategis K/L/D diisi oleh</p>	W/D/O	T		T		T		T			

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP												Kestimpulan Akhir Y/T
				SPP	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)				
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T			
1.3				SPP	MR	IEP	D	Sudah mengalkasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja namun pada tingkat strategis unit kerja belum memadai	berkompeten dalam bidang manajemen risiko a. Instansi Pemerintah telah mengalkasikan dan implementasi manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi KTR, kegiatan monitoring dan review dalam rencana kerja/DPA/DIPA secara memadai, namun belum memadai pada tingkat strategis unit kerja, dan/atau b. Kurang dari 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional Unit Kerja diisi oleh orang yang berkompeten dalam bidang manajemen risiko	W/D/O	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Y
1.3				SPP	MR	-	E	Sudah mengalkasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja namun belum memadai	a. Instansi Pemerintah telah mengalkasikan dan implementasi manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi KTR, kegiatan monitoring dan review dalam rencana kerja/DPA/DIPA namun belum memadai, dan/atau b. Kurang dari 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional Unit Kerja diisi oleh orang yang berkompeten dalam bidang manajemen risiko	W/D/O	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Y
1.3		3	Pimpinan K/L/D menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	SPP	MR	-	A	Seluruh pengambilan keputusan strategis K/L/D, strategis unit kerja, dan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko dan memberikan dampak bagi	Seluruh keputusan pimpinan instansi maupun unit kerja secara umum menggunakan informasi terkait risiko di tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D dan memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi	W/D/O		T											T

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP						Kestimpulan Akhir Y/T		
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4	
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T		Y/T	Y/T
1.3				SPIP	MR	I	B	penetapan tujuan organisasi Seluruh penggantian keputusan strategis K/L/D, strategis unit kerja, dan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko	W/D/O	Y	T	T	T	T	T	T	T		
1.3				SPIP	MR	I	C	Seluruh penggantian keputusan strategis unit kerja dan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko	W/D/O	Y	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	
1.3				SPIP	MR	I	D	Seluruh penggantian keputusan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	
1.3				SPIP	MR	I	E	Sebagian penggantian keputusan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	
1.3	Pimpinan K/L/D mendorong penerapan manajemen risiko, melalui penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	4		SPIP	MR	I	A	Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan UPR tingkat strategis K/L/D, seluruh UPR tingkat strategis unit kerja, seluruh UPR tingkat strategis unit kerja, dan UPR tingkat strategis K/L/D secara memadai dan telah dievaluasi pencapaiannya	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T		
1.3				SPIP	MR	I	B	Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai indikator kinerja pada	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T	

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T	
				SPIP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		
1.3							sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja, seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja, dan UPR tingkat strategis K/L/D secara memadai	dokumen perencanaan UPR tingkat strategis K/L/D, seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja, dan seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja secara tepat dan telah diukur pencapaiannya	W/D/O	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	T			T
1.3			SPIP	MRI	-	C	kinerja pencapaian manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja, seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja, dan UPR tingkat strategis K/L/D secara memadai	Kinerja pemertapan manajemen risiko sudah digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan UPR tingkat strategis K/L/D, seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja, dan seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja secara tepat dan telah diukur pencapaiannya	W/D/O	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T			Y
1.3			SPIP	MRI	-	E	kinerja pencapaian manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja, dan seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja secara memadai	Kinerja pemertapan manajemen risiko sudah digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan UPR tingkat strategis unit kerja dan seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja secara tepat dan telah diukur pencapaiannya	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y			Y
1.3		5	Program antikorupsi didukung dengan	SPIP	-	IEPK	Sumber daya keuangan, SDM, dan sarana-prasarana untuk	Anggaran untuk pengelolaan risiko korupsi dialokasikan secara ekseptif dalam dokumen	W/D/O		T		T		T					T

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
1.3				SPIP	-	IEPK	D	Terdapat data yang mengisyaratkan kegiatan pengelolaan risiko korupsi terhambat secara signifikan karena masalah ketersediaan SDM, keuangan, atau sarana, tetapi sudah ada upaya kompensatif untuk mengatasi permasalahan.	- Alokasi anggaran untuk aktivitas pengelolaan risiko korupsi kurang memadai - Personil/petugas untuk pengelolaan risiko korupsi tidak ditetapkan dan/atau jumlah dan kualitasnya tidak memadai - Sarana dan prasarana untuk memastikan kegiatan pengelolaan risiko korupsi berjalan tidak disejajarkan - Terdapat kegiatan antikorupsi yang terhambat karena faktor anggaran, SDM, dan sarana dan prasarana, tetapi sudah ada upaya kompensatif untuk mengatasi permasalahan sumberdaya.	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
1.3				SPIP	-	IEPK	E	Terdapat data yang mengisyaratkan kegiatan pengelolaan risiko korupsi terhambat secara signifikan karena masalah ketersediaan SDM, keuangan, dan sarana tidak ada kegiatan kompensatif untuk mengatasi permasalahan tersebut.	- Alokasi anggaran, SDM, dan sarana prasarana untuk aktivitas pengelolaan risiko korupsi tidak ada atau sangat kurang - Kegiatan antikorupsi terhambat secara signifikan karena faktor anggaran, SDM, dan sarana dan prasarana, dan tidak ada upaya kompensatif untuk mengatasi permasalahan tersebut.	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y		
1.3	Faktor kecukupan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipaksi untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak	6		SPIP	-	IEPK	A	Keputusan formal pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja secara nyata telah mempertimbangkan risiko korupsi, disusun secara partisipatif dan bersifat komitmen dan kolaboratif telah berdampak nyata pada efektivitas	Sikap antikorupsi dalam penggunaan kuasa dan wewenang diperlihatkan a.l.: - Memilih kebijakan yang tidak berisiko korupsi - Mendiskusikan perilaku korupsi internal sebagai pembelajaran - Terbuka menerima kritikan, masukan, laporan pegawai terkait korupsi - Tidak memburakan potensi berurusan kepentingan - Aktif terlibat dalam	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP						Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T		Y/T	Y/T	
			membicarakan / mengabaikannya				pengelesaian risiko korupsi.	kegiatan edukatif, internal dan eksternal - Berniatif menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam kegiatan cegah-deteksi-respons - Sikap antikorupsi termanifestasi dalam keputusan formal dan dipatuhi bawahan. - Terjadi perubahan nyata pada organisasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik.												
1.3				SPIP	-	IEP K	B	Pimpinan telah menampilkan sikap antikorupsi dalam setiap pengambilan keputusan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan terwujud dalam keputusan formal. Pimpinan selalu terbuka membahas risiko korupsi dengan bawahan dan secara aktif mengupayakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam aktivitas cegah-deteksi-respons.	W/D/O											
1.3				SPIP	-	IEP K	C	Pimpinan telah memperjelas sikap antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari, dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan edukatif, risiko korupsi yang berakibat komitmen dan kolaborasi dan telah cukup substansial meskipun lingkungannya masih terbatas (tidak semua kegiatan) dan	W/D/O											

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)		
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian
1.3						D	korupsi yang bersifat kemitrasan dan kolaboratif dan telah cukup substansial meskipun lingkungannya masih terbasah (tidak semua kegiatan) dan belum konsisten.	belum konsisten.	W/D/O	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Y		
							Pimpinan telah mempertontonkan sikap antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari, dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan edukatif, serta melaksanakan kegiatan antikorupsi bekerjasama dengan lembaga lain tetapi banyak aktivitas masih cenderung seremonial.	Pimpinan telah mempertontonkan sikap antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari, dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan edukatif, serta melaksanakan kegiatan antikorupsi bekerjasama dengan lembaga lain tetapi banyak aktivitas masih cenderung seremonial.		Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa
1.3						E	Pimpinan tidak menggunakan kewenangannya untuk mendorong sikap antikorupsi dalam pengambilan keputusan, tidak sikap untuk menanggapi/mengembangkan diri dan melakukan upaya yang bersifat kemitrasan dan kolaboratif agar mampu mengelola risiko korupsi secara efektif.	Pimpinan tidak mempertontonkan sikap antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari, a.l tempok dari tidak pernah mendiskusikan risiko korupsi secara terbuka dengan bawahannya dan tidak membuat pilihan kebijakan atas dasar pertimbangan antikorupsi. Pimpinan tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan edukasi antikorupsi baik internal maupun eksternal. Pimpinan cenderung melakukan pemberian terhadap keberadaan atau potensi perilaku koruptif di unit kerja sendiri, a.l. membaratkan potensi benturan kepentingan, berakap negatif terhadap	Pimpinan tidak mempertontonkan sikap antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari, a.l tempok dari tidak pernah mendiskusikan risiko korupsi secara terbuka dengan bawahannya dan tidak membuat pilihan kebijakan atas dasar pertimbangan antikorupsi. Pimpinan tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan edukasi antikorupsi baik internal maupun eksternal. Pimpinan cenderung melakukan pemberian terhadap keberadaan atau potensi perilaku koruptif di unit kerja sendiri, a.l. membaratkan potensi benturan kepentingan, berakap negatif terhadap	W/D/O	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y
							Pimpinan tidak menggunakan kewenangannya untuk mendorong sikap antikorupsi dalam pengambilan keputusan, tidak sikap untuk menanggapi/mengembangkan diri dan melakukan upaya yang bersifat kemitrasan dan kolaboratif agar mampu mengelola risiko korupsi secara efektif.	Pimpinan tidak mempertontonkan sikap antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari, a.l tempok dari tidak pernah mendiskusikan risiko korupsi secara terbuka dengan bawahannya dan tidak membuat pilihan kebijakan atas dasar pertimbangan antikorupsi. Pimpinan tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan edukasi antikorupsi baik internal maupun eksternal. Pimpinan cenderung melakukan pemberian terhadap keberadaan atau potensi perilaku koruptif di unit kerja sendiri, a.l. membaratkan potensi benturan kepentingan, berakap negatif terhadap	Bahwa		Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa

Kode	Uraian Subnasur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP												Kesimpulan Akhir Y/T	
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)					
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T				
1.3				SPIP	-	IEP K	D	Kepemimpinan etis cukup rendah ditandai dengan perilaku yang berlawanan dengan etika	Pimpinan unit kerja mengemukakan pentingnya membangun, mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip keadilan (fairness), integritas, keteladanan (Tone at the Top), akuntabilitas dan transparansi dalam pencegahan korupsi. Namun, terdapat bukti bahwa pimpinan unit kerja berperilaku berlawanan dengan karakteristik kepemimpinan etis tersebut. Terdapat bukti yang menunjukkan adanya perilaku korupif disebabkan oleh faktor kepemimpinan yang tidak etis	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	Y	
1.3				SPIP	-	IEP K	E	Kepemimpinan etis rendah dengan perilaku yang membiarkan, mendorong, dan memfasilitasi perilaku korupif	Pimpinan unit kerja tidak menyadari pentingnya membangun, menetapkan prinsip-prinsip keadilan (fairness), integritas, keteladanan (Tone at the Top), akuntabilitas dan transparansi dalam pencegahan korupsi. Terdapat bukti yang menunjukkan pimpinan unit kerja membiarkan, memfasilitasi atau mendorong pegawai berperilaku korupif	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	Y	
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan																							3
1.4		1	Dalam struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal.	SPIP	-	-	A	K/L/D memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan struktur organisasi dalam rangka mendukung perubahan proses bisnis dan perencanaan strategis	Perbaikan struktur organisasi dan tata laksana dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mengelola arus data dan informasi dalam menjalankan fungsi-fungsi dalam proses bisnis organisasi, sehingga kodukoduk fungsi berada di atas struktur.	W/D/O	T		T		T		T		T		T		T	T

Kode	Uraian Subnasur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T	
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T		
1.4				SPIP	-	-	B	Efisiensi dan efektivitas struktur organisasi dapat dilihat secara berkala melalui pengujian atas pelaksanaan proses bisnis organisasi dan ketepatanannya dengan perencanaan strategis	K/L/D melakukan evaluasi atas K/SOP terkait struktur organisasi dan tata laksana beserta implementasinya antara lain dengan ketentuan sebagai berikut: a. Evaluasi dilaksanakan untuk menangan <i>resistocal</i> risk; b. Terdapat duplikasi fungsi karena struktur yang tidak efektif/efisien; c. Arus data dan informasi yang tidak handal dalam pelaksanaan proses bisnis; d. Perubahan lingkungan strategis.	W/D/O	Y	T	T	T	T	T	T	T	T	
1.4				SPIP	-	-	C	Struktur organisasi sesuai dijalankan sesuai proses bisnis organisasi dengan SDM yang mencakupi	- Struktur organisasi telah ditindaklanjuti dengan implementasi/pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai proses bisnis; - Proses bisnis telah dijabarkan dengan SOP - Organisasi telah menerapkan kebijakan/SOP yang mengatur mengenai hubungan dan jejaring pelaporan intern/arus data dan informasi. - Organisasi telah memetakan kebutuhan pegawai untuk mendukung proses bisnis yang diantaranya mengatur managerial analisis beban kerja untuk pimpinan dan pegawai.	W/D/O	Y	Y	Y	T	T	T	T	Y	Y	
1.4				SPIP	-	-	D	Proses bisnis organisasi dapat didukung dengan struktur organisasi yang ditetapkan dan personel pada setiap lini mengetahui arus data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya	a. Struktur organisasi dan tata laksana sesuai dengan proses bisnis yang ditetapkan dengan mempertimbangkan: - Ukuran dan sifat kegiatan. - Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan sentralisasi/desentralisasi organisasi. - Struktur organisasi harus mampu memfasilitasi arus informasi di dalam instansinya. b. Struktur organisasi dan tata laksana telah.	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
1.4						E	Terdapat pendataan struktur, tugas, dan fungsi organisasi	dikomunikasikan dan dipahami Adanya struktur organisasi dan tata laksana yang disusun yang mengacu kepada peraturan terkait.	W/D/O	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Y			
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat															3			
1.5		1	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi telah memperhatikan benturan kepentingan	SPIP	-	-	A	Pimpinan organisasi memiliki akses untuk melihat proses pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang diberikan dan memonitor pelaksanaan tugas fungsi yang dijalankan untuk menjamin tujuan pencapaian yang diharapkan dan mendukung perbaikan secara berkelanjutan.	a. Terdapat tools untuk memonitor pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab yang diberikan secara berjenjang dan memampung pelaporan atas pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab kepada jenjang di atasnya. b. Kemudahan akses memungkinkan pimpinan untuk memberikan teguran/arahan atas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebelum menyalahi prosedur yang ditetapkan: c. penerima manfaat/stakeholder memberikan feedback yang baik atas kecepatan respon organisasi terhadap kebutuhan mereka. Organisasi melakukan evaluasi atas kebijakan/prosedur terkait pendelegasian wewenang dan tanggung jawab beserta implementasinya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Telah dilaksanakan evaluasi berkala; b. Evaluasi dilaksanakan untuk menangani residual risk; c. Tindak lanjut atas hasil evaluasi telah dilaksanakan. d. Menindaklanjuti keluhan/kekurangan kualitas pelaksanaan tugas	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	
1.5				SPIP	*	*	B	Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab organisasi yang didelegasikan dapat dilihat melalui evaluasi berkala atas pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab serta analisis terhadap kualitas hasil pelaksanaan tugas/fungsi yang dilaksanakan	Organisasi melakukan evaluasi atas kebijakan/prosedur terkait pendelegasian wewenang dan tanggung jawab beserta implementasinya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Telah dilaksanakan evaluasi berkala; b. Evaluasi dilaksanakan untuk menangani residual risk; c. Tindak lanjut atas hasil evaluasi telah dilaksanakan. d. Menindaklanjuti keluhan/kekurangan kualitas pelaksanaan tugas	W/D/O	T	T	T	T	T	T			

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
1.5				SPP	-	-	C	<p>(respon stakeholder)</p> <p>Pelaksanaan tugas dan fungsi yang didelegasikan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/prosedur yang ditetapkan</p>	<p>fungsi yang dilaksanakan oleh stakeholder.</p> <p>a. Tugas fungsi dan program/kegiatan telah dilaksanakan dengan menetapkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam kebijakan/prosedur yang ditetapkan;</p> <p>b. Pihak-pihak yang menerima pendelegasian telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur dan menyampaikan laporan kepada pihak yg memberikan wewenang secara berkala sesuai kebijakan.</p>	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	
											Bahwa Telah	Y	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	
1.5				SPP	-	-	D	<p>Kegiatan/prosedur yang dalam pelaksanaannya telah didelegasikan kepada struktur dibawahnya telah dipahami dan diketahui oleh pihak terkait.</p>	<p>a. Kebijakan/prosedur yang mengatur pelaksanaan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dipatuhi oleh pegawai yang berkepentingan;</p> <p>b. Kebijakan/prosedur yang mengatur pelaksanaan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan stakeholder.</p>	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y			
											Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y			
1.5				SPP	-	-	E	<p>Pimpinan organisasi menetapkan kebijakan terkait wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan/kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi yang memuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab yang didelegasikan; - Alur hubungan vertikal serta horizontal dan kejelasan ruang lingkup pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; - Kewajiban dan pertanggungjawaban pihak yang diberikan wewenang 	<p>Organisasi memiliki kebijakan/prosedur yang mengatur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas fungsi dan program/kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi yang memuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab yang didelegasikan; - Alur hubungan vertikal serta horizontal dan kejelasan ruang lingkup pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; - Kewajiban dan pertanggungjawaban pihak yang diberikan wewenang 	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	
											Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP												Kesimpulan Akhir Y/T	
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)					
											P	I	K	Y/	T	Y/	T	Y/	T	Y/	T	Y/		T
1.6	Penyusunan dan Penempatan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	1	Penetapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM telah sesuai dengan peraturan yang berlaku	SPIP	-	-	A	<p>Pengelolaan SDM telah diperbaiki secara berkelanjutan dan sesuai optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi</p>	<p>Perbaikan berkelanjutan telah menghasilkkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan SDM telah berhasil meningkatkan kinerja yang memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi - Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dihubungkan dengan pengelolaan SDM-nya - Pengelolaan SDM mampu meningkatkan kepuasan kerja pegawai 	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
1.6				SPIP	-	-	B	<p>Kebijakan dan implementasi terkait pengelolaan SDM organisasi telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya</p>	<p>Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkala - Terdokumentasi - Dilakukan untuk mengurangi resiko - Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti - Perbaikan telah menghasilkkan kinerja yang lebih baik 	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
1.6				SPIP	-	-	C	<p>Pengelolaan SDM telah dilaksanakan sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan</p>	<p>- Pengelolaan SDM dilakukan sesuai dengan kebijakan/prosedur yang ditetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan SDM dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun - Terdapat database kepegawaian yang update dan akurat yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pengelolaan SDM - Pengelolaan SDM dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang disebabkan kelemahan SDM/Men 	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y
1.6				SPIP	-	-	D	<p>Kebijakan terkait pengelolaan SDM</p>	<p>- Kebijakan telah diperbaiki oleh penanggungjawab</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y		

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T	
				SPI	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		
1.6				SPI	-	-	E	<p>telah dikomunikasikan dan digubahi oleh pihak yang berkepentingan dalam organisasi</p> <p>Terdapat kebijakan yang mengatur pelaksanaan SDM sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai</p>	<p>kebijakan telah mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur penerimaan pegawai - Prosedur penilaian kinerja individu pegawai - Prosedur kenaikan pangkat, jabatan, golongan - Prosedur kenaikan gaji - Prosedur pengembangan kompetensi (diklat, tugas belajar, ltn, bejajar) - Prosedur mutasi - Prosedur seleksi - Prosedur pemberhentian pegawai - Prosedur pensiun - Prosedur supervisi oleh pimpinan 	W/D/O	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		
																			Uraian Hasil Pengujian	Y/T
1.6		2		SPIP	MI	-	A	<p>Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan seluruh pegawai dan telah diawasi pencapaiannya</p>	<p>A. Kriteria upaya peningkatan kompetensi yang memadai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko baik tahunan maupun ltn tahunan baik tingkat K/L/Pemerintah daerah maupun Kerja/OPD; 2. Unit Kerja E seon I/OPD memiliki program in house training tahunan; 3. Instansi Pemerintah telah melaksanakan program pelatihan/sertifikasi tersebut dan dibuktikan dengan adanya laporan pelatihan dan bukti perolehan sertifikat keahlian (setiap Unit Kerja E seon I/OPD terdapat pegawai yang memiliki sertifikat keahlian); 4. In House Training telah dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu semester oleh masing-masing Unit Kerja E seon I/OPD serta instruktur harus orang yang telah memiliki sertifikat 	W/D/O	T								T	

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T	
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T		
1.6				SPI	MR	*	B	<p>Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan seluruh pegawai</p>	<p>keahlian;</p> <p>B. Kriteria Output: Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan untuk setiap tingkatan risiko</p> <p>1. Strategi K/L/D untuk Eselon I adalah lebih dari 90% pejabat;</p> <p>2. Strategis Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II adalah lebih dari 90% pejabat;</p> <p>3. Operasional Kerja/OPD untuk Eselon III ke atas sampai dengan staf adalah lebih dari 90% pejabat dan staff di level ini.</p> <p>C. Terdapat evaluasi atas dampak peningkatan kompetensi dan ketrampilan terhadap kualitas proses dan hasil manajemen risiko</p>	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T	

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)	
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T			
1.6				SPIP	MR	-	C	Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan sebagian besar pegawai	<p>I/OPD serta instruktur harus orang yang telah memiliki sertifikat keahlian;</p> <p>B. Kriteria Output: Peatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan untuk setiap tingkatan risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi K/L/D untuk Eselon I adalah lebih dari 90% pejabat; 2. Strategi Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II adalah lebih dari 90% pejabat; 3. Operasional Kerja/OPD untuk Eselon III ke atas sampai dengan staf adalah lebih dari 90% pejabat dan staff di level ini. <p>A. Kriteria upaya peningkatan kompetensi yang memadai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko baik tahunan maupun lima tahunan baik ditingkat K/L/Pemerintah daerah maupun Unit Kerja/OPD; 2. Unit Kerja/OPD memiliki program in house training tahunan; 3. Instansi Pemerintah telah melaksanakan program pelatihan/sertifikasi tersebut dan dibuktikan dengan adanya laporan pelatihan dan bukti perolehan sertifikat keahlian (setiap Unit Kerja/OPD terdapat pegawai yang memiliki sertifikat keahlian); 4. In House Training telah dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu semester oleh masing-masing unit Kerja/OPD serta instruktur harus memiliki sertifikat keahlian; 	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Belum	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	Y	Y

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T					
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian
1.6				SPIP	MRI	-	D	<p>Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan sebagian pegawai</p>	<p>A. Kriteria Memadai: 1. Memiliki program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko baik tahunan maupun lima tahunan baik tingkat K/L/Pemerintah daerah maupun Unit Kerja/OPD; 2. Unit Kerja/OPD memiliki program in house training tahunan; 3. Instansi Pemerintah telah melaksanakan program pelatihan/sertifikasi tersebut dan dibuktikan dengan adanya laporan pelatihan dan bukti perolehan sertifikat keahlihan (setiap Unit Kerja/OPD terdapat pegawai yang memiliki sertifikat keahlihan); 4. In House Training telah dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu semester oleh masing2 Unit Kerja/OPD serta instruktur harus orang yang telah memiliki sertifikat keahlihan;</p> <p>B. Kriteria Output: Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan untuk setiap tingkatan risiko: 1. Strategi Pemda untuk Eselon I adalah 71%-99% pejabat; 2. Strategi Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II adalah 71%-90% pejabat; 3. Operasional Unit Eselon I/OPD untuk Eselon III ke atas sempat dengan staf adalah 71%-90% pejabat dan staf di level ini.</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	Y

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP						Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4	
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T		Y/T	Y/T
1.6				SPIP	MR	-	E	<p>Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko namun belum memadai</p>	<p>pejabat; 2. Strategi Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II adalah 50% -70% pejabat; 3. Operasional Unit Eselon I/OPD untuk Eselon III ke atas samapai dengan staf adalah 50% -70% pejabat dari staf di level ini. Kriteria belum memadai apabila terdapat parameter point 1-4 dalam kriteria memadai tidak terpenuhi. Kriteria Memasak: 1. Memiliki program pekabahan/sertifikasi terkait manajemen risiko baik tahunan maupun lima tahunan baik ditingkat K/L/Pemerintah daerah maupun Unit Kerja/OPD; 2. Unit Kerja/OPD memiliki program in house training tahunan; 3. Instansi Pemerintah telah melaksanakan program pekabahan/sertifikasi tersebut dan dibuktikan dengan adanya laporan pelatihan dan buku perolehan sertifikat keahlilan (setiap Unit Kerja/OPD terdapat pegawai yang memiliki sertifikat keahlilan); 4. In House Training telah dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu semester oleh masing2 Unit Kerja/OPD serta instruktur harus orsng yang telah memiliki sertifikat keahlilan; B. Kriteria Output: Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan untuk setiap tingkatan risiko: 1. Strategi K/L/D untuk Eselon I adalah < 50% pejabat; 2. Strategi Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II adalah < 50% pejabat;</p>	W/D/O	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Bahwa Telah	Y	Y

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)	
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T			
1.7				SPIP	-	-	D	secara seragam Proses audit dilakukan secara tetap (rutin) dan berulang Tidak ada praktik yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan tergantung pada kinerja individu	Mengikuti syarat Level 2 Kapabilitas APP (In/Infrastructure)	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	
1.7				SPIP	-	-	E		Mengikuti syarat Level 1 Kapabilitas APP (Initial)	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait																			3	
1.8		1	Pimpinan K/L/D menjalin hubungan kerja yang baik (kemirisan) dengan instansi lain terkait pencegahan dan pengendalian kecurangan/ fraud	SPIP	-	-	A	Pelaksanaan hubungan kerja yang baik dengan mitra kerjasama organisasi meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada masing-masing instansi	Pimpinan organisasi telah menjalin hubungan kerja yang baik dengan instansi lain melalui pembagian peran dan ukuran kinerja yang diharapkan dapat saling mendukung kepada tujuan masing-masing. Pembagian peran mendukung pimpinan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai lingkungannya.	W/D/O	T		T		T		T		T	T	
1.8				SPIP	-	-	B	Pelaksanaan kebijakan kerjasama organisasi dievaluasi secara berkala	Organisasi melakukan evaluasi atas kebijakan/prosedur pelaksanaan kerjasama dan mekanisme kerja antar unit/organisasi/mitra kerja beserta implementasinya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Telah dilaksanakan evaluasi berkala; b. Evaluasi dilaksanakan untuk menanggapi hambatan koordinasi/kerjasama; c. Tidak lanjut atas hasil evaluasi telah dilaksanakan dengan pembauran kebijakan/perubahan pola kerjasama yang diperlukan.	W/D/O	T		T		T		T		T		T
1.8				SPIP	-	-	C	Masing-masing pihak	Organisasi melaksanakan komunikasi, koordinasi,	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	T	Bahwa ... Telah ...	T	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T	
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		
1.8							melaksanakan kegiatan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing sesuai kebijakan dan ukuran kinerja yang ditetapkan	pertukaran data dan informasi dengan unit/organisasi/mitra kerja sesuai dengan kebijakan/prosedur dan kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.		Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum					
1.8			SPIP	-	-	D	Publikasi kebijakan kerjasama organisasi kepada para pihak yang berkepentingan (antara lain subjek, objek, dan penerima manfaat kerjasama)	Kebijakan/prosedur yang mengatur pelaksanaan kerjasama dan mekanisme kerja antar unit/organisasi/mitra kerja telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan.	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
1.8			SPIP	-	-	E	Pengraian organisasi menetapkan mekanisme hubungan kerja/tata cara kerjasama dengan instansi lain	Adanya kebijakan/prosedur yang mengatur pelaksanaan kerjasama dan mekanisme kerja antar unit/organisasi/mitra kerja dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Kebijakan/prosedur tersebut antara lain memuat: - lingkup dan hasil kerjasama yang diharapkan; - alur komunikasi dan koordinasi; - wewenang, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban masing-masing pihak; - ukuran hasil kerjasama dalam rangka mencapai tujuan organisasi masing-masing.	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
1.8	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, K/L/D telah mengidentifikasi kasus, menilai, dan mengelola risiko (termasuk	2				A	Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen, telah dilakukan hasil review diplatform media pembelajaran.	A. Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen, telah dilakukan review secara berkala dan hasil review diplatform media pembelajaran. B. Kriteria implementasi adalah sebagai berikut: 1. Terintegrasi apabila penerapan manajemen risiko: a. Telah menyatu dalam	W/D/O	T		T		T		T		T		

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T		Y/T	Y/T	Y/T	Y/T
1.8			implikasi dari transfer risiko) terkait komitmen	SPI	MR	-	B	Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen dan penerapannya telah terintegrasi dengan proses bisnis Instansi Pemerintah	W/D/O	T	T	T	T	T	T				
				SPI	MR	-	C	Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen dan telah	W/D/O	Y	Y	T	T	Y	Y				

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
1.8							diterapkan dengan memadai	risiko telah dilakukan terhadap semua komitmen yang memiliki peran yang penting dalam organisasi.											
1.8			SPIP	MR	-	D	Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen namun belum diterapkan dengan memadai	A. Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen. B. Kriteria implementasi secara tidak memadai apabila sebagian dari komitmen utama yang memiliki peran penting terhadap organisasi yang telah menerapkan manajemen risiko.	W/D/O	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Y	Y				
1.8			SPIP	MR	-	E	Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait komitmen namun belum diterapkan sama sekali	Sudah jelas	W/D/O	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Y	Y				
2.1	Identifikasi Risiko														2				
2.1		1	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko	SPIP	MR	-	A	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai, terintegrasi serta telah direvisi secara berkala	Kebijakan Manajemen Risiko memiliki kriteria memadai dan dalam kebijakan tersebut telah menjelaskan bahwas: 1. Penerapan manajemen risiko oleh Instansi Pemerintah telah menyatu/menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan (perumusan target dan strategi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah). 2. Manajemen risiko diterapkan diseluruh level organisasi 3. Manajemen risiko dimunculkan untuk mengelola seluruh risiko yang muncul 4. Mengkorporasikan hasil dari manajemen risiko kedalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan 5. Kebijakan tersebut telah direvisi secara berkala	W/D/O	T	T	T	T	T	T			
2.1				SPIP	MR	-	B	K/L/D telah memiliki Kebijakan	Terintegrasi berarti bahwa Kebijakan Manajemen Risiko memiliki kriteria	W/D/O	T	T	T	T	T				

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPP	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)		
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T				
2.1				SPP	MR	-	C	Manajemen Risiko yang memadai dan dalam penjelasan bahwa: 1. Penerapan manajemen risiko oleh Instansi Pemerintah telah menyatu/menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan (perumusan target dan strategi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah). 2. Manajemen risiko diterapkan diseluruh level organisasi 3. Manajemen risiko dirancang untuk mengelola seluruh risiko yang muncul 4. Menginkorporasikan hasil dari manajemen risiko kedalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan	Memadai apabila Kebijakan Manajemen Risiko yang dibuat telah memuat: 1. Penetapan konteks manajemen risiko (konteks risiko strategis dan Operasional) 2. Identifikasi risiko setidaknya memuat penyebab risiko, dampak risiko, pihak yang terkena dampak 3. Analisis risiko setidaknya memuat metode prioritas risiko 4. Penetapan kriteria penilaian risiko (kriteria dampak, kriteria kemungkinan, dan skala nilai risiko). 5. Penetapan struktur manajemen risiko dan alur pertanggungjawaban; 6. Penetapan risk appetite/seleksi risiko 7. Gambaran proses manajemen risiko. 8. Pembangunan budaya risiko	W/D/O	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	T	Bahwa ... Belum	T	Bahwa ... Telah	T	Bahwa ... Telah	T	Bahwa ... Telah	T
											Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	T	Bahwa ... Belum	T	Bahwa ... Telah	T	Bahwa ... Telah	T	Bahwa ... Telah	T
2.1				SPP	MR	-	D	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko namun belum memenuhi seluruh	Belum memadai apabila K/L/D telah memiliki kebijakan terkait manajemen risiko namun belum memenuhi seluruh	W/D/O	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	Y			

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T		Y/T	Y/T	Y/T	Y/T
2.1				SPI	MR	-	E	belum memadai	kriteria kebijakan yang memadai (hanya memenuhi beberapa parameter yang ada dalam kriteria memadai)	W/D/O	Bahwa	Bahwa	Bahwa	Bahwa	Bahwa	Bahwa	Y		
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T
2.1		2	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	SPI	MR	-	A	Kualitas identifikasi risiko dan register risiko memadai, serta telah mengidentifikasi peluang	Kualitas Identifikasi Risiko dan Risk Register yang memadai bila: 1. Proses identifikasi risiko menghasilkan risiko utama dan peluang yang bisa diambil; 2. Seluruh sasaran strategis K/L/D, sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan konteks telah diidentifikasi risikonya; 3. Pihak yang terlibat setidaknya seluruh pegawai unit kerja yang benar-benar memahami proses bisnis organisasi; 4. Proses identifikasi telah sesuai dengan kebijakan yang dibuat; 5. Risk register setidaknya memuat hal berikut: a. uraian tujuan/sasaran strategis/kegiatan, b. indikator tujuan/sasaran strategis/kegiatan, c. Uraian Risiko, d. Penilik risiko, e. Uraian dan sumber penyebab, f. Uraian dan pihak yang terdampak; 6. Penyataan risiko, RTP, penyebab secara umum jelas/dapat dipahami (>90% sampling)	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T
2.1				SPIP	MR	-	E	Kualitas identifikasi risiko dan register risiko memadai	Kualitas Identifikasi Risiko dan Risk Register yang memadai bila: 1. Proses identifikasi risiko menghasilkan risiko	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T		

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP						Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T		Y/T	Y/T	
2.1				SPP	MR	+	C	Kualitas identifikasi risiko dan register risiko cukup memadai	<p>utama:</p> <p>2. Seluruh program dan kegiatan serta sasaran strategis unit kerja yang telah ditetapkan dalam penetapan konteks telah diidentifikasi risikonya;</p> <p>3. Pihak yang terlibat setidaknya seluruh pegawai unit kerja yang besar-besarnya memahami proses bisnis organisasi;</p> <p>4. Proses identifikasi telah sesuai dengan kebijakan yang dibuat;</p> <p>5. Risk register setidaknya memuat hal berikut: a. uraian tujuan/sasaran strategis/kegiatan, b. indikator tujuan/sasaran strategis/kegiatan, c. Uraian Risiko, d. Pemilik risiko, e. Uraian dan sumber penyebab, f. Uraian dan pihak yang berdampak;</p> <p>5. Pernyataan risiko, KTR penyebab, secara umum jelas/dapat dipahami (70%-90% sampling)</p>	W/D/O	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	T	Bahwa ... Belum	T	Bahwa ... Telah	T	Bahwa ... Telah	T
											Bahwa ... Telah	T	Bahwa ... Belum	T	Bahwa ... Telah	T	Bahwa ... Telah	T		

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPI P	MR I	IEP K					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T			Uraian Hasil Pengujian
2.1				SPIP	MR I		D	Kualitas identifikasi risiko dan register risiko belum memadai	<p>sumber penyebab, f. Uraian dan pihak yang terdampak;</p> <p>5. Pernyataan risiko, KTP penyebab sebagai besar jelas/dapat dipahami [50%-70% sampling].</p> <p>Kualitas identifikasi Risiko dan Risk Register belum memadai bila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses identifikasi risiko menghasilkan daftar risiko 2. Belum seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan konteks telah diidentifikasi risikonya; 3. Pihak yang terlibat kurang dari 2/3 pegawai unit kerja yang benar-benar memahami proses bisnis organisasi; 4. Proses identifikasi belum sesuai dengan kebijakan yang dibuat, baru sebatas 1-2 proses yang sesuai dengan kebijakannya; 5. Risk register yang dibuat belum sesuai dengan kriteria memadai yaitu masih ada hal-hal sebagai berikut ini yang tidak dicantumkan: a. uraian tujuan/sasaran strategis/kegiatan, b. Indikator tujuan/sasaran strategis/kegiatan, c. Uraian Risiko, d. Pemilik risiko, e. Uraian dan sumber penyebab, f. Uraian dan pihak yang terdampak 6. Pernyataan risiko, KTP penyebab secara umum kurang jelas/dapat dipahami (<50% sampling). <p>Sudah jelas</p>	W/D/O	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Y
2.1		3	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis K/L/D	SPIP	MR I		E	Register risiko telah disusun	Proses manajemen risiko telah terintegrasi dengan proses bisnis utama dari unit kerja terkait dan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan strategis K/L/D dan Unit kerja Eselon I/II/OPD	W/D/O	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Y				
2.1				SPIP	MR I		A	Proses manajemen risiko mendukung inovasi, diidentifikasi untuk memaksimalkan peluang dan	Proses manajemen risiko telah terintegrasi dengan proses bisnis utama dari unit kerja terkait dan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan strategis K/L/D dan Unit kerja Eselon I/II/OPD	W/D/O	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	Bahwa, Telah	Y	T				

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP						Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPIP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T
2.2				I			telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja	telah melakukan analisis risiko untuk hasil identifikasi risiko di tingkat operasional unit kerja secara memadai yaitu: 1. Telah sesuai dengan kebijakan termasuk semua risiko dan langkah analisis; 2. Kriteria yang digunakan baik dampak maupun probabilitasnya konsisten antara satu unit kerja dengan unit kerja lain; 3. Proses analisis risiko dilaksanakan setidaknya oleh orang2 yang memiliki kompetensi. E. Hasil dari proses ini telah menghasikan tren risiko.		Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum			
2.2				MR I	-	D	Analisis risiko telah dilakukan terhadap seluruh risiko operasional yang teridentifikasi, namun belum memadai	Instansi Pemerintah telah melakukan proses analisis risiko terhadap seluruh risiko operasional unit kerja yang telah teridentifikasi. Namun demikian proses analisis risiko belum dikerjakan secara memadai sesuai dengan 3 kriteria sistematis (sebagaimana disebutkan pada kriteria C)	W/D/O	Bahwa	Bahwa	Bahwa	Bahwa	Bahwa	Bahwa	Bahwa	Y		
2.2				MR I	-	E	Analisis risiko telah dilakukan terhadap sebagian risiko operasional yang teridentifikasi.	Analisis hanya dilakukan pada sebagian dari keseluruhan risiko yang teridentifikasi	W/D/O	Bahwa	Bahwa	Bahwa	Bahwa	Bahwa	Bahwa	Bahwa	Bahwa	Y	
2.2		2	K/L/D telah menentukan prioritas risiko	MR I	-	A	Instansi Pemerintah telah menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja, strategis K/L/D	1. Instansi Pemerintah telah melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas risiko operasional unit kerja, dan strategis K/L/D terhadap seluruh hasil analisis risiko yang telah dilakukan; 2. Proses evaluasi risiko telah didokumentasikan. 3. Evaluasi risiko dilakukan sesuai dengan kebijakan kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T		
2.2				MR I	-	B	Instansi Pemerintah telah	1. Instansi Pemerintah telah melakukan evaluasi	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T	

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP												Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPP	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)						
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T					
2.2				SPP	MR	-	C	<p>menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja.</p>	<p>risiko untuk menentukan prioritas risiko operasional unit kerja dan strategis seluruh hasil analisis risiko yang telah dilakukan;</p> <p>2. Proses evaluasi risiko telah didokumentasikan.</p> <p>3. Evaluasi risiko dilakukan sesuai dengan kebijakan kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.</p>	W/D/O	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Y
											...TelahTelahTelahTelahTelahTelahTelahTelah
2.2				SPP	MR	-	D	<p>menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja.</p>	<p>1. Instansi Pemerintah telah melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja yang telah dilakukan;</p> <p>2. Proses evaluasi risiko telah didokumentasikan.</p> <p>3. Evaluasi risiko dilakukan sesuai dengan kebijakan kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.</p>	W/D/O	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Y
											...TelahTelahTelahTelahTelahTelahTelahTelah
2.2				SPP	MR	-	E	<p>menentukan prioritas risiko pada sebagian risiko operasional unit kerja</p>	<p>1. Instansi Pemerintah telah melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas risiko operasional proses evaluasi risiko tersebut namun demikian evaluasi risiko belum dilakukan terhadap seluruh hasil analisis risiko yang telah dilakukan.</p>	W/D/O	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Bahwa	Y	Y
											...TelahTelahTelahTelahTelahTelahTelahTelah

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP						Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4	
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T		Y/T	Y/T
2.2	K/L/D telah menentukan rencana tindak pengendalian	3	K/L/D telah menentukan rencana tindak pengendalian	SPI	MR	-	A	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional unit kerja, strategi unit kerja, dan strategis K/L/D secara memadai	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
										T	T	T	T	T	T	T	T		
2.2				SPI	MR	-	B	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja secara memadai	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
										T	T	T	T	T	T	T	T		
2.2				SPI	MR	-	C	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja yang telah diprioritaskan	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
										T	T	T	T	T	T	T	T		
2.2				SPI	MR	-	D	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja yang telah diprioritaskan	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
										T	T	T	T	T	T	T	T		

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP						Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T
2.2				MR I	-	E	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap sebagian risiko operasional unit kerja yang telah diprioritaskan	<60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja yang disusun (sampling) telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas target seketu, penerangung jawab, ukuran pelaksanaan, secara substansi dinilai dapat mengurangi dampak/mengulangkan penyebab,realistis.	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
2.2		4	Tidak pengendalian telah diimplementasikan	MR I	-	A	Tidak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja, risiko strategis unit kerja, dan risiko K/L/D telah diimplementasikan	>60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D (sampling) yang direncanakan telah diimplementasikan dan didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	T	
2.2				MR I	-	B	Tidak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja telah diimplementasikan	>60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja (sampling) yang direncanakan telah diimplementasikan dan didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	T	
2.2				MR I	-	C	Tidak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja telah diimplementasikan	>60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja (sampling) yang direncanakan telah diimplementasikan dan didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	Y	Y	
2.2				MR I	-	D	Tidak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja telah diimplementasikan	>60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja (sampling) yang direncanakan telah diimplementasikan dan didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
2.2				MR I	-	E	Tidak pengendalian terhadap sebagian risiko operasional unit kerja telah diimplementasikan	<60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja (sampling) yang direncanakan telah diimplementasikan dan didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP												Kesimpulan Akhir Y/T
				SPP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)				
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T			
2.2				SPP	MRI	-	D	Tindak pengendalian efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja	Maka efektivitas penanganan risiko dihitung dengan cara [(20-3)/20X100]=85%	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y			
				SPP	MRI	-	E	Tindak pengendalian efektif menurunkan sebagian risiko operasional unit kerja	RTP untuk risiko operasional unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar >60%	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y			
2.2		6	Analisis dan asesmen risiko telah dilakukan dan menghasilkan rancangan tindak pengendalian untuk memitigasi risiko korupsi yang sudah ditetapkan	SPP	-	IEPK	A	Rencana tindak pengendalian hasil asesmen risiko korupsi baik pada kegiatan utama maupun kegiatan pendukung telah dilaksanakan dan update register risiko korupsi dilakukan secara periodik dan konsisten	- Analisis risiko korupsi (identifikasi dan asesmen) telah dilakukan oleh unit organisasi atau unit manajemen risiko. - Peta risiko korupsi telah disusun. - Rencana mitigasi dan rencana tindak pengendalian risiko korupsi telah disusun dan dipertuskan. - Unit kerja secara berkala menestar dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian apakah telah efektif mengidentifikasi risiko korupsi atau menguraangi keterjadian maupun dampak risiko korupsi. - Unit kerja secara berkala melakukan penutakhiran risiko korupsi berdasarkan hasil evaluasi risiko korupsi.	W/D/O	T		T		T		T		T				
				SPP	-	IEPK	B	Asesmen risiko korupsi pada kegiatan utama telah menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian dan bukti RTP dilaksanakan.	- Analisis risiko korupsi (identifikasi dan asesmen) telah dilakukan oleh unit organisasi atau unit manajemen risiko. - Peta risiko korupsi telah disusun. - Rencana mitigasi dan rencana tindak pengendalian risiko korupsi telah disusun dan diputuskan. - Unit kerja secara berkala	W/D/O	T		T		T		T		T				

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gрад	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP						Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	
2.2				-	-	IEPK	C	<p>Asesmen risiko korupsi pada beberapa kegiatan utama telah menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian dan terpadwal</p>	<p>mencatat dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian apakah telah efektif menghilangkan risiko korupsi atau mengurangi keterjadian maupun dampak risiko korupsi.</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	T			
											Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Belum	Y	Bahwa Telah	Y			
2.2				-	-	IEPK	D	<p>Unit kerja telah melakukan identifikasi risiko korupsi namun belum dilakukan penilaian atas risiko tersebut sehingga belum diketahui risiko korupsi mana yang mempunyai tingkat keterjadian dan dampak yang tinggi (prioritas) maupun yang rendah.</p>	<p>Unit kerja telah melakukan identifikasi risiko korupsi namun belum dilakukan penilaian atas risiko tersebut sehingga belum diketahui risiko korupsi mana yang mempunyai tingkat keterjadian dan dampak yang tinggi (prioritas) maupun yang rendah.</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y			
											Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y			
2.2				-	-	IEPK	E	<p>Penilaian risiko korupsi tidak berjalan</p>	<p>Unit kerja tidak pernah melakukan penilaian risiko korupsi yang dapat digunakan dalam rangka mitigasi risiko korupsi dan penyusunan kebijakan.</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y			
											Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y			
3.1	Revisi atas Kinerja	1	Pamptuan K/L/D membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara	-	-	-	A	<p>Pelaksanaan revisi kinerja mendukung pencapaian kinerja organisasi</p>	<p>a. Terdapat perbaikan yang berkelanjutan atas kinerja organisasi, unit kerja, kegiatan, dan pegawai sebagai akibat pelaksanaan revisi kinerja. b. Revisi kinerja memunculkan penilaian terhadap tolok ukur kinerja</p>	W/D/O	T		T		T		3	T		

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T
3.2	Pembinaan SDM	1	Pembinaan SDM dilakukan sesuai peraturan perundangn yang berlaku sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	A	<p>Pembinaan SDM organisasi telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi</p> <p>- Pembinaan SDM telah mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis</p> <p>- Pembinaan SDM telah berhasil meningkatkan kinerja yang memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi</p> <p>- Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dihubungkan dengan pembinaan SDM-nya</p>	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
				SPIP	-	-	B	<p>Kebijakan dan implementasi terkait pembinaan SDM organisasi telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya</p>	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
				SPIP	-	-	C	<p>Pembinaan SDM telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan organisasi</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah Belum Tidak Tidak	Y	Bahwa Telah Belum Tidak Tidak	T	Bahwa Telah Belum Tidak Tidak	T	Bahwa Telah Belum Tidak Tidak	Y	Y		
				SPIP	-	-	D	<p>Kebijakan terkait pembinaan SDM telah dikomunikasikan</p>	W/D/O	Y	Bahwa Telah Belum Tidak Tidak	Y	Bahwa Telah Belum Tidak Tidak	Y	Bahwa Telah Belum Tidak Tidak	Y	Bahwa Telah Belum Tidak Tidak	Y	Y		

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP						Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPI	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T
				SPIP	-	-	C	<p>Kebijakan pengelolaan sistem informasi organisasi digunakan dalam analisis kebutuhan dukungan sistem informasi, kemanfaatan sistem informasi existing, serta struktur pengelola dan pengguna sistem informasi beserta wewenang dan tanggungjawabnya</p> <p>a.</p>	<p>Seluruh kebijakan/SOP tentang pengelolaan sistem informasi telah diimplementasikan, antara lain:</p> <p>a. Sistem informasi yang digunakan telah dianalisis kemampuannya bagi pencapaian tujuan organisasi;</p> <p>b. Aset-aset yang berhubungan dengan teknologi informasi telah diperbaiki dan dicatat serta dianalisa kebutuhannya;</p> <p>c. Struktur organisasi pengelola sistem informasi telah menjalankan proses bisnis yang distur dengan SOP;</p> <p>d. Kewenangan dan tanggung jawab pengelola sistem informasi dan pengguna sistem informasi dipisahkan sesuai dengan perannya masing-masing.</p>	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Belum	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	Y	Y
				SPIP	*	*	D	<p>Unit pengelola sistem informasi organisasi dan pengguna mengetahui kebijakan pengelolaan sistem informasi.</p>	<p>Unit pengelola dan pengguna sistem informasi memahami prosedur pengelolaan sistem informasi dan tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing.</p>	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y		
				SPIP	-	-	E	<p>Fungsi organisasi ditetapkan kebijakan/grand design pengelolaan sistem informasi.</p>	<p>Adanya kebijakan pengelolaan sistem informasi yang antara lain mempertimbangkan:</p> <p>a. Risiko penggunaan sistem informasi;</p> <p>b. Prosedur otorisasi atas sistem informasi;</p> <p>c. Peretapan aset teknologi informasi yang perlu dikelola dan rencana penyusunan kebijakan dan prosedur teknologi informasi;</p> <p>d. Penetapan struktur organisasi untuk mengelola sistem informasi (termasuk program pengamanan);</p> <p>e. Kebijakan dan prosedur pemisahan fungsi dalam pengelolaan sistem informasi; dan</p> <p>f. Pedoman rencana</p>	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MR	IEP				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
										Y/T	Y/T	Y/T	Y/T		Y/T	Y/T	Y/T	Y/T
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	1	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin BMN/D digunakan sesuai peraturan yang berlaku (tidak terjadi pelanggaran hukum terkait penggunaan BMN/D oleh pimpinan dan pegawai)	SPIP	-	-	A	Perbaikan berkelanjutan atas pengelolaan aset organisasi	W/D/O	T	T	T	T	T	3			
				SPIP	-	-	B	Kebijakan/prosedur pengelolaan atas aset organisasi termasuk pengamanan fisik atas aset dievaluasi secara berkala	W/D/O	T	T	T	T	T				
				SPIP	-	-	C	Kebijakan/prosedur pengelolaan atas aset organisasi termasuk pengamanan fisik atas aset diimplementasikan secara memadai	W/D/O	Y	Y	T	T	Y	Y			

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T	
				SPIP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		
3.5	Penetapan dan Revisi atas Indikator dan Ukuran Kinerja	1	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan revisi atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibarengkan dengan IKU organisasi.	SPIP	-	-	A	Perbaikan berkelanjutan atas penetapan dan revisi atas indikator dan ukuran kinerja organisasi	dan rencana pemulihan setelah bencana (disaster recovery plan).	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3	T	
				SPIP	-	-	B	Kebijakan/prosedur penetapan dan revisi atas indikator dan ukuran kinerja organisasi secara berkala	a. K/L/D telah melaksanakan revisi secara berkala terhadap kebijakan/prosedur penetapan indikator dan ukuran kinerja dari organisasi, unit kerja, kegiatan, sampai dengan pegawai. b. Hasil revisi telah ditindaklanjuti dengan perbaikan perumusan indikator dan ukuran kinerja. c. Indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan mencapai kriteria tepat dan andal.	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	
				SPIP	-	-	C	Kebijakan/prosedur penetapan dan revisi atas indikator dan ukuran kinerja organisasi dilaksanakan secara memadai.	Indikator dan ukuran kinerja direvisi dan divalidasi secara periodik atas ketepatan dan kesesuaian ukuran dan indikator kinerja.	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Belum ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Belum ...	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	
				SPIP	-	-	D	Kebijakan/prosedur penetapan dan revisi atas indikator dan ukuran kinerja organisasi dipahami namun belum sepenuhnya diimplementasikan.	Setiap tingkatan pada organisasi sampai dengan individu telah memahami prosedur penetapan indikator dan ukuran kinerja terutama unit/pegawai yang menjalankan fungsi perencanaan kinerja namun belum sepenuhnya tepat dan andal.	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	
				SPIP	-	-	E	Penerapan kebijakan/prosedur penetapan dan revisi atas indikator dan ukuran kinerja	Adanya kebijakan/prosedur sebagai pedoman penetapan atas indikator	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	Y

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP												Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)						
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T			
3.6	Pemisahan Fungsi	1	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	SPIP	-	-	A	<p>Pemisahan fungsi telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi</p> <p>- Pemisahan fungsi telah mampu menyelesaikan dengan perubahan lingkungan strategis</p> <p>- Pemisahan fungsi secara efektif mampu mitigasi risiko kolusi dan pengalihan wewenang</p> <p>- Pemisahan fungsi mampu membuat pelaksanaan program dan kegiatan lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi</p>	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	3		
				SPIP	-	-	B	<p>Kebijakan dan implementasi terkait pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya</p>	W/D/O	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
				SPIP	-	-	C	<p>Pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	T	Bahwa ... Belum ...	T	Bahwa ... Telah ...	Y	Bahwa ... Telah ...	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T
			SPIP	-	-	D	<p>Kebijakan terkait pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan</p> <p>Terdapat kebijakan yang mengatur pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian</p>	<p>- Kebijakan telah dipahami oleh penanggungjawab pengelolaan keuangan/kegiatan</p> <p>- Kebijakan telah dikomunikasikan kepada pimpinan (struktural) dan pegawai</p>	W/D/O	<p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
			SPIP	-	-	E	<p>Proses otorisasi atas transaksi telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi</p> <p>Kebijakan dan implementasi terkait otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya</p>	<p>Kebijakan telah mengatur tugas atas transaksi atau kejadian telah dipisahkan di antara pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran dan penerimaan data, rewi dan audit, penyimpanan dan pengamanan aset</p> <p>- Pelimpahan tugas dan kewenangan secara sistematis ke sejumlah orang untuk memastikan terdapat proses check and balances</p>	W/D/O	<p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	1	<p>Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan.</p>	SPIP	-	A	<p>Proses otorisasi atas transaksi telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi</p> <p>Kebijakan dan implementasi terkait otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya</p>	<p>- Fungsi otorisasi telah mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis</p> <p>- Fungsi otorisasi secara efektif mampu mitigasi risiko kolusi dan penyelewengan wewenang</p> <p>- Fungsi otorisasi mampu membuat pelaksanaan program dan kegiatan lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi</p>	W/D/O	<p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p> <p>Bahwa Telah</p>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP						Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPP	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T
				SPIP	-	-	C	<p>Otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan</p>	<p>lebih baik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otorisasi dilaksanakan sesuai ketentuan (struktur organisasi, peraturan/keputusan, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain) - Fungsi otorisasi dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan maupun kegiatan teknis operasional organisasi - Fungsi otorisasi dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur 	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	Y	Y	
				SPIP	-	-	D	<p>Kebijakan terkait otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang bersangkutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan telah dipahami oleh penanggungjawab pengelolaan keuangan/kegiatan - Kebijakan telah dikomunikasikan kepada pimpinan (struktur) dan pegawai 	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
				SPIP	-	-	E	<p>Terdapat kebijakan yang mengatur prosedur otorisasi atas transaksi dan kejadian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan telah mengatur spesifik suatu transaksi atau kejadian dapat diotorisasi - Pihak yang berwenang melakukan otorisasi sesuai lingkup otorisasinya 	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian																3		
				SPIP	-	-	A	<p>Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pencatatan telah mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis - Proses pencatatan secara efektif mampu mitigasi risiko manipulasi transaksi dan penyalahgunaan wewenang - Proses pencatatan mampu menghasilkan informasi yang relevan, berubi, dan berguna bagi manajemen dalam mengendalikan operasi dan 	W/D/O	T		T		T		T	T	

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T
				SPIP	-	-	D	Kebijakan terkait pembatasan akses terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan	- Kebijakan telah dipahami oleh penanggungjawab BMN/BMD - Kebijakan telah dikomunikasikan kepada pimpinan (struktural) dan pegawai	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	Y		
				SPIP	-	-	E	Terdapat kebijakan yang mengatur pembatasan akses terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi beserta pencatatannya	Kebijakan telah mengatur: - Mekanisme/desain pembatasan akses yang tidak diinginkan terhadap sumber daya - Mekanisme/desain pembatasan akses yang tidak diinginkan terhadap pencatatan sumber daya	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y	Y		
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya																	3			
		1	Terdapat pertanggung jawaban secara atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/di kuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	A	Pertanggung jawaban terhadap sumber daya dan pencatatannya telah diperbaiki secara berkelanjutan dan sesuai optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi	- Proses pertanggung jawaban telah mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis - Proses pertanggung jawaban secara efektif mampu meminimisasi risiko penggunaan secara tidak sah dan penyalahgunaan wewenang - Pertanggung jawaban terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dibagi bagi kepada pihak/pegawai sesuai dengan kewenangannya	W/D/O	T		T		T		T		T		
				SPIP	-	-	B	Kebijakan dan implementasi terkait akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya telah dioptimasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya	Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan: - Berkala - Tindak lanjut - Dilakukan untuk mengurangi residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjut - Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik	W/D/O	T		T		T		T		T		

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T	
				Unit/OPD 1		Unit/OPD 2					Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		Unit/OPD... (n)					
				Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian					Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian		Y/T
			SPIP	-	-	C	Sumber daya dan pencatatannya telah dipertanggungjawabkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai ketentuan/peraturan/keputusan, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain) - Dilakukan perbandingan betwala antara sumber daya dengan pencatatannya - Pertanggungjawaban dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangannya (akuntansi keuangan dan EMN/BMD) maupun kegiatan teknis operasional organisasi - Pertanggungjawaban terhadap sumber daya dan pencatatannya direvisi secara periodik - Fungsi pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang disebabkan kelambatan alur/prosedur 	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Belum	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	Y	Y
			SPIP	-	-	D	Kebijakan terkait pertanggungjawaban sumber daya dan pencatatannya telah dikomunikasikan dan disetujui oleh pihak yang berkepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan telah dipahami oleh penanggungjawab pengelolaan keuangan dan EMN/BMD - Kebijakan telah dikomunikasikan kepada pimpinan (struktural) dan pegawai 	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y
			SPIP	-	-	E	Terdapat kebijakan yang mengatur prosedur pertanggungjawaban sumber daya dan pencatatannya	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan telah mengatur penyusunan, dan penetapan sumber daya - Penetapan pihak/pegawai yang harus bertanggungjawab - Penetapan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan/dibuat 	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y
3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian																		3	

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)		
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T				
		1	Terdapat pengabdian, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	SPIP	-	-	A	<p>Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi</p> <p>Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah diselesaikan sehingga dapat diketahui efektivitasnya</p>	<p>- Proses pendokumentasian telah mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis</p> <p>- Proses pendokumentasian mampu menghasilkan dokumen yang relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen dan pihak lain secara real time</p> <p>Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkala - Terdokumentasi - Dilakukan untuk mengurangi residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjut - Perbaikan telah dilaksanakan kinerjanya yang lebih baik 	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	
				SPIP	-	-	B	<p>Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah diselesaikan sehingga dapat diketahui efektivitasnya</p>	<p>- Proses pendokumentasian telah mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis</p> <p>- Proses pendokumentasian mampu menghasilkan dokumen yang relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen dan pihak lain secara real time</p> <p>Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkala - Terdokumentasi - Dilakukan untuk mengurangi residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjut - Perbaikan telah dilaksanakan kinerjanya yang lebih baik 	W/D/O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T
				SPIP	-	-	C	<p>Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan</p>	<p>- Pendokumentasian dilaksanakan sesuai ketentuan (peraturan/keputusan, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain)</p> <p>- Dokumentasi dan catatan dikelola, dipelihara, dan dimutakhirkan secara berkala</p> <p>- Pendokumentasian dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik sesuai karakteristik dokumen dan kebutuhan organisasi</p> <p>- Pendokumentasian dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan (akuntansi keuangan dan BMN/EMD) maupun kegiatan teknis operasional organisasi</p> <p>- Fungsi pendokumentasian dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang disebabkan</p>	W/D/O	Y	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Bahwa ... Telah	Y	Y

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
4.1						C	Informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia secara lengkap dan mudah diakses; untuk diperoleh	<ul style="list-style-type: none"> - Disajikan tepat waktu, andal, dan relevan. - Informasi layanan internal (keuangan, kepegawaian, umum, dab) telah dievaluasi dan ditindaklanjuti sehingga: <ol style="list-style-type: none"> Jelas klasifikasi informasi; Jelas prosedur penyelesaian informasi; Disajikan tepat waktu, andal, dan relevan. - Informasi manajemen kinerja (rencana kinerja, capaian kinerja, dab) telah dievaluasi dan ditindaklanjuti sehingga: <ol style="list-style-type: none"> Jelas klasifikasi informasi; Jelas prosedur penyelesaian informasi; Disajikan tepat waktu, andal, dan relevan. 	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	Y
4.1						D	Informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia secara lengkap namun tidak diperoleh/akses terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi produk, standar, prosedur layanan/pelaksanaan tugas fungsi dan pengaduan tersedia secara lengkap dan mudah diakses; - Informasi layanan internal (keuangan, kepegawaian, umum, dab) tersedia secara lengkap dan mudah diakses; - Informasi manajemen kinerja (rencana kinerja, capaian kinerja, dab) tersedia secara lengkap dan mudah diakses. 	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T	
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T		
4.1			SPIP	-	-	E	Ketersediaan informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tidak lengkap	capaian kinerja, daji tersedia secara lengkap, namun tidak mudah diakses	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y			
4.1		2	Pamflet K/L/D membangun sistem pengaduan	MR	I	A	Sistem pengaduan telah dibangun pada perbaikan berkelanjutan	Perbaikan berkelanjutan antara lain berdampak pada peningkatan kinerja, perbaikan pelayanan publik, dan kepuasan stakeholder.	W/D/O	T		T		T		T	T			
4.1			SPIP	MR	I	B	Sistem pengaduan telah diarahasi	Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan: - Berkala - Terdokumentasi - Dilakukan untuk menangani residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti - Perbaikan telah mengkasikan kinerja yang lebih baik	W/D/O	T		T		T		T	T			
4.1			SPIP	MR	I	C	Sistem pengaduan telah diterapkan dan ditindaklanjuti sesuai Kebijakan/SOP	Sudah jelas	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	Y	Y			
4.1			SPIP	MR	I	D	Keberadaan sistem pengaduan telah diinisialisasikan kepada masyarakat/stakeholder	Sudah jelas	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y			
4.1			SPIP	MR	I	E	Telah terdapat kebijakan penetapan sistem pengaduan	Sudah jelas	W/D/O	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Y			

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPP	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)	
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T		Y/T	Y/T
4.1	Register risiko dan rencana tindak pengendalian dalam rencana komunikasi dan kepihak terkait	4	Register risiko dan rencana tindak pengendalian dalam rencana komunikasi dan kepihak terkait	SPIP	MR	I	A	<p>operasional unit kerja</p> <p>Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional Unit Kerja/OPD, strategis Unit Kerja/OPD dan Strategis K/L/D telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait dan diadatkan bahan dalam pengembalian keputusan serta menjadi bahan pembelajaran dan inovasi</p>	W/D/O	Y	T	T	T	T	T	T	T	T			
4.1			Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional Unit Kerja/OPD, strategis Unit Kerja/OPD dan Strategis K/L/D telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait dan diadatkan bahan dalam pengembalian keputusan	SPIP	MR	I	B	<p>Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional Unit Kerja/OPD, strategis Unit Kerja/OPD dan Strategis K/L/D telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait dan diadatkan bahan dalam pengembalian keputusan</p> <p>Komunikasi Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional Unit Kerja/OPD, dan strategis Unit Kerja/OPD telah dilakukan kepada semua pihak yang telah rencana komunikasi dalam dokumen RTP yang telah disusun sebelumnya dan dijadikan bahan pembuatan keputusan oleh pihak-pihak tersebut serta menjadi bahan pembelajaran dan inovasi bagi K/L/D</p>	W/D/O	Y	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
4.1			Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional Unit Kerja/OPD, strategis Unit Kerja/OPD dan Strategis K/L/D telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	SPIP	MR	I	C	<p>Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional Unit Kerja/OPD, strategis Unit Kerja/OPD dan Strategis K/L/D telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait</p> <p>Komunikasi Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat</p>	W/D/O	Y	T	T	T	T	T	T	T	T	T	Y	
4.1			Register risiko dan rencana tindak	SPIP	MR	I	D	<p>Register risiko dan rencana tindak</p> <p>Komunikasi Register risiko dan rencana tindak</p>	W/D/O	Y	T	T	T	T	T	T	T	T	T	Y	

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP				Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2			Unit/OPD 3		Unit/OPD 4	
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T		Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T
4.1				MR	-	E	penyediaan tingkat operasional unit kerja/OPD dan strategi unit kerja/OPD telah dilaksanakan dalam rencana tindakan pengendalian tingkat operasional unit kerja/OPD tidak dilakukan kepada semua pihak yang telah diidentifikasi dalam rencana komunikasi sebagaimana tertuang dalam dokumen KTP yang telah disusun sebelumnya.	Komunikasi Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional Unit kerja/OPD tidak dilakukan kepada semua pihak yang telah diidentifikasi dalam rencana komunikasi sebagaimana tertuang dalam dokumen KTP yang telah disusun sebelumnya.	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	Y				
4.1		5	Saluran pelaporan internal dikelola secara kredibel dalam menentukan pelaporan dan memberikan perlindungan kepada pelapor sehingga keputusan meningkat dan memberikan efek pengantar yang efektif	SPIP	-	A	Unit kerja menyelenggarakan sistem whistleblowing secara mandiri dan telah dimanfaatkan secara konstruktif oleh pegawai dan stakeholder. Informasi whistleblowing ditangani sesuai prosedur dan kendalian sistem whistleblowing dipantau dan dievaluasi efektivitasnya sebagai bahan perbaikan yang berkelanjutan	- Pegawai memahami keberhasilan sistem whistleblowing internal pada pegawai tinggi. - Sikap pegawai terhadap tindakan pelapor whistlebloweri sangat positif. - Pegawai mempersepsi saluran pelaporan terpercaya (lagoran ditindaklanjuti). - Pegawai mempersepsi perlindungan pelapor terpercaya. - Ada bukti saluran pelaporan berfungsi dan dimanfaatkan pegawai/stakeholder. - Evaluasi dan perbaikan atas sistem whistleblowing telah dilakukan secara berkala.	W/D/O	T	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y			
4.1				SPIP	-	B	Unit kerja menyelenggarakan sistem whistleblowing internal secara mandiri, telah dimanfaatkan secara konstruktif oleh pegawai dengan tumbuhnya intensi	- Pegawai memahami keberhasilan saluran whistleblowing pada pegawai cukup tinggi. - Sikap pegawai terhadap tindakan pelapor whistleblower positif. - Pegawai mempersepsi saluran pelaporan terpercaya (laporan ditindaklanjuti).	W/D/O	T	Bahwa ... Telah	Y	Bahwa ... Telah	Y	T				

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gmd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T						
				SPIP	MIRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)					
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T			Uraian Hasil Pengujian	Y/T			
							whistleblowing yang cukup tinggi dan sikap positif kepada pelapor, serta mekanisme perlindungan kepada pelapor berfungsi.	- Pegawai mempersepsi perlindungan pelapor terpeceya - Ada bukti saluran pelaporan berfungsi dan dimanfaatkan - Tidak ada keluhan/ stakeholder - Berkaas dan perbaikan secara berkelanjutan atas sistem whistleblowing																	
4.1				SPIP		IEPK	C	Unit kerja menyelenggarakan sistem whistleblowing internal dan cukup berfungsi, secara umum sikap terhadap pelapor cukup positif dan niat whistleblowing pada tataran sedang. Pegawai tidak memanfaatkan saluran whistleblowing karena masih tidak percaya mekanisme perlindungan pelapor berjalan.	- Pegawai memahami keberadaan saluran whistleblowing internal - Intensitas whistleblowing pegawai pada tingkat sedang. - Sikap pegawai terhadap tindakan pelapor [whistleblower] cukup positif. - Pegawai mempersepsi saluran pelaporan kurang terpeceya [laporan ditindaklanjuti]. - Pegawai mempersepsi perlindungan pelapor kurang terpeceya - Tidak ada bukti saluran pelaporan berfungsi dan dimanfaatkan - Pegawai/stakeholder.	W/D/O	Bahwa Telah	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Belum	T	Bahwa Telah	T	Bahwa Telah	T					
4.1				SPIP		IEPK	D	Unit kerja menyelenggarakan sistem whistleblowing internal namun tidak ada bukti saluran pelaporan berfungsi dan dimanfaatkan, terhadap pelapor masih cenderung negatif dan niat whistleblowing cenderung rendah.	- Pegawai memahami keberadaan saluran whistleblowing internal - Intensitas whistleblowing pegawai cenderung rendah. - Sikap pegawai terhadap tindakan pelapor [whistleblower] cenderung negatif. - Pegawai mempersepsi saluran pelaporan tidak terpeceya [laporan ditindaklanjuti]. - Pegawai mempersepsi perlindungan pelapor tidak terpeceya - Tidak ada bukti saluran pelaporan berfungsi dan dimanfaatkan - Pegawai/stakeholder.	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y					
4.1				SPIP		IEPK	E	Unit kerja tidak menyelenggarakan sistem whistleblowing	- Pegawai tidak paham keberadaan saluran whistleblowing internal - Intensitas whistleblowing	W/D/O	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y	Bahwa Telah	Y							

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP								Kesimpulan Akhir Y/T				
				SPI P	MRI	IEPK					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4			Unit/OPD... (n)			
											Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T	Uraian Hasil Pengujian	Y/T			Uraian Hasil Pengujian	Y/T	
							dan adanya sikap negatif terhadap pelapor	pegawai sangat rendah. - Sikap pegawai terhadap tindakan pelapor (whistleblower) sangat negatif. - Saluran pelaporan yang ada tidak bekerja sama sekali															
4.2	Komunikasi yang Efektif																						3
		1	Tertaksaman ya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal dalam upaya pencegahan dan pengendalian kecurangan/ fraud	SPIP	*	*	A	Perbaikan berkelanjutan atas metodologi komunikasi yang efektif	Perbaikan berkelanjutan atas komunikasi yang efektif menghasilkan : - Upaya promosi/ sosialisasi tentang produk/ layanan/ pelaksanaan tugas fungsi yang telah berhasil meningkatkan kepercayaan publik/ stakeholder; - Upaya komunikasi dengan publik/ stakeholder yang telah berhasil memperbaiki citra instansi.	W/D/O													T
				SPIP	*	*	B	Komunikasi yang efektif telah dilakukan kepada internal dan eksternal secara terstruktur dan berkala dan telah dievaluasi	- Telah dilakukan evaluasi terhadap upaya promosi/ sosialisasi tentang produk/ layanan/ pelaksanaan tugas fungsi yang menghasilkan perbaikan. Contoh: melalui evaluasi kepuasan layanan, survei citra instansi di mata stakeholder - Telah dilakukan esubasi terhadap upaya komunikasi dengan publik/ stakeholder untuk mengatasi isu negatif, yang menghasilkan perbaikan	W/D/O													T
				SPIP	-	-	C	Komunikasi yang efektif telah dilakukan kepada internal dan eksternal secara terstruktur dan berkala	- Upaya promosi/ sosialisasi tentang produk/ layanan/ pelaksanaan tugas fungsi dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik/ stakeholder telah dilakukan secara terstruktur dan berkala; - Upaya komunikasi dengan publik/ stakeholder untuk mengatasi isu negatif telah dilakukan secara terstruktur dan berkala;	W/D/O													T

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP						Kesimpulan Akhir Y/T		
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3			Unit/OPD 4	
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T		Y/T	Y/T
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	1	Peningkatan organisasi/pelaksanaan/wab program dan kegiatan/pelaksanaan/pelembagaan/operasional/evaluasi secara berkala/pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi	SPIP	-	-	A	Perbaikan berkelanjutan atas pemantauan pengendalian intern dilaksanakan dan berdampak pada kualitas pengendalian intern	a. Pemantauan atas pelaksanaan pengendalian telah efektif mengurangi dampak dan frekuensi terjadinya risiko; b. Terdapat sistem informasi terintegrasi untuk memantau pengendalian untuk seluruh proses bisnis secara real-time; c. Pemantauan kinerja digunakan sebagai dasar dalam reward and punishment; d. Didukung oleh sistem informasi pemantauan kinerja yang terintegrasi.	W/D/O								T	
				SPIP	-	-	B	Seluruh hasil pemantauan berkelanjutan dikelola dan ditindaklanjuti	Seluruh hasil pemantauan dikelola dan ditindaklanjuti. Pemantauan dilaksanakan: a. Secara berkala; b. Pemantauan menilai pelaksanaan pengendalian (membandingkan rencana dengan pelaksanaan dan memberikan rekomendasi perbaikan); c. Hasil pemantauan dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi. Pemantauan atas kinerja K/L/D, unit level I, unit level II, unit level III dan pemantauan kinerja individu membahas: a. Capaian pelaksanaan rencana aksi; b. Hambatan; c. Rencana ke depan.	W/D/O									T
				SPIP	-	-	C	Pemantauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pemantauan dan dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian dan pemantauan kinerja telah	Pemantauan dilakukan pada seluruh aktivitas pengendalian. Pemantauan dilaksanakan: a. Secara berkala; b. Pemantauan menilai pelaksanaan pengendalian (membandingkan rencana dengan pelaksanaan dan memberikan rekomendasi perbaikan).	W/D/O									Y

Kode	Uraian Subansur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Gnd	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian terkait Tujuan 1 SPP					Kesimpulan Akhir Y/T			
				SPI	MR	IEP					Unit/OPD 1		Unit/OPD 2		Unit/OPD 3		Unit/OPD 4		
											Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T		Y/T	Y/T	Y/T
			terhadap risiko telah dilakukan				dan tidak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D secara memadai dan menjadi bagian pembelajaran bagi unit kerja	<p>Monitoring sesuai kebijakan;</p> <p>2. Monitoring dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sesuai kebijakan;</p> <p>3. Monitoring dilakukan oleh unit kepatuhan dan dilaksanakan minimal satu kali per semester atau sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>4. Proses dan hasil Monitoring telah didokumentasikan;</p> <p>5. Monitoring sepenuhnya dilakukan terhadap:</p> <p>a. implementasi pengendalian;</p> <p>b. kejadian risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan segera);</p> <p>c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko.</p> <p>6. Hasil monitoring menunjukkan kondisi yang baik;</p> <p>7. Hasil Monitoring seluruhnya telah ditindaklanjuti.</p> <p>8. Tercapat implementasi perbaikan atas hasil monitoring.</p>											
				SPIP	MR		B	Monitoring terhadap risiko dan tidak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD, strategis unit kerja/OPD dan strategis K/L/D secara memadai	<p>Memadai berarti:</p> <p>1. Telah ada langkah Monitoring sesuai kebijakan;</p> <p>2. Monitoring dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sesuai kebijakan;</p> <p>3. Monitoring dilakukan oleh unit kepatuhan dan dilaksanakan minimal satu kali per semester atau sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>4. Proses dan hasil Monitoring telah didokumentasikan;</p> <p>5. Monitoring sepenuhnya dilakukan terhadap:</p> <p>a. implementasi pengendalian;</p> <p>b. kejadian risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan</p>	W/D/O									

12. KK 4 – PENALTI/PENGURANGAN NILAI**KERTAS KERJA PENALTI/PENGURANGAN NILAI**

STRUKTUR DAN PROSES		PENGURANGAN NILAI
I	Lingkungan Pengendalian	
	Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	YA
	Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	TIDAK
	Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	YA
	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	TIDAK
	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	YA
	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	YA
	Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	YA
	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	YA
II	Penilaian Risiko	
	Identifikasi Risiko (2.1)	YA
	Analisis Risiko (2.2)	YA
III	Kegiatan Pengendalian	
	Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	TIDAK
	Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	YA
	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	TIDAK
	Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	YA
	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	TIDAK
	Pemisahan Fungsi (3.6)	TIDAK
	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	YA
	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	YA
	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	YA
	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	YA
	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	YA
IV	Informasi dan Komunikasi	
	Informasi yang Relevan (4.1)	YA
	Komunikasi yang Efektif (4.2)	TIDAK
V	Pemantauan	
	Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	YA
	Evaluasi Terpisah (5.2)	YA

Kasus Korupsi Institusional	
Sub Unsur Terkait	
1.1	3.4
1.3	3.7
1.5	3.8
1.6	3.9
1.7	3.10
1.8	3.11
2.1	4.1
2.2	5.1
3.2	5.2

Kasus Korupsi Individual	
Sub Unsur Terkait	
1.1	3.6
1.3	3.7
1.6	3.8
1.8	3.9
2.1	3.11
2.2	4.1
3.2	5.1
3.4	5.2

Tabel di atas dapat digunakan sebagai referensi namun tidak membatasi Tim Penjamin Kualitas dalam menganalisis hubungan kausalitas dan melakukan pengurangan nilai pada subunsur.

13. KK LEAD III – PENCAPAIAN TUJUAN

KERTAS KERJA HASIL PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP

No.	Pencapaian Tujuan		Cara Pengukuran	Capaian K/L/D
	Indikator	Definisi Indikator		
A	Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
1.	Capaian Outcome	Mengukur efektivitas pencapaian tujuan organisasi	Menghitung rata-rata pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis K/L/D	3
2.	Capaian Output	Mengukur efisiensi pencapaian tujuan kegiatan	Menghitung rata-rata pencapaian indikator output dari kegiatan satuan kerja	5
B	Keandalan Pelaporan Keuangan			
	Opini atas Laporan Keuangan – BPK RI	Penilaian atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah oleh BPK RI	Dapatkan informasi Opini Laporan Keuangan dalam 5 tahun terakhir, yang terdiri dari: - TMP - TW - WDP - WTP-DPP - WTP	3
C	Pengamanan atas Aset Negara/Daerah			
1.	Keamanan Administrasi	Penilaian kualitas penatausahaan BMN/BMD dalam rangka mengamankan BMN/BMD dari sisi administrasi	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi aset dalam 5 tahun terakhir	3
2.	Keamanan Hukum	Penilaian atas upaya menjaga/melindungi BMN/BMD dari persengketaan, gugatan, dan beralihnya kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan hukum aset dalam 5 tahun terakhir	3
3.	Keamanan Fisik	Penilaian atas upaya mengatasi penurunan fungsi, jumlah, serta hilangnya barang	Menghitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi baik dan aman dalam 5 tahun terakhir	2
D	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
1.	Jumlah Temuan atas Ketidakpatuhan dalam LHP BPK RI	Banyaknya temuan yang dilaporkan dalam LHP BPK RI pada subbab Temuan atas Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	Menghitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	5
2.	Pidana Korupsi	Keterjadian tindak pidana korupsi pejabat politik atau minimal pejabat eselon II dalam tahun dan/atau saat penilaian	Mengidentifikasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat eselon II dalam tahun dan/atau saat penilaian	Ya

14. KK 5.1 – CAPAIAN OUTCOME

**KERTAS KERJA KOMPONEN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
T.1 – EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN**

KERTAS KERJA CAPAIAN OUTCOME

NO	SASARAN STRATEGIS K/L/D	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA OUTCOME			CAPAIAN		
			SASARAN TEPAT	IK TEPAT	DATA ANDAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
1				50%	Y/T			
				50%	Y/T			
				Y/T	Y/T			
				Y/T	40%			
				Y/T	Y/T			
2			Y	Y/T	Y/T			
				Y/T	Y/T			
				Y/T	Y/T			
				Y/T	Y/T			
				Y/T	Y/T			
3			Y/T	Y/T	Y/T			
				Y/T	Y/T			
				Y/T	Y/T			
				Y/T	Y/T			
				Y/T	Y/T			
4			Y/T	Y/T	Y/T			
				Y/T	Y/T			
				Y/T	Y/T			
				Y/T	Y/T			
				Y/T	Y/T			
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA OUTCOME						...%
								A/B/C/D/E

16. KK 6 – KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN

KERTAS KERJA KOMPONEN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
T.2 - KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN

No	Parameter Opini	T WTP Pengecekan Opini Tidak WTP	T-1 WTP Pengecekan Opini Tidak WTP	T-2 WTP Pengecekan Opini Tidak WTP	T-3 WTP Pengecekan Opini Tidak WTP	T-4 WTP Pengecekan Opini Tidak WTP
II	Temuan a Ringkasan	<p>1. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018 Hasil Pembinaan dari Kantor Pelayanan Pajak Belum Seluruhnya Diverifikasi;</p> <p>2. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018 Belum Dilaksanakan Secara Memadai;</p> <p>3. Penatausahaan dan Pengelolaan Jm Pemakaman Tanah kepada Pihak Ketiga oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang belum Dilaksanakan Secara Memadai;</p> <p>4. Potensi Pajak Reklame Minimal Sebesar Rp1.477.084.477,00 Belum Ditetapkan;</p> <p>5. Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Magelang TA 2018 Belum Optimal serta Terdapat Kekurangan Penerimaan Sebesar Rp1.610.097.963,13 atas Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang Dikezulasikan dengan Pihak Ketiga yaitu PT CGA;</p> <p>6. Pengelolaan Jasa Giro pada 195 Rekening BCS Sekolah Dasar dan 27 Rekening BOS SMP pada Pemerintah Kota Magelang Tidak Sesuai Ketentuan;</p> <p>7. Realisasi Belanja Barang dan</p>	<p>1. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Pemerintah Kota Magelang Belum Tertib;</p> <p>2. Pengelolaan Jasa Giro dan Penyajian Sisa Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada 16 Rekening Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pemerintah Kota Magelang Tidak Sesuai Ketentuan;</p> <p>3. Serah Terima Sarana dan Prasarana Sebagai Dampak Pengalihan Uraian Pemerintahan Sesuai Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dari Pemerintah Kota Magelang Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Belum Optimal;</p> <p>4. Penyerahan SKRD Retribusi IMB Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Potensi Piutang Retribusi IMB TA 2017 Sebesar Rp1.742.400,00 dan Potensi Denda yang Tidak Dapat Ditagihkan Minimal Sebesar Rp41.938.176,00;</p> <p>5. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Belum Sesuai Ketentuan dan Terdapat Potensi Pendapatan Retribusi Berjumlah yang Tidak Tervalidasi Minimal Sebesar Rp7.938.750,00;</p> <p>6. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Magelang Belum Optimal;</p> <p>7. Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota</p>	<p>1. Penatausahaan Kas pada Bendahara Penerimaan PKTP Belum Sesuai Ketentuan;</p> <p>2. Pelaksanaan Pengeluaran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 Belum Optimal;</p> <p>3. Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar atas Penyelenggaraan Reklame Tidak Sesuai Ketentuan;</p> <p>4. Pemerintah Kota Magelang Belum Menatausahakan dan Mengelola Aset Tetap Secara Memadai;</p> <p>5. Pemanfaatan Retribusi Pasar Tidak Sesuai Ketentuan;</p>	<p>1. Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Kota Magelang Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan;</p> <p>2. Penganggaran Belanja Modal Perbaikan Mesin dan Peralatan Sebesar Rp1.195.301.000,00 Tidak Tepat;</p> <p>3. Penatausahaan Pendapatan Retribusi pada BPKAD dan Dinas Pasar Tidak Memadai;</p> <p>4. Pemerintah Kota Magelang Belum Menatausahakan Aset Tetap Secara Memadai;</p> <p>5. Peningkatan Pembayaran Uang Lendir Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Belum Sesuai Ketentuan;</p>	<p>1. Pembayaran SP2D LS Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp83.199.699.514,00 Tidak Dilakukan Melalui Rekening Perantara yang Tepat dan Keadaannya Pendebetan RKUD oleh Bank Jatim;</p> <p>2. Kendaraan Dinas pada Empat SKPD Seilai Rp7.460.857.400,00 Tidak Dikelola dan Keadaannya;</p> <p>3. Pengelolaan Dana Kepesertaan Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan oleh Dinas Pendidikan Kota Magelang Tidak Tertib;</p> <p>4. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp1.855.620.000,00 dan Pemakaian Aset Tanah serta Gedung dan Bangunan oleh Politeknik Kota Magelang Belum Didukung Perkiraan;</p>

No	Parameter	T	T-1	T-2	T-3	T-4	
		<p>Jasa Kelurahan Kasih Tidak Didukung Bakti Partisipatif yang Senyapnya Sebesar Rp31.030.000,00.</p> <p>8. Pembayaran Biaya Jasa Listrik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Belum Menunjukkan Kondisi yang Sebaiknya.</p> <p>9. Mekanisme Penganggaran dan Pertanggungjawaban Biaya Hibah Pemerintah Kota Magang Belum Efektif Sesuai Ketentuan.</p>	<p>Magang TA 2017 Belum Terbit dan Belum Memberikan Hasil yang Optimal bagi Pemerintah Kota Magang Serta Patensi Penerimaan Belum Tertagih Sebesar Rp2.423.387.962,50.</p> <p>8. Hilangnya Potensi Penerimaan atas Penyelenggaraan Ijin Pemakaian Tempat Tempak Tertentu Milik Pemerintah Kota Magang</p>	<p>1. Kelemahan dalam pengelolaan dana Kapitasi.</p> <p>2. Kelemahan Kepala SKPD dalam pengendalian pengeluaran dana DAK.</p> <p>3. Pengelola Barang belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan EMD.</p> <p>4. Pengguna Barang belum melaksanakan penatausahaan EMD.</p> <p>5. Lemahnya pengendalian dalam pengelolaan retribusi.</p> <p>6. Pengurus Barang belum optimal dalam pencaharian EMD.</p> <p>7. Lemahnya pengendalian dan koordinasi dalam pengelolaan pajak reklame.</p> <p>8. Lemahnya pengendalian dalam pengelolaan rekening BOS.</p>	<p>1. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas upaya pengalihan Piutang.</p> <p>2. Verifikasi dan inventarisasi atas subjek/objek pajak piutang PBB-P2 belum memadai.</p> <p>3. Pengelola Barang belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan EMD.</p> <p>4. Pengguna Barang belum melaksanakan penatausahaan EMD.</p> <p>5. Lemahnya pengendalian dalam pengelolaan retribusi.</p> <p>6. Pengurus Barang belum optimal dalam pencaharian EMD.</p>	<p>1. Kelemahan dalam pelaksanaan anggaran belanja.</p> <p>2. Kebijakan akuntansi belum diperbaharui.</p> <p>3. Kelemahan dalam pengendalian proses perencanaan dan penganggaran.</p> <p>4. Lemahnya pengendalian dalam pengelolaan retribusi.</p> <p>5. Pengelola Barang belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan EMD.</p> <p>6. Pengguna Barang belum melaksanakan penatausahaan EMD.</p>	
b	Penyebab						
	<p>Analisis</p> <p>1. a. Temuan terkait dengan Pengelolaan PEB yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian dalam penanganan dan lemahnya verifikasi dan inventarisasi subjek/objek PEB, terjadi pada TA 2018 dan 2017.</p> <p>b. Temuan terkait dengan Pengelolaan EMD yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh Pengelola Barang dan lemahnya penatausahaan EMD oleh pengguna Barang, terjadi pada TA 2018, 2017, 2016 dan 2015.</p> <p>c. Temuan terkait dengan Pengelolaan Retribusi yang disebabkan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan retribusi, terjadi pada TA 2017, 2016 dan 2015.</p>						
	<p>Simpulan</p> <p>Berdasarkan hasil analisis dokumen, Pemerintah Kota Magang memperoleh opini WTP dari BPK-RI untuk TA 2014 sampai dengan 2018 (5 tahun berturut-turut) Namun demikian, pada periode tersebut, terdapat penyebab temuan yang berulang (belum ditindaklanjuti dengan tuntas) terkait dengan pengelolaan PEB dan pengelolaan EMD.</p> <p>Capaian komponen Pencapaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan adalah C.</p>						

17. KK 7 – PENGAMANAN ATAS ASET

KERTAS KERJA KOMPONEN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
T.3 – PENGAMANAN ATAS ASET

Parameter	T WTP	T-1 WTP	T-2 WTP	T-3 WTP	T-4 WTP	Analisis
I Keamanan Administrasi	Penyebab Opini Tidak WTP: Aset (jika ada): -	Penyebab Opini Tidak WTP: Aset (jika ada): -	Penyebab Opini Tidak WTP: Aset (jika ada): -	Penyebab Opini Tidak WTP: Aset (jika ada): -	Penyebab Opini Tidak WTP: Aset (jika ada): -	1. LK Pemikat Magang memperoleh opini WTP lima tahun berturut-turut namun pada tahun anggaran 2017, terdapat catatan terkait aset pada opini BPK-RI. 2. Subnsur SPP yang terkait dengan penyebab catatan adalah subnsur 3.7, 3.8, 3.9, dan 3.10.
II Keamanan Hukum	Catatan terkait Temuan terkait Kepemilikan Aset: Tidak Ada	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset: Ada	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset: Tidak Ada	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset: Tidak Ada	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset: Tidak Ada	1. Terdapat aset yang bermasalah hukum dalam catatan LHP BPK untuk LK Tahun 2017; 2. Subnsur SPP yang terkait

Parameter	T	T-1	T-2	T-3	T-4	Analisis												
III Keamanan Fisik	Persentase BMN/D dalam kondisi aman dan berfungsi baik: <i>jumlah BMN/D dalam BMN/D dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN/D dalam Laporan BMN/D)</i>	Pengelolaan Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kota Magang, khususnya yang dimanfaatkan dengan pihak ketiga melalui mekanisme pemberian ijin pemakaian tempat-tempat tertentu berpotensi merugikan karena adanya pengalihan hak, penyalahgunaan izin, dan lepasnya aset tanah yang tidak dikelola dengan baik sebagaimana terjadi atas 66 bidang (persil) tanah.	Persentase BMN/D dalam kondisi aman dan berfungsi baik: <i>jumlah BMN/D dalam BMN/D dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN/D dalam Laporan BMN/D)</i>	Persentase BMN/D dalam kondisi aman dan berfungsi baik: <i>jumlah BMN/D dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN/D dalam Laporan BMN/D)</i>	Persentase BMN/D dalam kondisi aman dan berfungsi baik: <i>jumlah BMN/D dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN/D dalam Laporan BMN/D)</i>	Analisis dengan penyebab catatan adalah subunsur 3.7, 3.8, 3.9, dan 3.10.												
<p>Simpulan: Berdasarkan hasil analisis dokumen, meskipun Pemerintah Kota Magang memperoleh opini WTP dari BPK-RI untuk TA 2014 sampai dengan 2018 (5 tahun berturut-turut), pada periode tersebut, terdapat catatan terkait aset dalam opini BPK-RI atas LK Pemkot Magang. Dari sisi pengamanan hukum, terdapat temuan terkait kepemilikan aset yang berasal dari pemanfaatan BMD oleh pihak ketiga pada tahun anggaran 2017. Dari sisi pengamanan fisik, berdasarkan hasil analisis, pada periode 2014 sampai dengan 2018 belum seluruh BMD Pemkot Magang berada pada kondisi aman dan berfungsi baik.</p> <p>Capaian komponen pencapaian tujuan Pengamanan Barang Milik Negara/ Daerah adalah:</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>Keamanan</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Administrasi</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Keamanan Fisik</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Keamanan Hukum</td> <td></td> </tr> </table>							1	Keamanan	C	2	Administrasi	C	3	Keamanan Fisik	D		Keamanan Hukum	
1	Keamanan	C																
2	Administrasi	C																
3	Keamanan Fisik	D																
	Keamanan Hukum																	
<p>1. Analisis berdasarkan kriteria skor indikator pencapaian tujuan Keamanan Fisik-2. Identifikasi sub unsur SPIP yang terkait dengan penyebab temuan berutang tersebut.</p>																		

18. KK 8 – KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KERTAS KERJA KOMPONEN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
T.4 – KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Parameter	T	T-1	T-2	T-3	T-4	Analisis
I	Temuan Ketidaktepatuhan dalam LHP BPK a Ringkasan	1. Kekurangan volume pada dua paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp59.704.026,14. 2. Kekurangan volume pada enam paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan di lima Organisasi Perangkat Daerah/ Satuan Perangkat Kerja Daerah sebesar Rp153.232.687,44.	1. Kelebihan pembayaran atas realisasi tuitangan komunikasi intensif, tuitangan reses, serta dana operasional pimpinan DPRD Kota Magang sebesar Rp994.456.000,00. 2. Kekurangan volume atas pembelian paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.136.230.487,67. 3. Kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi pada lima SKPD sebesar Rp919.166.603,64.	1. Dua Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kekurangan Volume Sebesar Rp147.287.567,53 2. Pelaksanaan Empat Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp215.698.376,36 3. Dinas Pendapatian Belum Menganakan Sanksi Denda Administrasi kepada PPA/T/Notaris yang Melanggar Ketentuan Minimal Sebesar Rp502.500.000,00 4. Penggunaan Dana Cadangan Umum PDAM Sebesar Rp33.034.859.729,00 Tidak Didukung dengan Keputusan Walikota Magang	1. Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp744.149.116,02 pada Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan 2. Kelebihan Pembayaran Belanja Perumahan Dinas Luar Daerah pada SKPD Pemerintah Kota Magang sebesar Rp493.432.926,00 3. Bagian Pendapatian yang Menjadi Hak Pemerintah Kota Magang atas Pengelolaan Kawasan Pasar Terpadu Dinoyo Belum Tertagih 4. Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Sebesar Rp20.348.802.400,00 Belum Seluruhnya Disampaikan Kepada Walikota	1. Kekurangan Penerimaan Pajak Restoran atas Belanja Makanan dan Minuman SKPD TA 2014 Sebesar Rp796.584.728,18 2. Kekurangan Penerimaan Pajak Hotel Sebesar Rp623.611.917,27 atas Kegiatan yang Dilaksanakan SKPD Pemerintah Kota Magang 3. Pembayaran Sewa Sarana Mobilitas Darat Sebesar Rp21.265.565,90 Melebihi Ketentuan dan Pembayaran Sewa Gedung/Ruang Pertemuan Sebesar Rp307.400.503,20 Tidak Didukung Aspek Legalitas yang Memadai 4. Pelaksanaan Delapan Paket Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp239.636.218,26	1. Temuan Ketidaktepatuhan dalam Buku III LHP BPK-RI selama empat tahun berturut-turut tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK 2. Subinsur SPIP yang terkait dengan penyebab temuan tersebut adalah 1.3, 1.5, 1.7, 3.1, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2
	b Penyebab	1. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas dua paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan	1. TAPD dalam menghitung KKD tidak mengacu pada peraturan dan surat edaran yang mengatur.	1. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas dua paket pekerjaan belanja modal peningkatkan jalan	1. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas paket pekerjaan belanja modal peningkatkan jalan	1. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Dinas Pendapatan Daerah kurang optimal dalam melaksanakan penetapan, pengalihan, dan pengawasan pengelolaan Pajak Restoran	

No	Parameter	T	T-1	T-2	T-3	T-4	Analisis
		2. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas enam paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan	2. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas sembilan paket pekerjaan belanja modal pembangunan jalan, dan pembangunan sarana dan prasarana air bersih	2. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas empat paket pekerjaan belanja modal peningkatan jalan	2. Kurang selektif dalam membeli tiket pesawat, kurang teliti dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban; dan kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perjalanan dinas	2. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Dinas Pendapatan Daerah kurang optimal dalam melaksanakan penetapan, pengalihan, dan pengawasan kepada wajib pajak.	
		3. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas belanja jasa konsultasi	3. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan BPHTB	3. PPKD tidak optimal dalam menagih bagian pendapatan parkir yang menjadi hak Pemerintah Kota Magang	3. Kurang patuh batasan tertinggi pengeluaran pembayaran sewa yang ditetapkan Walikota; dan lalai untuk memproses perubahan penetapan SSH dalam Peraturan Walikota		
			4. Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Kota Magang dalam menggunakan Dana Cadangan Umum tidak sepenuhnya memperhatikan peraturan daerah yang berlaku	4. PPKD kurang optimal dalam menghimpun laporan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial dari penerima hibah dan bantuan sosial	4. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan delapan paket pekerjaan belanya modal		
II	Keterjadian Tindak Pidana Korupsi	<p>1. Sebanyak 41 anggota DPRD Kota Magang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan terjerat kasus korupsi terkait dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Magang Tahun Anggaran 2015. Kasus tersebut mulai dilimpahkan ke penuntutan pada bulan Juli 2018. Selain itu, pada awal 2019 Mantan Sekretaris Daerah Kota Magang juga ditetapkan tersangka atas pengembangan kasus suap ini. Dugaan penyupaan tersebut dalam rangka untuk memuluskan pembahasan APBD perubahan Pemerintah Kota Magang untuk Tahun Anggaran 2015.2. Subansur SPIP yang terkait dengan kejadian tersebut adalah I.1, 1.3, 1.7, 2.1, 3.1, 3.4, 3.7, 3.10</p>					
	Simpulan	<p>Berdasarkan hasil analisis dokumen, selama empat tahun berturut-turut temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh BPK-RI tidak lebih dari lima temuan serta tidak memengaruhi opini BPK</p>					
1	Kemampuan pencapaian tujuan Kelembagaan terhadap Peraturan-undangan adalah:	A					
2	Keterjadian Korupsi	Ya					

I.5. Format Daftar Periksa (Checklist) Penjaminan Kualitas

Berikut adalah contoh Format Daftar Periksa (Checklist) Penjaminan Kualitas oleh APIP. Pihak APIP dapat menyesuaikan format sesuai kebutuhan penjaminan kualitas dengan **tidak** mengurangi substansi pernyataan.

FORM PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENILAIAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH TAHUN 20XX

NO	ASPEK PENILAIAN	PERNYATAAN	CHECKLIST (N/X)	KETERANGAN
A.	Tahap Persiapan			
1.	Pembentukan Asesor	Tim Asesor telah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam rangka melakukan penilaian maturitas SPIP. Jumlah tim Asesor mencukupi.		Tim PK harus memastikan bahwa asesor pernah mengikuti sosialisasi/bimtek atau pernah mengikuti penguasaan terkait SPIP dan jumlahnya memadai untuk melaksanakan penilaian.
2.	Penetapan Kerja Sampel	Sampel yang diambil telah sesuai dengan sasaran strategis yang dipilih dan telah melibatkan semua unit pendukung pencapaian tujuan.		Tim PK harus memastikan kesesuaian satker yang dijadikan sampel. Tim PK dapat merekomendasikan penambahan jumlah satker sampel penanggung jawab sasaran strategis sehingga total anggaran seluruh satker sampel sebesar 40% dari anggaran K/L/D.
3.	Penetapan Rencana Tindak Penilaian	Tim Asesor telah menyiapkan paparan <i>entry meeting</i> , rencana kerja penilaian, dan hari penilaian serta anggaran yang dibutuhkan telah ditetapkan.		Tim PK harus memastikan rencana kerja penilaian telah disusun dan secara substansi sudah memadai/mendukung pelaksanaan penilaian. Tim PK dapat merekomendasikan agar hari penilaian disesuaikan agar dapat melakukan penilaian secara komprehensif.

NO	ASPEK PENILAIAN	PERNYATAAN	CHECKLIST (√/X)	KETERANGAN
B.	Tahap Pelaksanaan			
1.	Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan	Sumber data (Perjanjian Kinerja) dapat diyakini validitasnya dan sesuai dengan dokumen Rencana Kinerja di atasnya (RPJMN/D, Renstra K/L/D, dan Renja Satker/OPD)		Tim PK melakukan cek validitas data input yang dimasukkan ke dalam aplikasi penilaian.
2.	Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses	Hasil wawancara, analisis dokumen, dan dokumen yang disajikan oleh Tim Asesor dianalisis lebih lanjut dan dibandingkan dengan uraian parameter serta kriteria di dalam kertas kerja penilaian.		Tim PK menguji bukti-bukti dari hasil wawancara, analisis dokumen dan observasi. Terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dengan kriteria parameter, maka hasil penilaian dapat disesuaikan.
3.	Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	Hasil perhitungan komponen <i>outcome</i> dan <i>output</i> , observasi lapangan dan dokumen/laporan yang disajikan oleh Tim Asesor dianalisis lebih lanjut dan dibandingkan dengan kriteria di dalam kertas kerja penilaian.		Tim PK melakukan cek validitas data input yang dimasukkan ke dalam aplikasi penilaian. Terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dengan kriteria, maka hasil penilaian dapat disesuaikan.
4.	Validasi Perhitungan Skor per Subunsur SPIP	Validasi nilai telah dilakukan melalui aplikasi penilaian atas nilai per subunsur.		Tim PK memvalidasi nilai per subunsur dan menyesuaikan nilai dengan bukti-bukti yang diperoleh.
C.	Tahap Pelaporan			
1.	Penyusunan Laporan Penilaian Mandiri	Sampai dengan selesainya penjaminan kualitas, laporan masih dalam tahap reviu oleh Sekretaris Jenderal/Daerah (belum ditanda tangani).		Tim PK mengecek format dan substansi laporan hasil penilaian dan memastikan nilai hasil penilaian telah disesuaikan sesuai hasil PK. Tim PK harus memantau sampai dengan laporan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Daerah.

NO	ASPEK PENILAIAN	PERNYATAAN	CHECKLIST (√/X)	KETERANGAN
2.	Penyusunan <i>Area of Improvement (AoI)</i>	Area-area yang perlu ditingkatkan telah diuraikan di dalam laporan sesuai dengan komponen penilaian.		Tim PK harus mengecek substansi laporan dan memastikan laporan telah memuat <i>Area of Improvement</i> dan rekomendasi perbaikannya. <i>Area of Improvement</i> dan rekomendasi perbaikannya akan dimonitoring oleh APIP dan dimasukkan ke dalam sistem pemantauan hasil pengawasan (SIMHP) sebagai area pembinaan dan pengawasan oleh APIP.
3.	Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Nilai SPIP	Rencana aksi telah disusun dengan <i>timeline</i> yang jelas dan rinci.		Tim PK harus memastikan rencana aksi telah disusun sesuai hasil penilaian, <i>Area of Improvement</i> dan rekomendasi perbaikannya. Pelaksanaan rencana aksi harus dimonitoring oleh APIP.
	dan informasi lain yang diperlukan.			

I.6. Format Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Berikut adalah contoh Format Pelaporan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Asesor dapat menyesuaikan format pelaporan sesuai standar pelaporan masing-masing dengan **tidak** mengubah substansi pelaporan.

KOP SURAT INSTANSI PENILAI MATURITAS

Nomor : LAP-..../..../202X202X
 Lampiran : ...
 Hal : Laporan Hasil Penilaian Mandiri
 Maturitas Penyelenggaraan SPIP
**Kementerian/
 Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota**
 ... Tahun 202X-1/202X

Yth. Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Walikota/Bupati.....
di

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota** ... Tahun 202X-1/202X dengan uraian sebagai berikut:

A. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota** ... Tahun 202X-1/202X menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “**rintisan/berkembang/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum**” atau tingkat ... dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “**X,XXXX**”

Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	...	X,XXXX
2.	Struktur dan Proses	...	X,XXXX
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	...	X,XXXX
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	...	X,XXXX
	-MRI
	-IEPK

Dengan tingkat maturitas **“rintisan/berkembang/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum”**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota ...:**

- 1) **Telah/belum** mampu mendefinisikan kinerjanya termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya;
- 2) **Telah/belum** mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan, serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan;
- 3) **Telah/belum** mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif;
- 4) **Telah/belum** mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi;
- 5) **Telah/belum** mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

2. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat **“rintisan/berkembang/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum”** adalah perlu melakukan **“finalisasi penyusunan kebijakan dan prosedur/sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai/mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya/evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian/pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis”**.

Rincian kondisi maturitas per komponen dan saran perbaikannya diuraikan pada bagian berikutnya di uraian penilaian.

B. URAIAN PENILAIAN

1. Dasar Penilaian

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota ...** adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 2) Pasal ... Peraturan BPKP Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana **Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota** sebagai entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP;
- 3) Surat Tugas Nomor.....Tanggal..... tentang penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota ...**;
- 4) Dst.

2. Tujuan Penilaian

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan:

- 1) Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota ...**;
- 2) Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota....**

3. Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen sebagai berikut:

- 1) Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;

- 2) Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (duapuluh lima) subunsur penilaian; dan
- 3) Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) subunsur penilaian.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota** ... dilakukan pada buah Unit Kerja Eselon I (*untuk K/L*), yaitu:

- 1) Sekretariat Jenderal;
- 2) Direktorat Jenderal/Deputi...;
- 3) Inspektorat Jenderal;
- 4) ...*dst.*

atau

..... buah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (*untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota*), yaitu:

- 1) Sekretaris Daerah;
- 2) Inspektorat Daerah;
- 3) Badan Perencanaan Daerah;
- 4) ...*dst.*

Periode penilaian adalah penyelenggaraan SPIP mulai dari Juli 20X-1 sampai dengan Juni 20XX.

4. Metodologi Penilaian dan Teknik Pengumpulan Data

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota** ... dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

No.	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	Penetapan Tujuan	2	40%
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1	
	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1	
2.	Struktur dan Proses	25	30%
	a. Lingkungan Pengendalian	8	
	b. Penilaian Risiko	2	
	c. Kegiatan Pengendalian	11	
	d. Informasi dan Komunikasi	2	
	e. Pemantauan	2	
3.	Pencapaian Tujuan SPIP	7	30%
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2	
	b. Keandalan Pelaporan Keuangan	3	
	c. Pengamanan atas Aset Negara	1	

d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan		
Total Bobot		100%

Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai ditetapkan berdasar modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Responden yang menjadi rujukan pengumpulan data dipilih dari pejabat/pelaksana pada **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota**

Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan aplikasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	1,0 ≤ Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 ≤ Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 ≤ Nilai < 4,0
Terkelola dan Terukur	4	4,0 ≤ Nilai < 4,5
Optimum	5	≥ 4,5

5. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota** ... Tahun 20XX-1/20XX, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota** ... telah memenuhi kriteria pada tingkat “**rintisan/berkembang/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum**” dengan skor sebesar X,XXXX, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%
BOBOT PERENCANAAN	40.00%		X,XXXX
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30.00%
Penilaian Risiko	20.00%
Kegiatan Pengendalian	25.00%
Informasi dan Komunikasi	10.00%
Pemantauan	15.00%
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30.00%		X,XXXX
PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	
<i>Capaian Outcome</i>	15.00%
<i>Capaian Output</i>	15.00%
Keandalan Pelaporan Keuangan	
Opini LK	25.00%
Pengamanan atas Aset Negara	
Keamanan Administrasi	10.00%
Keamanan Fisik	5.00%
Keamanan Hukum	10.00%
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
Temuan Ketaatan - BPK	20.00%
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100.00%		
BOBOT HASIL	30.00%		X,XXXX
TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			X,XXXX

Uraian lebih lanjut hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 20XX-1/20XX** adalah sebagai berikut:

1) Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 20XX-1/20XX mencapai level “rintisan/berkembang/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum”

Seperti diuraikan sebelumnya, dengan tingkat maturitas **“rintisan/berkembang/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum”**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara

umum menunjukkan bahwa **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota** ... telah (jabarkan karakteristik yang relevan sesuai dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP yang dicapai)

Sedangkan dari sisi manajemen risiko, menunjukkan bahwa **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota** ... telah (jabarkan karakteristik yang relevan sesuai dengan level MRI yang dicapai)

Selanjutnya dilihat dari efektivitas pengendalian korupsi, menunjukkan bahwa **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota** ... telah dengan karakteristik (jabarkan karakteristik yang relevan sesuai dengan skor IEPK yang dicapai)

2) Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 (dua) fokus penilaian sebagai berikut:

a. Kualitas Sasaran Strategis

(uraikan hasil penilaian atas kualitas sasaran strategis, dengan penjabaran pada tingkat maturitas yang dicapai kualitas sasaran strategis dan kondisi serta kelemahan atas kualitas sasaran strategis)

b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

(uraikan hasil penilaian atas kualitas program dan kegiatan, dengan penjabaran pada tingkat maturitas yang dicapai kualitas program dan kegiatan, dan kondisi serta kelemahan atas kualitas program dan kegiatan)

3) Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

(uraikan hasil penilaian atas unsur lingkungan pengendalian, yang meliputi 8 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur)

b. Penilaian Risiko

(uraikan hasil penilaian atas unsur penilaian risiko, yang meliputi 2 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas

masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur)

c. Kegiatan Pengendalian

(uraikan hasil penilaian atas unsur kegiatan pengendalian, yang meliputi 11 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur)

d. Informasi dan Komunikasi

(uraikan hasil penilaian atas unsur informasi dan komunikasi, yang meliputi 2 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur)

e. Pemantauan

(uraikan hasil penilaian atas unsur pemantauan, yang meliputi 2 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur)

4) Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4 (empat) fokus penilaian sebagai berikut:

a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

(uraikan hasil penilaian atas unsur efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, yang meliputi 2 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur)

b. Keandalan Pelaporan Keuangan

(uraikan hasil penilaian atas unsur keandalan pelaporan keuangan, yang meliputi 1 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur)

c. Pengamanan atas Aset Negara

(uraikan hasil penilaian atas unsur pengamanan atas aset negara, yang meliputi 3 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur)

d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

(uraikan hasil penilaian atas unsur ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang meliputi 1 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur)

6. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota ...** ke tingkat, disarankan agar:

- 1) Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan, **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota** harus melakukan..... *(saran dikaitkan dengan perbaikan atas kelemahan pada masing-masing fokus penilaian di komponen perencanaan kinerja/penetapan tujuan, yang meliputi 3 unsur)*
- 2) Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses, **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota** harus melakukan..... *(saran dikaitkan dengan perbaikan atas kelemahan pada masing-masing fokus penilaian di komponen struktur dan proses, yang meliputi 25 subunsur pada 5 unsur)*
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota** harus melakukan..... *(saran dikaitkan dengan perbaikan atas kelemahan pada masing-masing fokus penilaian di komponen hasil/pencapaian tujuan SPIP, yang meliputi 12 subunsur pada 3 unsur)*

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris
Jenderal/Utama/Daerah.....

.....
NIP.....

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang...../Kepala Perwakilan BPKP Provinsi.....
2. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur.....

I.7. Contoh Format Pernyataan Penjaminan Kualitas

*Berikut adalah contoh Format Pernyataan Penjaminan Kualitas oleh APIP. Pihak APIP dapat menyesuaikan format pernyataan sesuai standar masing-masing dengan **tidak** mengubah substansi pernyataan.*

LOGO
K/L/D

**KOP INSPEKTORAT
KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSPEKTORAT
PROVINSI/INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA**

**PERNYATAAN TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN 20XX**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kami selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada **Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota ...** melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor XX Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Penjaminan kualitas dilakukan secara profesional sehingga terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan pedoman dapat langsung diperbaiki secara berkelanjutan sampai dengan penilaian selesai dilakukan.

Berdasarkan penjaminan kualitas yang kami lakukan, baik proses penilaian maupun hasil penilaian **telah sesuai** dengan pedoman yang ditetapkan, dengan catatan koreksi selama proses penjaminan kualitas terlampir.

Tempat, Tanggal 20XX

Inspektur Jenderal/Inspektur
Utama/ Inspektur

.....
NIP

1.8. Contoh Format Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Mandiri

Berikut adalah contoh Format Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Maturitas SPIP. Pihak manajemen K/L/D dapat menyesuaikan dan mengembangkan format pemantauan sesuai standar masing-masing dengan **tidak** mengubah substansi minimal pemantauan.

PEMANTAUAN REAKSI ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PADA K/L/D..... TAHUN 20XX-1/20XX

No.	Komponen/Unsur/Subunsur	No.	Area of Improvement (AoI)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu	Status	Keterangan (Status/Kendala/Hambatan)
1	PENETAPAN TUJUAN							
1.1	Kualitas Sasaran Strategis							
1.3	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)							
2	STRUKTUR DAN PROSES							
2.1	Lingkungan Pengendalian							
2.1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)							
2.1.2	Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)							
2.1.3	Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)							
2.1.4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)							
2.1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)							
2.1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)							
2.1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)							
2.1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)							
2.2	Penilaian Risiko							
2.2.1	Identifikasi Risiko (2.1)							
2.2.2	Analisis Risiko (2.2)							
2.3	Kegiatan Pengendalian							
2.3.1	Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)							

No.	Komponen/Unsur/Subunsur	No.	Area of Improvement (AoI)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu	Status	Keterangan (Status/Kendala/Hambatan)
2.3.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)							
2.3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)							
2.3.4	Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)							
2.3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)							
2.3.6	Pemisahan Fungsi (3.6)							
2.3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)							
2.3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)							
2.3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)							
2.3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)							
2.3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)							
2.4	Informasi dan Komunikasi							
2.4.1	Informasi yang Relevan (4.1)							
2.4.2	Komunikasi yang Efektif (4.2)							
2.5	Pemantauan							
2.5.1	Pemantauan Berkelanjutan (5.1)							
2.5.2	Evaluasi Terpisah (5.2)							
3	PENCAPAIAN TUJUAN SPIP							
3.1	Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi							
3.1.1	Capaian Outcome							
3.1.2	Capaian Output							
3.2	Keandalan Pelaporan Keuangan							
3.2.1	Opini LK							
3.3	Pengamanan atas Aset Negara							
3.3.1	Keamanan Administrasi							

No.	Komponen/Unsur/Subunsur	No.	Area of Improvement (AoI)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu	Status	Keterangan (Status/Kendala/Hambatan)
3.3.2	Keamanan Fisik							
3.3.3	Keamanan Hukum							
3.4	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan							
3.4.1	Temuan Ketaatan - BPK							

Keterangan:

Area of Improvement (AoI) : (diisi dengan kelemahan yang masih harus diperbaiki)

Rencana Aksi : (diisi dengan rencana aksi untuk mengatasi kelemahan yang masih harus diperbaiki)

Penanggung Jawab : (diisi dengan **pegawai/unit/satker** yang bertanggung jawab untuk melaksanakan renaksi)

Target Waktu : (diisi dengan waktu target penyelesaian renaksi)

Status : **Belum** (jika tindak lanjut belum dilakukan)

Proses (jika sedang dalam proses untuk ditindaklanjuti)

Selesai (jika tindak lanjut telah tuntas dilakukan)

Keterangan : (diisi dengan keterangan yang harus diungkap terkait status renaksi, serta hambatan/kendala yang menjadi tantangan renaksi)

Lampiran Penilaian Maturitas Penyelenggaraan
SPIP
Buku II

BUKU II EVALUASI ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

II.1. Daftar Dokumen Pendukung Hasil Penilaian Mandiri oleh K/L/D:

1. Surat Tugas Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
2. Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP beserta dokumentasi kegiatan pemaparannya;
3. Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
4. Seluruh Kertas Kerja sesuai dengan Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
5. Dokumen Bukti Penilaian Mandiri yang telah terdigitalisasi dan disusun rapi.

Semua data tersebut agar diunggah ke dalam *virtual cloud storage* atau disimpan ke dalam *Compact Disk (CD)*.

II.2. KERTAS KERJA EVALUASI

II.2.1. LANGKAH KERJA EVALUASI ATAS PROSES

1. Isi Sheet "Profil K/L/D" dan Sheet "Pemilihan Satker";
2. Lakukan evaluasi atas kesesuaian proses penilaian mandiri dengan pedoman berdasarkan isian pada semua kertas kerja evaluasi atas proses;
3. Hasil evaluasi akan terkompilasi dalam KKE-PROSES-LEAD.

II.2.2. LANGKAH KERJA EVALUASI ATAS HASIL (PENGUJIAN SUBSTANSI)

1. Buat salinan Kertas Kerja Hasil Penilaian Mandiri;
2. Lakukan validasi sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan (pengujian melalui wawancara/observasi/reviu dokumen), sehingga dapat dihasilkan nilai/skor "Versi Evaluasi";
3. Tuangkan hasil validasi ke dalam Kertas Kerja Evaluasi, Nilai/skor yang diinput kedalam Kertas Kerja Evaluasi diambil dari semua KKLEAD kertas kerja penilaian mandiri;

- 4. Hasil pengisian sebagian akan terkompilasi pada KKE-HASIL-LEAD, sebagian diinput manual.

KK Evaluasi 1: KK Pemilihan Satker

Profil K/L/D
K/L/D : Dummy
Tahun : 20xx
Tanggal :
Disusun Oleh :
Direviu Oleh :

		PENJAMINAN KUALITAS		EVALUASI (50%)	
Satker Wajib	:	1		1	
		2		2	
		3		3	
		4		4	
		5		5	
		6		6	
		7		7	
		8		8	
		9		9	
		10		10	
Satker Penanggung Jawab	:	1		1	
		2		2	
		3		3	
		4		4	
		5		5	
		6		6	
		7		7	
		8		8	
		9		9	
		10		10	

KK Evaluasi 2: KKE-PROSES-LEAD

KKE_Lead1
 K/L/D : Dummy
 Tahun : 20xx
 Tanggal : _____
 Disusun Oleh : _____
 Direviu Oleh : _____

Evaluasi
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
K/L/D : Dummy

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot		Ref	Keterangan
Persiapan	76,90%	20,00%	15,38%	KKE-P1	
Pelaksanaan	100,00%	60,00%	60,00%	KKE-P2	
Penyusunan Laporan Penilaian	72,58%	20,00%	14,52%	KKE-P3	
Rata-Rata Skor			89,90%		Sesuai

Simpulan Umum atas Hasil Evaluasi

Hal-Hal yang perlu Diperhatikan

KK Evaluasi 3: KKE-P1

KKE_P1
 K/L/D : Dummy
 Tahun : 20xx
 Tanggal : _____
 Disusun oleh : _____
 Direviu Oleh : _____

**Evaluasi
 Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
 Tahap Persiapan**

Tahap	Ref	Kesesuaian dengan standar	
Penetapan satuan kerja sebagai sampel	KKE-P1A		53,41%
% Kesesuaian Anggaran Satker Sampel dengan Pedoman		100%	
% Kesesuaian Satker Sampel dibanding Total Satker		50%	
% Kesesuaian Satker yang Mendukung Sasaran Strategis dibanding Total Satker		55%	
% Kesesuaian Satker yang Mendukung 4 Tujuan SPIP dibanding Total Satker		9,09%	
Penyiapan tim assessor dan tim penjamin kualitas	KKE-P1B1		62,14%
Penetapan dan pemaparan RPMMP	KKE-P1B2		91,67%
Total Skor Evaluasi Tahap Persiapan			76,90%

Simpulan Tahap Persiapan

hal-hal yang perlu diperhatikan

KK Evaluasi 4: KKE-P1A

KKE_P1A
 K/L/D : Dummy
 Tahun : 20xx
 Tanggal : _____
 Disusun oleh : _____
 Direviu Oleh : _____

Evaluasi
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Tahap Persiapan

No	Satker Sampel dalam penjaminan Kualitas	Anggaran OPD Sampel	Kriteria	
			Mendukung Sasaran Strategis (Satker Wajib)	Mendukung 4 Tujuan SPIP (Satker Penanggung Jawab)
1	2	3	3	
1	Satker 1	Rp200.000		
2	Satker 2	Rp200.000	1	
3	Satker 3	Rp200.000		
4	Satker 4	Rp200.000	1	
5	Satker 5	Rp200.000	1	
6	Satker 6	Rp200.000		
7	Satker 7	Rp200.000	1	
8	Satker 8	Rp200.000		
9	Satker 9	Rp200.000	1	
10	Satker 10	Rp200.000		
11	Satker 11	Rp200.000	1	1
	Jumlah	Rp2.200.000	6	1
	Total Anggaran K/L/P	5.000.000,00		
	% Anggaran Satker Sampel dibandingkan total Anggaran	44%		
1	% Kesesuaian Anggaran Satker Sampel dengan Pedoman	100%		
	Satker yang disampel dalam penjaminan kualitas	11		
	Jumlah Satker/Unit pada K/L/D : Dummy	39		
	% Satker Sampel dibandingkan total Satker	28,21%		
2	% Kesesuaian Satker Sampel dibanding Total Satker	50%		
3	% Kesesuaian Satker yang Mendukung Sasaran Strategis dibanding Total	55%		
4	% Kesesuaian Satker yang Mendukung 4 Tujuan SPIP dibanding Total Satker	9,091%		
	SKOR Evaluasi Tahap Persiapan - Penentuan	53,409%		

Capaian kesesuaian dengan standar penentuan sampel adalah sbb:

% Satker terkait Tujuan Utama K/L/P yang menjadi sampel

% Satker Sampel dibandingkan total Satker

% keterwakilan fungsi

Capaian kesesuaian dengan standar pada tahap persiapan - penentuan sampel (di luar tahap penyiapan tim assessor s.d Entry Meeting) sebesar 54,729% menunjukkan bahwa penentuan sampel cukup memadai.

KK Evaluasi 5: Profil K/L/D

Profil K/L/D
 K/L/D : Dummy
 Tahun : 20xx
 Tanggal : _____
 Disusun oleh : _____
 Direviu Oleh : _____

Nama Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah:

PROFIL KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

Karakteristik :	
Isu Strategis (Kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi/daerah) :	
Penghargaan yang Diterima :	
Sistem Informasi yang Digunakan :	
Kasus Hukum :	

CAPAIAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR:

Kriteria	20XX	20XX	20XX
1. Opini BPK atas Laporan Keuangan			
2. Nilai Evaluasi SAKIP			
3. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi			
4. Nilai EKPPD (untuk Pemerintah Daerah)			

Penjelasan:

Karakteristik : Diisi karakteristik dari K/L/D
 Isu Strategis : Diisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan K/L/D
 Penghargaan yang Diterima : Diisi penghargaan yang diterima K/L/D dalam masa penilaian
 Sistem Informasi yang Digunakan : Diisi sistem informasi yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan S
 Kasus Hukum : Diisi kasus hukum yang dilakukan oleh Eselon II atau ke atas dalam 3 tahun terakhir

KK Evaluasi 6: KKE-P1B**KKE-P1B1**

			KKE_P1B	
			K/L/D	: Dummy
			Tahun	: 20xx
			Tanggal	: _____
			Disusun oleh:	_____
			Direviu oleh :	_____
Evaluasi				
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP				
Tahap Persiapan				
1	2	3		
Penyiapan Tim				
KKE-P1B1				
Penyiapan Tim Assessor				
Administrasi Penugasan	A/B	b	0,5	a) ada surat tugas/SK/Satgas SPIP b) tidak ada
Pemahaman Tim Terkait SPIP	A/B/C	c	0,4	a) Minimal Sepertiga tim asesor telah mengikuti bimtek SPIP b) Kurang dari sepertiga tim asesor telah mengikuti bimtek SPIP c) Seluruh tim belum pernah mengikuti bimtek SPIP
Penyiapan Tim Penjamin Kualitas				
Administrasi Penugasan	A/B/C	b	0,7	a) ada surat tugas berdasarkan PKPT/Jakwas b) ada surat tugas c) tidak ada
Pemahaman Tim Terkait SPIP	A/B/C/D	c	0,5	a) Minimal Sepertiga tim pernah mengikuti diklat SPIP dan diklat penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP b) Minimal Sepertiga tim pernah mengikuti diklat penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP c) Minimal sepertiga tim pernah mengikuti diklat SPIP d) Seluruh tim belum pernah mengikuti diklat/sosialisasi SPIP
Jumlah Asesor	A/B/C/D	b	0,75	a) 4 assessor menilai 1 satker b) 1 assessor menilai 2 satker c) 1 assessor menilai 3 satker d) 1 assessor menilai 4 satker
Kecukupan Hari Penugasan	A/B/C/D	b	0,75	a) Memadai (> 30 hr) b) Cukup memadai (> 20 hr, < 29 hr) c) Kurang memadai (> 10 hr, < 19 hr) d) Tidak memadai/tidak sesuai rencana (< 10 hr)
Skor Evaluasi atas Penyiapan Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas			60,00%	

..... kertas kerja bersambung di halaman selanjutnya.

KK Evaluasi 6: KKE-P1B

KKE-P1B2

KKE_P1B :
 K/L/D : Dummy
 Tahun : 20xx
 Tanggal : _____
 Disusun oleh : _____
 Direvisi oleh : _____

**Evaluasi
 Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
 Tahap Persiapan**

Tahapan		Kesesuaian dengan standar*		Penjelasan
		2		
1		2		3
Penetapan Rencana Penilaian Maturitas SPIP (RPM)	KKE-P1B2			
Kelengkapan Unsur				
Latar belakang perlunya pelaksanaan penilaian	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Tujuan dan manfaat penilaian	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Ruang lingkup penilaian	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Metodologi penilaian yang digunakan	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Tahapan dan jadwal waktu penilaian	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Sistematika pelaporan	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Rencana kebutuhan sumber daya	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
pembahasan bersama di antara tim penilaian dan tim co	Y/T	t	0	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Paparan atas RPM	Y/T	y	1	"y" jika dilaksanakan, "t" jika tidak
Kehadiran Pejabat yang Berwenang	A/B/C/D	d	1	a) Seluruh satker Sampel b) sebagian besar Satker sampel c) sebagian kecil Satker sampel d) Tidak ada
Dokumentasi Paparan atas RPM	A/B/C/D	d	1	a) terdapat foto, daftar hadir dan notulen b) terdapat daftar hadir dan notulen c) terdapat daftar hadir d) Tidak ada
Persetujuan atas RPM	Y/T	y	1	"y" jika disetujui, "t" jika tidak disetujui
Skor Evaluasi Kualitas RPMMP			91,67%	

Simpulan Tahap Persiapan

Capaian kesesuaian dengan standar pada tahap persiapan di luar penentuan sampel menunjukkan bahwa tahap persiapan di luar penentuan sampel telah cukup memadai, terdiri dari:

- Skor Evaluasi Penyiapan Tim Assessor dan Tim Penjamin Kualitas 52,14%
- Skor Evaluasi Kualitas RPM 91,67%

Hal-hal yang perlu diperhatikan

KK Evaluasi 7: KKE-P2

KKE_P2
 K/L/D : Dummy
 Tahun : 20xx
 Tanggal : _____
 Diusun oleh : _____
 Direvisi Oleh : _____

Evaluasi
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Tahap Persiapan

No.	Elemen, Unsur, dan Sub Unsur Result-Based SPIP	Parameter/Indikator	Cara Pengukuran oleh Asesor	Telah Dilakukan oleh Asesor	Kesesuaian Pengujian dgn Pedoman	Jenis Pengujian yang dilakukan oleh Asesor	Jumlah Satker yang dinji	Nama Satker yang Dinji	Referensi/ Nama Dokumen Bukti	Penjelasan/ Keterangan
A. Evaluasi atas Pencapaian Tujuan										
1	Sasaran Strategis Organisasi	Tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan oleh organisasi: - menjawab mandat organisasi - Sasaran Strategis berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis - Indikator kinerja jelas, terukur, & berorientasi hasil - Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target diatasnya	Menilai ketepatan sasaran strategis organisasi, ketepatan indikator kinerja masing-masing sasaran, dan kecukupan target indikator kinerja	Y		Wawancara/ Observasi/ Reviu Dokumen			Nama Dokumen/ Jenis Dokumentasi (Foto/ Rekaman/Script Wawancara	
2	Sasaran Strategis Satker	Tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan oleh Satker: - Mengukur cascading kinerja dari sasaran strategis Perda ke sasaran strategis OPD - Sasaran Strategis berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis - Indikator kinerja jelas, terukur, & berorientasi hasil - Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target diatasnya	Menilai ketepatan sasaran strategis satker, ketepatan indikator kinerja masing-masing sasaran, dan kecukupan target indikator kinerja	Y		Reviu Dokumen				
3	Evaluasi Kualitas Strategi Kualitas Program	Pencapaian Sasaran Strategis Program yang dilakukan oleh organisasi merupakan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai sasaran strategis organisasi, maka perlu diukur: - Keterkaitan dengan Sasaran Strategis OPD - Kualitas sasaran Program OPD - Kualitas indikator kinerja program OPD - Kualitas target kinerja program OPD	Menilai keterkaitan antara substansi program dengan sasaran strategis, ketepatan indikator kinerja masing-masing program dan kecukupan indikator kinerja program	Y						
	Kualitas Kegiatan	Atas Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, maka perlu diukur: - Keterkaitan dengan Sasaran Program - Kualitas indikator kinerja kegiatan OPD - Kualitas target kinerja kegiatan OPD	Menilai Keterkaitan antara substansi kegiatan dengan program, ketepatan indikator kinerja masing-masing kegiatan dan kecukupan indikator kinerja kegiatan							

..... kertas kerja bersambung di halaman selanjutnya.

No.	Elemen, Unsur, dan Sub Unsur Result-Based SPIP	Parameter/Indikator	Cara Pengukuran oleh Asesor	Telah Dilakukan oleh Asesor	Kesesuaian Pengujian dgn Pedoman	Jenis Pengujian yang dilakukan oleh Asesor	Jumlah Satker yang diuji	Nama Satker yang Diuji	Referensi/Nama Dokumen Bukti	Penjelasan/ Keterangan
B Evaluasi atas Struktur dan Proses										
1	Lingkungan Pengendalian									
	Pengakuan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	Pegawai menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	Menguji Efektivitas Sub Unsur	Y						
	Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	Menguji Efektivitas Sub Unsur	Y						
	Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	Plupian organisasi mendukung penerapan pengendalian intern dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam upaya pencapaian tujuan organisasi	Menguji Efektivitas Sub Unsur	Y						
	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan proses bisnis organisasi dan masing-masing unit sebagai bagian dari organisasi memiliki fungsi dan ukuran kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi	Menguji Efektivitas Sub Unsur	Y						
	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung-Jawab yang Tepat (1.5)	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian pencapaian tujuan organisasi	Menguji Efektivitas Sub Unsur	Y						
	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	Menguji Efektivitas Sub Unsur	Y						
	Perwujudan Peran AP/PP yang Efektif (1.7)	Hubungan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kerjasama) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi	Menguji Efektivitas Sub Unsur	Y						
	Penilaian Risiko Identifikasi Risiko (2.1)	Risiko-risiko utama telah teridentifikasi dan dapat digunakan untuk secara tepat menentukan risiko-risiko prioritas atas: a. pencapaian tujuan organisasi b. keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan	Menguji Efektivitas Sub Unsur	Y						
2	Analisis Risiko (2.2)	Risiko-risiko prioritas dan Rencana Tindak pengendalian yang tepat telah dapat ditentukan atas: a. pencapaian tujuan organisasi; b. keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan.	Menguji Efektivitas Sub Unsur	Y						

..... kertas kerja bersambung di halaman selanjutnya.

No.	Elemen, Unsur, dan Sub Unsur Result-Based SP/PP Kegiatan	Parameter/Indikator	Cara Pengukuran oleh Asesor	Telah Dilakukan oleh Asesor	Kesesuaian Pengujian dgn Pedoman	Jenis Pengujian yang dilakukan oleh Asesor	Jumlah Satker yang diuji	Nama Satker yang diuji	Referensi/Nama Dokumen Bukti	Penjelasan/Keterangan
3.	Pengendalian Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sesuai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	Menguji Efektifitas Sub Unsur	Y						
	Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	Menguji Efektifitas Sub Unsur	Y						
	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	Menguji Efektifitas Sub Unsur	Y						
	Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	Pengendalian fisik atas aset dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	Menguji Efektifitas Sub Unsur	Y						
	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKTU organisasi.	Menguji Efektifitas Sub Unsur	Y						
	Pemisahan Fungsi (3.6)	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang.	Menguji Efektifitas Sub Unsur	Y						
	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan.	Menguji Efektifitas Sub Unsur	Y						
	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bermilai, dan berguna bagi manajemen.	Menguji Efektifitas Sub Unsur	Y						
	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya.	Menguji Efektifitas Sub Unsur	Y						
	Akurabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.	Menguji Efektifitas Sub Unsur	Y						
	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait.	Menguji Efektifitas Sub Unsur	Y						

..... kertas kerja bersambung di halaman selanjutnya.

KK Evaluasi 8: KKE-P3

KKE_P3
 K/L/D : Dummy
 Tahun : 20xx
 Tanggal : _____
 Disusun oleh : _____
 Direvisi Oleh : _____

Evaluasi
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Tahap Pelaporan

Tahapan	Kesesuaian dengan standar*		Keterangan	
Penentuan Area of Improvement				
Evaluasi atas Penetapan Tujuan				
Evaluasi Kualitas Sasaran Strategis	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Evaluasi Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	Y/T	t	0,5	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Evaluasi atas Struktur dan Proses				
Evaluasi Lingkungan Pengendalian	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Evaluasi Penilaian Risiko	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Evaluasi Aktivitas Pengendalian	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Evaluasi Proses Informasi dan Komunikasi	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Evaluasi Proses Pemantauan Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah.	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Evaluasi atas Capaian Tujuan SPIP				
Evaluasi atas Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Evaluasi atas Keandalan Laporan Keuangan	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Evaluasi atas Pengamanan Aset	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Evaluasi atas Ketaatan Peraturan Perundang-undangan	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Skor Evaluasi Kualitas Penentuan AOI			95,43%	
Pembuatan Rekomendasi				
Evaluasi atas Penetapan Tujuan				
Evaluasi Kualitas Sasaran Strategis	a/b/c	c	0,4	a) Terdapat rekomendasi s.d. level yang diinginkan atau satu level di atasnya b) Terdapat rekomendasi c) Tidak ada rekomendasi
Evaluasi Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	a/b/c	b	0,7	a) Terdapat rekomendasi s.d. level yang diinginkan atau satu level di atasnya b) Terdapat rekomendasi c) Tidak ada rekomendasi
Evaluasi atas Struktur dan Proses				
Evaluasi Lingkungan Pengendalian	a/b/c	b	0,7	a) Terdapat rekomendasi s.d. level yang diinginkan atau satu level di atasnya b) Terdapat rekomendasi c) Tidak ada rekomendasi
Evaluasi Penilaian Risiko	a/b/c	b	0,7	a) Terdapat rekomendasi s.d. level yang diinginkan atau satu level di atasnya b) Terdapat rekomendasi c) Tidak ada rekomendasi
Evaluasi Aktivitas Pengendalian	a/b/c	b	0,7	a) Terdapat rekomendasi s.d. level yang diinginkan atau satu level di atasnya b) Terdapat rekomendasi c) Tidak ada rekomendasi
Evaluasi Proses Informasi dan Komunikasi	a/b/c	b	0,7	a) Terdapat rekomendasi s.d. level yang diinginkan atau satu level di atasnya b) Terdapat rekomendasi c) Tidak ada rekomendasi
Evaluasi Proses Pemantauan Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah.	a/b/c	b	0,7	a) Terdapat rekomendasi s.d. level yang diinginkan atau satu level di atasnya b) Terdapat rekomendasi c) Tidak ada rekomendasi

..... kertas kerja bersambung di halaman selanjutnya.

Tahapan	Kesesuaian dengan standar*		Keterangan	
Evaluasi atas Pencapaian Tujuan SPI				
Evaluasi atas Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	a/b/c	b	0,7	a) Terdapat rekomendasi s.d. level yang diinginkan atau satu level di atasnya b) Terdapat rekomendasi c) Tidak ada rekomendasi
Evaluasi atas Keandalan Laporan Keuangan	a/b/c	b	0,7	a) Terdapat rekomendasi s.d. level yang diinginkan atau satu level di atasnya b) Terdapat rekomendasi c) Tidak ada rekomendasi
Evaluasi atas Pengamanan Aset	a/b/c	b	0,7	a) Terdapat rekomendasi s.d. level yang diinginkan atau satu level di atasnya b) Terdapat rekomendasi c) Tidak ada rekomendasi
Evaluasi atas Ketaatan Peraturan Perundang-undangan	a/b/c	b	0,7	a) Terdapat rekomendasi s.d. level yang diinginkan atau satu level di atasnya b) Terdapat rekomendasi c) Tidak ada rekomendasi
Skor Evaluasi atas Pembuatan Rekomendasi			67,27%	
Penyusunan laporan				
Kelengkapan Kertas Kerja Penilaian Maturitas	a/b/c/d	d	0,25	a) ada, lengkap, rapi dan terdigitalisasi b) ada, lengkap dan rapih c) ada, namun tidak lengkap d) Tidak ada kertas kerja
Pembahasan bersama di antara tim asesor dan tim <i>counterpart</i>	Y/T	y	1	"y" jika ada, "t" jika tidak ada
Administrasi Laporan	a/b/c	c	0,4	a) ada laporan formal b) ada dalam bentuk draft c) belum ada laporan
Skor Evaluasi atas Penyusunan laporan			55,00%	
Rata-Rata Tertimbang				72,58%

Simpulan Tahap Pelaporan

Rata-rata capaian kesesuaian dengan standar pada tahap pelaporan sebesar 80,83%, menunjukkan bahwa tahap pelaporan telah cukup memadai, terdiri dari:

- Tahap Penentuan Area of Improvement, kesesuaian dengan standar tercapai sebesar 100%.
- Tahap Pembuatan Rekomendasi, kesesuaian dengan standar tercapai hanya sebesar 50%.
- Tahap Penyusunan laporan, kesesuaian dengan standar tercapai hanya sebesar 92,50%.

Kesesuaian dengan standar Tahap Pembuatan Rekomendasi tercapai sebesar 50%, karena belum seluruhnya rekomendasi yang disampaikan hanya untuk mencapai 1 level di atasnya.

KK Evaluasi 9: KKE-HASIL-

KERTAS KERJA PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELANGGARAAN SPIP							KERTAS KERJA EVALUASI						
Elemen, Unsur, dan Sub Unsur Result-Based SPIP	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komposisi	Nilai Unsur	Nilai Komposisi	Nilai Akhir	Elemen, Unsur, dan Sub Unsur Result-Based SPIP	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komposisi	Nilai Unsur	Nilai Komposisi	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN							PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis		50,00%		0,00			Kualitas Sasaran Strategis		50,00%		0,00		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran		50,00%		0,00			Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran		50,00%		0,00		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%	40,00%	0,00	0,000		SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%	40,00%	0,00	0,000	
STRUKTUR DAN PROSES							STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian							Lingkungan Pengendalian						
Pengaplikasian integrasi dan Nilai Etika (1.1)		3,75%		0,00			Pengaplikasian integrasi dan Nilai Etika (1.1)		3,75%		0,00		
Kemampuan terhadap Kompetensi (1.2)		3,75%		0,00			Kemampuan terhadap Kompetensi (1.2)		3,75%		0,00		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)		3,75%		0,00			Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)		3,75%		0,00		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)		3,75%		0,00			Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)		3,75%		0,00		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)		3,75%		0,00			Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)		3,75%		0,00		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)		3,75%		0,00			Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)		3,75%		0,00		
Perwujudan Peran AFP yang Efektif (1.7)		3,75%		0,00			Perwujudan Peran AFP yang Efektif (1.7)		3,75%		0,00		
Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)		3,75%		0,00			Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)		3,75%		0,00		
Penilaian Risiko							Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)		10%		0,00			Identifikasi Risiko (2.1)		10%		0,00		
Analisis Risiko (2.2)		10%		0,00			Analisis Risiko (2.2)		10%		0,00		
Kegiatan Pengendalian							Kegiatan Pengendalian						
Revisi atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)		2,27%		0,00			Revisi atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)		2,27%		0,00		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)		2,27%		0,00			Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)		2,27%		0,00		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)		2,27%		0,00			Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)		2,27%		0,00		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)		2,27%		0,00			Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)		2,27%		0,00		
Pencapaian dan Revisi atas Indikator dan Uraian Kinerja (3.5)		2,27%		0,00			Pencapaian dan Revisi atas Indikator dan Uraian Kinerja (3.5)		2,27%		0,00		
Pemastian Fungsi (3.6)		2,27%		0,00			Pemastian Fungsi (3.6)		2,27%		0,00		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)		2,27%		0,00			Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)		2,27%		0,00		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)		2,27%		0,00			Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)		2,27%		0,00		
Pembinaan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatan (3.9)		2,27%		0,00			Pembinaan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatan (3.9)		2,27%		0,00		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatan (3.10)		2,27%		0,00			Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatan (3.10)		2,27%		0,00		
Dokumentasi yang Baik atas SFI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)		2,27%		0,00			Dokumentasi yang Baik atas SFI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)		2,27%		0,00		
Informasi dan Komunikasi							Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)		5%		0,00			Informasi yang Relevan (4.1)		5%		0,00		
Komunikasi yang Efektif (4.2)		5%		0,00			Komunikasi yang Efektif (4.2)		5%		0,00		
Pemantauan							Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)		7,50%		0,00			Pemantauan Berkelanjutan (5.1)		7,50%		0,00		
Evaluasi Terhadap (5.2)		7,50%		0,00			Evaluasi Terhadap (5.2)		7,50%		0,00		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES			30,00%	0,000	0,000		SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES			30,00%	0,000	0,000	
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES							BOBOT STRUKTUR DAN PROSES						

... kertas kerja bersambung di halaman selanjutnya.

PENCAPAIAN TUJUAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi	15%	0,00	0,00
Capaian Outcome	15%	0,00	0,00
Kesediaan Laporan Keuangan	25%	0,00	0,00
Opisik LK	10%	0,00	0,00
Pengamanan atas Aset	5%	0,00	0,00
Keamanan Administrasi	10%	0,00	0,00
Keamanan Fisik	10%	0,00	0,00
Keamanan Hutan	20%	0,00	0,00
Ketaatan pada Peraturan	100,00%	0,00	0,00
Temuan Kelelahan - BPK			
SUB JUMLAH HASIL		30,00%	0
BOBOT HASIL			0,000
NILAI MATURITAS RESULT-BASED SPIP			
0,00			

NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS			
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI
PERENCANAAN	40,00%		0,00
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	0,00	0,00
KAPABILITAS	30,00%		0,00
KEPEMIMPINAN	5,00%	0,00	0,00
KEBLAJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	0,00	0,00
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	0,00	0,00
KEMITRAAN	2,50%	0,00	0,00
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	0,00	0,00
HASIL	30,00%		0,00
AKTIVITAS PEMANGAMAN RISIKO	18,75%	0,00	0,00
OUTCOMES	11,25%	0,00	0,00
TOTAL	100,00%		0,00
NILAI INDEKS PENGENDALIAN KORUPSI			
0,00			

PENCAPAIAN TUJUAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi	15%	0,00	0,00
Capaian Outcome	15%	0,00	0,00
Kesediaan Laporan Keuangan	25%	0,00	0,00
Opisik LK	10%	0,00	0,00
Pengamanan atas Aset	5%	0,00	0,00
Keamanan Administrasi	10%	0,00	0,00
Keamanan Fisik	10%	0,00	0,00
Keamanan Hutan	20%	0,00	0,00
Ketaatan pada Peraturan	100,00%	0,00	0,00
Temuan Kelelahan - BPK			
SUB JUMLAH HASIL		30,00%	0
BOBOT HASIL			0,000
NILAI MATURITAS RESULT-BASED SPIP			
0,00			

NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS			
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI
PERENCANAAN	40,00%		0,00
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	0,00	0,00
KAPABILITAS	30,00%		0,00
KEPEMIMPINAN	5,00%	0,00	0,00
KEBLAJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	0,00	0,00
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	0,00	0,00
KEMITRAAN	2,50%	0,00	0,00
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	0,00	0,00
HASIL	30,00%		0,00
AKTIVITAS PEMANGAMAN RISIKO	18,75%	0,00	0,00
OUTCOMES	11,25%	0,00	0,00
TOTAL	100,00%		0,00
NILAI INDEKS PENGENDALIAN KORUPSI			
0,00			

NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS			
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI
PERENCANAAN	40,00%		0,00
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	0,00	0,00
KAPABILITAS	30,00%		0,00
KEPEMIMPINAN	5,00%	0,00	0,00
KEBLAJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	0,00	0,00
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	0,00	0,00
KEMITRAAN	2,50%	0,00	0,00
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	0,00	0,00
HASIL	30,00%		0,00
AKTIVITAS PEMANGAMAN RISIKO	18,75%	0,00	0,00
OUTCOMES	11,25%	0,00	0,00
TOTAL	100,00%		0,00
NILAI INDEKS PENGENDALIAN KORUPSI			
0,00			

NILAI INDEKS PENGENDALIAN KORUPSI			
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		0,00
KEBLAJAKAN ANTIKORUPSI	9,00%	0,00	0,00
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	0,00	0,00
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	0,00	0,00
POWER (KUASA & WEWANG)	14,40%	0,00	0,00
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,00%	0,00	0,00
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		0,00
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	0,00	0,00
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	0,00	0,00
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	0,00	0,00
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	0,00	0,00
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	0,00	0,00
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0,00
INVESTIGASI	8,00%	0,00	0,00
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	0,00	0,00
TOTAL	100%		0,00
KAPABILITAS APJP			
0,00			

KK Evaluasi 10: KKE-H1-KL

A. PENILAIAN PERENCANAAN KINERJA

* isi kolom (a) dengan nilai hasil penilaian mandiri

** isi kolom (b) dengan nilai hasil validasi pada kertas kerja penilaian mandiri yang disalin

A. Kualitas Sasaran Strategis (Kertas Kerja 1)

No	Uraian	Uraian pengukuran	KK	Kolom Bobot	Hasil PM		Hasil Evaluasi		Analisis Hasil Evaluasi
					Skor (a)*	Skor Akhir	Skor (b)**	Skor Akhir	
1	Sasaran Strategis K/L								
a	Sasaran Strategis Tepat	Sasaran Strategis berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis	1	G	40	0,00%	0,00%	0,00%	
b	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	Indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil	1	H	30	0,00%	0,00%	0,00%	
c	Target Kinerja Baik	Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target diatasnya	1	I	30	0,00%	0,00%	0,00%	
	Skor Akhir Level					0,00%		0,00%	

Gradasi Level

- 1 51% s.d. 60%
- 2 61% s.d. 70%
- 3 71% s.d. 80%
- 4 81% s.d. 90%
- 5 91% s.d. 100%

B. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Kertas Kerja 1 dan 2)

No	Uraian	Uraian pengukuran	KK	Kolom Bobot	Skor PM		Skor Hasil Evaluasi		Analisis Hasil Evaluasi
					Skor (a)*	Skor Akhir	Skor (b)**	Skor Akhir	
1	Kualitas Program (Outcome) Unit Kerja Eselon I								
a	Keterkaitan dengan Sasaran Strategis K/L	Mengukur cascading kinerja dari sasaran strategis K/L ke sasaran program Unit kerja	1	S	30	0,00%	0,00%	0,00%	
b	Sasaran Program Tepat	Sasaran Program berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis	2	E	30	0,00%	0,00%	0,00%	
c	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	Indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil	2	F	20	0,00%	0,00%	0,00%	
d	Target Kinerja Baik	Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target diatasnya	2	G	20	0,00%	0,00%	0,00%	
2	Kualitas Kegiatan (Output) Eselon II					0,00%		0,00%	
a	Keterkaitan dengan Sasaran Strategis Satker		2	M	30	0,00%	0,00%	0,00%	
b	Kualitas sasaran Program Satker		2	N	30	0,00%	0,00%	0,00%	
c	Kualitas indikator kinerja program Satker		2	O	20	0,00%	0,00%	0,00%	
d	Kualitas target kinerja program Satker		2	P	20	0,00%	0,00%	0,00%	
	Skor Akhir Level					0,00%		0,00%	

KK Evaluasi 11: KKE-H1-Pemda

A. PENILAIAN PERENCANAAN KINERJA

* isi kolom (e) dengan nilai hasil penilaian mandiri

** isi kolom (b) dengan nilai hasil validasi pada kertas kerja penilaian mandiri yang disalin

A. Kualitas Sasaran Strategis (Kertas Kerja 1)

No	Uraian	Uraian pengukuran	KK	Kolom Bobot	Hasil PM		Hasil Evaluasi		Analisis Hasil Evaluasi
					Skor (a)*	Skor Akhir (b)**	Skor	Skor Akhir	
1	Sasaran Strategis K/L a Sasaran Strategis Tepat	Sasaran Strategis berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis	1	G	40	0,00%	0,00%	0,00%	
		Indikator Kinerja Tepat dan Baik berorientasi hasil	1	H	30	0,00%	0,00%	0,00%	
		Target Kinerja Baik	1	I	30	0,00%	0,00%	0,00%	
2	Sasaran Strategis Satker a Keterkaitan dengan Sasaran Strategis Pemda b Sasaran Strategis Tepat c Indikator Kinerja Tepat dan Baik d Target Kinerja Baik	Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target diatasnya	1	I	30	0,00%	0,00%	0,00%	
		Mengukur cascading kinerja dari sasaran strategis Pemda ke sasaran strategis OPD	1	S	30	0,00%	0,00%	0,00%	
		Sasaran Strategis berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis	2	E	30	0,00%	0,00%	0,00%	
		Indikator Kinerja Tepat dan Baik berorientasi hasil	2	F	20	0,00%	0,00%	0,00%	
	Skor Akhir Level					0,00%	0,00%	0,00%	

Gradasi Level
1 51% s.d. 60%
2 61% s.d. 70%
3 71% s.d. 80%
4 81% s.d. 90%
5 91% s.d. 100%

B. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Kertas Kerja 1 dan 2)

No	Uraian	Uraian pengukuran	KK	Kolom Bobot	Skor PM		Skor Hasil Evaluasi		Analisis Hasil Evaluasi
					Skor (a)*	Skor Akhir (b)**	Skor	Skor Akhir	
1	Kualitas Program (Outcome) Unit Kerja Eselon I a Keterkaitan dengan Sasaran Strategis OPD b Kualitas sasaran Program OPD c Kualitas indikator kinerja program OPD d Kualitas target kinerja program OPD		2	M	30	0,00%	0,00%	0,00%	
			2	N	30	0,00%	0,00%	0,00%	
			2	O	20	0,00%	0,00%	0,00%	
			2	P	20	0,00%	0,00%	0,00%	
2	Kualitas Kegiatan (Output) Eselon II a Keterkaitan dengan Sasaran Program b Kualitas indikator Kinerja Kegiatan c Kualitas target kinerja Kegiatan OPD		2	V	40	0,00%	0,00%	0,00%	
			2	W	30	0,00%	0,00%	0,00%	
			2	X	30	0,00%	0,00%	0,00%	
	Skor Akhir Level					0,00%	0,00%	0,00%	

KK Evaluasi 13: KKE-H3

No.	Pencapaian Tujuan		Hasil PM	Hasil Evaluasi	Analisis Hasil Evaluasi
	Indikator	Definisi Indikator			
A	Efektivitas dan Efisiensi				
1.	Capaian Outcome	Mengukur efektivitas pencapaian tujuan organisasi	Menghitung rata-rata pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis K/L/D		
2.	Capaian Output	Mengukur efisiensi pencapaian tujuan kegiatan	Menghitung rata-rata pencapaian indikator output dari kegiatan satuan kerja		
B	Keandalan Pelaporan Keuangan				
	Opini atas Laporan Keuangan – BPK RI	Penilaian atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah oleh BPK RI	Dapatkan informasi Opini Laporan Keuangan dalam 5 tahun terakhir, yang terdiri dari: - TMP - TW - WDP - WTP-DPP - WTP		
C	Pengamanan atas Aset Negara/Daerah				
1.	Keamanan Administrasi	Penilaian kualitas penatausahaan BMN/BMD dalam rangka mengamankan BMN/BMD dari sisi administrasi	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi aset dalam 5 tahun terakhir		
2.	Keamanan Hukum	Penilaian atas upaya menjaga/melindungi BMN/ BMD dari persengketaan, gugatan, dan beralihnya kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan hukum aset dalam 5 tahun terakhir		
3.	Keamanan Fisik	Penilaian atas upaya mengatasi penurunan fungsi, jumlah, serta hilangnya barang	Menghitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi baik dan aman dalam 5 tahun terakhir		

No.	Pencapaian Tujuan		Hasil PM	Hasil Evaluasi	Analisis Hasil Evaluasi
	Indikator	Definisi Indikator			
D	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan				
1.	Jumlah Temuan atas Ketidakpatuhan dalam LHP BPK RI	Banyaknya temuan yang dilaporkan dalam LHP BPK RI pada subbab Temuan atas Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	Menghitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.		
2.	Keterjadian Tindak Pidana Korupsi	Keterjadian tindak pidana korupsi pejabat politik atau minimal pejabat eselon II dalam tahun dan/ atau saat penilaian	Mengidentifikasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat eselon II dalam tahun dan/ atau saat penilaian		

II.3. DAFTAR DOKUMEN HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

1. Dokumen kronologis pembinaan penyelenggaraan SPIP, mulai dari *initial assessment*, kegiatan bimbingan dan konsultasi yang pernah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP/Direktorat Mitra K/L sampai dengan kegiatan penilaian mandiri yang diajukan Evaluasinya (Surat tugas dan laporan).
2. Data dukung terkait capaian indikator *governance* K/L/D (opini laporan keuangan, nilai LAKIP, level kapabilitas APIP, data kasus hukum yang pernah terjadi, penghargaan, keunggulan/karakteristik K/L/D);
3. Kertas Kerja Hasil Evaluasi (KKE)
Format kertas kerja Evaluasi terdapat pada **Lampiran II.2.**
4. Paparan untuk ekspos.
5. Berita Acara (BA) Hasil Evaluasi
*Berita Acara hasil Evaluasi ditandatangani oleh tim Evaluasi dan Tim Penjamin Kualitas (APIP K/L/D) pada saat *exit meeting*. Hasil Evaluasi belum bersifat final dan akan diputuskan melalui mekanisme ekspos kepada Tim Panel.
Format BA terdapat pada **Lampiran II.5.**
6. Draf Laporan Hasil Evaluasi
*Laporan difinalkan setelah diputuskan nilai akhir hasil penilaian oleh Tim Panel.
Format Laporan Hasil Evaluasi terdapat pada **Lampiran II.6.**

II.4. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI

BERITA ACARA HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PADA ... (NAMA K/L/D)

Berdasarkan pembahasan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada (nama K/L/D), maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Proses)

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada(nama K/L/D) tahun 20XX telah **sesuai/kurang sesuai/tidak sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor Tahun 2021), sebagai berikut:

Tahapan		Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan	Rata Tertimbang	Kesimpulan
K/L/D :						
Tahap Persiapan	20%%		%	Sesuai/Kurang Sesuai/Tidak Sesuai
Tahap Pelaksanaan	60%	%	%	
Tahap Pelaporan	20%		%%	
Skor	%%%%	

Catatan Evaluasi atas Proses:

- a. Tahap persiapan mendapatkan skor (*sebutkan skor*) karena
- b. Tahap pelaksanaan mendapatkan skor (*sebutkan skor*) karena
- c. Tahap pelaporan mendapatkan skor (*sebutkan skor*) karena.....

2. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil)

Hasil Evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/D, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah..... atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level ... (.....)**
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah..... atau telah

memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada **Level ... (.....)**

c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP			
2	MRI			
3	IEPK			

Demikian berita acara hasil evaluasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penjamin Kualitas K/L/D

1.

2.

dst

....., dd mmmm 20XX

Tim Evaluasi

1.

2.

II.5. FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN**

.....

Nomor : LAP- /...../.....20XX Bulan 20XX
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Laporan Hasil Evaluasi Penilaian
 Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
 SPIP pada (nama K/L/D)

Yth. Pimpinan K/L/D
 di

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada (nama K/L/D), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan BPKP Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
2. Surat Tugas Nomor ST- /.../.../20xx Tanggal perihal Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada (nama K/L/D).

B. Waktu Penugasan

Kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (nama K/L/D) dilaksanakan selama ...(.....) hari kerja, mulai tanggaldengan

C. Tujuan Penugasan

Kegiatan Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan memutuskan nilai akhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Evaluasi adalah atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/D pada Tahun 20xx, meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, yang meliputi aspek:
 - a. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim *assessor* dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan rencana penilaian mandiri maturitas penilaian SPIP beserta pemaparannya;
 - b. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, manajemen risiko indeks dan indeks;
 - c. Tahap pelaporan meliputi penentuan *area of improvement*, pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat *Assessor*.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.

E. Tanggung Jawab

Tanggung jawab atas kebenaran formal dalam dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada (nama K/L/D) Tanggung jawab kami terbatas pada data dan informasi yang telah disampaikan.

F. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil penilaian mandiri melalui wawancara, observasi dan reviu dokumen.

G. Hasil Evaluasi

1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh(nama K/L/D)

Informasi umum terkait penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/D sebagai berikut:

Nama K/L/D :
No. dan Tanggal ST PM :
Tanggal mulai dan selesai : s.d.
No. dan Tanggal ST PK :
Tanggal mulai dan selesai : s.d.

Periode waktu penilaian : Bulan Juli 20xx-1 s.d. Juni 20xx

No. dan Tanggal LHPM :

2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada (nama K/L/D) tahun 20XX telah **sesuai/kurang sesuai/tidak sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor Tahun 2021), sebagai berikut:

Tahapan		Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan	Rata-Rata Tertimbang	Kesimpulan
K/L/D :						
Tahap Persiapan	20%%		%	Sesuai/ Kurang Sesuai/ Tidak Sesuai
Tahap Pelaksanaan	60%	%	%	
Tahap Pelaporan	20%		%%	
Skor	%%%%	

Catatan Evaluasi atas Proses:

- Tahap persiapan mendapatkan skor (*sebutkan skor*) karena
- Tahap pelaksanaan mendapatkan skor (*sebutkan skor*) karena
- Tahap pelaporan mendapatkan skor (*sebutkan skor*) karena.....

3. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil)

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/D, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level ... (.....)**
- Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah atau telah memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada **Level ... (.....)**
- Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/ Turun
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP			
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)			
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)			

Perubahan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP
(Jelaskan berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang dilakukan)
2. Perubahan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)
(Jelaskan berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang dilakukan)
3. Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
(Jelaskan berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang dilakukan)

H. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

1. *Jelaskan kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus dari K/L/D*
2. *Dst*
(AOI atas hasil penilaian kualitas penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan)

I. Saran

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut di atas, disarankan kepada Pimpinan K/L/D, agar:

1.
2. dst

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

.....,

.....

NIP

Tembusan Yth.:

II.6. FORMAT NOTULEN HASIL EKSPOS**NOTULEN EKSPOS TIM PANEL****PERWAKILAN/DIREKTORAT/KEDEPUTIAN PPKD/KEDEPUTIAN
TERKAIT/ BPKP ATAS HASIL EVALUASI PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PADA ...(NAMA K/L/D)**

Hari/Tanggal :

Waktu : WIB

Tempat : Ruang

Penyaji : Tim

Tim Panel : 1. nama.....(jabatan.....)
2. nama.....(jabatan.....)

Notulis :

A. Arahan Tim Panel

1. ...
2. ...

B. Hasil Pengujian

1. Maturitas Penyelenggaraan SPIP :
2. Manajemen Risiko Indeks :
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

C. Tanya Jawab dan Arahan

Pertanyaan 1 :
Jawaban :
Arahan :
Pertanyaan 2 :
Jawaban :
Arahan :

D. Saran Tim Panel

1. ...
2. ...

Mengetahui
Ketua Tim Panel

Notulis

.....

.....

II.7. FORMAT BERITA ACARA HASIL EKSPOS

BERITA ACARA EKSPOS TIM PANEL

PERWAKILAN/DIREKTORAT/KEDEPUTIAN PPKD/KEDEPUTIAN TERKAIT/BPKP ATAS HASIL EVALUASI PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PADA(K/L/D)

Berdasarkan ekspos tim panel **Perwakilan/Direktorat/Kedeputian PPKD/Kedeputian Terkait/BPKP** hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada..., maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Berdasarkan ekspos hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun 20XX telah **sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor Tahun 2020), sebagai berikut:

Tahapan		Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan	Rata-Rata Tertimbang	Kesimpulan
K/L/D :						
Tahap Persiapan	20%%		%	Sesuai/ Kurang Sesuai/ Tidak Sesuai
Tahap Pelaksanaan	60%	%	%	
Tahap Pelaporan	20%		%%	
Skor	%%%%	

Catatan Ekspos terhadap Penilaian atas Proses:

- Tahap persiapan tidak mendapatkan skor maksimal karena
- Tahap pelaksanaan tidak mendapatkan skor maksimal karena
- Tahap pelaporan tidak mendapatkan skor maksimal karena.....

2. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil)

Berdasarkan ekspos hasil Evaluasi dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar atau

telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level ... (.....)**

b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar atau telah memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada **Level ... (.....)**

c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesaratau telah memenuhi xxxxx (.....)

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/ Turun
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP			
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)			
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)			

3. Catatan Hasil Ekspos

(Uraikan jika terdapat catatan lainnya hasil ekspos)

Dengan berita acara hasil ekspos ini dibuat.

....., dd mmmm 20xx

Tim Panel,
Ketua Tim Panel

.....

.....
NIP

Anggota I

.....
.....

Anggota II

.....
.....

.....
NIP

.....
NIP

Dst....

**Menyetujui,
Penanggung Jawab**

.....

.....
NIP

II.8. STRUKTUR TIM PANEL DIREKTORAT

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM SK
A. PENANGGUNG JAWAB SEKALIGUS KETUA		
1.	Direktur terkait	Penanggung Jawab
B. ANGGOTA PANEL		
1.	Auditor Utama	Anggota I
2.	Koordinator terkait	Anggota II
3.	Koordinator lainnya pada Direktorat terkait	Anggota III

ugas dan Struktur Tim Panel Hasil Evaluasi

- Penanggung jawab sekaligus Ketua Tim : 1. Menentukan fokus pengujian yang akan diuji pada saat ekspos;
2. Memberikan pertanyaan pengujian kepada Tim Evaluasi;
3. Menetapkan kesimpulan ekspos hasil evaluasi jika tidak terdapat kesepakatan antar anggota panel;
4. Memberikan persetujuan atas hasil ekspos;
5. Menandatangani berita acara hasil ekspos.
- Anggota : 1. Memberikan pertanyaan pengujian kepada Tim Evaluasi;
2. Memberikan catatan ekspos hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP;
3. Memberikan kesimpulan ekspos hasil evaluasi.
4. Menandatangani berita acara hasil ekspos.

II.9. STRUKTUR TIM PANEL EKSPOS KEDEPUTIAN

**STRUKTUR TIM PANEL KEDEPUTIAN
 ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
 PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM SK
A. PENANGGUNG JAWAB		
^r 1.	Deputi terkait	Penanggung Jawab
B. KETUA TIM PANEL		
¹ 1.	Direktur yang ditunjuk	Ketua
C. ANGGOTA PANEL		
¹ 1.	Direktur	Anggota I
2.	Direktur	Anggota II
^T 3.	Direktur	Anggota III
^u 4.	Auditor Utama	Anggota IV
D. ADVISOR		
^a 1.	Deputi Bidang Investigasi	Advisor

dan Struktur Tim Panel Hasil Evaluasi

- Penanggung jawab : 1. Menginstruksikan Tim Panel untuk memberikan penjelasan terkait kesimpulan ekspos;
2. Menguji kembali hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana uraian tugas Ketua Tim Panel (jika diperlukan);
 3. Memberikan persetujuan atas hasil ekspos;
 4. Berdasarkan pertimbangan strategis, tim panel kedeputian dapat merekomendasikan hasil ekspos kedeputian untuk dibahas oleh Tim Panel BPKP. Jika Tim Panel Kedepuitian tidak merekomendasikan hasil ekspos kedeputian untuk dibahas oleh Tim Panel

BPKP, maka Tim Panel Kedeputian menetapkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP kepada K/L sesuai dengan hasil ekspos;

5. Memberikan arahan yang bersifat strategis terkait pembinaan penyelenggaraan SPIP;
6. Menandatangani berita acara hasil ekspos.

Ketua Tim Panel : 1. Menentukan fokus pengujian yang akan diuji pada saat ekspos;

2. Memberikan pertanyaan pengujian kepada Tim Panel Direktorat;
3. Memberikan kesimpulan ekspos hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP;
4. Menetapkan kesimpulan ekspos hasil evaluasi jika tidak terdapat kesepakatan antar anggota panel.
5. Menandatangani berita acara hasil ekspos.
6. Menyampaikan berita acara ekspos hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP.

Anggota : 1. Memberikan pertanyaan pengujian kepada Tim Panel Direktorat

2. Memberikan catatan ekspos hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP;
3. Memberikan kesimpulan ekspos hasil evaluasi;
4. Menandatangani berita acara hasil ekspos.

II.10. STRUKTUR TIM PANEL PERWAKILAN BPKP**STRUKTUR TIM PANEL EKSPOS INTERNAL PERWAKILAN BPKP**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM SK
A.	PENANGGUNG JAWAB & KETUA TIM	
1.	Kepala Perwakilan	Penanggung Jawab
B.	ANGGOTA PANEL	
1.	Korwas Bidang APD	Anggota I
2.	Korwas Bidang Investigasi	Anggota II
3.	Korwas.....	Anggota III

Penanggung Jawab sekaligus Ketua Tim : 1. Memberikan persetujuan atas hasil ekspos;
 2. Menentukan fokus pengujian;
 3. Memberikan pertanyaan pengujian kepada Tim Evaluasi;
 4. Memberikan kesimpulan ekspos hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP;
 5. Menetapkan kesimpulan ekspos hasil evaluasi jika tidak terdapat kesepakatan antar anggota Panel;
 6. Menandatangani berita acara hasil ekspos.

Anggota Tim Panel : 1. Memberikan pertanyaan pengujian kepada Tim Evaluasi
 2. Memberikan catatan ekspos hasil evaluasi;
 3. Memberikan kesimpulan ekspos hasil evaluasi;
 4. Menandatangani berita acara hasil ekspos.

II.11. STRUKTUR TIM PANEL KEDEPUTIAN UNTUK PEMDA

**STRUKTUR TIM PANEL KEDEPUTIAN - HASIL EVALUASI
 ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
 PADA PEMERINTAH DAERAH**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM SK
A. PENANGGUNG JAWAB		
1.	Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD	Penanggung Jawab
B. KETUA TIM PANEL		
1.	Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Ketua
C. ANGGOTA PANEL		
1.	Auditor Utama	Anggota I
2.	Koordinator Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Daerah	Anggota II
3.	Koordinator Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP Daerah	Anggota III
4.	Kasubdit Perencanaan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota IV
D. ADVISOR		
1.	Deputi Bidang Investigasi atau Direktur pada Deputi Bidang Investigasi yang ditunjuk	Advisor

- Penanggung jawab : 1. Menginstruksikan Tim Panel untuk memberikan penjelasan terkait kesimpulan ekspos atas hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP;
2. Menguji kembali hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana uraian tugas Ketua Tim Panel (jika diperlukan);
3. Memberikan persetujuan atas hasil ekspos;
4. Berdasarkan pertimbangan strategis, tim panel kedeputian dapat merekomendasikan hasil ekspos kedeputian untuk dibahas oleh Tim Panel BPKP. Jika Tim Panel Kedeputian tidak merekomendasikan hasil ekspos kedeputian untuk dibahas oleh Tim Panel BPKP, maka Tim Panel Kedeputian

menetapkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP kepada Pemda sesuai dengan hasil ekspos.

- Ketua Tim Panel : 1. Menentukan fokus pengujian yang akan diuji pada saat ekspos;
2. Memberikan pertanyaan pengujian kepada Tim Panel Perwakilan BPKP;
3. Memberikan kesimpulan ekspos hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP;
4. Menetapkan kesimpulan ekspos hasil evaluasi jika tidak terdapat kesepakatan antar anggota panel.
5. Menandatangani berita acara hasil ekspos.
6. Menyampaikan berita acara ekspos hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP.
- Anggota : 1. Memberikan pertanyaan pengujian kepada Tim Panel Perwakilan BPKP;
2. Memberikan catatan ekspos hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP;
3. Memberikan kesimpulan ekspos hasil evaluasi;
4. Menandatangani berita acara hasil ekspos.

II.12. STRUKTUR TIM PANEL BPKP**STRUKTUR TIM PANEL BPKP**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM SK
A. PENANGGUNG JAWAB		
1.	Kepala BPKP	Penanggung Jawab
B. KETUA TIM PANEL		
1.	Deputi yang ditunjuk	Ketua
C. ANGGOTA PANEL		
1.	Sekretaris Utama	Anggota I
2.	Deputi....	Anggota II
3.	Deputi....	Anggota III
4.	Deputi....	Anggota IV
5	Deputi....	Anggota V

- Penanggung Jawab :
1. Menginstruksikan Tim Panel untuk memberikan penjelasan terkait kesimpulan ekspos atas hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP;
 2. Menguji kembali hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana uraian tugas Ketua Tim Panel (jika diperlukan);
 3. Memberikan persetujuan atas hasil ekspos;
 4. Menetapkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP kepada K/L/D sesuai dengan hasil ekspos

- Ketua Tim Panel :
1. Menentukan fokus pengujian yang akan diuji pada saat ekspos;
 2. Memberikan pertanyaan pengujian kepada Tim Panel Kedeputian;
 3. Memberikan kesimpulan ekspos hasil

evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP;

4. Menetapkan kesimpulan ekspos hasil evaluasi jika tidak terdapat kesepakatan antar anggota panel;
5. Menandatangani berita acara hasil ekspos;
6. Menyampaikan berita acara ekspos hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP.

Anggota

- :
1. Memberikan pertanyaan pengujian kepada Tim Panel Kedeputian;
 2. Memberikan catatan ekspos hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP;
 3. Memberikan kesimpulan ekspos hasil evaluasi;
 4. Menandatangani berita acara hasil ekspos.

II.13. FORMAT SK TIM PANEL

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN**

.....

KEPUTUSAN

NOMOR: KEP-

TENTANG

TIM PANEL HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN BPKP/DEPUTI BIDANG
/PERWAKILAN BPKP PROVINSI.....

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
 - b. bahwa sesuai dengan pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP berkewajiban untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. bahwa sesuai dengan pasal Peraturan BPKP NomorTahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP;
 - d. bahwa sesuai dengan pasal Peraturan BPKP NomorTahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP, dalam melakukan evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan ekspos kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi...../Deputi.....;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu untuk menetapkan Tim Panel Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah di Lingkungan BPKP/Deputi Bidang...../Perwakilan BPKP Provinsi

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
4. Peraturan BPKP Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Panel Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah/Daerah di Lingkungan BPKP/Deputi Bidang...../Perwakilan BPKP Provinsidengan struktur tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua : Mengangkat pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Panel Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Lingkungan BPKP/Deputi Bidang...../Perwakilan BPKP Provinsi
Ketiga : Tim Panel Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Lingkungan BPKP/Deputi Bidang...../Perwakilan BPKP Provinsibertanggung jawab dalam melaksanakan Evaluasi dan menyimpulkan nilai hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP untuk kemudian mendapatkan persetujuan Kepala BPKP/Deputi Kepala BPKP Bidang..../Kepala Perwakilan BPKPdengan uraian tugas tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Keempat : Penyimpulan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan melalui mekanisme ekspos hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dari Tim Evaluasi kepada Tim Panel.
Kelima : Kesimpulan Tim Panel terhadap hasil Evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah di Lingkungan BPKP/Deputi Bidang...../Perwakilan BPKP Provinsidituangkan di dalam Berita Acara Hasil Evaluasi.

- Keenam : Berita Acara yang telah disepakati oleh Tim Panel (minimal 3 orang termasuk ketua) selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKP /Deputi Kepala BPKP Bidang/Kepala Perwakilan BPKP untuk mendapatkan persetujuan.
- Ketujuh : Tanggung jawab atas kebenaran formal dokumen yang diterima dan digunakan dalam penilaian dan Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP sepenuhnya berada pada Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah selaku assessor.
- Kedelapan : Seluruh biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan Tim Panel Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Lingkungan BPKP/Deputi Bidang...../Perwakilan BPKP Provinsidibebankan pada DIPA Deputi Bidang...../Perwakilan BPKP Provinsi
- Kesepuluh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

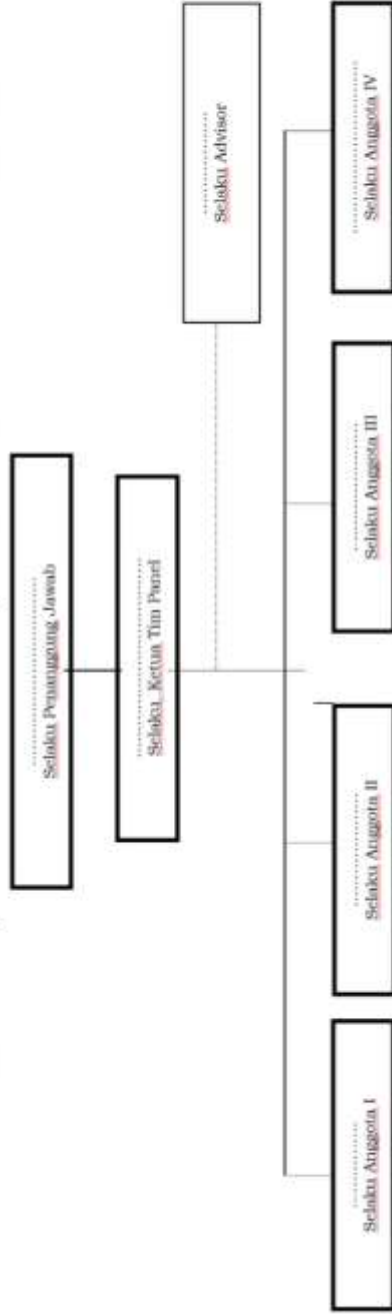
KEPALA BPKP/DEPUTI KEPALA BPKP
BIDANG/ KEPALA PERWAKILAN
BPKP

.....,

ttd.

Lampiran 1
Keputusan
Nomor : Kep-.....
Tanggal :

**STRUKTUR TIM PANEL HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN BPKP/DEPUTI BIDANG...../PERWAKILAN BPKP PROVINSI**



KEPALA BPKP /DEPUTI KEPALA BPKP
BIDANG...../KEPALA PERWAKILAN
BPKP.....,

ttd.
.....

Lampiran 2
Keputusan
Nomor : Kep-.....
Tanggal :

**URAIAN TUGAS TIM PANEL HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
PADA KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN BPKP / DEPUTI BIDANG.... / PERWAKILAN BPKP PROVINSI**

.....

.....
.....
.....

KEPALA BPKP / DEPUTI KEPALA BPKP
BIDANG..... / KEPALA PERWAKILAN
BPKP....,

ttd.

.....

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH